SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan…

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan ....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Satandar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 tahu 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 131);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD tahun 2025-2029.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematiak sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB V : PENUTUP

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan RKPD.

BAB III ...

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 193

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 08/1612/TBB/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 19780522 201001 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 disusun sebagai amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama periode lima tahun. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang bersifat strategis dan wajib disusun oleh pemerintah daerah paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD disusun dengan mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme konsultasi publik, forum perangkat daerah, musyawarah perencanaan pembangunan, serta kajian teknokratik dan naskah akademik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah ini benar-benar merefleksikan kepentingan masyarakat luas dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dengan demikian Tulang Bawang Barat diharapkan mampu menjalankan pembangunan secara terarah, sinergis, dan terukur, serta mencapai target strategis yang ditetapkan dalam RPJMD, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-
2029

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan strategis dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan program kerja pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Dokumen RPJMD ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan pendekatan berbasis data dan analisis objektif, serta diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Visi **"Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju"** merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang terstruktur dan terarah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan dokumen ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan Dokumen RPJMD ini. Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada para jajaran pemerintah daerah, para akademisi, praktisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) serta masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga.

Kami berharap, dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal. Semoga Dokumen RPJMD ini dapat diimplementasikan dengan baik dan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan ini.

Bupati Tulang Bawang Barat

ttd

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... 4
1.3. Hubungan Antar dokumen 6
1.4. Maksud dan Tujuan..... 8
1.5. Sistematika Penyusunan RPJMD 9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... 12

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 12
2.1.1. Aspek Goagrafi dan Demografi..... 12
2.1.1.1. Aspek Geografi 12
2.1.1.2. Aspek Demografi..... 58

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 69
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 69
2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua 82
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata ... 93
2.1.2.4. Indeks Keluarga Sehat 96
2.1.2.5. Perlindungan Sosial Yang Adaptif 97
2.1.2.6. Beragama Maslahat dan Berbudaya Maju 99
2.1.2.7. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif..... 101

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah..... 107
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia..... 108
2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi 122
2.1.3.3. Transformasi Digital..... 127
2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domistik dan Gobal 129
2.1.3.5. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi..... 130
2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro..... 132

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 133
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif 133
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nisional Yang Tangguh, dan Demokrasi Substansil 158

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal..... 164

2.1.6. Kerjasama Daerah 169
2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur Oleh APBN Dan APBD Provinsi di Kab. Tulang Bawang Barat 170
2.1.8. BUMD Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Daerah..... 173

2.2. Gambaran Keuangan Daerah 174
2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 175
2.2.2. Neraca Daerah 179
2.2.3. Proyeksi Kerangka Pendanaan 181

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis 185
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 186
2.3.2. Isu Strategis 199

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNA DAERAH..... 211

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 211
3.1.1. Visi dan misi..... 211
3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2025-2029 . 247
3.1.3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 257

3.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 270
3.2.1. Arah Kebijakan 270
3.2.2. Strategi 271
3.2.3. Program Prioritas 351
3.2.4. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029..... 381
3.2.5. Penyelarasan Sasaran RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat 388
3.2.6. Penyelarasan Indikator Makro 399

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 401

4.1. Program Perangkat Daerah 401
4.1.1. Daftar Program, Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 401
4.1.2. Keselarasan Program Pembangunan Daerah Mendukung Program Prioritas Nasional..... 429
4.1.3. Program RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Dukungan Untuk Kegiatan Prioritas Utama (Lampiran 1) RPJM Nasional Tahun 2025-2029. 452

4.1.4. Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025 – 2029 454

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 470

BAB V PENUTUP 523

5.1. Kaidah Pelaksanaan..... 523
5.2. Tata Kelola Data Pembangunan 525
5.3. Manajemen Resiko Perencanaan 525

Tabel **Halaman**

2.1. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 13
2.2. Keadaan Topografi dan Luasan Perkecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 16
2.3. Batuan Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat 18
2.4. Rata - rata suhu udara dan kelembapan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 19
2.5. Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 20
2.6. Guna Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 22
2.7. Daya Dukung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.. 30
2.8. Klasifikasi Kemampuan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 31
2.9. Koefisien Limpasan 33
2.10. Daya Dukung Air Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 34
2.11. Koefisein Kawasan Lindung..... 36
2.12. Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung..... 37
2.13. Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023..... 37
2.14. Analisa Daya Dukung Permukiman Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 38
2.15. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 41
2.16. Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 41
2.17. Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2024 44
2.18. Persentase RTH Kabupaten Tulang Bawang Barat 45
2.19. Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 47
2.20. Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 Kabupaten Tulang Bawang Barat 48
2.21. Angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022-2024..... 49
2.22. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 50
2.23. Nilai Indeks Risiko Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Bencana..... 51
2.24. Indeks Kerentanan Kabupaten Tulang Bawang Barat 56
2.25. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024 59
2.26. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 60
2.27. Jumlah dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 61
2.28. Proyeksi Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 63
2.29. Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2025 – 2030 Kab. Tulang Bawang Barat 64
2.30. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan tahun 2024 dan Proyeksi 2029 Kab. Tulang Bawang Barat 65

2.31. Jumlah dan Persentase Penduduk Tulang Bawang Barat Berdasarkan Umur tahun 2024 dan Proyeksi 2039..... 67
2.32. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2024 71
2.33. Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2023..... 72
2.34. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017-204 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 76
2.35. IPM Beserta Indek Komposit Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 80
2.36. Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu Poliklinik dan Apotik Tahun 2020 – 2024 Kab. Tulang Bawang Barat..... 84
2.37. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk Tahun 2020 s.d. 2024 Kab. Tulang Bawang Barat 85
2.38. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 85
2.39. Capaian UHC tahun 2022 – 2025 Kabupaten Tulang Bawang Barat 88
2.40. Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 90
2.41. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 90
2.42. Kasus Kematian Bayi Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 90
2.43. Kasus Kematian Neonatal Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 91
2.44. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 93
2.45. Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 93
2.46. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2021 – 2023 KabupatenTulang Bawang Barat..... 94
2.47. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 94
2.48. Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kab. Tulang Bawang Barat..... 95
2.49. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2024 (Negeri dan Swasta) Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 95
2.50. Capai Indeks Keluarga Sehat (IKS) Tahun 2020-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 97
2.51. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020-2024 97
2.52. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2021 sampai dengan 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat.. 101
2.53. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 103
2.54. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019 s.d. 2024

Kabupaten Tulang Bawang Barat 106
2.55. Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 107
2.56. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 109
2.57. Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 110
2.58. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 111
2.59. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid PAUD (TK) Negeri/Swasta atau Raudatul Athfal (RA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 111
2.60. Ketersediaan Sekolah atas Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2018-2028 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 112
2.61. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2024-2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat 112
2.62. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 113
2.63. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 116
2.64. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 (dalam Milyar rupiah) 117
2.65. Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran Kab. Tulang Bawang Barat, 2015 – 2023 120
2.66. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2018 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 120
2.67. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan perKapita Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2024 121
2.68. Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 122
2.69. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 124
2.70. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi, Nasional 125
2.71. Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2018 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 125
2.72. Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Tulang BawangBarat 127
2.73. Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 128
2.74. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Mantap Tahun 2020 -2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 132
2.75. Laju Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018 sampai dengan 2024 (%) 133

2.76. Indeks Pelayanan Publik pada Kabupaten di Provinsi Lampung pada Tahun 2024 136
2.77. Score dan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2024..... 137
2.78. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tulang Bawang Barat Tahun 2014—2024..... 139
2.79. Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 142
2.80. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 143
2.81. Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 144
2.82. Sarana Perhubungan yang Tersedia Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 145
2.83. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 146
2.84. Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2021 – 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 147
2.85. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 148
2.86. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 149
2.87. Produksi Perikanan Budi Daya Menurut Jenis Ikan Tahun 2019 s.d. 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat 150
2.88. Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 150
2.89. Fasilitas Hotel/Penginapan tahun 2018-2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 151
2.90. Rumah makan/ Restoran tahun 2019-2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 151
2.91. Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 152
2.92. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020 s.d. 2023 Kab. Tulang Bawang Barat..... 152
2.93. Rata-rata produktivitas tanaman pangan di Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024 153
2.94. Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 153
2.95. Luas Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2018 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 154
2.96. Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 – 2024..... 155
2.97. Statistik Tanaman Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2022 sampai dengan 2024 155
2.98. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019 s.d. 2024 Kab. Tulang Bawang Barat 156
2.99. Populasi Ternak Tahun 2019-2024 Kab. Tulang Bawang Barat..... 156

2.100. Pola Konsumi Produk Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2023 157
2.101. Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 – 2024..... 158
2.102. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pertahun Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 – 2024..... 158
2.103. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran & Tingkat Waktu Tanggap Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024 161
2.104. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kab. Tulang Bawang Barat..... 164
2.105. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat..... 165
2.106. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang Barat 166
2.107. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Tulang Bawang Barat..... 168
2.108. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlimas Kabupaten Tulang Bawang Barat 169
2.109. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 s/d Tahun 2024 Kabupatten Tulang Bawang Barat..... 178
2.110. Realisasi Neraca Daerah dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat 180
2.111. Proyeksi Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026 s/d Tahun 2030..... 182
2.112. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 200
3.1. Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 216
3.2. Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029..... 218
3.3. Keterkaitan RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan RPJPD Tahun 2025- 2045 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 225
3.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 233
3.5. Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan..... 238
3.6. Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 240
3.7. Dukungan Program Perangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Terhadap Program Unggulan Provinsi Lampung..... 243
3.8. Penyelarasan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat dengan Misi Gubernur Lampung serta Asta Cita Persiden dan Wakil Presiden 245
3.9. Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029..... 249
3.10. Sinkronisasi RPJMD tahun 2025-2029 dengan RTRW

tahun 2023 - 2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat 258
3.11. Sinkronisasi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RTRW Tahun 2023-2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat dan RTRW tahun 2023-2043 Provinsi Lampung 266
3.12. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029..... 270
3.13. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 272
3.14. Peogram Prioritas RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 352
3.15. Keselarasan Stratetgi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 dengan Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029..... 382
3.16. Program – Program Dalam Mendukung Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional 387
3.17. Penyelarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 389
3.18. Penyelarsan Indikator Makro RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025 2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 399
4.1. Kerangka Pendaanaan Pembangunan Daerah Kabupaten TulangBawang Barat Tahun 2026-2030..... 402
4.2. Indikasi Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 403
4.3. Keselarasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi dengan Program Prioritas Nasional..... 432
4.4. Dukungan Program RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kegiatan Prioritas Utama Pada Lampiran 1 RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029 454
4.5. Program Perangkat Daerah Pendukung Tematik Pembangunan..... 457
4.6. Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 473
4.7. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 481

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1.1. Keterhubungan Antara Dokumen RPJPD dan RPJMD Tulang Bawang Barat 2
1.2. Bagan Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Baw 3
1.3. Hubungan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 7
1.4. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen RTRW dan KLHS 8
2.1. Peta Administrasi Kabupaten Tupang Bawang Barat..... 15
2.2. Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat 17
2.3. Peta Formasi Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat . 19
2.4. Peta Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang Barat 21
2.5. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat .. 22
2.6. Koridor Ekonomi Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional.. 23
2.7. Peta Kawasan Strategis Kab. Tulang Bawang Barat 24
2.8. Peta Rencana Pola Ruang Kab. Tulang Bawang Barat ... 29
2.9. Peta Daya Dukung Lahan Kab. Tulang Bawang Barat.... 31
2.10. Peta Kemampuan Lahan Kab. Tulang Bawang Barat..... 32
2.11. Peta Daya Dukung Air Kab. Tulang Bawang Barat 36
2.12. Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 38
2.13. Peta Daya Tampung Lahan Kab. Tulang Bawang Barat. 40
2.14. Grafik Persentas Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum layak Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020 – 2024 42
2.15. Grafik Perkembangan Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2024 44
2.16. Grafik Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 ... 46
2.17. Peta Rawan Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat . 51
2.18. Peta Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 52
2.19. Peta Resiko Gerakan Tanah di Kabupaten Tulang Bawng Barat..... 53
2.20. Peta Segmentasi dan Magnitudo Maximum Subduksi Indonesia 54
2.21. Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 55
2.22. Peta Kerentanan Kab. Tulang Bawang Barat 58
2.23. Peta Kepadatan Penduduk Ka. Tulang Bawang Barat..... 66
2.24. Perbandingan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2029..... 68
2.25. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Lampung dan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020 s.d 2024..... 70
2.26. Grafik Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung dan Nasional 72
2.27. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024..... 73
2.28. Perkebangan PDRB Perkapita Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024 74
2.29. Distribusi Persentase Produk Domistik Regional Bruto

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 74
2.30. Pertumbuhan 5 (lima) Sektor Tertinggi PDRB Kab. Tulang Bawang Barat ADHK 2010 Tahun 2024..... 75
2.31. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 76
2.32. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung dan Nasional tahun 2020-2024..... 77
2.33. Perkembagan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024..... 78
2.34. IPM Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2024 79
2.35. Angka Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 80
2.36. Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tahun)..... 81
2.37. Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tahun)..... 81
2.38. Pengeluran Perkapita Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat (000Rp)..... 82
2.39. Perkembangan UHH Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat – Provinsi Lampung dan Nasional 83
2.40. Perekembangan Cakupan JKN tahun 2022 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat – Prov. Lampung..... 89
2.41. Prevalensi Stunting Tahun 2021 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 92
2.42. Prevalensi stunting Kab/Kota Provinsi Lampung Berdasarkan SKI tahun 2024..... 92
2.43. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tulang Bawang Barat Prov.Lampung dan Nasional 2019 – 2023 100
2.44. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 102
2.45. Ideks Kualitas Keluarga (IKK) Berdasarakan Provinsi Tahun 2022 104
2.46. Perkembangan IDG Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2023..... 106
2.47. Persentase Penduduk Kab. Tulang Bawang Barat Kelompok Umur tahun 2018 – 2023 108
2.48. Kontribusi Sektor PDRB Kab. Tulang Bawang Barat Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2024 114
2.49. Persentase Pengeluaran Rata – Rata Per Kapita Kab. Tulang Bawang Barat 119
2.50. Kondisi Jalan Tahun 2024 Kab. Tulang Bawang Barat... 132
2.51. Capaian SPBE Kab/Kota Se- Provinsi Lampung 2023 ... 134
2.52. Capaian SAKIP Kab/Kota Se-Provinsi Lampung 2023 138
2.53. Indeks Demokrasi Prov. Lampung 2017 – 2022..... 159
2.54. Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat 163
3.1. Strategi Pencapaian Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan (RPJPD Tahun 2025- 2045 212
3.2. Fokus Arah Kebijakan RPJPD tahun 2025 – 2045 (Tahap I)..... 213
3.3. Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Prioritas Pembangunan Daerah..... 224
3.4. Visi dan Misi Presiden 227

3.5. 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat..... 228
3.6. Visi – Misi Gubernur Lampung..... 229
3.7. Program Unggulan dan Program Hasil Terbaik Cepat Gubernur Lampung Tahun 2025 – 2029 230
3.8. Visi – Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 231
3.9. Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat 231
3.10. Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Program Prioritas Nasional..... 236
3.11. Dukungan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap PHTC RPJM Nasional 237
3.12. Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Atas Program Unggulan Gubernur Provinsi Lampung..... 241
3.13. Dukungan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap PHTC Provinsi Lampung tahun 2025 – 2029 .. 242

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai amanat dan cita-cita bangsa, kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan kesejahteraan umum dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, proses pembangunan diawali dengan perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Pemerintah Daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus perwujudan dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah, dalam menyusun perencanaan pembangunan pemerintah daerah berkewajiban mempedomani dan mengacu perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah harus memanfaatkan kearifan lokal dan potensi daerah, serta pembanguan daerah harus didukung oleh kreativitas dan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya keberhasilan pembangunan daerah akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, hierarkis, dan terintegrasi, memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa untuk setiap periode jabatan kepala daerah, harus disusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berlaku sejak pelantikan kepala daerah hingga akhir periode jabatan selama 5 tahun. Selanjutnya untuk menindak lanjuti pasal 65 dan pasal 264 Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan pasal 10 Undang – Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan melaksanakan Peraturan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang

didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 hal ini dikarenakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan penjabaran RPJPD serta bagian dari RPJM Nasional, dimana setelah RPJMD tersusun akan menjadi pedoman bagi daerah untuk menyusun RKPD dan bagi Perangkat Daerah untuk pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daearah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitik beratkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-1 (pertama) pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045 yang diarahkan untuk penguatan modal dasar (penguatan fodasi) dalam pelaksanaan transformasi dengan azas gotong royong (kolaborasi) untuk mendorong kemajuan bersama- sama di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun keterkaitan antara RPJPD tahun 2025 – 2045 dengan RPJMD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar 1.1. dibawah ini.

Gambar 1.1.
Keterhubungan antara Dokumen RPJPD dan Dokumen RPJMD



Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partifipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan

lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan adalah :

1. Pendekatan teknokratik;
2. Pendekatan partisipatif;
3. Pendekatan politis;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. Pendekatan holistic-tematik;
6. Pendekatan integratife;
7. Pendekatan Spasial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 disusun melalui beberapa tahapan yang dilaksanakan yaitu :

1. Persiapan penyusunan RPJMD,
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD,
3. Penyusunan Rancangan RPJMD,
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD,
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan
6. Penetapan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan RPJMD diatas dapat dilihat pada gambar 1.2. di bawah ini.

Gambar 1.2.
Bagan Tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029
Kabupaten Tulang Bawang Barat

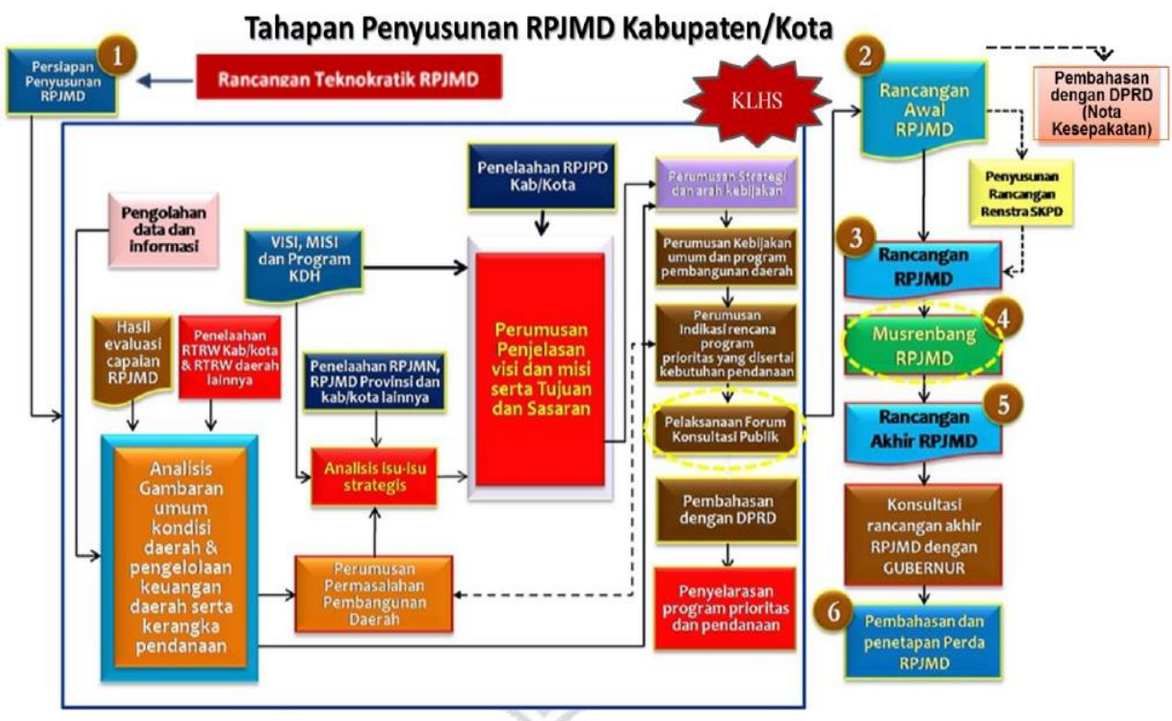

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa jabatan tahun 2025 – 2030. Berdasarkan undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 264 ayat (4) menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik, utuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provisi Lampung tahun 2025 – 2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Satandar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 tahu 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 131);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 140);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, serta dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 yang disinkronkan dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Selain hal tersebut, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, disajikan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3.
Hubungan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

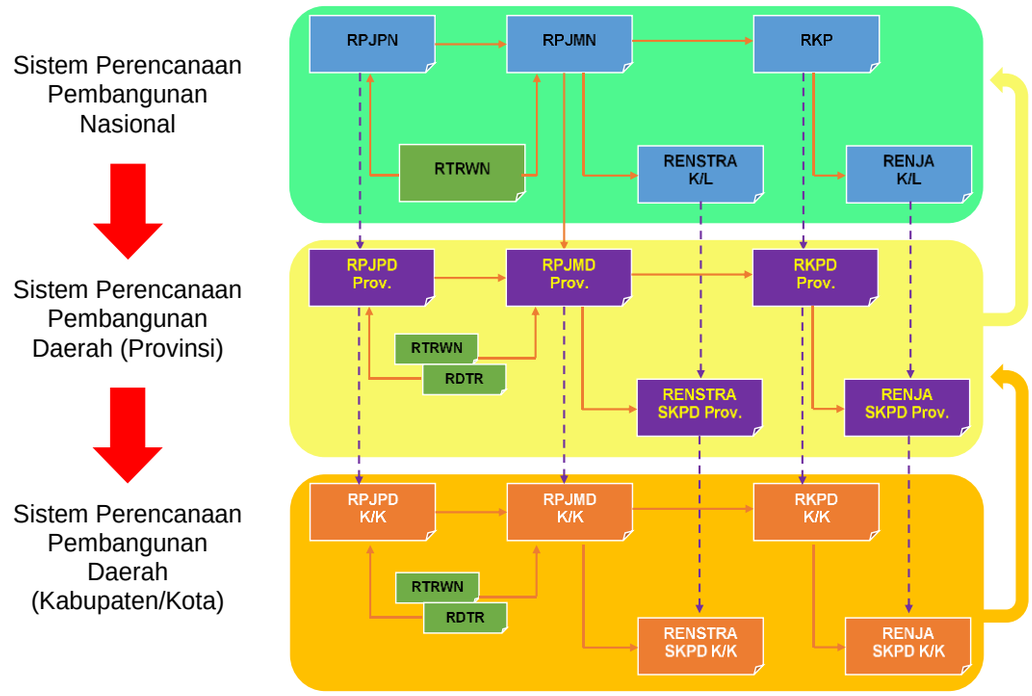

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah sebagaimana digambarkan pada gambar 1.3, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023-2043, dan juga dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 hal ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.11.2/8755/ Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD, sebagai upaya untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan sudah didasari dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis sehingga penyusunan RPJMD tidak terlepas dari analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan pertimbangan terhadap potensi bencana alam. KLHS juga memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan berkelanjutan terintegrasi, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di sisi lain, analisis risiko bencana, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan, menjadi bagian integral dalam perencanaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga aman dan lestari secara lingkungan, serta meminimalisir dampak negatif dari potensi bencana. untuk menentukan arah pengembangan wilayah.

Sedangkan untuk keterhubungan antara RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023-2043 ialah dalam penentuan arah kebijakan prioritas pembanguan wilayah dan lokasi program atau kegiatan pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 telah memperhatikan struktur ruang, polar uang serta Kawasan strategis sebagaimana yang diatur dalam RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 – 2043. Adapun gambaran keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW dan KLHS dapat dilihat pada gambar 1.4.

Gambar 1.4.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen RTRW dan KLHS

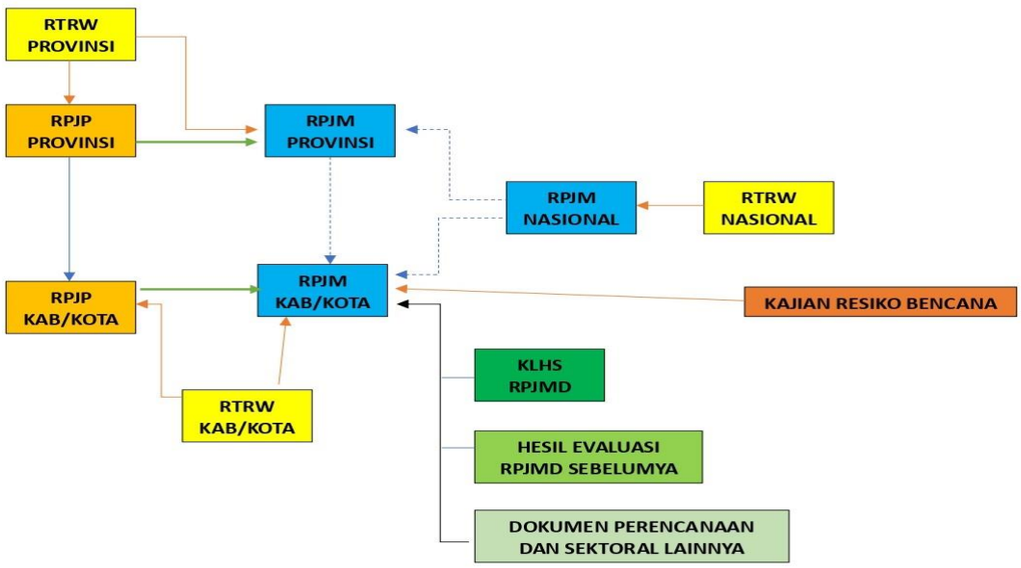

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1.4.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk memberikan arahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai upaya mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lingkup waktu 5 (lima) tahun, serta sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 adalah :

a. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama masa jabatan bupati dan wakil bupati tahun 2025-2029;
c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat; serta
f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penyusunan RPJMD

Sistematika penyusunan (penulisan) dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merumuskan latar belakang penyusuanan, mengidetifikasi dasar hukum yang relevan dan sinifikan dalam penyusunan, menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainya, mengurai maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

1.1. Latar Belakang

Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD tahun 2025 – 2029 yang dilengkapi dengan defenisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD, tanggal pelantikan dan masajabatan kepala daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisikan landasan atau dasar yang berupa peraturan perundang - undangan yang relevan dan siknifikan menjadi pedoman dalam proses pembuatan atau pembentukan suatu dokumen,

kebijakan, atau peraturan, serta disusun sesuia kaidah peyusunan produk hukum.

1.3. Hubungan Antar dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Menggamabarkan keterkaitan atau hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya baik secara Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota

1.4. Maksud dan Tujuan

Menerangkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Penyusunan RPJMD

Berisikan bentuk tata naskah dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, dan gambaran keuangan daerah sebagai dasar perumusan permasalahan, isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Meberikan gambaran tentang kondisi secara umum suatu daerah (Kabupaten Tulang Bawang Barat) serta capaian capaian kinerja daerah.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Subbab ini memberikan gambaran keadaan keuangan daerah yang telah lalu dan prediksi lima tahun yang akan datang.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada permasalahan dan isu strategis ini menggambarkan tentang permasalahan – permasalahan yang menjadi target penyelesaian dalam dokumen RPJMD 2025-2029.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya serta dijabarkan arah kebijakan dan strategi serta program prioritas daerah yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Tulang Bawang Barat.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Subab ini berisikan tentang visi dan misi bupati dan wakil bupati serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan.

3.2. Strategi Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada subbab ini menggambarkan tentang strategi arah kebijakan dan program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program kerja dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

1.1. Program Perangkat Daerah

Pada subbab ini memberikan informasi tentang program – program serta target kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah.

1.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Subbab ini memberikan informasi tentang indikator-indikator kinerja utama dan kinerja daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat lima tahun kedepan beserta kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evalausi sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembagunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat di gunakan sebagai dasar acuan perencanaan pembangunan daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi memberikan gambaran geografi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mencakup karakteristik lokasi, potensi pengembangan wilayah, sumber daya alam, daya dukung lingkungan, dan aspek kebencanaan serta perubahan iklim, dan juga posisi strategis wilayah kabupaten serta gamabaran perkembangan penduduk. Sehingga mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mendukung arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Karateristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, pada tanggal 26 November 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang dengan ibu kota kabupaten yaitu Panaragan. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pada awal pembetukannya terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 96 tiyuh/kelurahan, namun dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan tiyuh sehingga pada tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan 100 (seratus) tiyuh dan 3 (tiga) kelurahan.

Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada awal terbentuk memiliki luas wilayah 1.201,15 Km^2 atau setara dengan 120.115 Ha, akan tetapi dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 untuk luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi 1.257,088 Km^2 atau setara dengan 125.708,76 Ha. Bila dilihat dari luas wilayah perkecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup bervariasi, terkecil 72,16 km^2 di Kecamatan Gunung Terang dan terluas 247,47 km^2 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Kecamatan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah menurut Kecamatan Kab. Tulang Bawang Barat

No.	Kecamatan	Tiyuh dan Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan	Luas	
				(Ha)	(%)
1	Tulang Bawang Udik	13	Karta	21.369,69	16,999
2	Tumijajar	10	Dayamurni	11.322,43	9,007
3	Tulang Bawang Tengah	21	Panaragan	24.746,94	19,686
4	Pagar Dewa	6	Pagar Dewa	13.929,28	11,081
5	Lambu Kibang	10	Kibang Budi Jaya	8.482,24	6,748
6	Gunung Terang	10	Gunung Terang	7.216,48	5,741
7	Batu Putih	10	Margo Mulyo	10.083,71	8,021
8	Gunung Agung	13	Tunas Jaya	21.188,62	16,855
9	Way Kenanga	10	Balam Jaya	7.369,38	5,862
Total		**103**		**125.708,76**	**100,00**

Sumber: RTRW Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2043

Secara administratif, batas – batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Way Serdang dan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Banjar Margo, Banjar Agung dan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar dan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

Kabupaten Tulang Bawang Barat di dasarkan pada sekelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai dan terbagi menjadi tiga wilayah. Pembagian ketiga wilayah tersebut dipisahkan oleh dua sungai yaitu Way Kiri dan Way Kanan. Tiga kelompok wilayah membentuk sisi utara, yang meliputi: Kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang, Batu Putih dan Way Kenanga. Bagian Tengah meliputi Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik sedangkan sebelah selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Tumijajar.

Berdasarkan rencana pola ruang yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung disebutkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam kawasan lindung yaitu konservasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Rawa Kandis Tulang Bawang Barat dan termasuk dalam kawasan budi daya yaitu : 1). Kawasan hutan produksi Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2). Kawasan pertanian mendukung ketahanan pangan pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 14.907 ha, 3). Kawasan perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 4). Kawasan peruntukan industri Kabupaten Tulang Bawang Barat, 5). Kawasan pariwisata di darat Kabupaten

Tulang Bawang Barat, 6). Kawasan permukiman Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk pengenbangan kawasan – kawasan tersebut sangat besar peluangnya hal ini terkait dengan tersedianya akses Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung yang yang melalui daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sepanjang 36,67 KM dan gerbang tol keluar (exit tol) yang mengarah ke Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat sebanyak 4 (empat) Gerbang Tol (GT) yaitu 1). GT Gunung Batin di KM 26, 2). GT Menggala yang ada di KM 43, 3). GT Lambu Kibang di KM 61, dan 4). GT Way Kenanga di KM 77. Adapun peta administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Gambar 2.1

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat

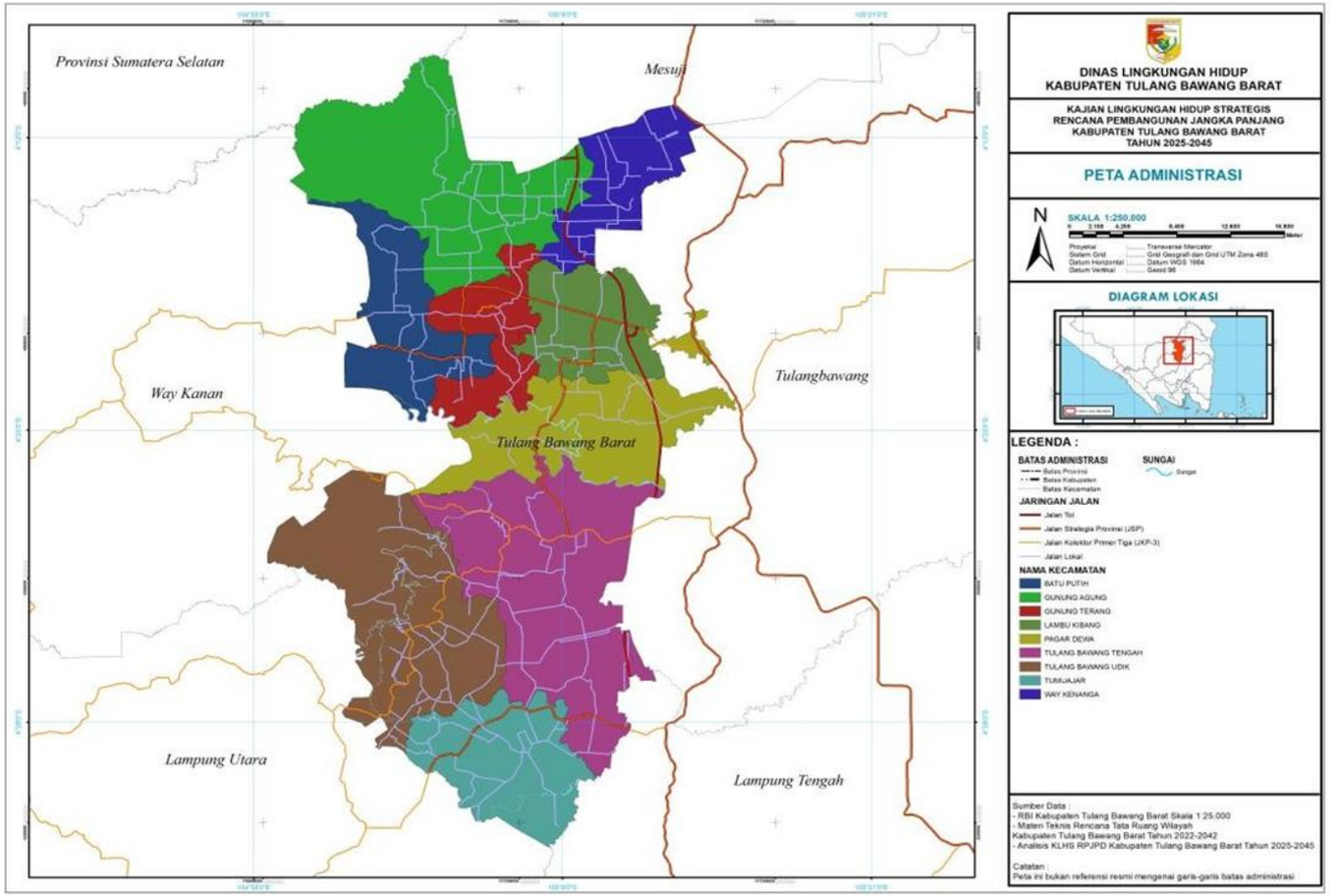

Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2043

b. Topografi

Topografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah dataran rendah, dan berdasarkan hasil interprestasi data ketinggian, maka ketinggian wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat terbagi menjadi 2 (dua) kelasa ketinggian yakni 0 – 25 mdpl dan 25 – 50 mdpl sebagai mana data pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Kedaan Topografi dan luasan Perkecamatan
Kab. Tulang Bawang Barat

No	Nama Kecamatan	Topografi (mdpl)	Luas (Ha)	Ket
1	Batu Putih	0 – 25	4.834,81	
		25 - 50	5.248,90	
2	Gunung Agung	0 – 25	5.388,04	
		25 - 50	15.800,58	
3	Gunung Terang	0 – 25	4.364,10	
		25 - 50	2.852,38	
4	Lambu Kibang	0 – 25	4.593,60	
		25 - 50	3.888,64	
5	Pagar Dewa	0 – 25	11.807,27	
		25 - 50	2.122,01	
6	Tulang Bawang Tengah	0 – 25	16.661,82	
		25 - 50	8.085,12	
7	Tulang Bawang Udik	0 – 25	15.781,35	
		25 - 50	5.588,34	
8	Tumijajar	0 – 25	496,49	
		25 - 50	6.872,89	
9	Way Kenanga	0 – 25	8.750,48	
		25 - 50	2.571,94	
Luas Total			**125.708,76**	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029

Selanjutnya di bawah ini kami sajikan peta topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu pada gambar 2.2 sebagai berikut.

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat

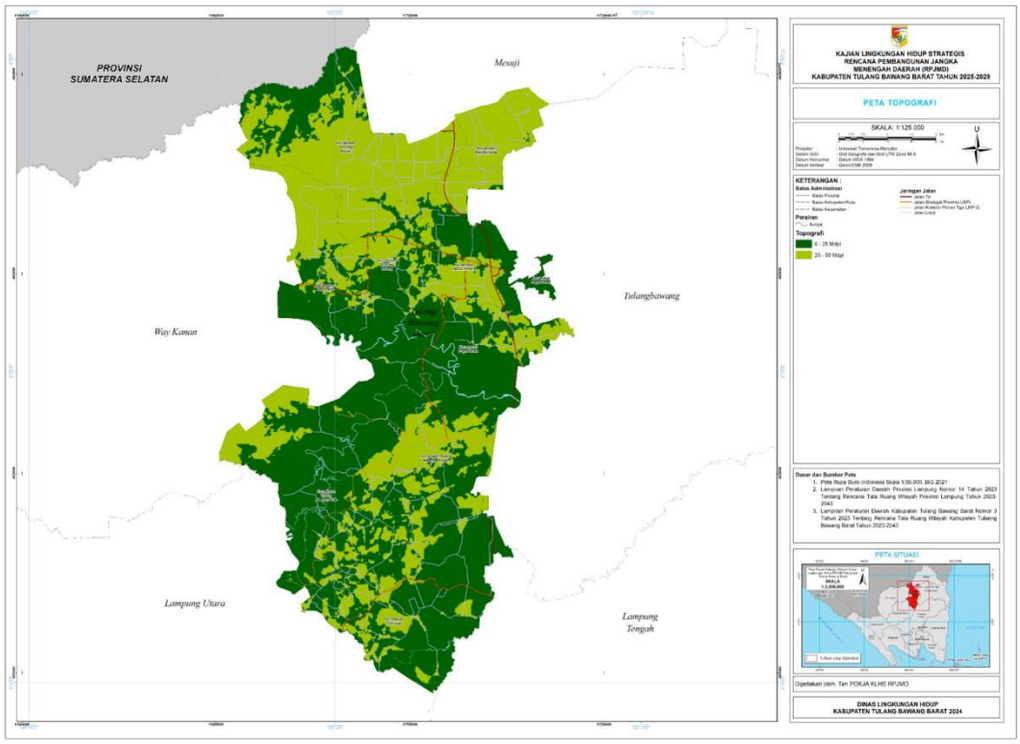

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029

c. Geologi

Formasi Geologi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak dipermukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk lebih jelasnya, kondisi Formasi Geologi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Tanah Alluvial, dimana Tanah Alluvial adalah jenis tanah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar dan tersebar di daerah pantai bagian timur. Sifat Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi. Dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam serta kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).

Tabel 2.3
Batuan Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nama Kecamatan	Jenis Formasi Batuan Geologi (Ha)				Luas Total Alluvium (Ha)
	Alluvium (Qa)	Formasi Kasai (QTk)	Formasi Muara Enim (Tmpm1)	Formasi Terbanggi (Qpt3)	
Batu Putih	311,41	5.149,43	4.622,88	-	10.083,71
Gunung Agung	2.308,46		18.880,15	-	21.188,62
Gunung Terang	1.187,28	2.711,68	3.317,52	-	7.216,48
Lambu Kibang		1.925,81	6.556,43	-	8.482,24
Pagar Dewa	5.230,44	8.088,01	610,83	-	13.929,28
Tulang Bawang Tengah	2.425,77	5.678,09	-	16.643,08	24.746,94
Tulang Bawang Udik	2.227,81	11.827,57	-	7.314,31	21.369,68
Tumijajar	-	-	-	11.322,43	11.322,43
Way Kananga	-	-	7.369,38	-	7.369,38
Jumlah Total	**13.691,17**	**35.380,59**	**41.357,18**	**35.279,81**	**125.708,76**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Batuan Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh jenis batuan formasi Muara Enim / Tmpm1 *(endapan yang diendapkan formasi muaraenim yaitu merupakan formasi pembawa batubara utama di Cekungan Sumatera Selatan yang penyebaran formasi ini sangat luas meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan sedikit di Provinsi Riau dan Provinsi Lampung dengan lokasi tipe dapat dijumpai di wilayah Kabupaten Kabupaten Muara Enim*) dengan luas 41.357,18 Ha yang terdapat di Kecamatan Batu Putih, Gunung Agung, Gunung Terang, Lambu Kibang, Pagar Dewa, dan Way Kenanga. Sedangkan jenis batuan terendah adalah jenis formasi Alluvium (Qa) dengan luas 13.691,17 Ha yang terdapat di Kecamatan Batu Putih, Gunung Agung, Gunung Terang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik. Berikut gambar 2.3. merupakan peta geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Gambar 2.3.
Peta Formasi Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat

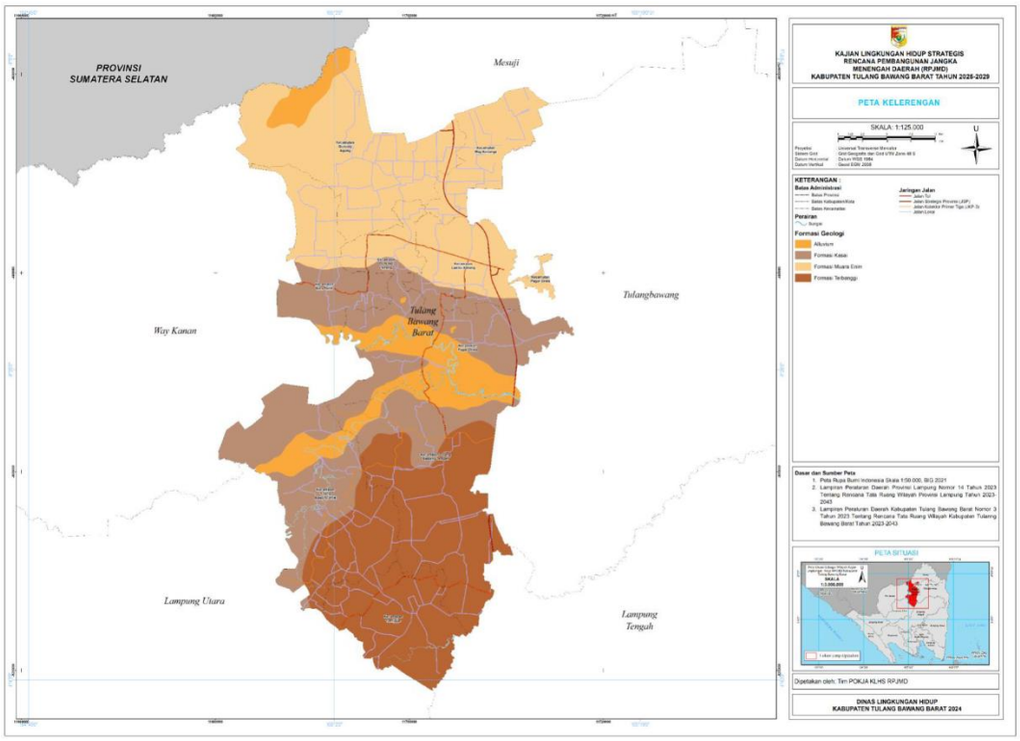

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2029

d. Kondisi Klimatologi

Iklim di Kabupaten Tulang Bawang Barat sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh Angin Muson, maka daerah Tulang Bawang Barat tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

Rata – rata suhu udara tertinggi sebesar 36,6^{0}C terjadi pada bulan September, sedangkan kelembapan tertinggi mencapai 100% yang terjadi di beberapa bulan pada tahun 2024. Rata – rata suhu udara dan kelembapan setiap bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 tersaji pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rata-Rata Suhu Udara dan kelembapan Setiap Bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bulan	Suhu Udara °C (2024)			Relatif Kelembaban % (2024)		
	Min	Avg	Maks	Min	Avg	Maks
Januari	22,6	26,9	34,3	56,0	86,5	100,0
Februari	22,5	27,2	34,0	62,0	85,6	98,0
Maret	22,8	27,4	34,6	59,0	86,2	100,0
April	23,6	27,6	34,4	59,0	87,4	100,0
Mei	24,0	28,1	35,2	58,0	84,8	98,0

Bulan	Suhu Udara °C (2024)			Relatif Kelembaban % (2024)		
	Min	Avg	Maks	Min	Avg	Maks
Juni	23,0	27,4	34,2	57,0	84,0	100,0
Juli	20,6	28,3	34,3	47,0	76,5	100,0
Agustus	21,2	27,1	35,0	45,0	78,5	97,0
September	21,6	27,9	36,6	0,0	69,7	98,0
Oktober	21,6	28,5	34,4	42,0	74,5	98,0
November	22,8	27,3	36,4	41,0	83,5	98,0
Desember	23,2	27,1	34,2	51,0	85,0	100,0

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/thn)	Jumlah Hari Hujan(hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	517,0	22,0	3,3
Februari	262,0	15,0	4,8
Maret	202,0	12,0	4,0
April	164,0	11,0	3,9
Mei	302,0	12,0	4,5
Juni	76,0	9,0	3,1
Juli	15,0	3,0	6,2
Agustus	30,0	5,0	5,6
September	249,0	7,0	5,4
Oktober	56,0	5,0	5,4
November	146,0	8,0	3,9
Desember	217,0	13,0	2,7

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

Jumlah curah hujan tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 517,0 mm terjadi pada bulan Januari dan pada bulan Januari pula merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak yaitu sebesar 22 hari. Selain itu, Penyinaran matahari tertinggi sebesar 6,2% terjadi pada bulan Juli. Peta curah hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat di sajikan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4.
Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang Barat

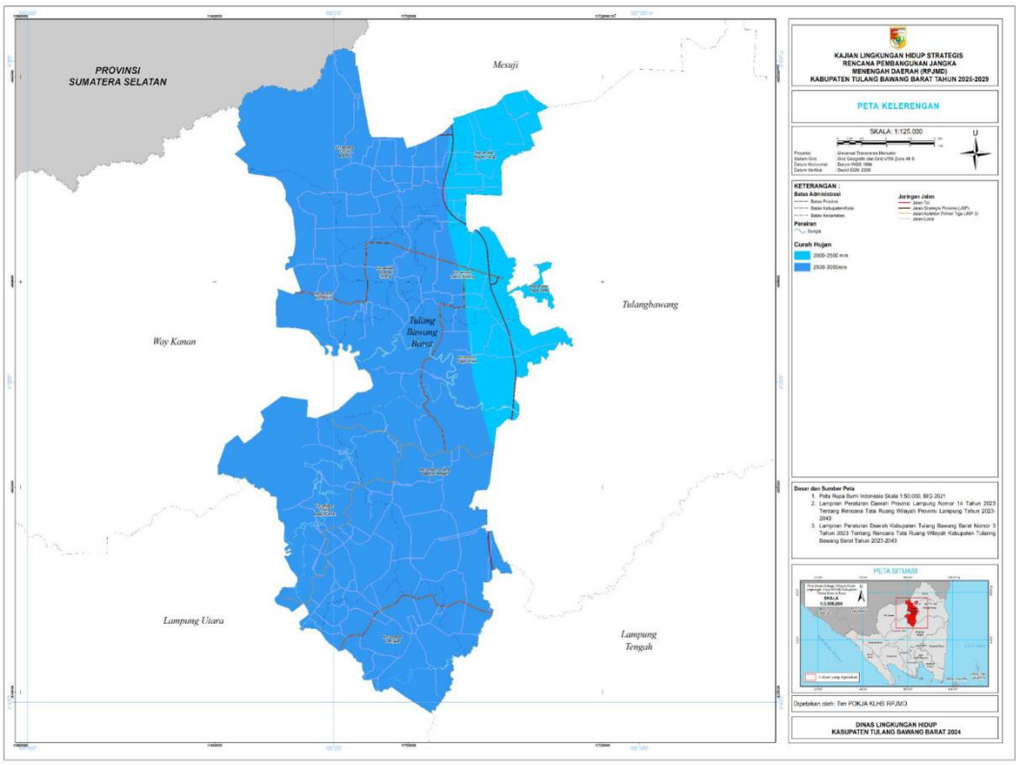

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 - 2029

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 kategori, antara lain yaitu Semak belukar, perkebunan, permukiman lahan terbuka, tubuh air, Semak belukar rawa, pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campuran serta sawah. Dimana penggunaan lahan paling dominan adalah Guna Lahan Pertanian Lahan Kering dengan luas 43.559,81 Ha. Penggunaan lahan yang paling sedikit adalah guna lahan semak belukar dengan luas 2,21 Ha. Peta penggunaan lahan beserta luas lahan secara rinci dapat di lihat pada gambar 2.5 dan tabel 2.6 dibawah ini.

Gambar 2.5
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

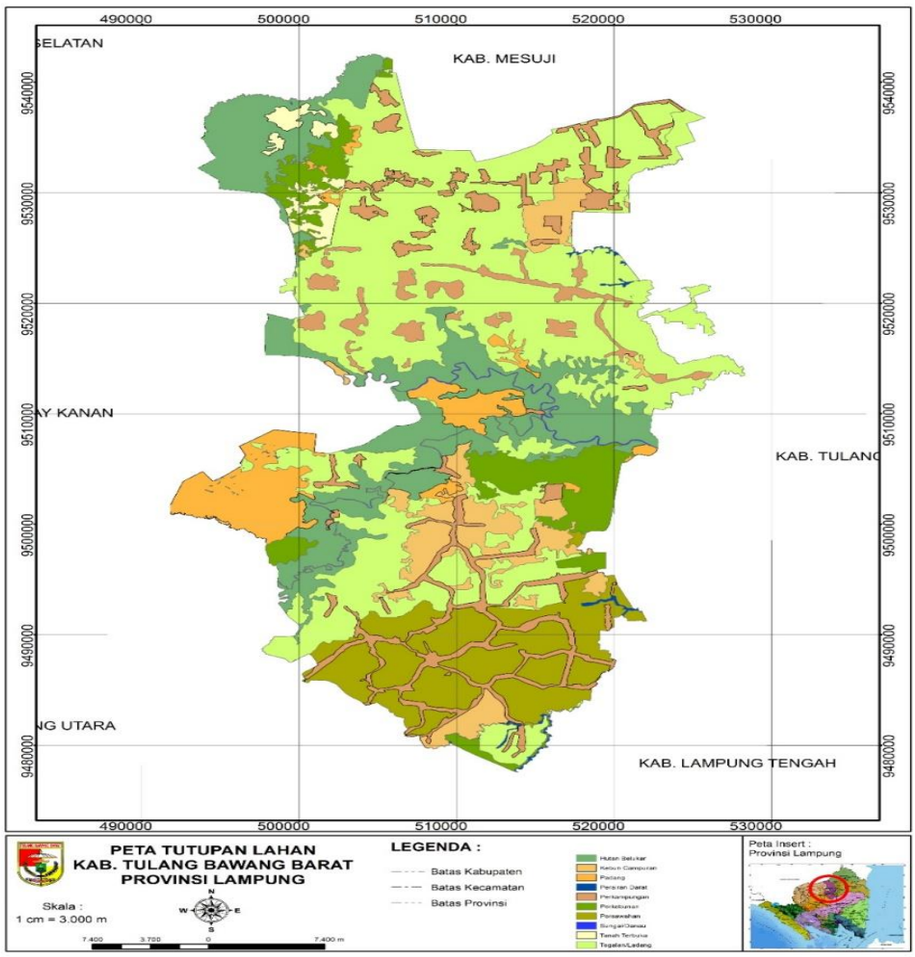

Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043

Tabel 2.6
Guna Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Belukar	21.745,77
2	Kebun Campuran	8.162,99
3	Padang	7.737,65
4	Perairan Darat	362,40
5	Perkampungan	13.217,23
6	Perkebunan	8.013,55
7	Persawahan	13.939,20
8	Sungai / Danau	622,91
9	Tanah Terbuka	1.729,47
10.	Tegalan/Ladang	50.177,60
Total		**125.709**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029

B. Potensi Daerah

1) Peran Strategi Daerah dalam Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Lampung

Potensi geografi merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Arah Pembangunan Kewilayahan. Arahan kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Lampung yang dikelompokan pada masing-masing klaster yang memiliki pusat pertumbuhan. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk ke dalam arahan Pembangunan Wilayah pada WP II ini di klasterkan berdasarkan yang struktur ruang pada RTRW yang bertujuan untuk pemerataan simpul pada Klaster 2 yaitu Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji , dimana Tulang Bawang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah menjadi Wilayah Inti pada Klaster ini yang kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji menjadi wilayah pendukungnya.

Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kabupaten penghasil karet alami di Provinsi Lampung, termasuk dalam koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada enam Kegiatan Ekonomi Utama, yaitu Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Perkapalan dan Besi Baja yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Sumatera. Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional, dimana strategi untuk pengembangan karet tersebut terdapat beberapa infrastrukur dasar yang harus dipenuhi seperti Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung industri karet baik hulu maupun hilir; Penambahan kapasitas listrik yang saat ini masih dirasakan kurang memadai untuk mendukung industri karet di Sumatera; dan pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, sentra pengolahan dan akses ke pelabuhan.

Gambar 2.6.
Koridor Ekonomi Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional

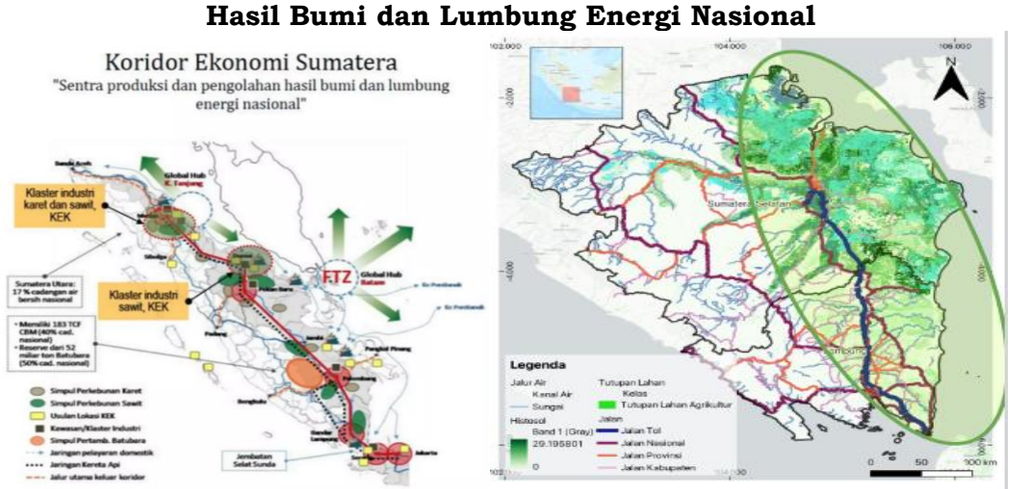

Sumber : RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045

2) Kawasan Strategis Potensial Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043, kawasan strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi menjadi:

1. Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa. Adapun rencana pengembangan yang akan dilakukan ialah pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dan permukiman;
2. Kawasan Perkotaan Panaragan berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Panaragan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa. Adapun rencana pengembangan yang akan dilakukan ialah pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman;
3. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Tumijajar, yang bertujuan mewujudkan Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan. Adapun arahan pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan dilakukan ialah rencana pengembangan pertanian, kegiatan perdagangan dan jasa, dan permukiman;
4. Kawasan Industri Lambu Kibang berada di Kecamatan Lambu Kibang, dengan arahan pengembangan sebagai Kawasan Industri.

Gambar 2.7
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat

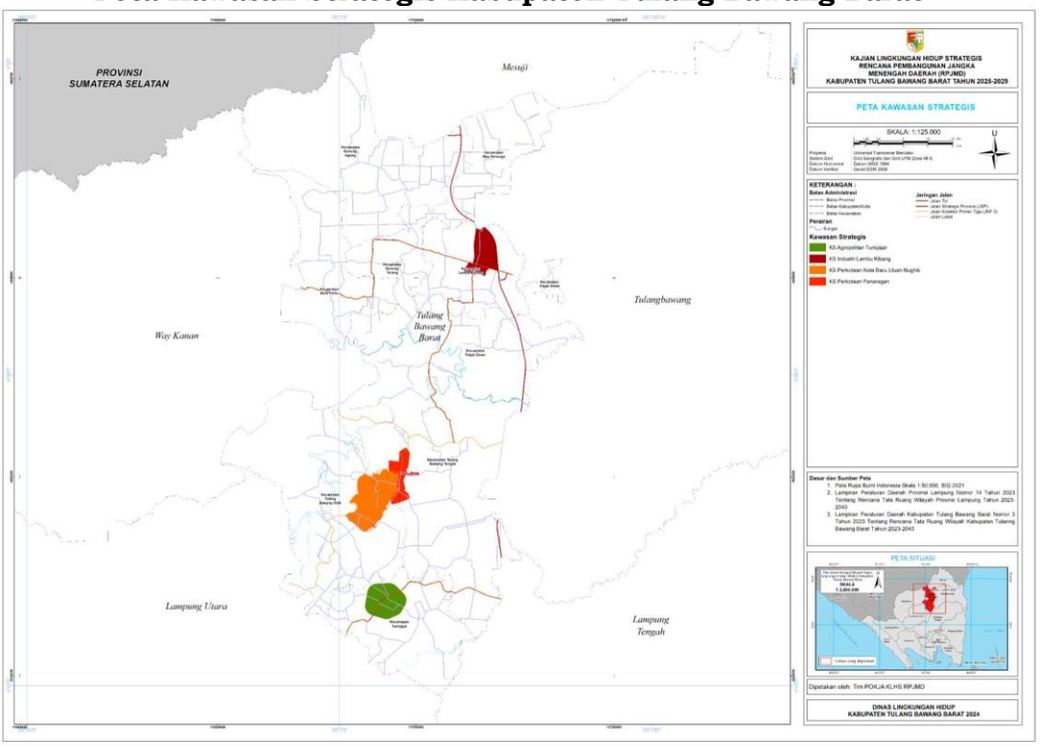

Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2043

3) Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah tahun 2023 - 2043, rencana pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dibagi menjadi rencana kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya.

1. Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari Kawasan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat Dan Kawasan Konservasi.

a) Badan Air

Badan air merupakan salah satu kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Karena fungsinya maka harus terlindungi atau tidak diperkenankan adanya kegiatan manusia (budidaya). Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ini, maka harus diatur sehingga tercapai tata ruang kawasan lindung yang optimal. Badan Air Tulang Bawang Barat memiliki luas sekitar 838 Ha yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat ini dapat berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan.

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Tulang Bawang Barat salah satunya berupa kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria kawasan sempadan sungai :

- Embung, telaga alami, irigasi, dan tubuh air lain mempunyai garis sempadan sebesar 30 m di kiri dan kanan perairannya.
- Sungai besar (sungai yang mempunyai daerah pengaliran ≥ 500 km^2) mempunyai garis sempadan sungai sebesar 100 m di kiri dan kanan sungai.

Untuk kawasan permukiman yang sudah ada di sepanjang sungai dibatasi dengan jalan inspeksi sebesar 10 – 15 m dari bibir sungai. Sungai yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Sungai Way Kanan, Way Kiri, dan Way Tulang Bawang. Sempadan sungai ditetapkan supaya memberikan batasan pembangunan permukiman di kawasan dekat sungai untuk mencegah terjadinya bencana. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat diarahkan sejauh 100 meter.

Kawasan ini diarahkan sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi

dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Kawasan RTH di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 1.558 Ha.

c) Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan konservasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan/atau taman wisata alam laut. KPA yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa Taman Hutan Raya yang terletak di Kecamatan Pagar Dewa dengan luas 1.375 Ha.

2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan Budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana kawasan peruntukan Budidaya terdiri dari badan jalan, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman.

a) Badan Jalan

Badan Jalan merupakan kawasan yang ditutup oleh jaringan jalan yang cukup lebar dan menutupi lahan yang ada. Badan jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan luas dari jaringan jalan tol yang membentang melewati Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Kecamatan Way Kenanga. Luas dari Badan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 447 Ha.

b) Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang bisa dikonversi. Kawasan hutan produksi di

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi tetap adalah hutan yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. Kawasan hutan produksi tetap yang di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 10.425 Ha yang berada di Kecamatan Gunung Agung, Batu Putih dan Way Kenanga.

c) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian dalam Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan, dan dapat juga ditambahkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

- Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 16.663 Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LCP2B) dan Tanaman Pangan yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain di Gunung Agung, Batu Putih, Gunung Terang. Lambu Kibang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Tumijajar.
- Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Kawasan hortikultur di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 1.033 Ha yang berada di Kecamatan Tumijajar.
- Kawasan perkebunan merupakan jenis pertanian tanaman kebun dengan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Kawasan perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 71.624 Ha yang berada di seluruh kecamatan. Kawasan Perkebunan meliputi pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan komoditas lainnya, berupa perkebunan karet, singkong, dll.

d) Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan Perikanan Budidaya ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan budidaya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem sungai. Kawasan ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menjamin ketersediaan bahan baku perikanan (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir.

Kawasan perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan perikanan Budidaya yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Pagar Dewa, dan Kecamatan Gunung Terang. Luas kawasan perikanan Budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah seluas 2.720 Ha.

e) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 3.349 Ha berada tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Way Kenanga. Kawasan Industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga diarahkan sebagai kawasan industri unggulan berbasis ekonomi kerakyatan, dengan didukung promosi komoditas dan produk unggulan kabupaten, Pengaturan zona Industri dan infrastruktur pendukungnya, serta promosi peluang investasi industri.

f) Kawasan Pariwisata

Dengan kondisi alam di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tidak cukup banyak menyediakan pariwisata alam, maka pariwisata yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah wisata buatan yang bertema Agrowisata dengan luasan kawasan peruntukan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebesar 1.464 Ha. Konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang Barat akan terkait dengan potensi dan permasalahan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang Barat serta isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan yang dihadapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung. Kawasan wisata dengan skala kecamatan atau skala lokal dapat menjadi kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat kecamatan atau tingkat lokal.

g) Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman dikembangkan berada dekat dengan kawasan perkantoran pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi; kawasan permukiman perkotaan yang berada di dekat kawasan perkantoran yang meliputi wilayah Panaragan (Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat) dan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan perdagangan dan jasa mencakup wilayah Daya Murni (Kec. Tumijajar). Sedangkan untuk kawasan permukiman perdesaan dikembangkan mencakup seluruh desa dengan penambahan peluasan buffering di sepanjang sisi jalan dengan kondisi eksisting permukiman yang ada.

- Kawasan Permukiman Perkotaan merupakan Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan. Kawasan permukiman perkotaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 4.218 Ha yang dikembangkan di wilayah Panaragan (Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat) dan wilayah Daya Murni (Kec. Tumijajar) serta wilayah Karta (Kec.Tulang Bawang Udik) menjadi fokus utama dalam arahan permukiman perkotaan karena ketiga daerah tersebut merupakan kawasan yang berpotensi tinggi sebagai permukiman perkotaan mengingat lokasi tersebut memiliki kegiatan yang cukup bervariatif yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebagai kawasan perkotaan

Timur Laut yang terdapat perkantoran pemerintahan, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, dan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan kawasan permukiman di Kecamatan Tumijajar merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk yang cukup dengan kegiatan utamanya adalah perdagangan dan jasa yang cukup besar.

- Kawasan Permukiman Perdesaan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan. Secara umum lokasi kawasan permukiman desa tersebar secara acak dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengikuti sumber produksi masyarakat setempat serta jaringan jalan yang terbentuk. Pada pengembangan kawasan permukiman perdesaan, mencakup semua desa yang ada serta dengan pengembangan pada kawasan permukiman eksisting dengan penambahan luas di sepanjang koridor jalan permukiman eksisting yang ada melalui buffering masing-masing sebesar 10 meter pada sisi kanan dan kiri jalan. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan juga harus menjadi prioritas, termasuk mendorong pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan. Luasan kawasan permukiman perdesaan Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 9.996 Ha. Peta rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada gambar 2.8.

Gambar 2.8.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat

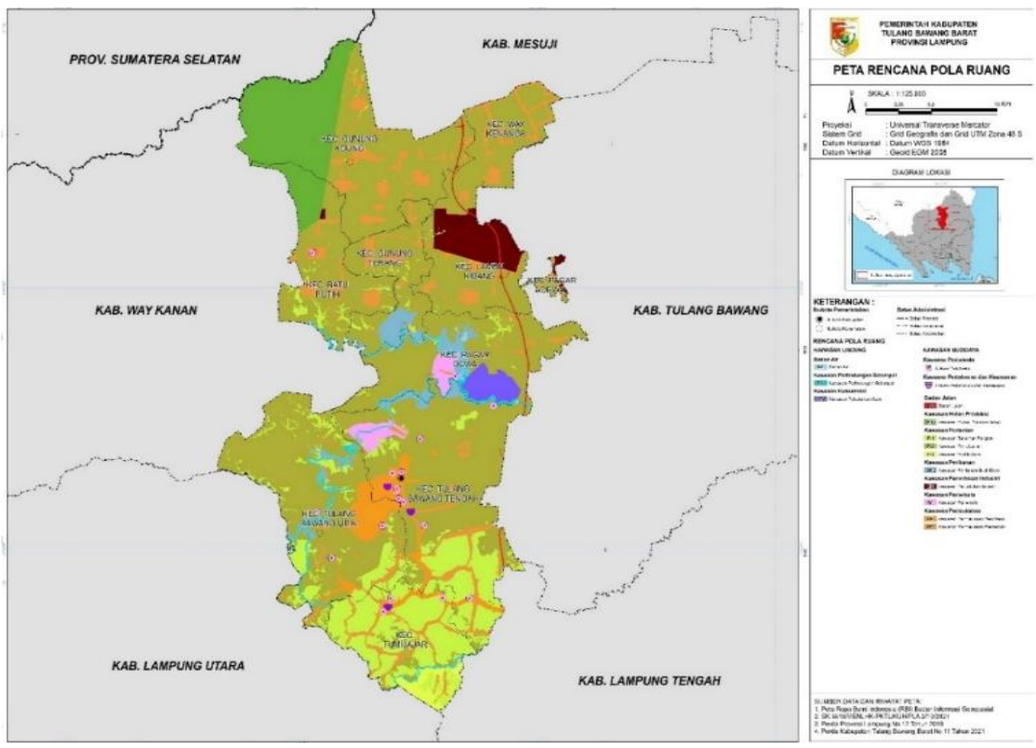

Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu dapat menjabarkan kondisi umum daerah sebagai bahan mempertimbangkan arah pembangunan daerah, selain itu kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan dasar untuk menentukan business as usual dan skenario dengan upaya tambahan untuk isu strategis. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu.

1) Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan adalah kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan kota, kegiatan ekonomi dan keseimbangan diantaranya. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan perkotaan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan yang memiliki kendala untuk pembangunan dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan perkotaan. Integrasi hasil analisis daya dukung lahan dengan Rencana Pola Ruang RTRW adalah sebagai berikut:

a) Lahan limit dijadikan sebagai kawasan lindung
b) Lahan kendala hutan produksi dijadikan sebagai kawasan budidaya. Lahan kendala kelerengan 15-40% dijadikan sebagai kawasanperlindungan terhadap kawasan bawahnya.
c) Lahan potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.7.
Daya Dukung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Nama Kecamatan	Daya Dukung Lahan (Ha)		
		Potensi	Kendala	Limitasi
1	Batu Putih	9.862,36	221,348	
2	Gunung Agung	21.152,16	36,478	
3	Gunung Terang	7.211,244	5,253	
4	Lambu Kibang	7.740,37	741,867	
5	Pagar Dewa	11.941,23	613,41	1.374,64
6	Tulang Bawang Tengah	24.700,42	46,347	
7	Tulang Bawang Udik	21.363,26	6,385	
8	Tumijajar	11.316,9	5,568	
9	Way Kenanga	6.407,234	962,314	
Total Luas		**121.695,18**	**2.638,97**	**1.374,64**
Jumlah		**125.708,76**		

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan tabel 2.7. daya dukung lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat diketahui bahwa kawasan potensial kabuapten seluas 121.695,18 Ha, dimana Kecamatan Tulang Bawang Tengah memiliki daya dukung potensial tertinggi sebesar 24.700,42 Ha yang dapat di manfaatkan sebagai kawasn budidaya. Berikut Peta Daya Dukung Lahan berdasarkan klasifikasi dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9.
Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

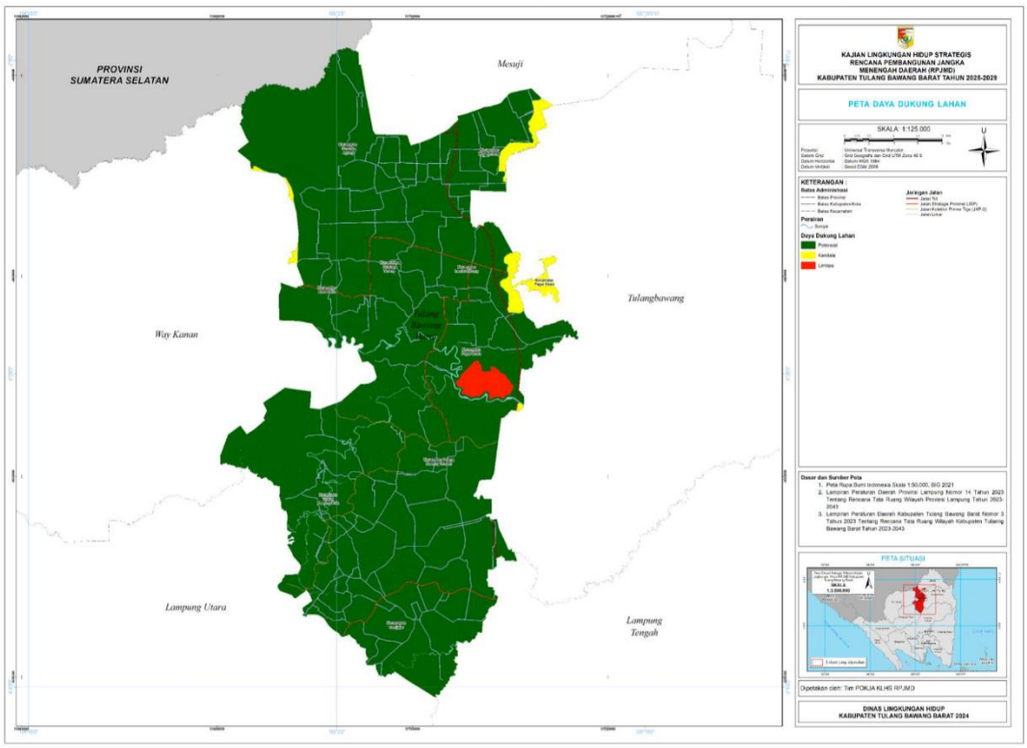

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

2) Kemampuan Lahan

Tujuan analisis kemampuan lahan yaitu untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Adapun kategori untuk menentukan kemampuan lahan di Kabupaten Tulang Bawang dibagi kedalam 3 kelas yaitu sedang, agak tinggi, dan sangat tinggi. Berikut adalah tabel kelas kemampuan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.8
Klasifikasi Kemampuan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Nama Kecamatan	Klasifikasi Kamampuan Lahan (Ha)		
		Kemampuan Pengembangan Sedang	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi
1	Batu Putih	221,35	6.961,33	2.901,28
2	Gunung Agung	36,48	21.152,09	0,07
3	Gunung Terang	5,25	4.865,7	2.345,75
4	Lambu Kibang	741,87	5.333,07	2.407,57
5	Pagar Dewa	612,41	6.612,5	6.704,24
6	Tulang Bawang Tengah	46,35	6.194,8	18.505,3
7	Tulang Bawang Udik	6,39	9.640,01	11.722,83

No	Nama Kecamatan	Klasifikasi Kamampuan Lahan (Ha)		
		Kemampuan Pengembangan Sedang	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi
8	Tumijajar	5,57	710,05	10.607,1
9	Way Kenanga	962,31	6.327,39	79,5
Total Luas		**2.637,98**	**67.796,94**	**55.273,64**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Kemampuan lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh kemampuan pengembangan lahan sangat tinggi yakni seluas 55.273,64 Ha, sehingga kemampuan lahan untuk dikembangkan sangat tinggi yang berarti pada kawasan tersebut berpotensi dilakukan pengembangan lahan sesuai dengan perencanaan yang akan dilakukan. Berikut merupakan peta kemampuan lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tergambar pada gambar 2.10 dibawah ini.

Gambar 2.10
Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

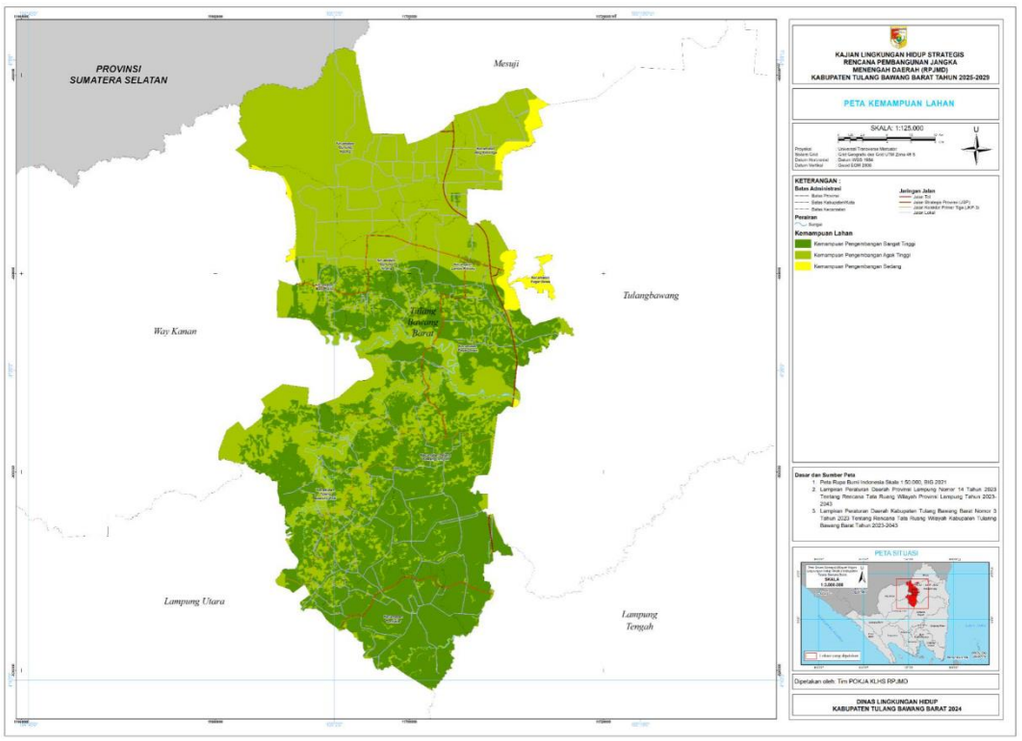

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

3) Daya Dukung Air

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan.

Tabel 2.9
Koefisien Limpasan

No	Deskripsi Permukaan	Ci
1	Kota, jalan aspal, atap genteng	0,7-0,9
2	Kawasan Industri	0,5-0,9
3	Permukiman multi unit, pertokoan	0,6-0,7
4	Kompleks perumahan	0,4-0,6
5	Villa	0,3-0,5
6	Taman, pemakaman	0,1-0,3
7	Pekarangan tanah berat: a. >7% b. 2-7% c. <2%	0,25-0,35 0,18-0,22 0,13-0,17
8	Pekarangan tanah ringan: a. >7% b. 2-7% c. <2%	0,15-0,20 0,10-0,15 0,05-0,10
9	Lahan berat	0,40
10	Padang rumput	0,35
11	Lahan budidaya pertanian	0,30
12	Hutan Produksi	0,18

Sumber : KLHS RPJMD Kabupten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029

Kebutuhan air dihitung dari hasil konservasi terhadap kebutuhan hidup layak untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Permen PU No. 01 Tahun 2014 bahwa kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60 Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih domestik (sekolah, kantor, tempat ibadah, dll). Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adapun untuk contoh perhitungan jumlah kebutuhan air untuk kegiatan domestik, non domestic dan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Perhitungan kebutuhan air seperti inilah yang menjadi dasar dalam proyeksi daya dukung air pada tahun berikutnya.

Tabel 2.10
Daya Dukung Air Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023

Nama Kecamatan	Luas Daerah (Ha)	Penutupan Lahan										Ci	C	Ketersediaan Air (M^3/Tahun)	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Kebutuhan Air (M^3/Tahun)	Daya Dukung Air	Ket
		Perkebunan (Ha)	Permukiman (Ha)	Tanah Terbuka (Ha)	Badan Air (Ha)	Belukar Rawa (Ha)	Pertanian Lahan Kering (Ha)	Pertanian Lahan Kering Campur (Ha)	Sawah (Ha)	Blukar (Ha)	Hutan Tanaman (Ha)							
Batu Puith	10.083,71	5.661,04	1.346,96	5,45	33,27	13,95	2.772,64	89,30	163,10			3.100,62	270,41	54.534.217.394,73	17.517	28.027.200	54.506.190.194,73	surplus
Gunung Agung	21.188,62	9.720,04	2.293,62		0,00	896,56	8.276,19			2,21		5.943,67	1.089,20	461.571.549.533,24	34.513	55.220.800	461.516.328.733,24	surplus
Gunung Terang	7.216,481	4.326,69	871,41		27,56	1.048,83	32,79	69,80	839,41			2.302,08	143,68	20.737.248.028,43	19.992	31.987.200	20.705.260.828,43	surplus
Lambu Kibang	9.093,063	6.625,17	1.281,54	3,76			392,05	178,92	0,80			2.881,79	226,63	41.215.559.996,06	24.208	38.732.800	41.176.827.196,06	surplus
Pagar Dewa	13.318,39	3.761,54	456,25	117,64	253,60	4.954,62	3.206,17	389,47	889,98			3.385,67	389,98	103.878.932.194,30	7.004	11.206.400	103.867.725.794,30	surplus
Tulang Bawang Tengah	24.746,86	4.834,23	2.891,90	68,56	103,83	3.369,82	6.714,11	5.977,39	792,10			7.097,26	1.519,01	751.812.675.901,48	88.791	142.065.600	751.670.610.301,48	surplus
Tulang Bawang Udik	21.369,66	572,17	1.392,07	15,68	186,71	968,07	14.021,90	3.791,88	422,19			5.065,62	936,22	400.134.997.606,38	33.977	54.363.200	400.080.634.406,38	surplus
Tumijajar	11.322,42		1.788,89			176,22	4.770,36	1.177,87	3.409,09			3.339,80	327,05	74.059.108.170,68	45.565	72.904.000	73.986.204.170,68	surplus
Way Kenanga	7.369,376	5.352,16	1.973,96				12,39	22,05			8,82	2.800,45	178,49	26.306.855.004,98	23.914	38.262.400	26.268.592.604,98	surplus

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029

Terlihat pada data diatas bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki daya dukung air pada kondisi Surplus, sehingga sangat cocok untuk mendukung pembangunan daerah. Pada kondisi surplus, air tersedia dalam jumlah yang cukup atau bahkan berlebih untuk mendukung berbagai kebutuhan, seperti air minum, pertanian, industri, serta kebutuhan lingkungan. Berikut adalah beberapa bentuk dukungan yang diberikan oleh air dalam kondisi surplus:

1. Pertanian: Surplus air memungkinkan kegiatan irigasi yang optimal, meningkatkan hasil panen dan mendukung berbagai jenis tanaman. Hal ini juga mengurangi risiko kekeringan dan kerusakan tanaman.
2. Ekosistem dan Lingkungan: Kondisi surplus air berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk mempertahankan keberadaan lahan basah dan habitat alami lainnya yang bergantung pada pasokan air berkelanjutan.
3. Kehidupan Masyarakat: Dengan pasokan air yang melimpah, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti air minum, kebersihan, dan sanitasi.

Surplus air juga mendukung pertumbuhan ekonomi karena sektor-sektor seperti pariwisata air dan rekreasi dapat berkembang.

Secara keseluruhan daya dukung air di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencukupi hingga 5 tahun kedepan serta mencukupi untuk mendukung lahan pertanian sawah. Supply menunjukkan jumlah ketersediaan air di wilayah tersebut yaitu berupa jumlah ketersediaan air dari volume curah hujan rerata kawasan, sedangkan demand menunjukkan jumlah kebutuhan air berdasarkan faktor penentu kebutuhan air di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rustiadi, et al (2010) menyatakan untuk Rasio Supply terbagi demand > ara 1 – 2 termasuk dalam kategori aman bersyarat, dan untuk rasio < 1 termasuk dalam kategori tidak aman (daya dukung lingkungan telah terlampaui). Berikut merupakan peta daya dukung air Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Gambar 2.11.
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tulang Bawang Barat

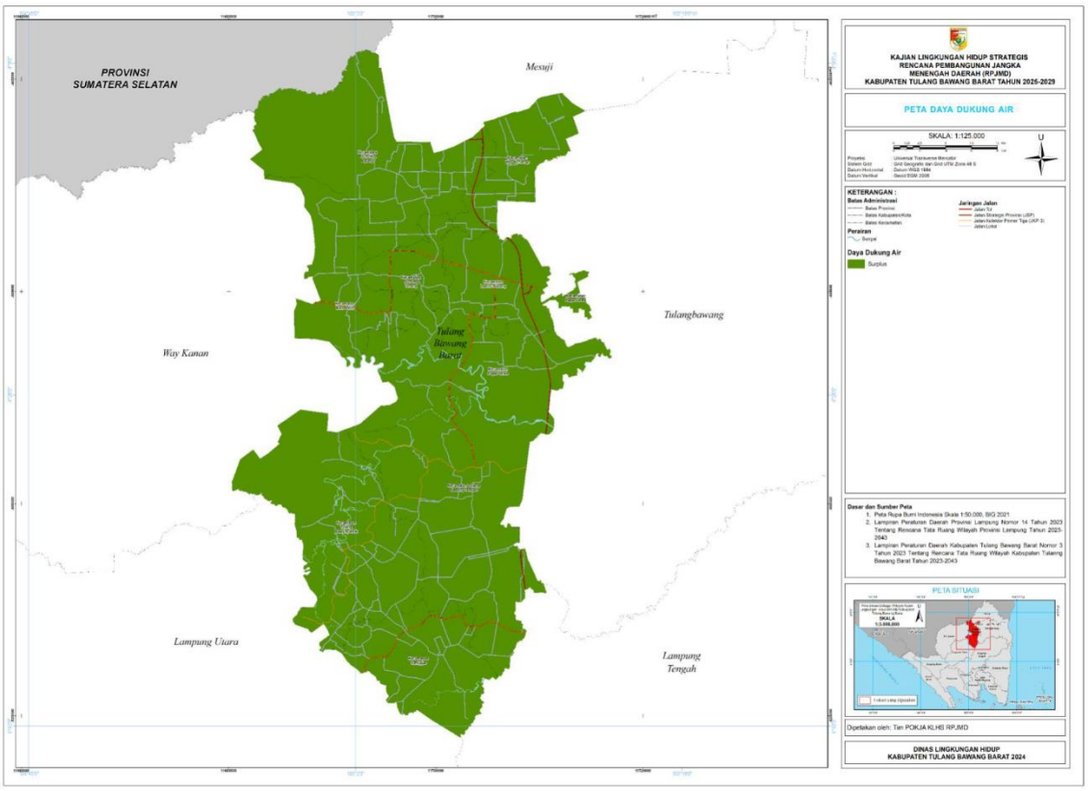

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 -2026

4) Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya Dukung Fungsi Lindung di Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan data penggunaan lahan dari pengolahan citra serta BPS Kecamatan yang kemudian diolah menggunakan rumus untuk memperoleh hasil daya dukung fungsi lindung di wilayah tersebut. Nilai daya dukung fungsi lindung didapatkan dari perhitungan antara luas penggunaan lahan dan koefisien lindungnya.

Tabel 2.11
Koefisien Kawasan Lindung

No	Kawasan	Koefisien Lindung
1	Cagar Alam	1,00
2	Suaka Margasatwa	1,00
3	Taman Wisata	1,00
4	Taman Buru	0,82
5	Hutan Lindung	1,00
6	Hutan Cadangan	0,61
7	Hutan Produksi	0,68
8	Perkebunan besar	0,54
9	Perkebunan Rakyat	0,42
10	Persawahan	0,46
11	Ladang/Tegalan	0,21
12	Padang Rumput	0,28
13	Danau/Tambak	0,98

No	Kawasan	Koefisien Lindung
14	Tanaman Kayu	0,37
15	Permukiman Kota	0,18
16	Tanah Kosong	0,01

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Tabel 2.12
Klasifikasi Daya Dukung FungsI Lindung

Kreteria	Kelas	Jangkauan Nilai
A	Tinngi	>0,667
B	Sedang	0,333 – 0,667
C	Rendah	<0,333

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Untuk wilayah perkecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terkategorikan dalam daya dukung lindung sedang, dan secara keseluruhan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini didominasi oleh daya dukung lindung kategori sedang, dengan rata-rata koefisien lahan sebesar 6702,20 dan rata-rata nilai daya dukung lindung 0,496. Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.13 dan gambar 2.12

Tabel 2.13.
Daya Dukung Fungsi Lindung
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Koefisien Lahan	Nilai daya Dukung Fungsi Lindung	Kategori
1	Batu Putih	10,083.71	5,400.75	0.536	Sedang
2	Gunung Agung	21,188.62	10,875.50	0.513	Sedang
3	Gunung Terang	7,216.48	3,962.71	0.549	Sedang
4	Lambu Kibang	8,482.24	4,976.73	0.587	Sedang
5	Pagar Dewa	13,929.28	6,862.18	0.493	Sedang
6	Tulang Bawang Tengah	24,746.94	11,003.43	0.445	Sedang
7	Tulang Bawang Udik	21,369.69	8,894.35	0.416	Sedang
8	Way Kenanga	7,369.38	4,018.06	0.545	Sedang
9	Tumijajar	11,322.43	4,326.09	0.382	Sedang
Rata- Rata		**-**	**6,702.20**	**0.496**	**Sedang**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Gambar 2.12.
Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat

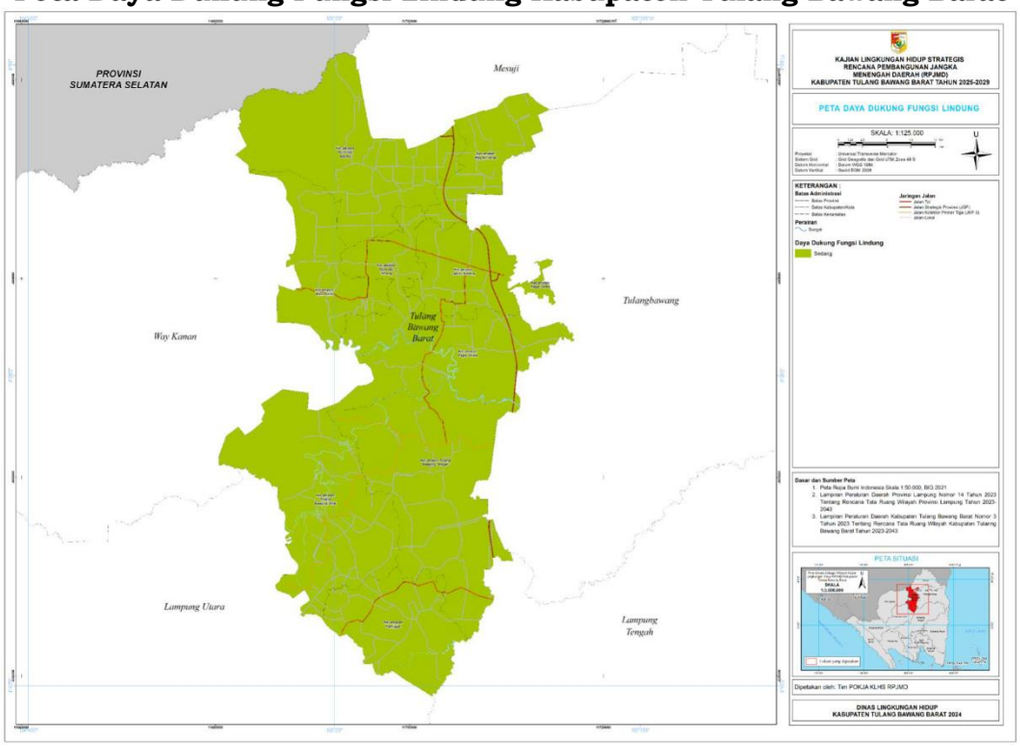

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2029

5) Daya Tampung Lahan

Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila SL> DL daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan. Berdasarkan kebutuhan lahan dan ketersediaan lahan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dapat dihitung Daya Tampung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Analisis Daya Dukung Permukiman Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kecamatan	Perkiraan Jumlah Penduduk Tahun (2029)	LWP	LpmX60%	DPPM 2029	Nilai DDPm	Daya Tampung Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat (Jiwa)
1	Batu Putih	37.763	10.083,71	6.050,23	12,05	DDPm>1	454.904
2	Gunung Agung	48.090	21.188,62	12.713,17	19,88	DDPm>1	955.878
3	Gunung Terang	92.983	7.216,48	4.329,89	3,5	DDPm>1	325.555
4	Lambu Kibang	7.969	8.482,24	5.089,34	48,02	DDPm>1	382.657

No	Kecamatan	Perkiraan Jumlah Penduduk Tahun (2029)	LWP	LpmX60%	DPPM 2029	Nilai DDPm	Daya Tampung Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat (Jiwa)
5	Pagar Dewa	27.601	13.929,28	8.357,57	22,77	DDPm>1	628.389
6	Tulang Bawang Tengah	22.134	24.746,94	14.848,16	50,44	DDPm>1	1.116.403
7	Tulang Bawang Udik	18.981	21.369,69	12.821,81	50,79	DDPm>1	964.046
8	Tumijajar	41.840	11.322,43	6.793,46	12,21	DDPm>1	510.786
9	Way Kenanga	32.517	7.369,38	4.421,63	10,22	DDPm>1	332.453
	Tulang Bawang Barat	**329.878**	**125.708,77**	**75.425,26**	**17,19**	**DDPm>1**	**5.671.072**

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan analisis DDPm yang dilakukan terhadap jumlah penduduk tahun 2029 dengan menggunakan rumus perhitungan DDPm, maka didapatkan nilai DDPm >1 untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang artinya masih mampu menerima tambahan penduduk sehingga pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Hal ini menandakan bahwa daya tampung lahan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih memenuhi standar hingga tahun 2029. Berikut merupakan peta daya dukung perukiman Kabupaten Tulang Bawang Barat.Berdasarkan analisis DDPm yang dilakukan pada tahun 2022, setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, masih mampu mendukung kebutuhan pokok manusia dan menerima tambahan penduduk. Peta daya tampung lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2.13

Gambar 2.13.
Peta Daya Tampung Lahan Kab. Tulang Bawang Barat

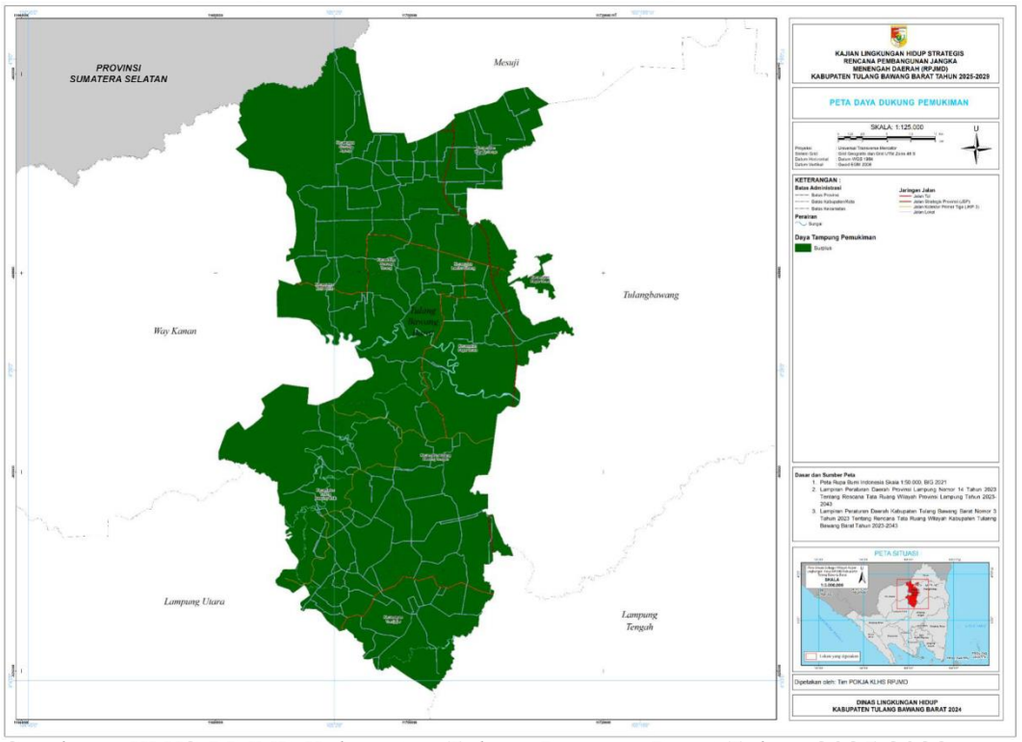

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari tiga komponen penilaian yaitu Indeks Ketersediaan (IK), Indeks Keterjangkauan (IA) dan Indeks Pemanfaatan (IP). Capaian IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 sebesar 83,59. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023, dan jika dilihat perkembangan IKP selama periode tahun 2020-2024 angka IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung ada nya peningkatan. IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 – 2024 tersaji pada tabel 2.15 sebagai berikut.

Tabel 2.15.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan (IK)	98,17	98,84	99	99,69	Belum Rilis
Indeks Keterjangkauan (IA)	87,28	86,39	87,89	89,66	Belum Rilis
Indeks Pemanfaatan (IP)	54,87	57,53	59,43	66,97	Belum Rilis
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	77,58	78,58	7 9,84	83,59	83,74

Sumber : Badan Ketahan Pangan Kementrian Pertanian Tahun 2020-2025

2) Kinerja Urusan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merujuk pada kondisi di mana kebutuhan pangan negara hingga individu terpenuhi dengan baik. Hal ini mencakup penyediaan pangan yang cukup dalam hal jumlah dan kualitas, serta memastikan bahwa pangan tersebut aman, bervariasi, bergizi, merata, terjangkau, dan sesuai dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 mengatur tentang penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah. Ketahanan pangan di suatu daerah terdiri dari empat komponen utama yang harus diperhatikan.

1) Kecukupan ketersediaan pangan;
2) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun;
3) Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan
4) Kualitas/keamanan pangan.

Pencapaian kinerja urusan pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.16 dibawah ini.

Tabel 2.16.
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/kap	130	125	115	65,43	70,45
2	Ketersediaan Energi Per Kapita	Kkal/kap/hari	7244	8656	1854,8	9485	8785
3	Ketersediaan Protein Per Kapita	gram/kap/hari	67,34	91,33	84,2	111,44	115
4	Skor PPH	-	86,2	80,1	81,7	83	83,5
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	80	87	87,05	87,25
6	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	80	8	82	82,12	82,40

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025

3) Rumah tangga yang menggunakan listrik

Rumah Tangga yang menggunakan Listrik merupakan indikator penting untuk menilai tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap energi listrik, yang menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan modern. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, akses listrik terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan upaya pemerintah dalam memperluas jaringan listrik ke seluruh wilayah.

Berdasarkan data *Lampung Dalam Angka 2025*, sebanyak 100% rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terhubung dengan jaringan listrik PLN. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan upaya elektrifikasi di daerah tersebut, di mana hampir seluruh masyarakat telah mendapatkan akses terhadap energi listrik yang stabil. Peningkatan akses listrik ini sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas rumah tangga, pendidikan, usaha mikro, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun capaian sudah sangat tinggi, perhatian tetap perlu diberikan untuk memastikan pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil, serta mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Rumah Tangga

Indikator Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Rumah Tangga digunakan untuk menilai persentase warga yang memiliki akses terhadap kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Indikator ini mencerminkan ketersediaan layanan air minum yang aman, layak, dan memenuhi standar kesehatan. Air minum yang layak harus bebas dari kontaminasi fisik, kimia, dan mikrobiologi, serta tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar harian setiap individu.

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentasenya tercatat sebesar 35,12%, kemudian naik menjadi 63,16% pada tahun 2024, secara seris data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak disajikan dalam gambar 2.14 dibwah ini.

Gambar 2.14
Grafik Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum layak Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020 - 2024

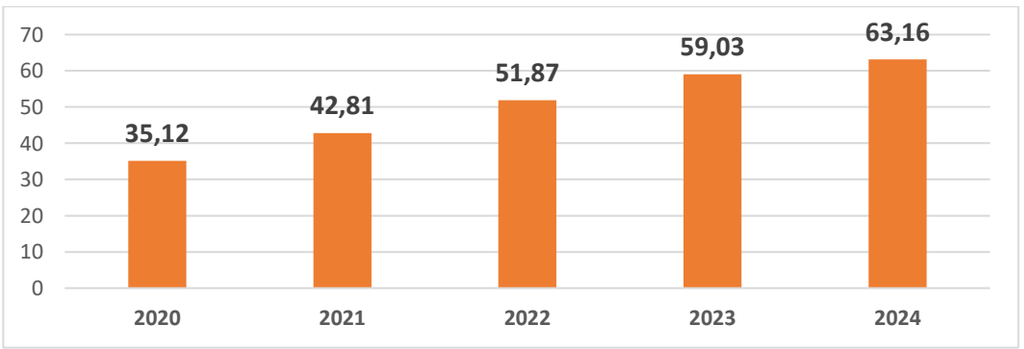

Sumber : Lampung Dalam Angka 2025

Tren positif ini menunjukkan adanya peningkatan aksesibilitas terhadap layanan air minum yang lebih baik, baik melalui pembangunan infrastruktur distribusi air bersih, peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum, maupun upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang sehat. Pemerintah daerah diharapkan terus mengupayakan pemerataan akses ini, sehingga cakupan layanan air minum dapat menjangkau seluruh masyarakat, khususnya di daerah pedesaan

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup berbagai aspek penting seperti pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, perlindungan sumber daya alam, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam hal pengelolaan sampah, aktivitas yang dilakukan meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan daur ulang. Indikator utama untuk menilai kinerja dalam penanganan sampah di daerah ini adalah melalui sistem pengelolaan persampahan yang diterapkan. Pengelolaan yang efektif akan tercermin dari kemajuan dalam proses-proses ini dan dampaknya terhadap lingkungan. Untuk mendukung aktivitas, komunikasi, dan interaksi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyediakan ruang terbuka hijau dalam bentuk taman dan arena. Ruang terbuka hijau, secara teoritis, adalah kawasan yang sebagian besar ditumbuhi vegetasi dan dibangun untuk berbagai fungsi seperti perlindungan habitat, sarana lingkungan, pengamanan prasarana, atau budidaya pertanian. Kehadiran area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan ruang yang menyegarkan bagi masyarakat.

Dalam upaya melindungi dan melestarikan sumber daya alam, Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak hanya fokus pada peningkatan kawasan hijau, tetapi juga pada pengembangan area serapan air. Area serapan ini dibangun terutama di wilayah yang padat untuk membantu penyerapan air hujan dan mengurangi risiko banjir. Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara berkelanjutan membangun sumur resapan sebagai bagian dari strategi perlindungan lingkungan.

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Provinsi Lampung Tahun 2018 menyatakan bahwa, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tulang Bawang Barat tergolong yang baik dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain di Provinsi Lampung dengan angka indeks sebesar 87,85 dan penghitungan IKU berdasar jumlah nitrogen dioksida (NO_2) dan sulfur dioksida (SO_2). Parameter NO_2 sendiri dipengaruhi oleh pertambahan kendaraan bermotor, sedangkan parameter SO_2 dominan berasal dari industri. Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021 - 2024 ditunjukkan pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2021 – 2024

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2021	60,00	85,18	23,61	62,23
2022	52,22	88,49	23,61	60,64
2023	50,00	88,15	26,51	60,31
2024	64,29	91,95	25,03	66,89

Sumber: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025

Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 yaitu 60,31 dengan Rating Sedang. Capaian tersebut menurun dari sebelumnya yaitu tahun 2022 dengan capaian 60,64 akan tetapi ditahun 2024 mengalami peningkatan kembali memjadi 66,89, sebagai mana disajikan pada gambar grafik 2.15 dibawah ini.

Gambar 2.15
Grafik Perkembangan Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2021-2024

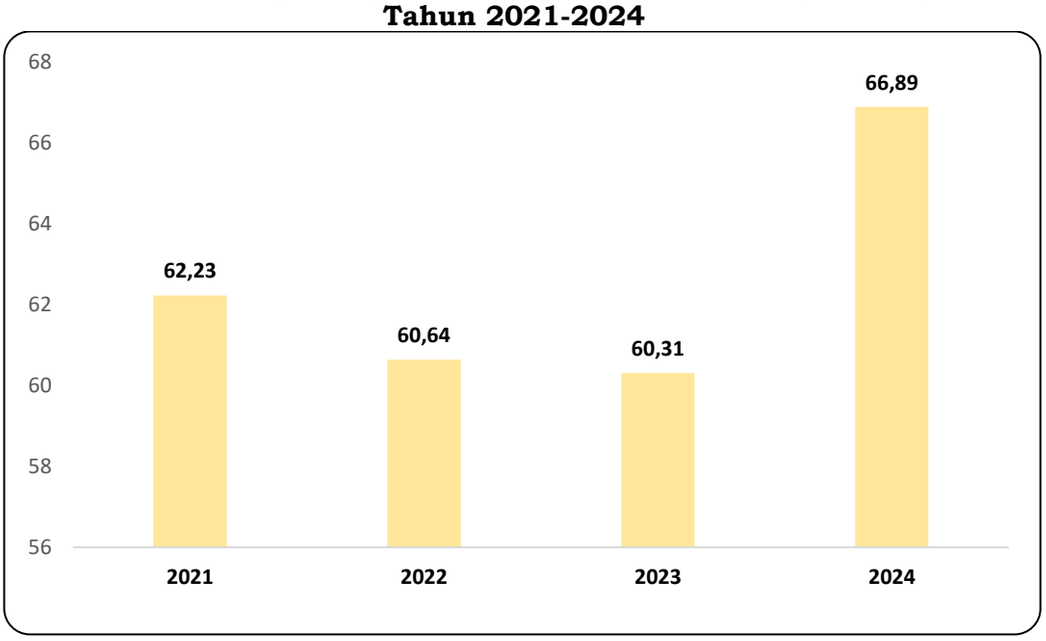

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKU Tulang Bawang Barat di tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya mencapai 91,95. Nilai IKU Kabupaten Tulang Barat berada pada peringkat 7 (tujuh) dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan 261 pada Tingkat Nasional. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh masih ada cukup banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi untuk mengurangi kadar karbondioksida di udara. Selain itu, industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang didominasi oleh pabrik tapioka, jumlahnya tidak terlalu banyak.

2) Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Standar ideal luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari luas kawasan bersangkutan, yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Sejalan dengan adanya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022, RTH Privat dapat dijadikan RTH Publik. Selain itu dalam peraturan tersebut terdapat kebijakan penggabungan RTH, Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dan Ruang Terbuka Biru (RTB) menjadi satu nama yaitu RTH. Hal tersebut dikarenakan selama ini pemisahan antara RTH dan RTNH menjadi kendala tersendiri untuk seluruh daerah dalam pencapaian 30% ketersediaan RTH.

RTH berkualitas menjamin ketersediaan ruang terbuka yang tidak hanya berkontribusi secara ekologis, namun juga menjamin kebermanfaatan ruang untuk aktivitas sosial masyarakat yang sehat, aman, nyaman, interaktif, edukatif, rekreatif, dan partisipatif. Melalui pendekatan baru ini, maka seluruh ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis dan sosial dapat diperhitungkan menjadi bagian dari RTH.

Berikut adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan tipologi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022.

Tabel 2.18.
Persentase RTH Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Deskripsi	Nilai	Satuan
1.	Luas RTH Publik	35.236,91	Ha (Hektar)
		28,03	% (Persen)
2.	Luas RTH Privat	69.520,10	Ha (Hektar)
		55,30	% (Persen)

Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043

Dari tabel 2.16 menunjukkan bahwa fenomena jumlah RTH Publik lebih kecil dibandingkan RTH Privat. Diketahui hal tersebut dikarenakan terdapat tipologi Perkebunan Rakyat yang sangat luas yang dalam pendataan tersebut tidak dapat diklaim sebagai RTH publik dikarenakan status kepemilikan dan tidak adanya persetujuan.

3) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat dan tingkat kesejahteraan. Indikator ini mengacu pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, seperti toilet yang layak dan tidak mencemari lingkungan, serta sistem pengelolaan limbah domestik yang aman. Sanitasi aman juga mencakup aspek kebersihan, keberlanjutan, dan aksesibilitas fasilitas tersebut oleh seluruh anggota rumah tangga. Indikator ini penting karena sanitasi yang aman berkontribusi langsung terhadap penurunan risiko penyakit menular seperti diare, kolera,

dan penyakit berbasis lingkungan lainnya. Selain itu, keberadaan sanitasi yang memadai juga berkaitan dengan upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2019 hingga 2023. Berdasarkan data, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2019 dan 2020 tercatat sebesar 75,21%, angka ini kemudian meningkat menjadi 80,85% pada tahun 2024 secara rinci data tersajikan pada gambar 2.16 dibawah ini.

Gambar 2.16
Grafik Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2024

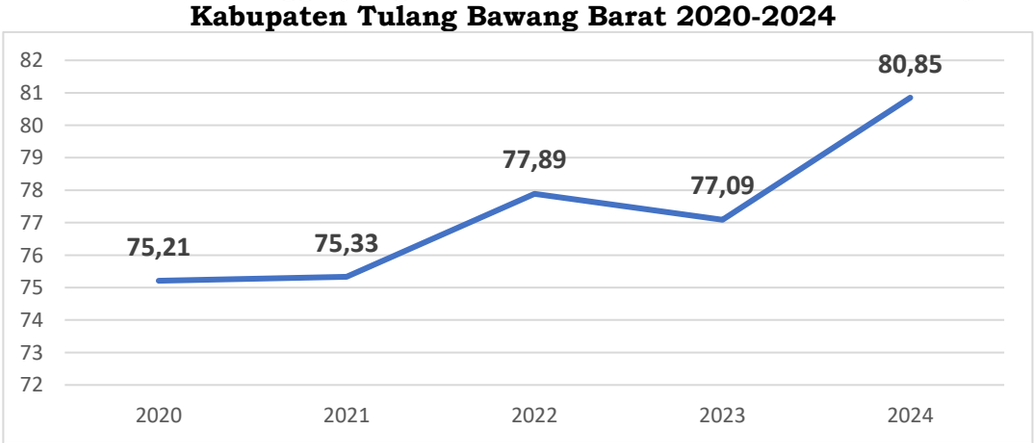

Sumber : Lampung Dalam Angka 2025

Kenaikan persentase ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses sanitasi aman bagi masyarakat. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh program-program seperti pembangunan infrastruktur sanitasi, edukasi kesehatan lingkungan, serta dorongan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Meskipun ada kemajuan, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mencapai cakupan sanitasi aman yang lebih luas dan merata.

4) Kinerja pengelolaan persampahan

Kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam periode 2020 hingga 2024 dapat dipantau melalui data yang disajikan dalam tabel dibawah. Data tersebut menggambarkan progres dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah dari tahun ke tahun. Memahami data ini akan membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan melindungi lingkungan di masa depan.

Tabel 2.19.
Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengurangan Timbunan Sampah (%)	11,73	15,44	17,44	19,17	18,79
2	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah(%)	21,79	28,70	31,44	31,08	30,46
3	Sampah yang dikelola	33,52	44,14	48,88	50,25	49,25

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2025

Berdasarkan data kinerja pengelolaan persampahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tertera diatas dimana pada tahun 2024 persentase jumlah pengurangan timbunan sampah 18,79% dan Jumlah Penanganan Timbunan Sampah 30,46%, hal ini sebagai akibat dari masih terbatasnya sarana dan prasana untuk pelayanan persampahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Dalam rangka mengelola sampah dengan lebih baik, konsep yang diterapkan adalah pengelolaan sampah secara terpadu. Konsep ini mencakup beberapa aspek penting seperti proyeksi kebutuhan prasarana persampahan, penggunaan sanitary landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan program zero waste atau 3R. Rincian dari konsep-konsep ini dapat ditemukan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat. Proyeksi dan rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas penanganan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) harus dilakukan dengan standar yang layak, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi untuk menampung sampah tetapi juga harus dirancang untuk meminimalisasi potensi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah. Pengelolaan yang baik di TPSA sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan lingkungan.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki satu TPSA yang terletak di Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Pada tahun 2024, total timbunan sampah di daerah tersebut mencapai 41.485 ton per tahun. Namun, hanya 12.457 ton per tahun atau sekitar 30,00% dari total timbunan sampah yang berhasil ditangani dan diangkut ke TPSA. Hal ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah dan perlunya perbaikan dalam sistem pengumpulan dan pemrosesan sampah.

6) Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang memanjang berbentuk jalur atau area mengelompok yang lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Luas RTH hanya dihitung dari RTH perkotaan karena pernah dilakukan studi mengenai RTH di kawasan perkotaan. Penyediaan RTH di Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk mendorong implementasi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil survei penataan ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dilakukan di wilayah yang direncanakan menjadi pusat perkotaan Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, dan Kecamatan Lambu Kibang, didapati persentase kebutuhan akan ketersediaan ruang terbuka hijau. Informasi lebih rinci mengenai kebutuhan RTH di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Perkotaan	Luas RTH (Ha)	Kebutuhan RTH (Ha)
1	Kawasan Perkotaan 1 (KP1)	2.500	8.248
2	Kawasan Perkotaan 2 (KP2)	9.023	15.539
3	Kawasan Perkotaan 3 (KP3)	2.991	4.682
4	Kawasan Perkotaan 4 (KP4)	8.969	19.370

Sumber : Buku Data RTH Tulang Bawang Barat, 2018

F. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. Dengan kata lain, IKD ini memberikan gambaran sejauh mana suatu daerah sudah siap menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah teresebut, hal ini penting dikarenajan IKD merupakan :

1) Tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana.
2) Dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada pengurangan risiko bencana.
3) Alat bantu dalam menentukan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan bencana.
4) Dasar untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan daerah dalam menghadapi bencana, upaya peningkatan kesiapsiagaan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Kaspasitas suatu daerah dalam penyelenggaraan penanggualangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan daerah dalam pengurangan resiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta aturan turunannya, untuk pengukuran kapasita daerah yaitu dikihat dari 7 Fokus dan 71 indikator capaian, yang mana dari ketercapaian 71 indikator tersebut merupakan perolehan nilai ketahanan daerah (IKD). Adapun untuk IKD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 – 2024 digambarkan dalam bentuk matrik tabel 2.21 dibawah ini.

Tabel 2.21
Angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun					
		2022		2023		2024	
		Angka	Kelas	Angka	Kelas	Angka	Kelas
1	Angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,32	Rendah	0,32	Rendah	0,41	Sedang

Sumber : BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025

Berdasarkan data IKD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tabel diatas yang termasuk dalam katagori (kelas) rendah maka untuk urusan terkait kebencanaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat belum siap dalam mengahadapi bencana dan dengan keadaan katagori rendah tersebut jika terjadi bencana maka akan terjadi :

- **Kerugian yang lebih besar:** Ketika bencana terjadi, daerah dengan IKD rendah cenderung mengalami kerugian yang lebih besar baik dalam hal korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun dampak ekonomi;
- **Pemulihan yang lebih lambat:** Proses pemulihan setelah bencana akan memakan waktu yang lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keadaan IKD dalam katagori rendah, adapun faktor – faktor tersebut sebagai berikut :

a. *Tingkat kerentanan yang tinggi*
   Daerah tersebut mungkin memiliki kondisi geografis yang rawan bencana (misalnya, daerah rawan banjir, gempa bumi, atau longsor), atau memiliki populasi yang rentan (misalnya, masyarakat miskin, lansia, atau anak-anak);
b. *Kapasitas pemerintah dan masyarakat yang rendah*
   Pemerintah daerah dan masyarakat mungkin kurang memiliki sumber daya, pengetahuan, atau keterampilan untuk menghadapi bencana.
c. *Adanya koordinasi dan Kerjasama yang kurang*
   Koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana mungkin kurang efektif.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan daerah untuk meningkatkan IKD sehinga tidak dalam katagori rendah, adapun upaya – upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Peningkatan kesadaran masyarakat:* Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan pentingnya kesiapsiagaan;
2) *Penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat:* Melalui pelatihan, simulasi, dan penyediaan peralatan yang dibutuhkan;
3) *Pengembangan sistem peringatan dini:* Membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat;
4) *Peningkatan koordinasi dan kerjasama:* Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana;
5) *Peningkatan infrastruktur:* Membangun infrastruktur yang tahan bencana, seperti bangunan tahan gempa, sistem drainase yang baik, dan jalur evakuasi.

b) Indeks Risiko Bencana

Penilaian kapasitas stakeholder penanggulangan bencana dicerminkan melalui Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Provinsi Lampung merupakan wilayah yang memiliki potensi kebencanaan yang sedang (142,55) dan tidak terkecuali di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 termasuk wilayah dengan potensi kebencanaan sedang (120,28). Komponen bahaya yang ditimbulkan merupakan fenomena alam yang dapat disebabkan seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan kejadian alam lain. Sedangkan komponen kerentanan dapat berupa kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengu rangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Data indeks resiko bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018-2024 ditunjukkan pada Tabel 2.22

Tabel 2.22.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2018-2024

No	Tahun	Skor	Kelas Resiko
1	2018	120,40	Sedang
2	2019	120,40	Sedang
3	2020	120,40	Sedang
4	2021	120,40	Sedang
5	2022	120,34	Sedang
6	2023	120,28	Sedang
7	2024	120,28	Sedang

Sumber: BNPB Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Peta daerah rawan bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.17.

Gambar 2.17.
Peta Rewan Bancana Kabupaten Tulang Bawang Barat

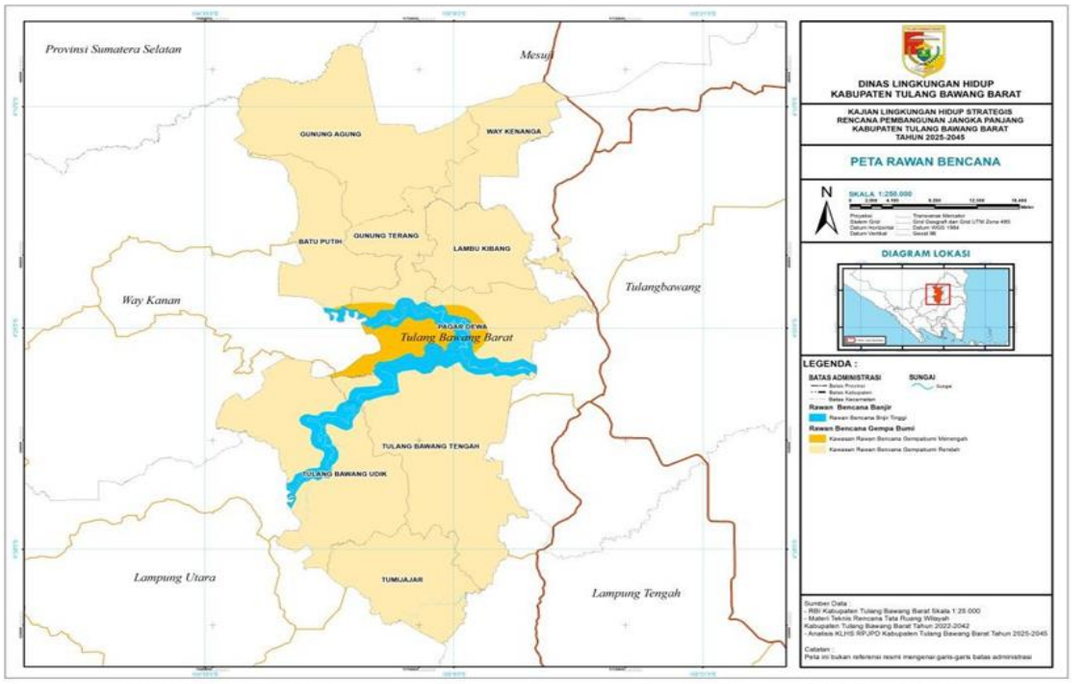

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki beberapa potensi bencana alam diantaranya banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah yaitu khususnya wilayah yang ada pada bagian sempadan sungai yang melingkupi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Lambu Kibang, dan Kecamatan Pagar Dewa, sedangkan kecamatan lainnya termasuk dalam katagori aman dari bencana alam.

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat tabel nilai indeks risiko tersebut diketahui bahwasanya cenderung konstan (sedang) mulai dari Tahun 2018 – 2024. Adapun nilai indeks risiko bencana untuk setiap jenis bencana yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.23 sebagai berikut.

Tabel 2.23.
Nilai Indeks Risiko Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Bencana

No	Jenis Bencana	Skor	Kelas
1	Banjir	28,37	Tinggi
2	Gempa Bumi	8,51	Sedang
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	18,91	Tinggi
4	Tanah Longsor	9,46	Sedang
5	Kekeringan	18,91	Tinggi
6	Cuaca Ekstrim	10,72	Sedang

Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2024

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kebencanaan adalah sebagai berikut:

1) Banjir

Banjir adalah salah satu bencana alam yaitu peristiwa ketika tergenangnya daratan oleh aliran air yang berlebih. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah penggundulan hutan didaerah resapan air yang mengakibatkan menurunnya kemampuan daerah resapan air untuk menampung debit air sehingga terjadi banjir. Secara keseluruhan kecamatan yang paling berpotensi terjadinya banjir adalah Kecamatan Pagar Dewa sedangkan untuk Kacamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Lambu Kibang dan Kecamatan Tulang Bawang Udik tingkat potensi terjadinya bencana banjir lebih rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan Pagar Dewa.

Total luas lahan rawan banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 8.916,49 Ha dan kawasan paling luas untuk rawan banjir ada di Kacamatan Pagar Dewa yaitu dengan luas 3.098,22 Ha. Peta daerah rawan banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18.
Peta Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat

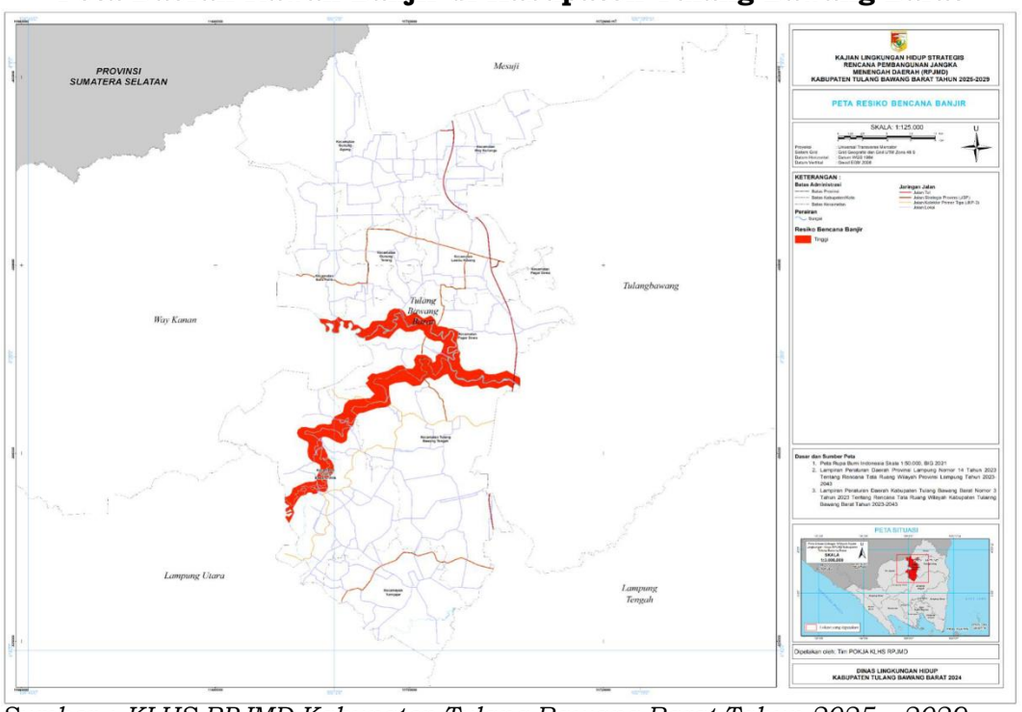

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

2) Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau getar – getar yang terjadi dipermukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rawan gema tergolong daerah rawan bencana gempa rendah dimana hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah aman dari bencana gempa. Untuk tingkat rawan bencana gempa menengah terdapat pada daerah sempadan sungai yaitu di

Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Gunung Terang, selanjutnya kawasan rawan gempa lainya di Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh kelas rendah dengan luasan daerah 121.305 Ha.

3) Gerakan Tanah

Gerakan tanah adalah suatu konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia. Gerakan tanah akan terjadi pada suatu lereng, jika ada keadaan ketidak seimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, mengakibatkan sebagian lereng tersebut bergerak mengikuti gaya gravitasi dan selanjutnya terjadi longsor. Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam katagori zona kerentanan gerakan tanah rendah dengan luas 111.994,53 Ha, dari total luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peta Risiko Gerakan Tanah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.19.

Gambar 2.19.
Peta Resiko Gerakan Tanah di Kabupaten Tulang Bawang Barat

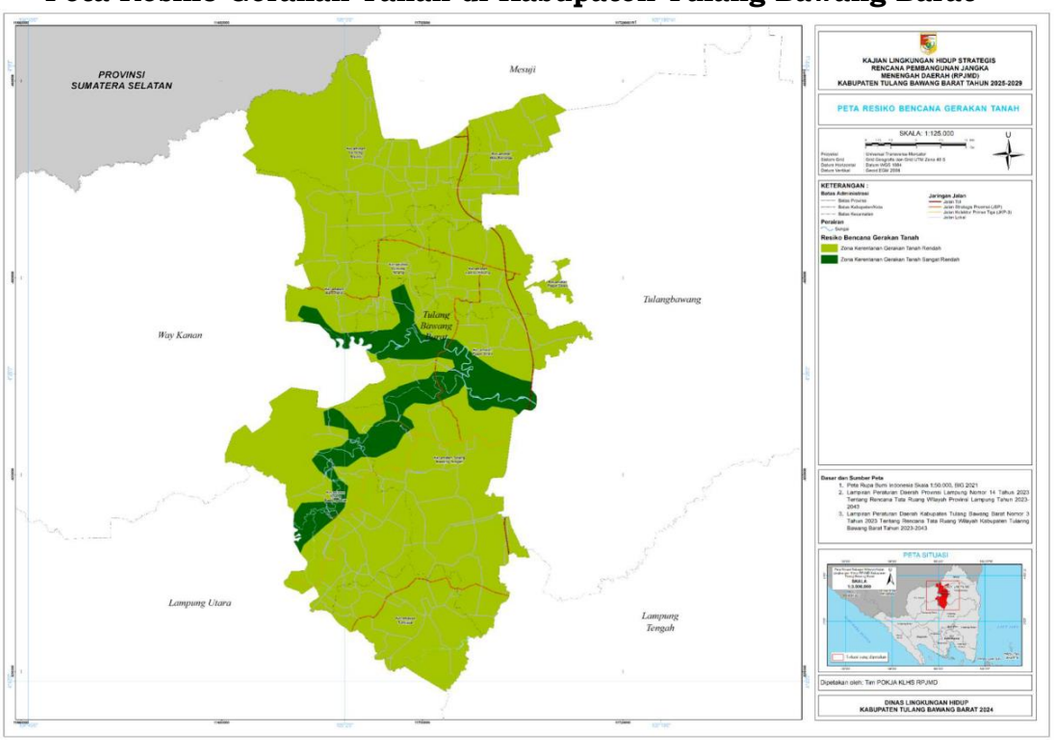

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Gambar 2.20.
Peta Segmentasi dan Magnitudo Maximum Subduksi Indonesia

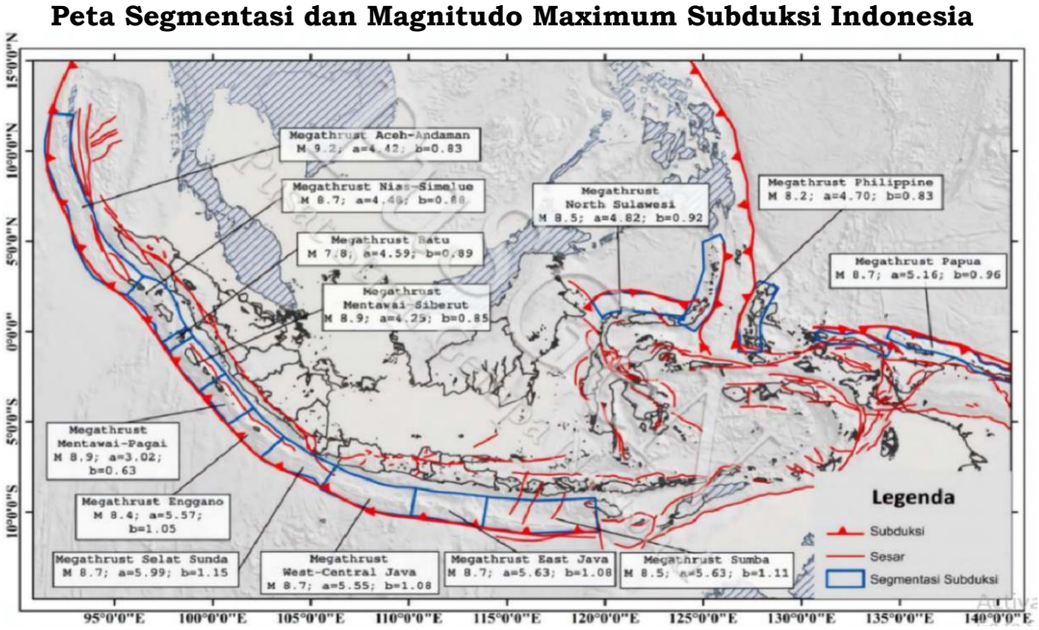

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Megathrust dapat memicu ribuan gempa bumi yang berepisentrum di sekitar zona penunjaman lempeng. Selain deformasi pada batas lempeng, pergerakan tektonik lempeng bumi menyebabkan pembentukan banyak patahan-patahan aktif baik di wilayah daratan maupun di dasar laut. Batas lempeng dan patahan-patahan aktif menjadi sumber timbulnya gempa bumi tektonik (BNPB, 2012). Pertemuan lempeng tektonik juga membentuk pegunungan api aktif dan mengakibatkan Indonesia menjadi negara “Ring of Fire”. Hal ini menyebabkan Indonesia berpotensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, erupsi gunungapi dan tsunami. Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai salah satu kabupaten yang berlokasi di Provinsi Lampung, sehingga termasuk dalam kategori zona kerentanan gerakan tanah rendah dengan luas 111.994,53 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berikut merupakan peta risiko bencana gempa bumi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Gambar 2.21.
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kab. Tulang BawangBarat

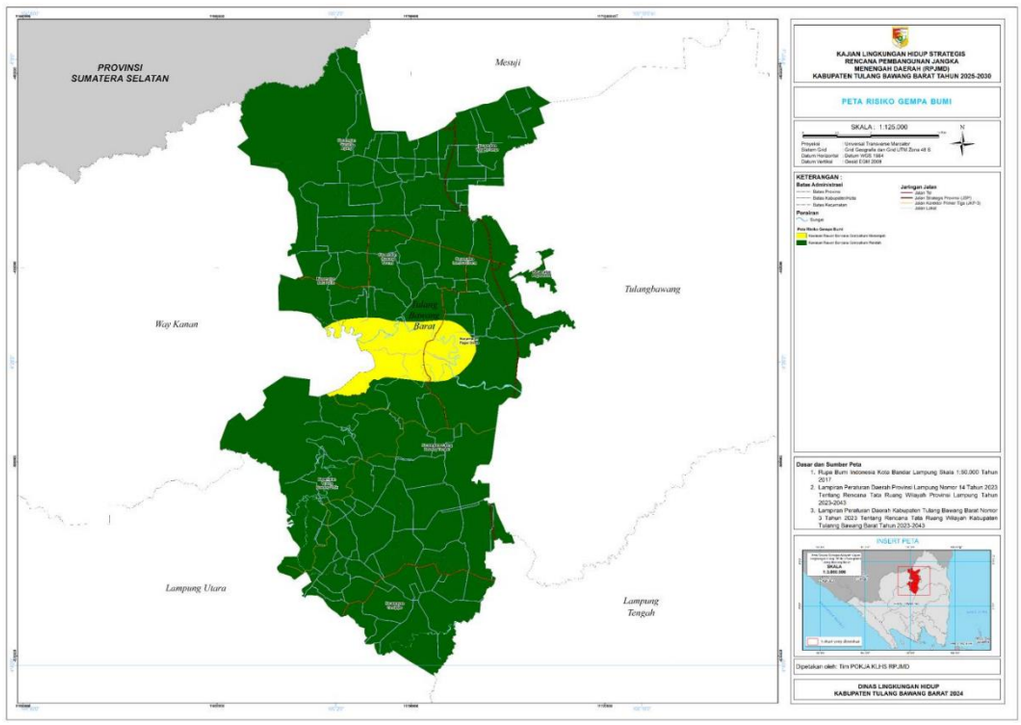

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

4) Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai kerentanan lingkungan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan didominasi kelas rendah yang disebabkan oleh rendahnya luasan rawa, tidak adanya hutan lindung dan hutan mangrove, serta rendahnya luasan semak belukar, sehingga jika terjadi bencana kebakaran akan mengalami kerugian yang rendah. Akan tetapi terdapat dua kecamatan yang berada dikelasa sedang untuk bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Gunung Agung hal ini disebabkan pada dua wilayah kecamatan tersebut terdapat luasan hutan alam dan semak belukar yang besar.

5) Adaptasi Kerentanan Perubahan Iklim

Perubahan iklim, disebabkan oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca, mengancam kehidupan dan pembangunan dengan menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan parah. Dampaknya termasuk kerusakan lingkungan, gangguan ekonomi, dan peningkatan bencana seperti banjir,keringan, dan badai. Hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan, membutuhkan tindakan cepat dan efektif dalam adaptasi dan mitigasi untuk melindungi masyarakat serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Data indeks kerentanan dari KLHK memberikan pandangan tentang tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, penting untuk pengambilan keputusan terkait mitigasi dan adaptasi.

Tabel 2.24.
Indeks Kerentanan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kecamatan	Kelurahan	Kerentanan	Klasifikasi
Batu Putih	Marga Mulyo	3	Sedang
	Marga Sari	3	Sedang
	Panca Marga	3	Sedang
	Sakti Jaya	3	Sedang
	Toto Katon	3	Sedang
	Toto Wonodadi	3	Sedang
Gunung Agung	Bangun Jaya	3	Sedang
	Jaya Murni	3	Sedang
	Marga Jaya	3	Sedang
	Mekar Jaya	3	Sedang
	Mulya Sari	3	Sedang
	Suka Jaya	3	Sedang
	Sumber Jaya	3	Sedang
	Tri Tunggal	3	Sedang
	Tunas Jaya	3	Sedang
	Wono Rejo	3	Sedang
	Gunung Agung	3	Sedang
	Gunung	3	Sedang
	Kagungan	3	Sedang
	Setia Bumi	3	Sedang
	Terang Mulya	3	Sedang
	Toto Mulyo	3	Sedang
Lambu Kibang	Gilang Tunggal	3	Sedang
	Gunung Sari	3	Sedang
	Kibang Budi	3	Sedang
	Kibang Tri	3	Sedang
	Kibang Yekti	3	Sedang
	Lesung Bakti	3	Sedang
	Mekar Sari	3	Sedang
	Pagar Jaya	3	Sedang
Pagar Dewa	Bujunga	3	Sedang
	Bujung Sari	3	Sedang
	Cahyou Rand	3	Sedang
	Pagar Dewa	3	Sedang
	Pagar Dewa	3	Sedang
Tulang Bawang	Bandar Dewa	3	Sedang
	Candra	3	Sedang
	Menggala Mas	3	Sedang
	Mulya Asri	3	Sedang
	Mulya Jaya	3	Sedang
	Mulya	3	Sedang
	Panaragan	3	Sedang
	Panaragan	3	Sedang
	Panaragan	3	Sedang
	Panaragan	3	Sedang
	Pulung	3	Sedang
	Tirta Kencana	3	Sedang
	Tunas Asri	3	Sedang
	Wonokerto	3	Sedang
	Penumangan	4	Tinggi

Kecamatan	Kelurahan	Kerentanan	Klasifikasi
	Penumangan	5	Sangat
Tulang Bawang Udik	Gedung Ratu	3	Sedang
	Gunung Katun	3	Sedang
	Gunung Katun	3	Sedang
	Kagungan	3	Sedang
	Karta	3	Sedang
	Karta Raharja	3	Sedang
	Karta Sari	3	Sedang
	Marga	3	Sedang
	Way Sido	3	Sedang
Tumi Jajar	Daya Asri	3	Sedang
	Daya Murni	3	Sedang
	Daya Sakti	3	Sedang
	Gunung	3	Sedang
	Gunung	3	Sedang
	Makarti	3	Sedang
	Margo Dadi	3	Sedang
	Margouly	3	Sedang
	Murni Jaya	3	Sedang
	Sumber Rejo	3	Sedang
Way Kenanga	Agung Jaya	3	Sedang
	Balam Jaya	3	Sedang
	Indraloka II 3	3	Sedang
	Mercu Buana	3	Sedang
	Pagar Buana	3	Sedang
	Balam Asri	3	Sedang
	Indraloka I	3	Sedang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2029

Kabupaten Tulang Bawang Barat secara dominan berada pada kategori tiga, menunjukkan klasifikasi sedang dalam hal kerentanan perubahan iklim. Hanya pada kecamatan Penumangan dan Penumangan Baru yang tergolong kategori tinggi dan sangat tingg. Dampak pemanasan global diperkirakan akanunculkan risiko baru, terutama dalam hal kenaikan suhu dan perubahan pola hujan yang dapat meningkatkan ancaman banjir dan kekeringan. Peta spasial kerentanan kabupaten memberikan gambaran visual kondisi kerentanan di Tulang Bawang Barat.

Gambar 2.22.
Peta Kerentanan Kabupaten Tulang Bawang Barat

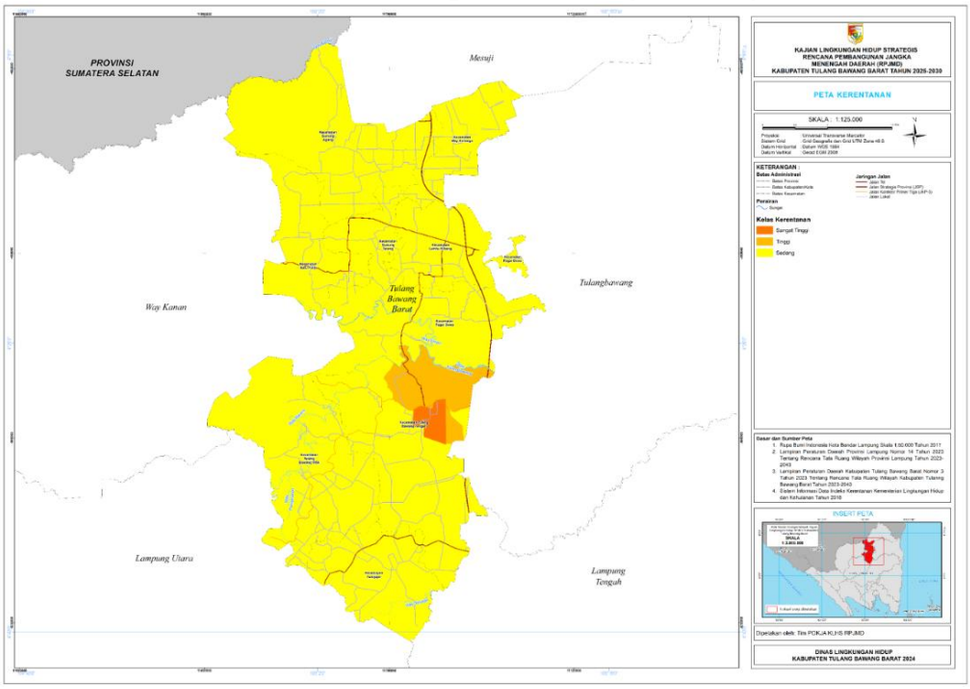

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

2.1.1.2. Aspek Demografi

Pembangunan dalam paradigma baru tidak hanya menekankan pada pembangunan fisik namun juga pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Disisi lain, SDM di Indonesia memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Karakter dan sifat SDM banyak dipengaruhi dengan letak geografis, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, suku, agama/kepercayaan, maupun faktor lingkungan lainnya. Kependudukan atau masyarakat merupakan subjek utama pembangunan karena merupakan subjek dan objek pembangunan. Besar kecilnya, komposisi, kualitas dan persebaran penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang pesat namun kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk, daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan berkorelasi dan berinteraksi dengan kondisi demografi saat ini, karena informasi demografi menempati posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Oleh karena itu, pembangunan SDM seharusnya lebih inovatif dan variatif mencakup seluruh aspek mengingat bangsa Indonesia sangat majemuk.

Provinsi Lampung dalam beberapa terkhusus demografis memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Provinsi Lampung dalam kaitan demografis merupakan miniatur Indonesia dimana berbagai macam suku budaya serta agama ada di Provinsi ini. Terkhusus Kabupaten Tulang Bawang Barat, masyarakat adat masih terdapat dibeberapa wilayah permukiman. Selain itu pertumbuhan penduduk alami (fertilitas), migrasi masuk lebih besar dibandingkan migrasi keluar (positif net migrasi), sehingga

mengakibatkan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berkembang dan hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat baik yang tinggal dan menetap di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maupun masyarakat yang tinggal di luar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam 5 tahun teakhir (2020 – 2024) mengalami peningkatan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2020-2024 yakni sebesar 1,173%. Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal tersebut menunjukkan potensi produktivitas tenaga kerja masih cukup besar. Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2024 masih menempati peringkat 4 terendah jumlah penduduk di Provinsi Lampung setelah Kota Metro, kabupaten Pesisir Barat, dan Mesuji. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)
		Laki-laki	Perempuan			
1.	2020	146.355	139.807	286.162	104,68	1,33
2.	2021	147.052	140.655	287.707	104,55	0,72
3.	2022	147.936	141.684	289.620	104,41	0,66
4.	2023	150.600	144.881	295.481	103,95	1,98
5.	2024	152.054	146.642	298.696	103,69	1,17

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.25 menunjukkan perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 – 2024 berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang Barat data ini sangat penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, sebab data yang dirilis dari BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat dasar dalam perhitungan data – data yang digunkan dalam perencanaan salah satunya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan data jumlah penduduk yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu per-semester 2 (dua) atau diakhir tahun 2024 tercatat Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat ada sebanyak 312.516 jiwa dengan jumlah laki – laki sebanyak 159.586 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 152.930 jiwa, data tersebut yang digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu. Data ini, yang dikenal sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), yang akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU.

B. Rasio Penduduk

Pada tahun 2024 komposisi penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan fakta positif. Komposisi penduduk usia produktif yaitu usia 15 – 64 tahun mendominasi yaitu sebanyak 202.048 jiwa atau mencapai 67,64% dari total jumlah penduduk. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan dimana jumlah ketersediaan tenaga kerja produktif cukup besar. Namun disisi lain, juga menjadi beban yang berat dimana mayoritas penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat atau sebesar 55,59% memiliki tingkat pendidikan hanya sebatas SD dan SMP. Oleh karena itu, menjadi tugas berat bagi stake holder terkait dalam rangka mendorong masyarakat usia produktif mampu bersaing sehingga memiliki pendapatan dan kesejahteraan yang baik. Pada tabel 2.26 menunjukan secara rinci jumlah dan persentase penduduk kelompok umur pada tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.26.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	0-4	13.194	12.581	25.775
2	5-9	13.026	12.333	25.359
3	10-14	12.310	11.771	24.081
4	15-19	10.674	10.006	20.653
5	20-24	9.528	9.314	18.842
6	25-29	11.869	11.919	23.788
7	30-34	12.788	12.605	25.393
8	35-39	12.282	11.886	24.168
9	40-44	11.294	10.813	22.107
10	45-49	10.001	10.002	20.003
11	50-54	9.016	9.355	18.371
12	55-59	8.015	7.815	15.830
13	60-64	6.698	6.195	12.893
14	65-69	4.830	4.214	9.044
15	70-74	3.379	2.891	6.270
16	75+	3.177	2.942	6.119
Kab. Tulang Bawang Barat		**152.054**	**146.642**	**298.696**

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025

C. Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar masing-masing 89.693 dan 45.961 jiwa. Kedua kecamatan tersebut selama ini memang telah menjadi pusat perekonomian dari Kabupaten tulang Bawang Barat. Dalam hal kepadatan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tumijajar masih menjadi kecamatan dengan rasio kepadatan tertinggi. Kepadatan terendah berada di daerah Kecamatan Pagar Dewa. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024

mencapai 246 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk menunjukkan rasio jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut dengan luas wilayah yang didiami. Semakin besar kepadatan penduduk menunjukkan semakin banyak orang yang mendiami wilayah tersebut. Data distribusi dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk / KM^2
1.	Tulang Bawang Udik	34.290	11,48	160,46
2.	Tumijajar	45.961	15,39	405,93
3.	Tulang Bawang Tengah	89.693	30,03	364,44
4.	Pagar Dewa	7.080	2.97	50.83
5.	Lambu Kibang	24.500	8.2	288,84
6.	Gunung Terang	20.187	6,76	279,73
7.	Batu Putih	17.763	5,95	176,16
8.	Gunung Agung	34.954	11,7	164,97
9.	Way Kenanga	24.268	8,12	329,31
Tulang Bawang Barat		**298.696**	**100**	**246.52**

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025

D. Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk adat pepadun dengan marga “Megou Pak Tulang Bawang” (Empat Marga Tulang Bawang) yaitu Marga Tegamoan, Marga Buay Bulan, Marga Suwai Umpu dan Marga Buay Aji. Prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan antar masyarakat Lampung yang disimpulkan dalam lima prinsip, yaitu:

1. “Piil Pesenggiri” diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap yang menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun berkelompok senantiasa dipertahankan. Dalam hal-hal tertentu seseorang (Lampung) dapat mempertaruhkan apa saja (termasuk nyawa) demi untuk mempertahankan Piil Pesenggiri tersebut. Selain itu dengan Piil Pesenggirinya seseorang dapat berbuat sesuatu atau tidak meskipun hal itu akan merugikan dirinya secara materi.
2. “Sakai Sambayan” mengandung makna dan pengertian yang luas, termasuk diantaranya tolong-menolong, bahu-membahu, dan saling memberikan sesuatu kepada pihak lain yang memerlukan dalam hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi dalam arti moral termasuk sumbangan tenaga, pikiran dan lain sebagainya.
3. “Nemui Nyimah” berarti bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam satu klan maupun diluar klan dan juga terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Jadi selain bermurah hati

dengan memberikan sesuatu yang ada padanya kepada pihak lain juga sopan santun dalam bertutur kata terhadap tamu mereka.

4. “Nengah Nyappur” adalah tata cara pergaulan masyarakat Lampung dengan sikap membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum agar berpengetahuan luas dan ikut berpartisipasi terhadap segala sesuatu yang sifatnya baik dalam pergaulan dan kegiatan masyarakat yang dapat membawa kemajuan dan selalu bisa menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman.
5. “Bejuluk Buadek” adalah didasarkan kepada “Titei Gemettei” yang diwarisi secara turun temurun secara adat dari zaman nenek moyang dahulu, tata cara ketentuan pokok yang selalu dipakai diikuti (Titei Gemettei) diantaranya adalah ketentuan seseorang selain mempunyai nama juga diberi gelar sebagai panggilan terhadapnya dan bagi seseorang baik pria maupun wanita jika sudah menikah diberi adek (beadek) yang biasanya pemberian adek ini dilakukan atau dilaksanakan di dalam rangkaian upacara atau waktu pelaksanaan perkawinan/pernikahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam masyarakat Lampung sudah terjadi akulturasi budaya sejak penjajahan belanda, dan hingga kini masih terus berjalan. Proses tersebut dipercepat dengan adanya pertukaran/ perpindahan penduduk, dimana penduduk Lampung yang pindah ke Pulau Jawa baik untuk menuntut ilmu (belajar) maupun bekerja dan sebaliknya banyak masyarakat jawa atau daerah lain yang masuk ke Lampung khususnya Tulang Bawang Barat untuk transmigrasi ataupun mendapat pekerjaan mengadu nasib.

Masyarakat suku-suku pendatang tersebar luas di seluruh Kecamatan seperti Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Way Kenanga. Proses akulturasi budaya mempengaruhi pembentukan pola-pola daerah pemukiman. Perkampungan penduduk asli Lampung masih banyak dijumpai mengikuti garis jalan, aliran sungai dengan pola linier dan pola mengelompok secara sporadik. Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai 11 kampung tua yang berada di sepanjang aliran Way Rarem, Way Kiri dan Way Tulang Bawang. Sedangkan penduduk pendatang umumnya bermukim pada kantong-kantong pemukiman yang sudah dibentuk dengan dan atau tanpa pengaturan.

E. Tren Demografi dan Momentum Bonus Demografi

a. Analisis Proyeksi Kependudukan

Pada Tahun 2029 diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 329.878 Jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun di kabupaten Tulang Bawang Barat diprediksi sebesar 1,00%. Selain itu secara umum pertumbuhan penduduk laki-laki maupun perempuan tidak berubah komposisinya dari tahun ke tahun. Penduduk laki-laki masih lebih dominan dibandingkan penduduk perempuan. Namun terdapat kecenderungan menurunnya rasio penduduk laki-laki dan perempuan antara tahun 2024 dan proyeksi di tahun 2030,

walaupun penurunnya tidak signifikan. Jumlah penduduk tahun 2024 yakni 298.700 Jiwa sedangkan proyeksi tahun 2029 sebesar 329.878 Jiwa. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.28 yang sajikan dibawah ini.

Tabel 2.28
Proyeksi Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2025-2029

Uraian	Baseline 2024	Proyeksi Penduduk Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk	298.696	306.392	312.687	318.417	324.147	329.878

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menggambarkan terdapat potensi yang cukup besar dalam hal ketersediaan tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM), serta potensi pasar (sebagai konsumen) bagi berputarnya roda perekonomian. Disisi lain pertumbuhan jumlah penduduk menjadi tantangan bagi para stakeholder terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, produktivitas kerja, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk. Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi.

Proyeksi Penduduk berdasarkan usia dalam 5 tahun kedepan hingga tahun 2030 diprediksi tidak terdapat banyak perubahan dalam komposisi kelompok umur, perubahan terjadi hanya akibat dari penambahan penduduk disemua kelompok umur sebagai mana tersjikan pada tabel 2.29 dibawah ini.

Tebel 2.29
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Klamin dan Umur
Tahun 2025 – 2030 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Umur	Tahun											
	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0–4	12,62	12,11	12,44	11,94	12,26	11,77	12,10	11,61	11,95	11,47	11,82	11,35
5–9	13,47	12,69	13,49	12,73	13,49	12,76	13,42	12,74	13,20	12,60	12,62	12,13
10–14	12,53	12,02	12,72	12,20	12,82	12,27	12,90	12,29	13,04	12,36	13,49	12,71
15–19	11,08	10,41	11,43	10,78	11,75	11,14	12,03	11,47	12,30	11,78	12,52	12,03
20–24	9,35	9,06	9,42	9,04	9,71	9,25	10,14	9,61	10,61	10,03	11,04	10,44
25–29	11,47	11,54	10,98	11,04	10,42	10,45	9,89	9,85	9,50	9,38	9,32	9,12
30–34	12,73	12,61	12,61	12,55	12,43	12,43	12,18	12,24	11,85	11,96	11,45	11,58
35–39	12,42	12,07	12,54	12,24	12,65	12,38	12,72	12,50	12,74	12,56	12,68	12,56
40–44	11,52	11,01	11,71	11,21	11,88	11,41	12,04	11,61	12,18	11,81	12,32	12,00
45–49	10,20	10,09	10,42	10,21	10,66	10,36	10,90	10,53	11,15	10,72	11,37	10,91
50–54	9,16	9,54	9,29	9,67	9,44	9,75	9,59	9,79	9,76	9,85	9,95	9,93
55–59	8,13	8,06	8,25	8,33	8,38	8,62	8,51	8,89	8,64	9,13	8,77	9,32
60–64	6,92	6,52	7,10	6,80	7,24	7,05	7,36	7,28	7,47	7,50	7,58	7,75
65–69	5,00	4,46	5,22	4,75	5,47	5,08	5,73	5,44	5,97	5,77	6,17	6,08
70–74	3,55	3,07	3,68	3,23	3,79	3,38	3,88	3,53	4,00	3,71	4,15	3,94
75+	3,30	3,10	3,46	3,29	3,65	3,51	3,85	3,75	4,06	4,00	4,26	4,26

Sumber : BPS Provinsi Lampung – Proyeksi Penduduk Kab/Kota Prov. Lampung 2020-2035

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk disemua kelompok umur bertambah baik perempuan ataupun laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa akan terdapat banyak peluang dan tantangan yang dihadapi dalam waktu 5 tahun kedepan. Peluang yang mungkin muncul yakni penambahan sumber daya manusia di usia produktif, kelahiran anak, serta pertambahan penduduk yang berimplikasi pada meningkatnya konsumen rumah tangga. Disisi lain, seperti halnya yang telah dijelaskan di atas beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi diantaranya aspek kesehatan bayi, anak, dan Ibu, pendidikan anak, penyediaan tenaga kerja, serta perlindungan bagi kaum lansia. Peluang dan tantangan tersebut merupakan keniscayaan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, persiapan yang matang perlu dilakukan guna memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan yang akan muncul dalam waktu 5 tahun kedepan.

Disisi Lain kepadatan penduduk dengan bertambahnya jumlah penduduk pasti akan meningkat. Berdasarkan data proyeksi perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang, diprediksi kepadatan penduduk hingga tahun 2030 mencapai 251,05. Kepadatan penduduk tertinggi masih berada di Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah. Peta kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.23. dan data proyeksi penduduk di sajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Penduduk dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan
Tahun 2024 dan Proyeksi 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kecamatan	2024		Proyeksi 2029	
	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
Tulang Bawang Udik	34.290	160,46	37.763	169,84
Tumijajar	45.961	405,93	48.090	429,76
Tulang Bawang	89.693	364,44	92.938	383,23
Pagar Dewa	7.080	50.83	7.969	53,70
Lambu Kibang	24.500	288,84	27.601	84,82
Gunung Terang	20.187	279,73	22.134	296,09
Batu Putih	17.763	176,16	18.981	185,59
Gunung Agung	34.954	164,97	41.840	173,97
Way kenanga	24.268	329,31	32.517	346,43
Kabupaten Tulang Bawang Barat	**298.696**	**246.52**	**329.878**	**251,05**

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025
KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Gambar 2.23.
Peta kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat

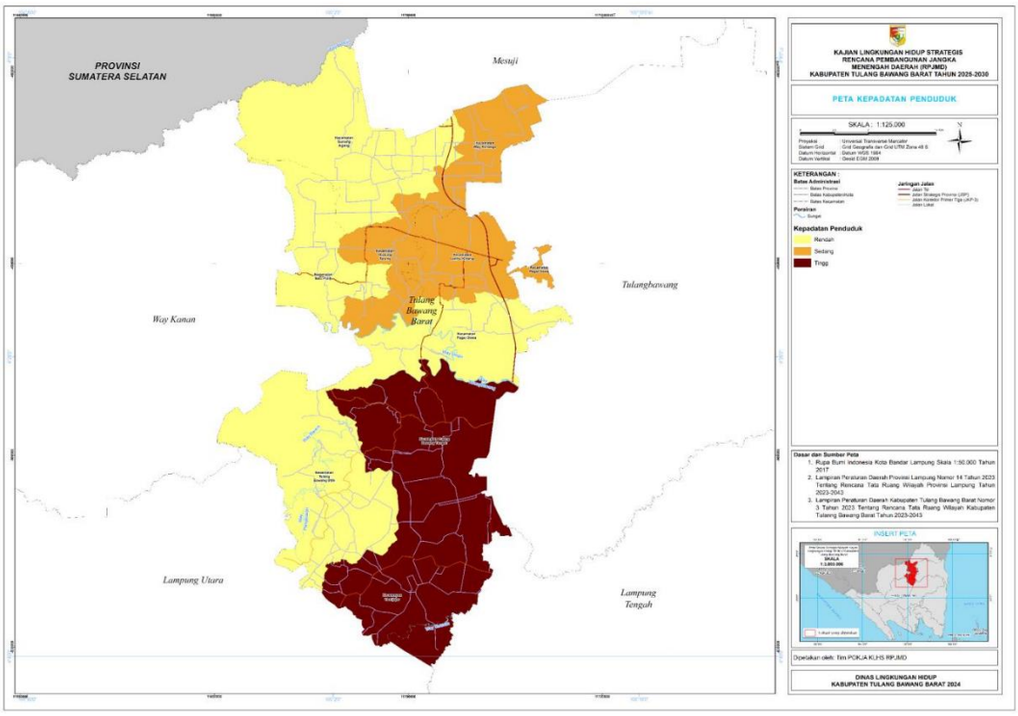

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2029

b. Analisis Bonus Demografi

Bonus demografi sebagai bagian dari tahapan transisi demografi merupakan jendela peluang bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Pada tahapan awal transisi demografi, suatu wilayah akan berada pada kondisi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dengan struktur umur yang relatif sama. Berjalannya pembangunan dengan adanya perbaikan kesehatan, sanitasi, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, dan dilakukannya penanganan tingkat kelahiran mengakibatkan tingkat kelahiran mulai turun dengan tingkat kematian yang tetap rendah. Hal ini menyebabkan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan persentase penduduk usia nonproduktif dan menjadi fase awal dari bonus demografi. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif menjadi modal dan sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial suatu negara. Para peneliti memprediksi setiap perubahan 1 persen pada populasi usia kerja suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 1,5 persen dan 0,8 persen tabungan bagian dari PDB, yang berakibat pada pengurangan jumlah kemiskinan rata-rata sebesar 0,76 persen. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membuat formulasi yang efektif guna mendapatkan bonus demografi yang diidam-idamkan.

Tabel 2.31
Jumlah dan Persentase Penduduk Tulang Bawang Barat
Berdasarkan Umur pada Tahun 2024 dan Proyeksi 2029

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Persentase (%)	Jumlah Penduduk Tahun 2029	Persentase (%)
1	0-4	25.775	9	24.230	7
2	5-9	25.359	9	26.591	8
3	10-14	24.081	8	26.195	8
4	15-19	20.653	7	24.885	8
5	20-24	18.842	7	21.474	7
6	25-29	23.788	8	20.112	6
7	30-34	25.393	9	25.612	8
8	35-39	24.168	8	27.092	8
9	40-44	22.107	7	25.794	8
10	45-49	20.003	7	22.692	7
11	50-54	18.371	6	20.447	6
12	55-59	15.830	5	18.620	6
13	60-64	12.893	4	15.846	5
14	65-69	9.044	3	12.645	4
15	70-74	6.270	2	8.649	2
16	75+	6.119	2	8.994	3
Kab. Tulang Bawang Barat		**298.696**	**100**	**329.878**	**100**

Sumber : *Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025*
KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2020 telah mengalami bonus demografi kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat. Meskipun sebagian besar provinsi di Indonesia telah mengalami bonus demografi, hanya terdapat 10 provinsi yang termasuk telah mengalami bonus demografi dengan pencapaian nilai IPM melampaui IPM nasional. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi dengan potensi penduduk usia produktif tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Capaian IPM 10 provinsi dalam kategori tinggi dan sangat tinggi,. seperti di Provinsi DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta yang memiliki capaian IPM tertinggi. Kedua provinsi ini terletak di Pulau Jawa serta keduanya telah berada pada fase akhir bonus demografi. Sementara itu, masih terdapat 22 provinsi yang juga telah mengalami bonus demografi, namun nilai pencapaian IPM masih di bawah IPM nasional. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk daerah-daerah tersebut sehingga memiliki kemudahan akses untuk pencapaian pembangunan manusia yang lebih baik dalam mengoptimalkan potensi bonus demografi.

Komposisi penduduk Tulang Bawang Barat saat ini sebenarnya mayoritas telah diisi oleh penduduk pada usia produktif. Pada Tahun 2024 komposisi usia produktif Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 68% dan diprediksi pada tahun 2029 berkisar 67%. Namun dalam hal pemanfaatan bonus demografi belum maksimal. Terdapat beberapa aspek yang

menjadi kendala terutama dalam hal pembangunan modal dasar (kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan) yang masih belum optimal. Hal tersebut menyebabkan masih terdapatnya berbagai masalah dasar dari kependudukan di Kabupaten tulang Bawang Barat. Disamping itu berdasarkan prediksi, struktur penduduk Tulang Bawang Barat pada tahun 2040 diproyeksikan mengalami perubahan, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2045. Pada saat yang sama, angka ketergantungan (*dependency ratio*) mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua juga meningkat. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 9,96% (28.503 penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 16,40% (53.193 penduduk) pada tahun 2035. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia > 60 tahun di Tulang Bawang Barat yang sudah melebihi 10% dari total penduduk Tulang Bawang Barat, dan ada kecenderungan perubahan dari piramida *expae* menjadi piramida *stationary*, sebagai mana gambar dibawah ini.

Gambar 2.24.
Perbandingan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2023 dan 2029

Penduduk Tahun 2023

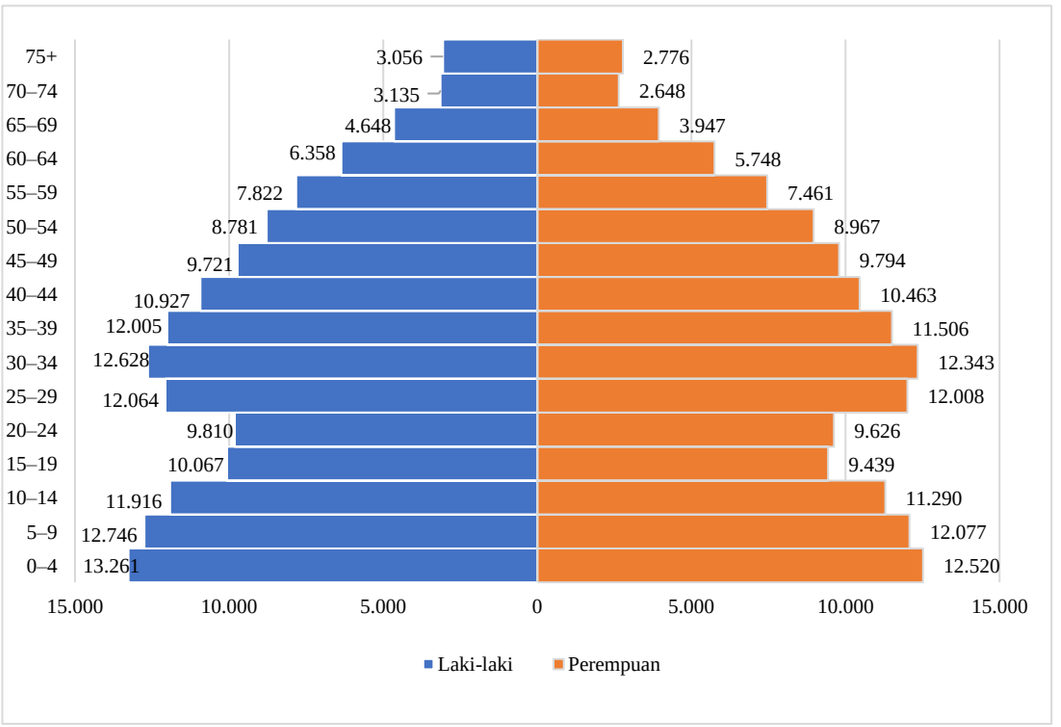

Sumber : RPJPD Kanupaten Tulang Bawang Barat 2025 - 2045

Proyeksi Penduduk Tahun 2029

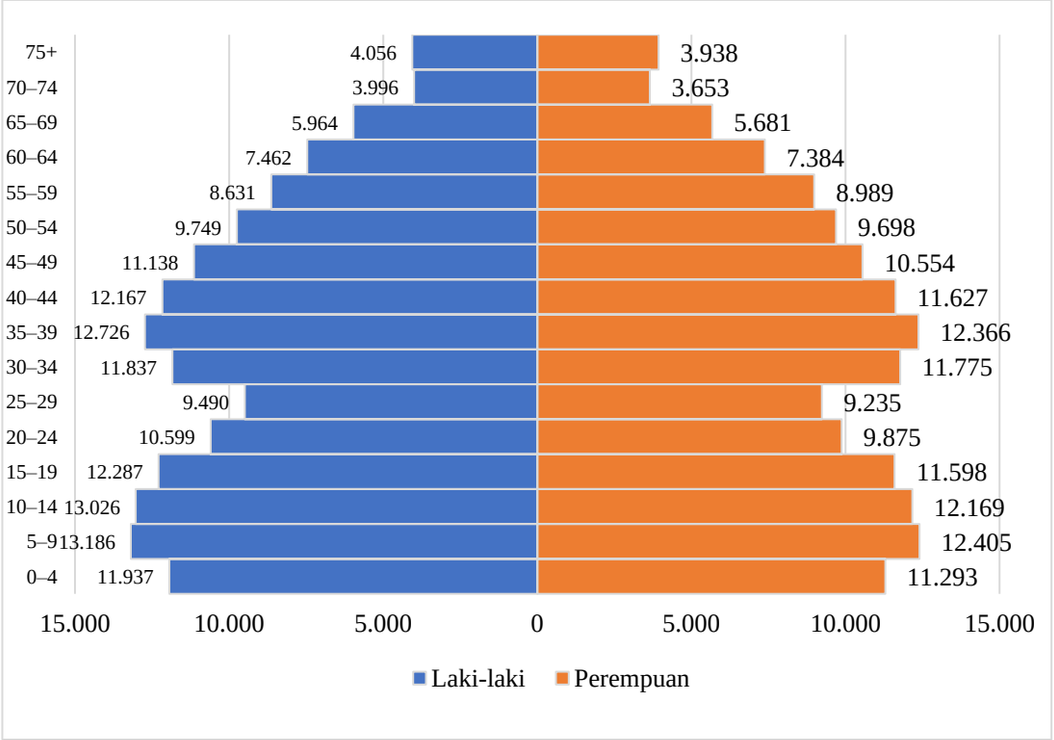

Sumber : RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2045

Kondisi ini harus diantisipasi mengingat perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar bagi perekonomian lokal, regional dan nasional. Pada fase ini, masalah kependudukan akan muncul apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang. Strategi menjelang *ageing population* antara lain penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang persiapkan maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dimensi kesejahteraan masyarakat meliputi (1) dimensi kesejahteraan dengan penekanan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) dimensi kesejahteraan dengan penekanan pada kebaikan sosial

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ditunjukkan melalui sejumlah indikator ekonomi, antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, PDB per kapita, indeks Gini, jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan lainnya.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakaan pembangunan yang akan datang. Indikator tersebut yaitu Produk Domestik Regional Bruto.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur total nilai produk domestik bruto (PDB) suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam satu tahun. Baik PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah indikator makro yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan dan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Selama periode 2020-2024, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan kinerja yang baik dengan menunjukkan peningkatan yang stabil, setelah adanya kontraksi yang signifikan mencapai sebesar -1,32% pada tahun 2020 sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Meskipun demikian, kondisi ekonomi terus membaik pada tahun 2022 hingga 2024 walau mengalami perlambatan dan tidak sebaik pertumbuhan yang terjadi sebelum adanya covid-19 yang selalu tumbuh diatas pertumuhan ekonomi Provinsi Lampung, adapun pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2.25. dibawah ini.

Gambar 2.25.
Grafik Pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 s/d 2024

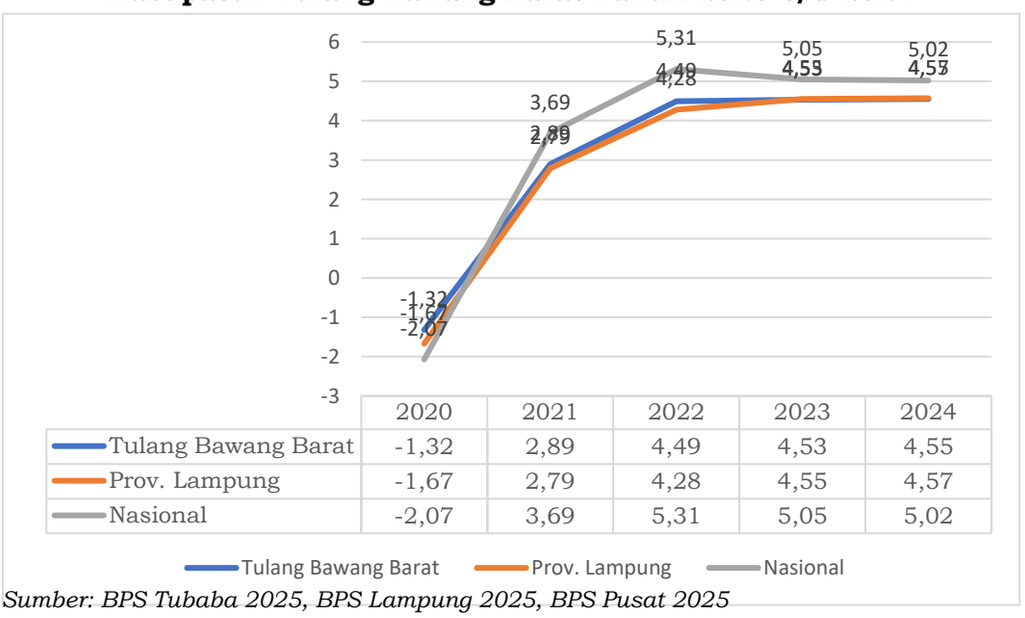

	2020	2021	2022	2023	2024
Tulang Bawang Barat	-1,32	2,89	4,49	4,53	4,55
Prov. Lampung	-1,67	2,79	4,28	4,55	4,57
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,02

Sumber: BPS Tubaba 2025, BPS Lampung 2025, BPS Pusat 2025

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kuat. Oleh karena itu,

upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan antar kelompok dan wilayah, sambil menjaga kelestarian lingkungan tempat aktivitas ekonomi berlangsung. Kondisi ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi wilayah, dan struktur ekonomi wilayah.

B. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Selama periode 2018-2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat menurun dari 8,10 persen pada tahun 2018 menjadi 7,39 persen pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 8,32 persen, dan kemudian turun kembali menjadi 7,22 persen pada tahun 2024. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat disebabkan oleh perbaikan situasi pandemi Covid-19 dan adanya program Pemerintah Daerah yang membantu masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan sosial melalui Program Maju Sejahtera Tulang Bawang Barat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./kapita/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) %	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) %
2014	303.252	18,73	7,12	0,74	0,14
2015	329.796	21,80	8,23	1,48	0,36
2016	358.939	22,39	8,40	1,20	0,26
2017	370.332	21,77	8,11	0,21	1,08
2018	384.933	21,93	8,10	1,08	0,22
2019	391.096	21,14	7,75	0,77	0,13
2020	432.693	20,29	7,39	0,92	0,18
2021	447.327	23,03	8,32	0,69	0,12
2022	476.712	20,72	7,44	0,88	0,16
2023	511.418	20,32	7,25	1,04	0,24
2024	544.020	20,35	7,22	0,87	0,19

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2025

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung maupun Nasional tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dibawah angka kemiskinan Provinsi Lampung yang berada di angka 10,69 persen maupun Nasional sebesar 9,03 persen. Perbandingan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional disajikan pada Gambar 2.26.

Gambar 2.26.
Grafik Persentase jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2014 – 2024



Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2025, BPS, Lampung Dalam Angka 2025

Menurut Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan ekstrem adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum bersih, sanitasi yang layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Kondisi ini tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses ke layanan sosial. Menurut Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah mereka yang pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan.

Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 adalah 0,69%, lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung yang mencapai 1,32%. Data kemiskinan ekstrem Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2.33
Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2023

No	Daerah	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Po)			
		2021	2022	2023	2024
1	Kab. Tulang Bawang Barat	0,32	0,91	0,69	Belum Rilis
2	Prov. Lampung	2,40	2,29	1,32	Belum Rilis

Sumber : SSGI, 2024

C. PDRB Per Kapita

Tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama periode 2020-2024, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp 7,74 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 9,10 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) juga mengalami kenaikan, dari Rp 11,42 triliun di tahun 2020 menjadi Rp 15,59 triliun pada tahun 2024. Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.27.

Gambar 2.27.
Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2020 – 2024

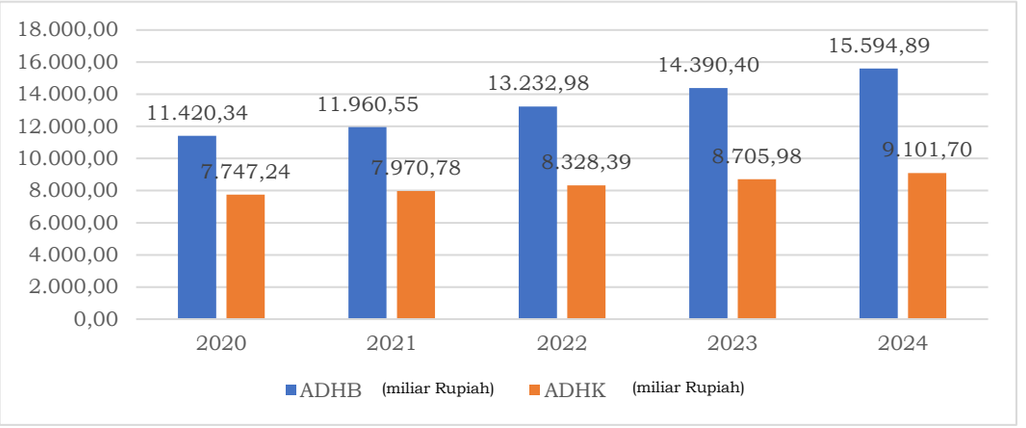

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2020-2025

Selama periode tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat juga berimbas pada kenaikan PDRB per kapita. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita penduduk berdasarkan ADHK 2010 tercatat sebesar Rp 27,11 juta, dan meningkat menjadi Rp 30,47 juta pada tahun 2024. Selain itu, nilai PDRB per kapita penduduk berdasarkan ADHB pada tahun 2024 mencapai Rp 52,21 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 41,85 juta. Perkembangan nilai PDRB per kapita berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB dapat dilihat pada Gambar 2.28

Grafik 2.28
Perkembangan PDRB per kapita Penduduk
di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024

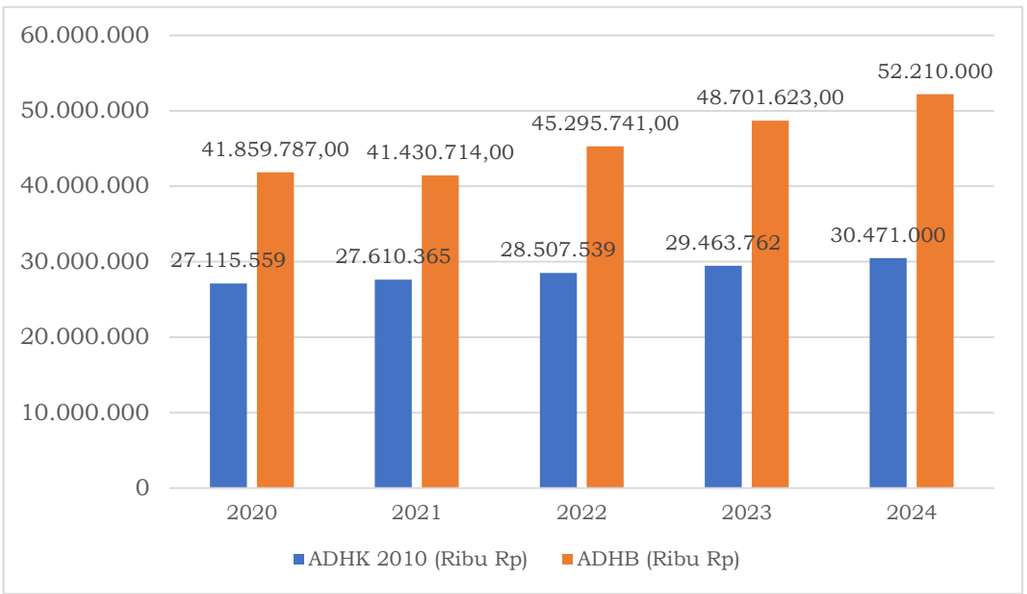

Sumber: Lampung Dalam Angka, 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tercermin dari besarnya kontribusi PDRB masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Dengan mengetahui struktur ekonomi wilayah, maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah. Struktur ekonomi juga dapat dijadikan acuan untuk merencanakan upaya perbaikan struktur, maupun penciptaan struktur ekonomi wilayah yang ideal dalam jangka panjang.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 disajikan pada Gambar 2.29

Gambar 2.29
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

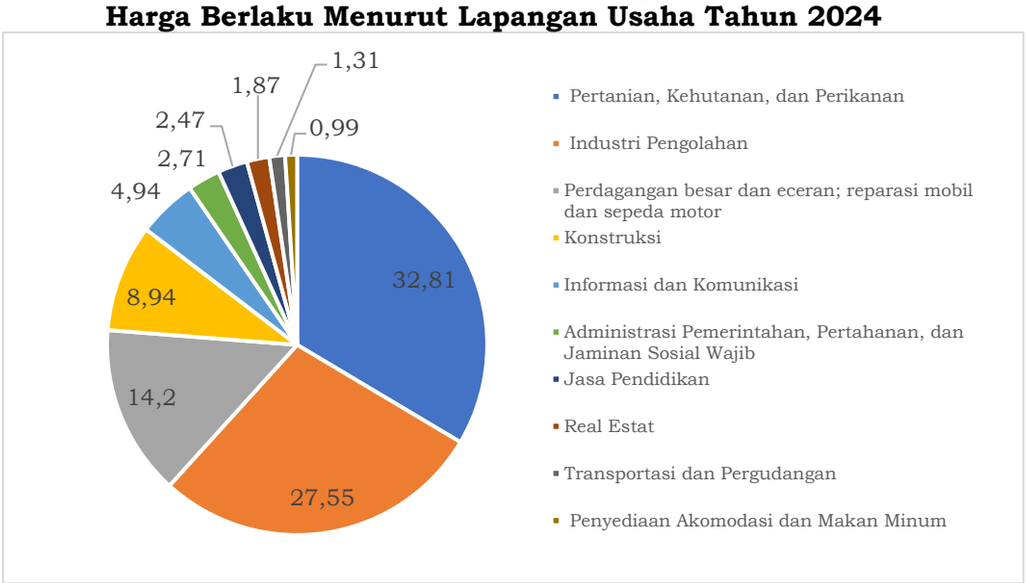

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025

Dari Gambar di atas, terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 didominasi oleh 5 sektor utama dari 17 sektor yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor primer yang mampu memberikan kontribusi terbesar sebesar 32,81%, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 27,55%, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan motor sebesar 14,2%, sektor konstruksi 8,94% dan sektor informasi dan komunikasi 4,94%.

Laju pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 tertinggi dicapai oleh Jasa lainnya sebesar 11,91%, sektor Transportasi dan Pergudangan 10,44%, Informasi dan komunikasi 9,92%, Real estat 9,71%, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,54%. Adapun laju pertumbuhan 5 (lima) sektoral tertinggi PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.30.

Grafik 2.30
Pertumbuhan 5 (Lima) Sektoral Tertinggi PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat ADHK 2010 Tahun 2024

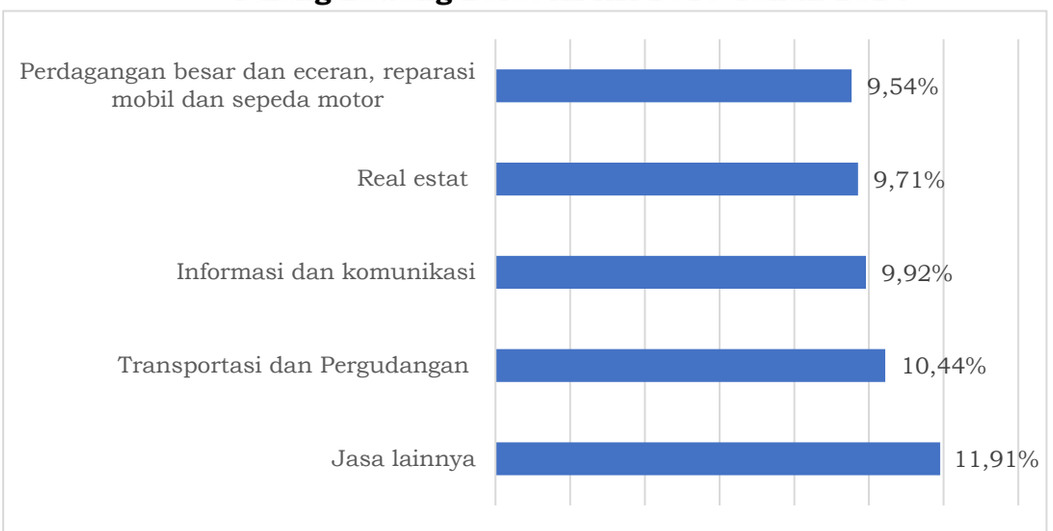

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2025

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka juga yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebas tugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh anak usia 15 tahun keatas yang bersekolah, masih bersekolah dari rumah/daring sehingga peluang membantu orang tuanya sangat tinggi. TPT Tahun 2023 3,89 dan ditahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 4,12. Tingkat Pengangguran

Terbuka Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.31 dibawah ini.

Gambar 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

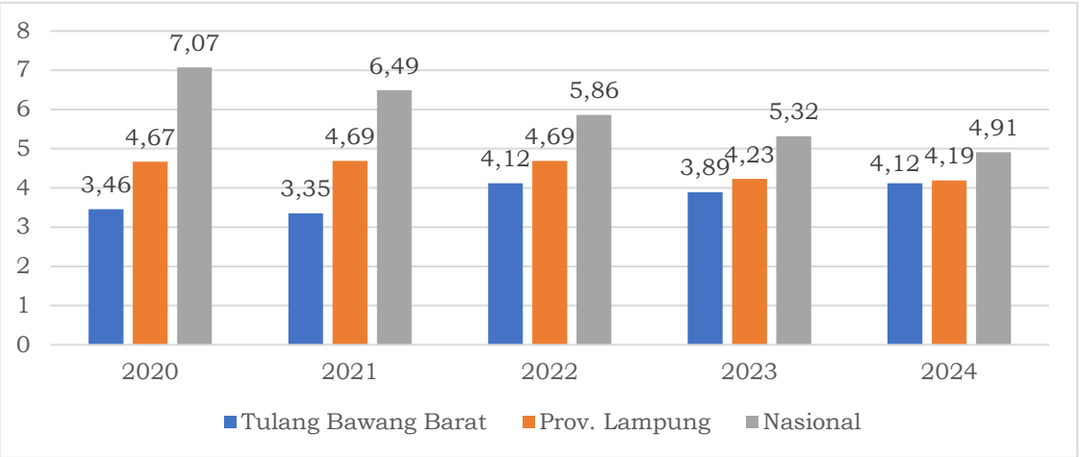

Sumber: BPS Tulang Bawang Barat 2025

E. Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan merupakan salah satu indikator untuk menilai kesempatan kerja, selain TPT. Dimaa, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dan total penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan seberapa besar partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja dan biasanya digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesulitan angkatan kerja dalam memperoleh pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh, TPAK di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama tahun 2017-2024 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Data mengenai TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun 2017-2024 dapat dilihat pada tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017 – 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	72,71	70,21	70,60	71,58	72,32	70,21	70,77	70,90

Sumber : BPS, Provinsi Lampung Tahun 2025

Selama periode tahun 2017 – 2024 angka TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan dan cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2024 TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 70,90% meningkat dari tahun 2023 yang mencapai sebesar 70,77%.

F. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1, dimana angka 0 menunjukkan pendapatan yang merata dan angka 1 menunjukkan tingkat pendapatan penduduk yang sangat tidak merata. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 yaitu 0,272, namun ditahun 2021 kembali naik menjadi 0,282 dan ditahun 2022 berada pada angka 0,261, Kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 0,274. Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kab. Tulang Bawang Barat yang di ukur menggunakan rasio gini berada pada angka 0,297. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Tulang Bawang Barat masih berada dalam kategori ketimpangan rendah yang berarti distribusi pengeluaran masyarakat relatif merata dibandingkan daerah lain. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung yang memiliki rasio gini tahun 2024 sebesar 0,32, Tulang Bawang Barat memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, hal ini menunjukkan pemerataan ekonomi di Tulang Bawang Barat lebih baik dibandingkan Provinsi lampung. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.32

Gambar 2.32
Perkembangan *Gini Ratio* Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024

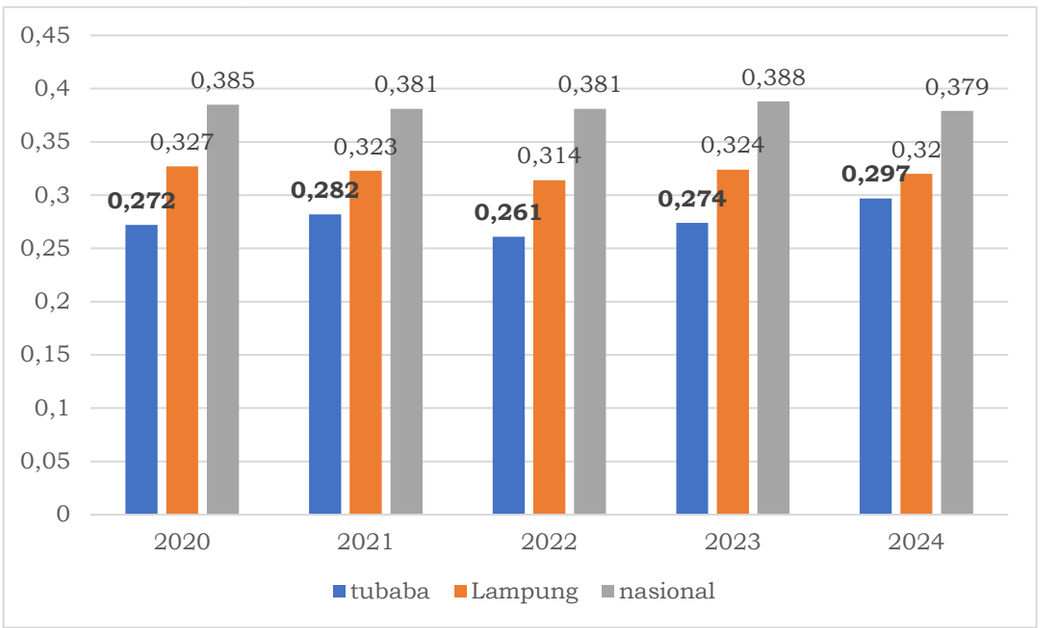

Sumber: BPS Tubaba, Provinsi Lampung dan BPS Nasional 2025

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan suatu daerah atau negara. IPM menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan,

yang secara keseluruhan memberikan gambaran tentang tingkat pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power parity*). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia.

Berdasarkan data IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 – 2024 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dimana IPM pada tahun 2020 sebesar 67,51 dan di tahun 2024 menjadi 70,04. Peningkatan IPM ini merupakan hasil upaya pembangunan dari sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunjukkan perbaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.33 dibawah ini.

Gambar 2.33.
Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 - 2024

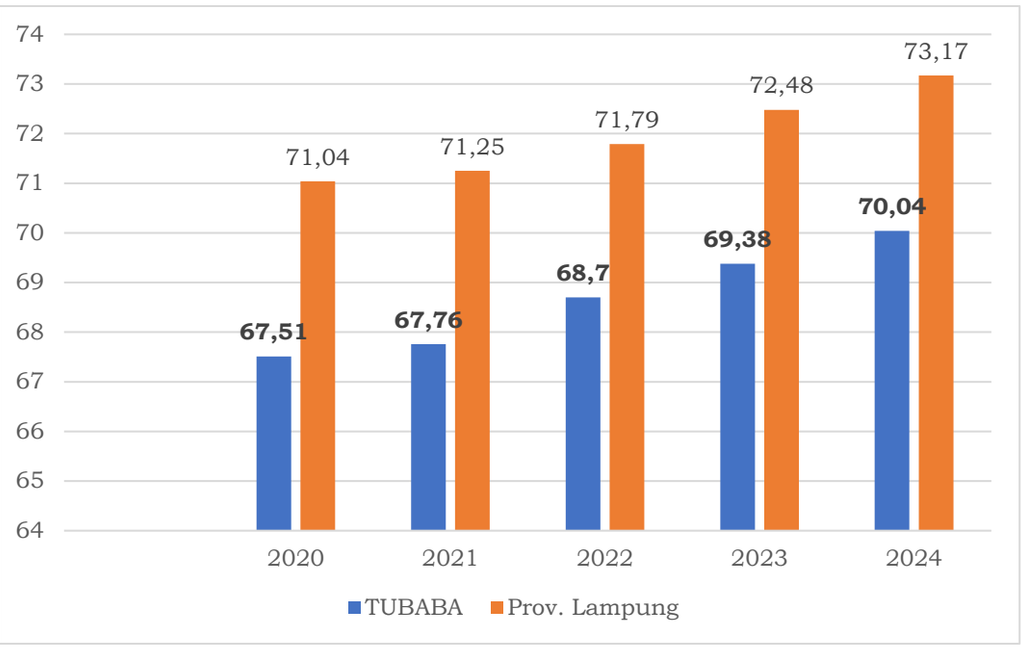

Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025

Akan tetapi pekembangan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunjukan perkembang positif setiap tahunnya masih harus terus ditingkatkan agar keberadaan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat jika dibandingakan dengan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Lampung dapat meningkat tingkatannya dari posisi sekarang yang berada urutan ke -14 (empat belas) dari 15 (lima belas) Kabupaten Kota Provinsi Lampung, sebagai mana tergambar pada grafik dibawah ini.

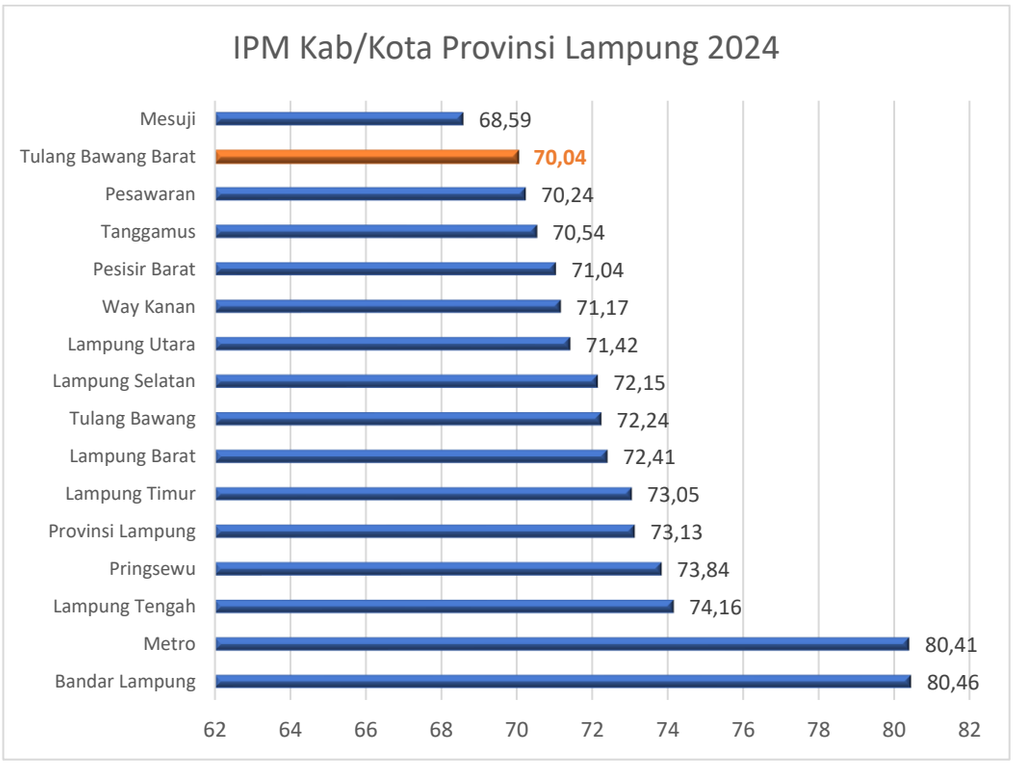

Sumber : Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025

IPM mencakup tiga dimensi utama yang menjadi komponen penghitungan nilai IPM secara keseluruhan:

1) Dimensi Kesehatan: Diukur dengan harapan hidup saat lahir. Ini mencerminkan usia rata-rata yang dapat diperkirakan dapat dicapai oleh seseorang pada saat lahir di suatu daerah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut.
2) Dimensi Pendidikan: Terdiri dari dua indikator utama:
   - Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Mengukur rata-rata tahun yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal.
   - Harapan Lama Sekolah (HLS): Mengukur jumlah tahun yang diperkirakan dapat dijalani oleh anak yang baru lahir, berdasarkan angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan tertentu.
3) Dimensi Pendapatan: Diukur dengan pengeluaran per kapita, yang menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata setiap individu dalam suatu daerah. Pendapatan ini mencerminkan daya beli masyarakat dan menunjukkan kesejahteraan ekonomi.

adapun perkembangan dari 3 dimensi pengukuran IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 – 2024 tersajikan pada tabel 2.35 Sebagai berikut.

Tabel 2.35
IPM Beserta Indeks Komposit
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 – 2024

IPM - Berdasarkan Indeks Komposit	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,59	73,62	73,83	74,02	74,23
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,05	12,06	12,09	12,10	12,12
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,24	7,39	7,72	7,79	7,80
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Bulan)	8.395	8.422	8.737	9.162	9.646
IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat	**67,51**	**67,76**	**68,7**	**69,38**	**70,04**

Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2025

Angka Rata-rata Lama Sekolah meningkat tiap tahunnya. Bila angka ini dikonversikan kejenjang pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya secara rata–rata penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah lulus sekolah dasar. Data angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.34

Gambar 2.35
Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

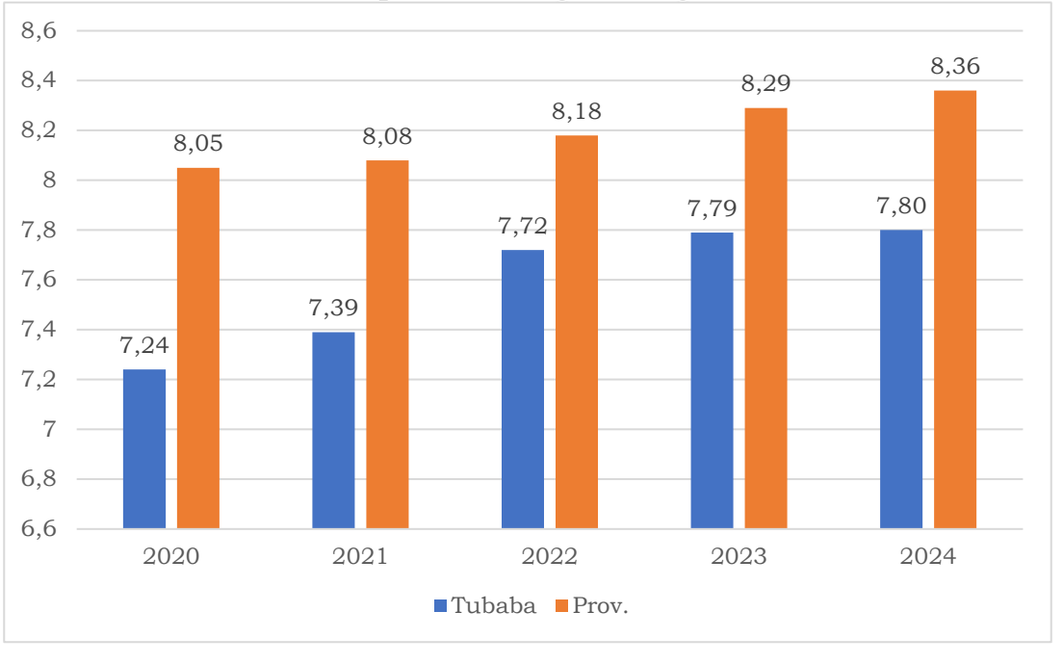

Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Tulang Bawang Barat meningkat tiap tahunnya. Data Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.35

Gambar 2.36
Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tahun)

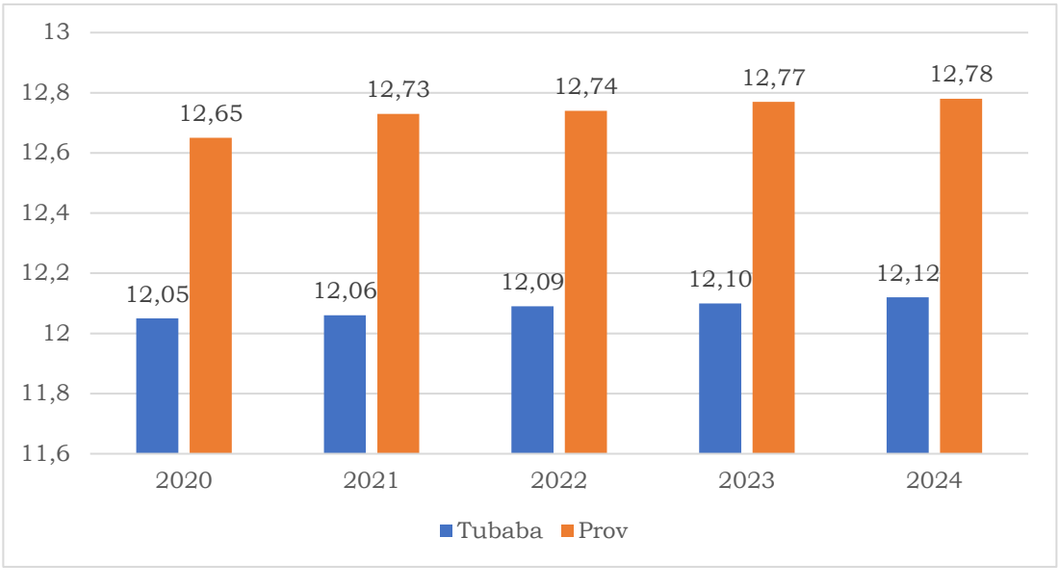

Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020-2024 berdasarkan SP 2020 LF, pada tahun 2020 sebesar 73,59 tahun, mengalami kenaikan menjadi 74,23 tahun pada tahun 2024 AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat tiap tahunnya, berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin tinggi. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 2.36

Gambar 2.37
Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tahun)

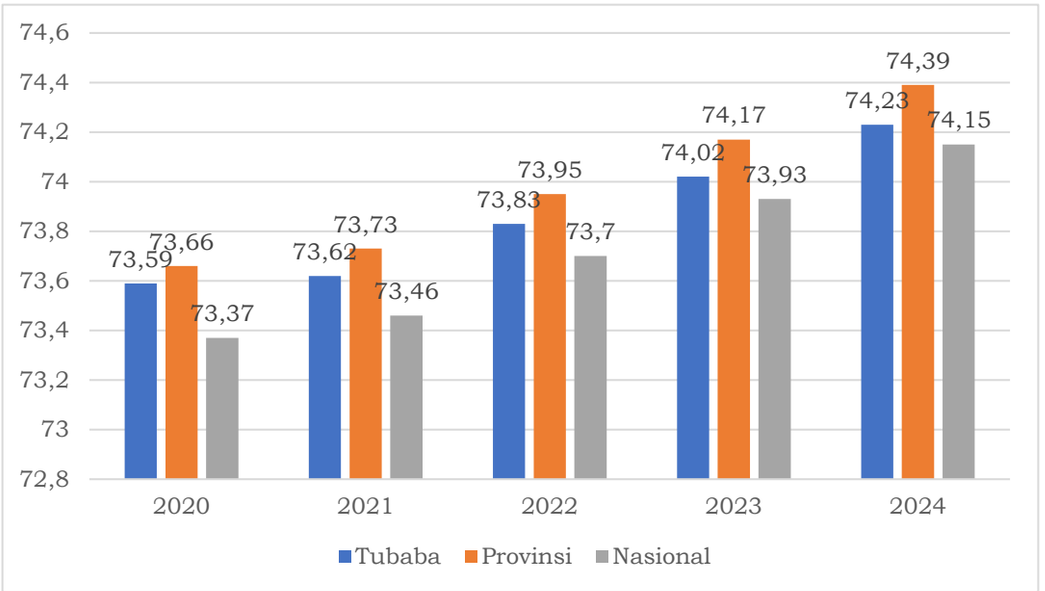

Sumber: BPS Tulang Bawang Barat 2025

Dimensi ekonomi dalam komponen IPM adalah standar hidup yang layak yang dipresentasikan dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan pendekatan besaran pendapatan perkapita penduduk. Perkembangan pendapatan kabupaten Tulang Bawang Barat pada gambar 2.37

Gambar 2.38
Grafik Pengeluaran Perkapita Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat (000 Rp)

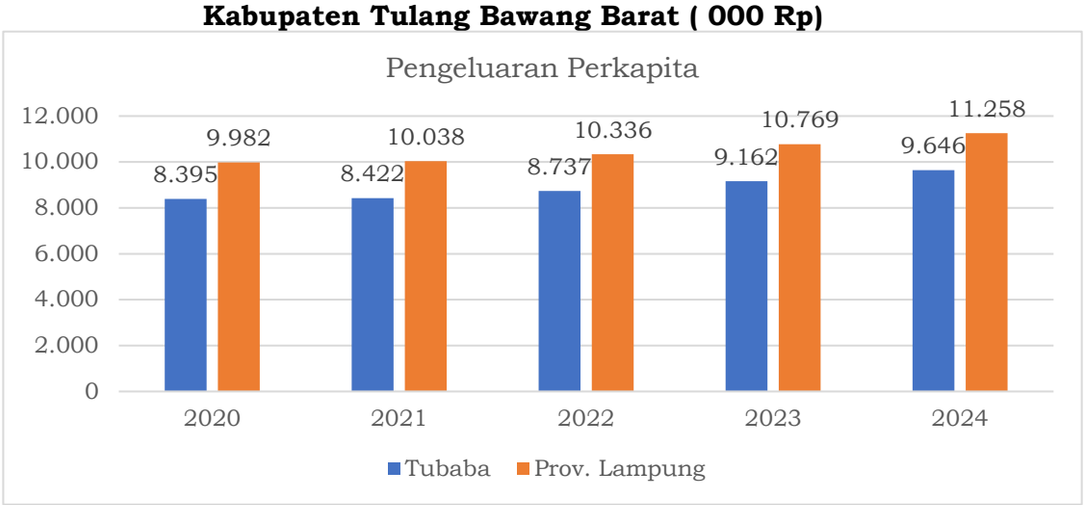

Sumber: BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan ini ditandai oleh peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) dimana AHH dapat terpenuhi dengan baik bila mana pelayanan kesehatan terus mengalami perbaiakan, sehingga pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat daapat terlaksana, adapun komponen pengukuran yang akan dilihat adalah sebagai berikut.

A. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah salah satu indikator terpenting untuk mengukur kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi, usia harapan hidup bukan sekadar angka yang menunjukkan berapa lama seseorang diperkirakan akan hidup, tetapi merupakan cerminan dari keberhasilan dari pembangunan di suatu daerah.

Pembangunan yang telah dicapai oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan bagian dari pembangunan provinsi lampung dan Indonesia selama ini telah memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan adanya peningkatan dari Usia Harapan Hidup penduduk sehingga terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas) hal ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Gambaran perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat yang

disandingkan dengan perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Nasional dapat terlihat pada Gambar Grafik di bawah ini.

Gambar 2.39
Grafik Perkembangan UHH Tahun 2020 – 2024
Kabupaaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dan Nasional

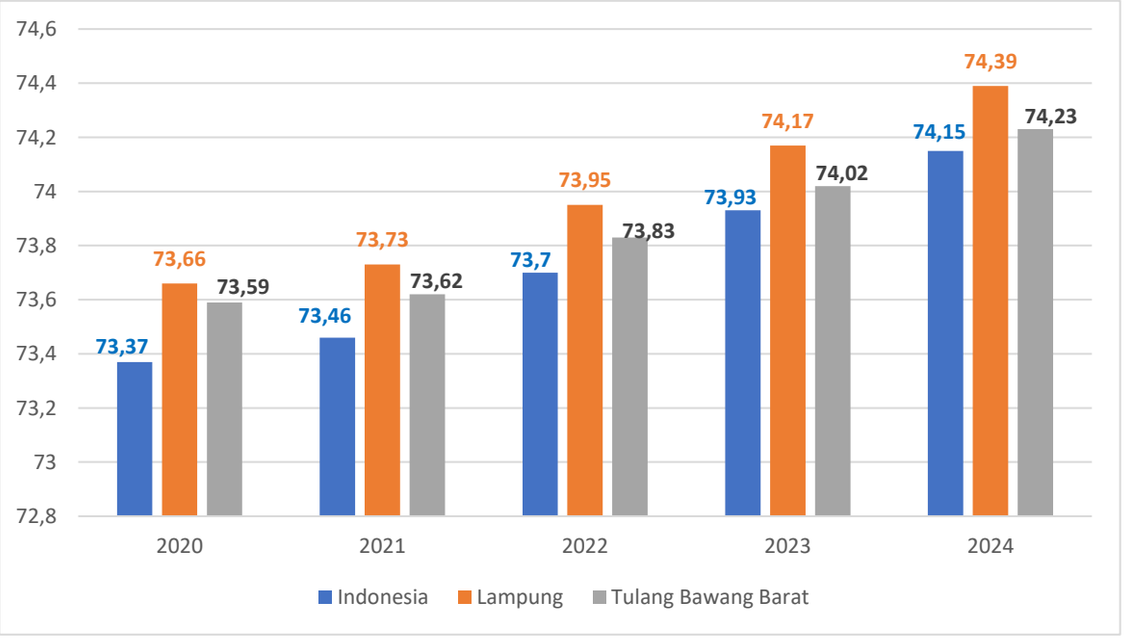

Sumber : BPS Nasional tahun 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, terlihat perbandingan data usia harapan hidup (UHH) dari tahun 2020 hingga 2024 antara Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum, tren yang terlihat adalah adanya peningkatan UHH dari tahun ke tahun. UHH nasional secara konsisten meningkat, dari 73,37 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,15 tahun pada tahun 2024, untuk Provinsi Lampung juga meningkat dari 73,66 tahun menjadi 74,39 tahun dalam periode yang sama dengan nasional sedangkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengalami peningkatan UHH, dari 73,59 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,23 tahun pada tahun 2024.

Sehingga dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa sepanjang periode 2020-2024, UHH Provinsi Lampung selalu berada di atas rata-rata UHH nasional, ini mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan dan kesejahteraan di Lampung secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Indonesia. Dan sama halnya dengan capaiannya provinsi Lampung, untuk UHH di Tulang Bawang Barat juga konsisten berada di atas rata-rata nasional. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 angkanya sedikit di bawah Lampung, pada tahun 2022 dan 2023, perbedaannya dengan lampung semakin tipis.

B. Ketersediaan Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Apotek

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Puskesmas pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Data yang menunjukkan ketersediaan jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Apotek disajikan dalam Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Apotek Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	3	3
2	Jumlah Poliklinik	14	13	13	13	13
3	Jumlah Puskesmas	16	16	16	16	16
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	57	43	37	37	39
5	Jumlah Apotek	19	18	18	44	53

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

Data menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang berupa puskesmas dan pustu di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memadai dimana disetiap kecamatan telah memiliki ketersediaan pusat kesehatan masyarakat demi melayani kebutuhan masyarakat.

C. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga Kesehatan persatuan penduduk adalah jumlah tenaga Kesehatan (Tenaga Keperawatan dan Kebidanan) per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Jumlah tenaga Kesehatan pada tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan, diharapkan jumlah tenaga Kesehatan untuk tahun mendatang dapat diperbanyak agar pelayanan terhadap Kesehatan masyarakat lebih maksimal. Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk
Tahun 2020 s.d.2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	286.162	287.707	289.620	295.481	298.696
2	Jumlah Tenaga Kesehatan	445	683	683	693	696
	Rasio	**0,643**	**0,421**	**0,424**	**0,426**	**0,429**

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Selain dari total jumlah tenaga kesehatan yang berbandingkan dengan jumlah penduduk sebagai mana disajikan pada tabel diatas berikut ini di sajikan pula data tenaga kesehatan per masing masing tenaga kesehatan serta nilai standar yang harus tersedia per 1000 jumlah penduduk yaitu pada Tabel 2.38 dibawah ini.

Tabel 2.38
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun		Dokter spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	SKM	Kesling	Gizi	Lab	Farmasi/ apt
2021	Jumlah	7	57	4	210	393	21	26	22	32	38
	capaian per 1.000 pddk	0,02	0,19	0,01	0,70	1,32	0,07	0,09	0,07	0,11	0,13
	Target per 1.000 pddk	0,2	1	0,1	2,4	2	1	0,21	0,35	0,35	1
2022	Jumlah	10	75	5	313	526	37	40	35	33	44
	capaian per 1.000 pddk	0,03	0,25	0,02	1,05	1,76	0,12	0,13	0,12	0,11	0,15
	Target per 1.000 pddk	0,2	1	0,1	2,4	2	1	0,21	0,35	0,35	1
2023	Jumlah	18	76	4	274	459	41	42	42	33	35
	capaian per 1.000 pddk	0,06	0,25	0,01	0,92	1,54	0,14	0,14	0,14	0,11	0,12
	Target per 1.000 pddk	0,2	1	0,1	2,4	2	1	0,21	0,35	0,35	1
2024	Jumlah	28	98	7	355	542	39	37	37	39	63
	capaian per 1.000 pddk	0,09	0,33	0,02	1,19	1,81	0,13	0,12	0,12	0,13	0,21
	Target per 1.000 pddk	0,2	1	0,1	2,4	2	1	0,21	0,35	0,35	1

Sumber : Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat

1) Jumlah dan Rasio dokter spesialis di Sarana Kesehatan

Dokter spesialis yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun tahun 2021 sebanyak 7 orang dengan 0,02 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 10 orang dengan 0,03 Per 1000 penduduk , dan tahun 2023 sebanyak 18 orang dengan 0,06 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 28 orang dengan 0,09 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter umum terhadap 1000 penduduk sebesar 0,02 artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 dokter spesialis jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio dokter spesialis belum memenuhi target.

2) Jumlah dan Rasio dokter Umum di Sarana Kesehatan

Dokter umum yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 57 orang dengan 0,19 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 75 orang dengan 0,25 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 76 orang dengan 0,25 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 98 orang dengan 0,33 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter umum terhadap 1000 penduduk sebesar 1 artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 dokter umum jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio dokter umum belum memenuhi target.

3) Jumlah dan Rasio Dokter Gigi di Sarana Kesehatan

Dokter gigi yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 4 orang dengan 0,01 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 5 orang dengan 0,02 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 4 orang dengan 0,01 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 7 orang dengan 0,03 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter gigi umum terhadap 1000 penduduk sebesar 0,1 artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 dokter umum jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio dokter gigi belum memenuhi target.

4) Jumlah dan Rasio Perawat di Sarana Kesehatan

Perawat yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 210 orang dengan 0,01 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 313 orang dengan 1,05 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 274 orang dengan 0,93 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 335 orang dengan 1,19 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter gigi umum terhadap 1000 penduduk sebesar 2,4 artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 3 perawat jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio perawat belum memenuhi target.

5) Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian di Sarana Kesehatan

Tenaga Kefarmasian yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 38 orang dengan 0,13 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 44 orang dengan 0,15 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 35 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 63 orang dengan 0,21 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter gigi umum terhadap 1000 penduduk sebesar 1 tenaga kefarmasian artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 tenaga kefarmasian jika dilihat

dari tabel selama empat tahun rasio tenaga kefarmasian belum memenuhi target.

6) Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat di Sarana Kesehatan

Kesehatan masyarakat yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 21 orang dengan 0,07 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 37 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 41 orang dengan 0,14 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 39 orang dengan 0,13 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter gigi umum terhadap 1000 penduduk sebesar 1 kesehatan masyarakat artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 kesehatan masyarakat jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio kesehatan masyarakat belum memenuhi target.

7) Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan di Sarana Kesehatan

Kesehatan lingkungan yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 26 orang dengan 0,09 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 40 orang dengan 0,13 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 42 orang dengan 0,14 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 35 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk. Target Rasio dokter gigi umum terhadap 1000 penduduk sebesar 0,21 kesehatan lingkungan artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 kesehatan lingkungan jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio kesehatan lingkungan belum memenuhi target.

8) Jumlah dan Rasio Tenaga Teknisi Medis Ahli Laboratorium

Medis ahli laboraturium yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 32 orang dengan 0,11 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 33 orang dengan 0,11 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 42 orang dengan 0,11 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 37 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk. Target Rasio medis ahli laboraturium terhadap 1000 penduduk sebesar 0,35 medis ahli laboraturium artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 medis ahli laboraturium jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio medis ahli laboraturium belum memenuhi target.

9) Jumlah dan Rasio Tenaga Gizi

Tenaga Gizi yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat mulai tahun 2021 sebanyak 22 orang dengan 0,07 Per 1000 penduduk, tahun 2022 sebanyak 35 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk, dan tahun 2023 sebanyak 42 orang dengan 0,14 Per 1000 penduduk dan tahun 2024 sebanyak 37 orang dengan 0,12 Per 1000 penduduk. Target Rasio tenaga Gizi terhadap 1000 penduduk sebesar 0,35 tenaga Gizi artinya setiap 1000 penduduk hanya dilayani oleh 1 tenaga Gizi jika dilihat dari tabel selama empat tahun rasio medis tenaga Gizi belum memenuhi target.

D. Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Tulang Bawang Barat

Universal Health Coverage (UHC) merupakan indikator penting untuk mengukur cakupan jaminan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk, guna menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas. Berdasarkan data hingga tahun 2025, capaian UHC Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun belum mencapai ambang batas 98% yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai syarat mendapatkan predikat UHC secara nasional. Dalam perhitungan capaian UHC jumlah penduduk yang digunakan adalah data jumlah penduduk yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini dikarenakan untuk megetahui jumlah penduduk sebenarnya berdasarkan nomor induk kependudukan sehingga memudahkan dalam analisa data penduduk yang masuk dalam jaminan kesehatan pembiayaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berikut capain UHC Kebupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 – 2024 yang disajikan dalam bentuk matrik tabel 2.39

Tabel 2.39
Capain UHC tahun 2022 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	TAHUN	CAPAIAN UHC			KEAKTIFAN PESERTA		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Peserta	Persentase	Jumlah Penduduk	Jumlah Peserta Aktif	Persentase
1	2022	300.328	213.258	71,01%	300.328	149.073	49,64%
2	2023	302.569	234.240	77,42%	302.569	194.946	64,43%
3	2024	312.516	272.620	87,23%	312.516	154.239	49,35%

Sumber : Dinas Kesehatan Tubaba 2025

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2022 cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru mencapai 71,01%, meningkat menjadi 77,42% pada 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan menjadi 87,23%. Meskipun tren ini menunjukkan arah positif, capaian tersebut masih belum mencapai target nasional UHC sebesar 98%. Dan jika capaian cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Tulang Bawang Barat di bandingkan dengan cakupan Provinsi Lampung masih berada di bawah, sebagai mana digambarkan pada gambar grafik di bawah ini.

Gambar 2.
Grafik Perkembangan Cakupan JKN tahun 2022 – 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung

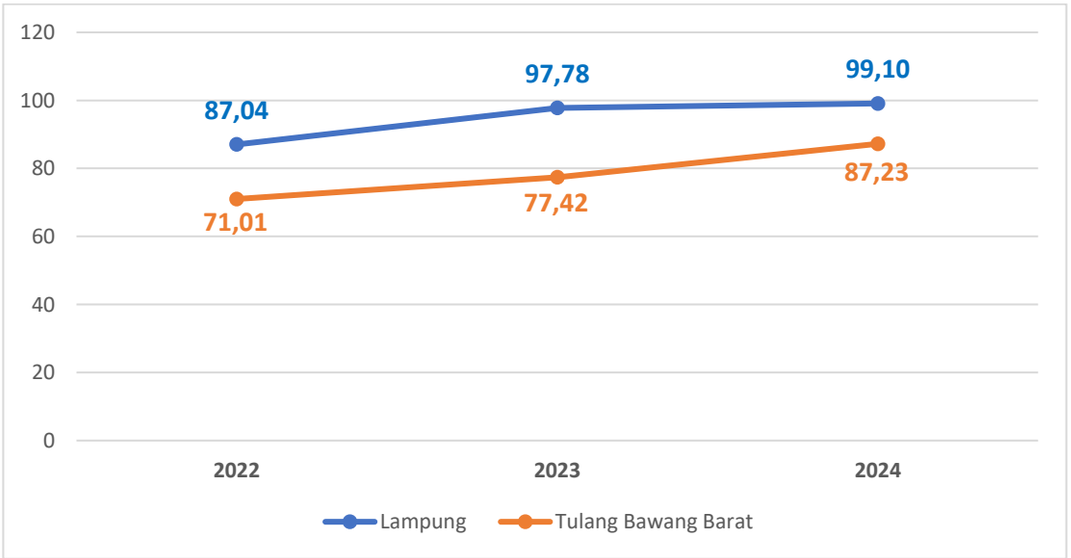

Sumber : Dinas Kesehatan Tubaba 2025

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat ditarik suatu kesempulan bahwa Provinsi Lampung telah berhasil mencapai dan bahkan melampaui standar Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2023, bahkan telah mencapai 99,10% pada tahun 2024, sedangkan untuk capaian di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum mencapai stadar UHC, walaupun belum mencapai UHC di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif, dapat dilihat terutama pada laju peningkatannya dari tahun 2023 ke 2024, yang mengindikasikan adanya percepatan program yang kuat oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat.

E. Kasus Kematian Ibu

Kematian ibu merupakan indikator utama dalam menilai derajat kesehatan ibu dan kualitas pelayanan kesehatan maternal di suatu wilayah. Kematian ibu didefinisikan sebagai kematian seorang perempuan selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah berakhirnya kehamilan), yang disebabkan oleh kehamilan atau penanganannya, bukan karena sebab-sebab kebetulan atau insidental. Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat, angka kematian ibu menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun dalam lima tahun terakhir.

Meskipun sempat mengalami lonjakan pada tahun 2021, tren menurun yang terjadi dalam tiga tahun terakhir merupakan sinyal positif dari hasil intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu, penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten.

Jumlah kasus kematian ibu maternal di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami keturunan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Kasus Kematian Ibu Meternal tahun 2022 sejumlah 3 kasus dan ditahun 2024 turun menjadi 1 kasus. Berikut tabel kasus kematian ibu maternal disajikan pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus	3	5	3	2	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025

F. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun per 1000 kelahiran. AKHB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Dilihat dari persentase AKHB tahun 2023 yaitu 99,77%. Mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 99,72%. Secara lebih rinci informasi jumlah kelahiran, AKB, dan AKHB disajikan dalam Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelahiran Hidup	4.743	4.743	4.869	4.302	4.578
2	Jumlah Kelahiran Mati	11	11	18	10	13
3	Angka Kematian Bayi (%)	2,2	2,2	3,7	4,42	4,81
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	99,76	99,76	99,63	99,77	99,72

Sumber: Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat 2025

G. Kasus Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada seorang bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan ini adalah jumlah kasus kematian bayi setiap tahun dan Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kematian bayi merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat, karena sangat terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi, serta lingkungan hidup.

Data kasus kematian bayi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang Jumlah Kasus Kematian Bayi Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu dari 10 kasus meningkat menjadi 13 kasus. Angka kasus kematian bayi disajikan dalam Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Kasus Kematian Bayi Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus	11	11	18	10	13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025

H. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah penduduk yang meninggal satu bulan pertama setelah kelahiran (28 hari) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Kasus kematian neonatal di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami fluktuatif dalam waktu lima tahun terakhir, pada tahun tahun 2020 sebanyak 15 kasus dan pada tahun 2021 tidak ada kasus neonatal ditahun 2023 sejumlah 19 kasus dan ditahun 2024 menurun menjadi 9 kasus, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berhasil dalam menekan Angka Kematian Neonatal. Kasus kematian neotanal disajikan dalam Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Kasus Kematian Neonatal Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus	15	0	3	19	9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025

I. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat menurut data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu dari 22,1% ke 16,4%, dan untuk tahun 2023 digunakan data dari SKI dan mengalami penurunan kembali menjadi 10,5. Prevalensi tersebut mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama dengan perangkat daerah yang terkait dengan penanganan stunting. Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2021-2024 dapat dilihat di gambar grafik di bawah ini.

Gambar 2.41.
Grafik Prevelensi Stunting Tahun 2021 - 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

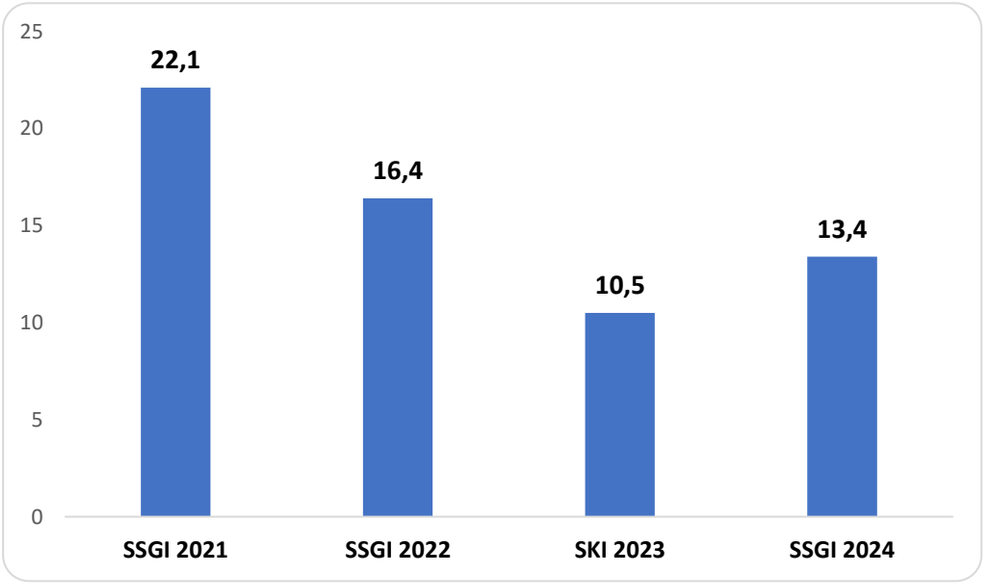

Sumber : SSGI dan SKI

Berdasarkan data SSGI tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk capaian penangangan prevalensi stunting berada di atas capaian Provinsi Lampung sebagai mana tergambar pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.42
Prevalensi Stunting Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung
Berdasarkan SKI tahun 2024

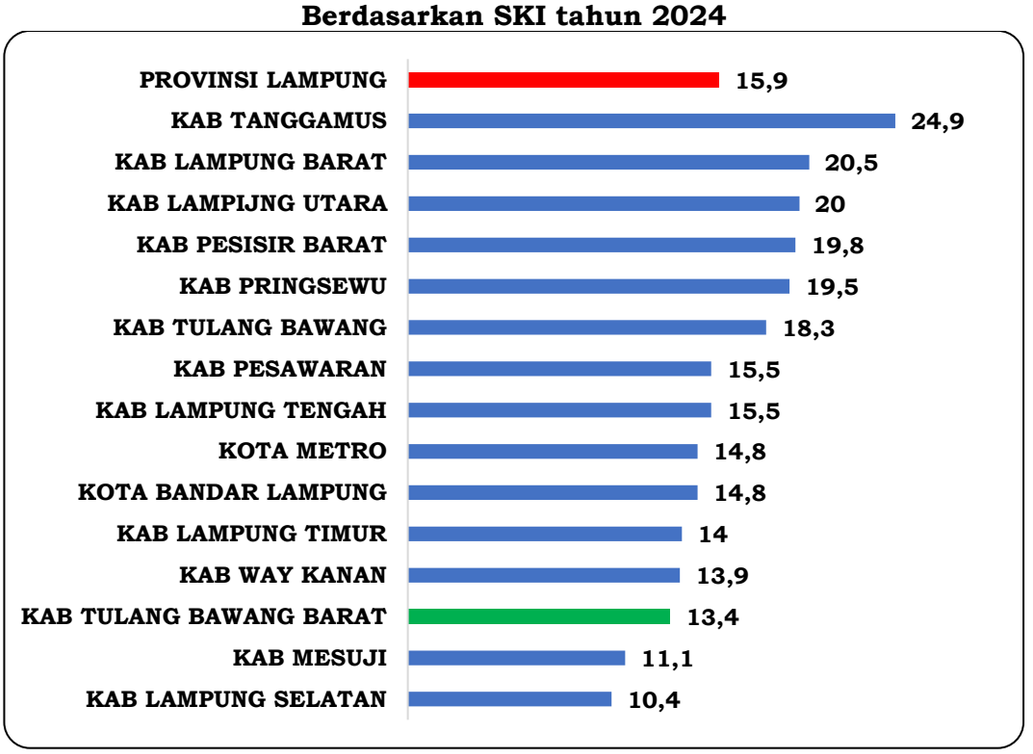

Sumber : SSGI Tahun 2024

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2023-2024 APK jenjang pendidikan SD mengalami penurunan. APK Jenjang SD tahun 2023 105,58 dan ditahun 2024 menjadi 101,19. Sementara itu, hanya nilai APK jejang pendidikan SMP yang mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2023 91,70 meningkat di tahun 2024 menjadi 93,79. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020-2024. disajikan dalam Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD	109,95	108,37	109,10	105,58	101,19
2	SMP	101,74	100,21	99,67	91,70	93,79
3	SMA	64,37	71,85	71,29	78,59	75,99
	APK	92,02	93,47	93,35	91,95	90,32

Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar tingkat SMA masih rendah untuk itu perlu alternatif pendidikan selain SMA dalam bentuk Paket A, B dan C guna memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia SMA.

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni berbagai jenjang pendidikan menurut jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.45 SMA mengalami perkembangan yang selalu meningkat tiap tahunnya, namun jenjang pendidikan SD selalu berada pada angka 95%. Secara umum APM di Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat hingga tahun 2024.

Tabel 2.45.
Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

(dalam persen)

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	99,02	99,07	99,46	99,55	97,71
SMP	84,71	84,24	84,18	85,36	87,56
SMA	53,86	54,78	57,24	63,48	64,88
APM	**79,19**	**79,36**	**80,29**	**82,79**	**83,38**

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025.

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh jumlah murid usia sekolah. Namun naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau semakin rendah. Data perkembangan APS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2021 - 2023
KabupatenTulang Bawang Barat

No	Umur	2021	2022	2023	2024
1	7-12	99,73	99.46	99,76	98,99
2	13-15	93,84	92.89	93,41	94,02
3	16-18	74,85	71.57	71,30	69,47

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tulang Bawang Barat 2025

Angka Partisipasi Sekolah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yaitu pertumbuhan penduduk nilainya lebih besar dari pertumbuhan siswa, maka persentase APS akan menurun, begitu pula sebaliknya.

D. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan gedung sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun 2024 sebesar 1,15 (Tabel 2.47), adapun ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar menurut Kecamatan Tahun 2021-2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.47.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sekolah (SMPN, SMP Swasta dan MTsN, MTs Swasta)	75	78	81	81
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	12.355	15.077	15.730	
	Rasio	**48,84**	**51,73**	**51,49**	

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.48
Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
SD/MI dan SMP/MTs Menurut Kecamatan Tahun 2024
Kab. Tulang Bawang Barat

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		SD	MI	Total	SMP	MTs	Total
1	Tulang Bawang Udik	22	-	22	6	2	8
2	Tumijajar	32	2	34	9	4	13
3	Tulang Bawang Tengah	46	7	53	15	7	22
4	Pagar Dewa	5	1	6	2	-	2
5	Lambu Kibang	15	1	16	6	2	8
6	Gunung Terang	13	2	15	6	1	7
7	Batu Putih	10	3	13	3	3	6
8	Gunung Agung	21	1	22	7	2	9
9	Way Kenanga	13	-	13	5	1	6
	Jumlah	**177**	**17**	**194**	**59**	**22**	**81**

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

E. Rasio Guru dan Murid

Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara jumlah murid dengan jumlah guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil rasio guru terhadap murid menunjukkan hasil yang semakin baik. Rasio guru terhadap murid berdasarkan jenjang Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2024
(Negeri dan Swasta) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pendidikan Dasar	Jmlh Guru	Jmlh Murid	Rasio
SD	2.084	28.542	13,69
SMP	994	13.379	13,45
MI	244	2.692	11,03
MTs	268	2.919	10,89
Jumlah	**3.590**	**47.532**	**13,24**

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

Jika berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dijelaskan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA, seorang guru idealnya bertanggung jawab terhadap 20 peserta didik, maka jika dilihat pada Tabel diatas untuk rasio guru dan murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup ideal karena seorang guru bertangung jawab kurang dari dua puluh siswa, akan tetapi dimungkinkan pemerataan penempatan guru yang belum merata atar wilayah.

F. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Kegiatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan inisiatif yang diselenggarakan oleh Perpustakaan

Nasional RI (PERPUSNAS) dengan tujuan untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. Aktivitas ini merupakan bagian integral dalam penguatan budaya literasi, dengan fokus pada pengukuran usaha pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengelola dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan budaya literasi yang lebih baik di masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mencerminkan tingkat pengembangan literasi di suatu daerah yang diperoleh dari elemen-elemen yang terlibat dalam pembangun literasi masyarakat. Data ini diperoleh melalui sumber sekunder dan aspek masyarakat yang terkait dengan upaya pengembangan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat. Kajian ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang perpustakaan, sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Menurut data IPLM yang dirilis oleh Perpusnas RI, pada tahun 2023, indeks IPLM Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di angka 60,9% dan mengalami kenaikan menjadi 63,11 di tahun 2024. Dengan hasil tersebut, IPLM Kabupaten Tulang Bawang Barat berada dalam kategori sedang, yaitu pada interval 50-79,9. Hal ini menunjukkan perlunya upaya bersama untuk meningkatkan skor IPLM dengan target capaian di kategori sangat tinggi dalam dua puluh tahun ke depan, yang berada pada interval penilaian 90-100.

Sebagai langkah tindak lanjut, penting bagi seluruh pihak untuk bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas perpustakaan dan budaya literasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Upaya peningkatan ini akan mendukung pencapaian target IPLM yang lebih baik di masa depan dan berkontribusi pada kemajuan literasi masyarakat secara keseluruhan. Perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pengembangan literasi

2.1.2.4. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komposit yang menggambarkan derajat kesehatan keluarga melalui sejumlah dimensi, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi lingkungan rumah tangga. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IKS Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih tergolong rendah dan membutuhkan perhatian serius dalam periode perencanaan berikutnya.

Pada tahun 2020 dan 2021, IKS tercatat stagnan di angka 0,090, mencerminkan tantangan dalam peningkatan indikator-indikator kesehatan keluarga di tengah kondisi pandemi COVID-19. Namun, mulai tahun 2022, terjadi perbaikan yang ditandai dengan peningkatan menjadi 0,093, lalu meningkat lebih signifikan menjadi 0,108 pada tahun 2023, dan mencapai 0,110

pada tahun 2024. Peningkatan IKS ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat. Meski demikian, angka capaian yang masih berada di bawah 0,2 menandakan bahwa masih terdapat pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk mendorong seluruh rumah tangga mencapai kategori keluarga sehat.

Dalam periode RPJMD 2025–2029, upaya peningkatan IKS akan menjadi salah satu prioritas pembangunan bidang kesehatan. Hal ini akan diarahkan melalui penguatan layanan kesehatan primer, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam praktik hidup sehat, serta peningkatan cakupan dan kualitas intervensi lintas sektor yang berkontribusi pada dimensi kesehatan keluarga.

Table 2.50
Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	**0,090**	**0,090**	**0,093**	**0,108**	**0,110**

Sumber : Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat 2025

2.1.2.5. Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Capaian Pelayanan Sosial

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus diprioritaskan bagi individu yang hidup dalam kondisi tidak layak secara kemanusiaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun 2020 hingga 2022 dapat ditemukan dalam Tabel 2.46. Data ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang memerlukan bantuan sosial. Melalui tabel tersebut, informasi rinci mengenai jumlah penerima layanan kesejahteraan sosial selama periode tersebut disajikan. Tabel 2.46 memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah penerima pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam tiga tahun terakhir. Informasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkannya. Dengan memantau data ini, dapat dievaluasi sejauh mana efektivitas program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.51.
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020-2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenis Masalah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	10		-	-	1
2	Anak Terlantar	30	300	200	200	40

No	Jenis Masalah	2020	2021	2022	2023	2024
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum		9	4	4	1
4	Anak Jalanan		-	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas	5	5	-	-	25
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	3	28	25	25	30
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan	7	1	25	25	30
8	Lanjut Usia Terlantar		0	10	10	50
9	Penyandang Disabilitas	391	-	145	145	125
10	Tuna Sosial	1.126	-	-	-	225
11	Gelandangan		-	10	10	5
12	Pengemis		-	5	5	5
13	Pelumung		-	5	5	8
14	Kelompok Minoritas		-	2	2	-
15	Ex Napi		-	-	-	-
16	Penyandang HIV		-	-	-	-
17	Korban NAPZA		1	1	1	-
18	Korban Traficking		2	2	2	-
19	Korban Tindak Kekerasan	27	28	28	28	30
20	Pekerja Migran Bermasalah		-	1	1	-
21	Korban Bencana Alam		10	6	6	30
22	Korban Bencana Sosial		57	15	15	8
23	Wanita Rawan Sosial	585	-	5	5	12
24	Keluarga Fakir Miskin	16.31	21.989	21.989	21.989	20.320
25	Keluarga Masalah Sosial		1	2	2	-
26	Komunitas Adat Terpencil		-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Tulang Bawang Barat Tahun 2025

Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat memprioritaskan berbagai pelayanan sosial sebagai urusan wajib layanan dasar. Berbagai Program Pemberdayaan Sosial, Program Pemeliharaan Anak Terlantar, Program Pendataan PMKS, serta Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial telah diterapkan untuk menangani masalah-masalah tersebut. Program-program ini dirancang untuk mengatasi berbagai isu sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Penanganan masalah sosial ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Seluruh upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab Dinas Sosial dalam melaksanakan layanan sosial.

B. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengukur persentase tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini melindungi pekerja dari risiko seperti kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan lainnya. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana pekerja di suatu wilayah, baik di sektor formal maupun informal, mendapatkan perlindungan sosial yang layak.

Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebesar 22,6%, menempatkannya di peringkat menengah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Cakupan ini lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah seperti Way Kanan (19,3%) dan Pringsewu (21,4%), tetapi masih berada di bawah Lampung Tengah (26,4%) dan Tulang Bawang (26,9%). Persentase ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam memperluas cakupan kepesertaan, terutama di sektor informal yang mendominasi struktur tenaga kerja Tubaba. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial, keterbatasan akses layanan BPJS, serta belum maksimalnya kebijakan wajib kepesertaan menjadi beberapa faktor yang memengaruhi angka ini.

Untuk meningkatkan cakupan, Tubaba perlu menggalakkan edukasi tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan pekerja informal. Selain itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, seperti program subsidi kepesertaan atau jemput bola ke desa-desa. Dengan langkah ini, diharapkan lebih banyak tenaga kerja di Tubaba mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.

2.1.2.6. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Ada tiga indikator utama kerukunan umat beragama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi merujuk pada sikap saling menerima dan menghargai antara kelompok agama yang berbeda. Kesetaraan adalah keinginan untuk saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan yang sama satu sama lain. Kerja sama mencakup interaksi sosial serta saling berempati dan bersimpati dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, dan agama.

Provinsi Lampung menampilkan tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi, yang biasanya menciptakan lingkungan kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keberagaman yang baik dapat menjadi sumber kekuatan dan kekayaan dalam membangun masyarakat yang inklusif. Pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya berperan aktif dalam mempromosikan dialog antaragama, memfasilitasi kegiatan bersama, dan menciptakan kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan.

Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, indeksnya sebesar 72 dan terus naik hingga mencapai 75,10 pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kerukunan umat beragama Provinsi Lampung dan Nasional, yang masing-masing sebesar 73,09. Data perkembangan indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun 2019 hingga 2023 ditampilkan pada Gambar 2.40.

Gambar 2.43.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019—2023

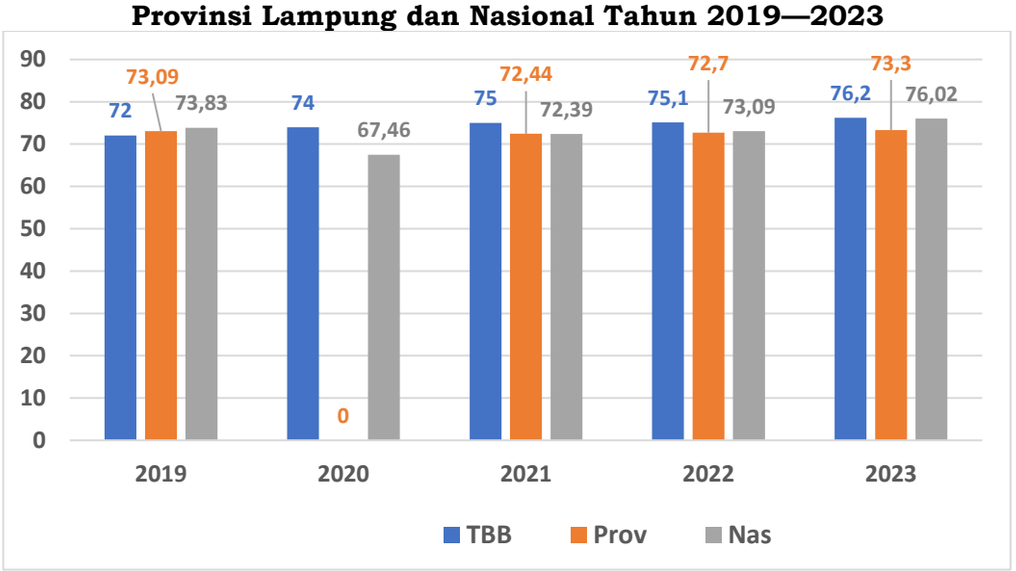

Sumber: Kementerian Agama 2022 dan balitbangdiklat.kemenag.go.id

Kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, peran pemerintah, dan kearifan lokal. Tingkat pendidikan seseorang memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang terhadap realitas di sekitarnya. Pemerintah daerah, sebagai entitas yang berbeda dari lembaga keagamaan, harus hadir di tengah keragaman agama karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, kearifan lokal yang berasal dari pengalaman kolektif masyarakat memiliki potensi besar untuk mendorong kerukunan antar umat beragama.

Indeks kerukunan umat beragama yang positif di Provinsi Lampung mencerminkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah tempat yang aman, inklusif, dan ramah bagi semua kelompok masyarakat. Kehadiran pemerintah daerah di tengah keragaman agama sangat penting untuk memastikan harmoni di masyarakat. Pendidikan yang baik membantu individu melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman. Kearifan lokal yang dikembangkan dari pengalaman bersama juga dapat menjadi alat efektif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis.

Dalam hal investasi, keberagaman yang dikelola dengan baik dapat memberikan banyak keuntungan. Ini termasuk akses ke tenaga kerja yang beragam dan potensi pasar yang luas. Mengelola keberagaman dengan baik tidak hanya menciptakan lingkungan yang harmonis tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kerukunan yang terjaga dapat menjadi tempat yang menarik bagi investor untuk menanamkan modal mereka.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan wilayah transmigrasi yang penduduknya sebagian besar berasal dari Jawa, Sunda, dan Bali. Akibatnya, daerah ini kaya akan berbagai kebudayaan, termasuk kebudayaan Lampung, Jawa, dan Bali. Beragam bentuk kesenian tradisional dari ketiga budaya tersebut,

baik kesenian rakyat maupun kesenian klasik, masih eksis dan dihargai hingga saat ini. Nuansa budaya Lampung, Jawa, dan Bali sangat terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan dan mengembangkan seni pertunjukan serta tradisi Jawa yang telah melekat dalam masyarakat Tulang Bawang Barat.

Seni pertunjukan tradisi di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang masih aktif dan berkembang meliputi begawi, tari sembah, dan tari kuda lumping. Selain itu, tari kreasi baru seperti tari Nenemo juga menggambarkan kondisi lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Upaya untuk menjaga dan mengembangkan kesenian tradisi yang sudah menjadi bagian dari masyarakat ini merupakan kontribusi signifikan terhadap pembangunan budaya nasional. Selain itu, ini juga membantu mengurangi dampak budaya asing yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.

Kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat dari beberapa indikator, termasuk pendirian pusat budaya "Balai Adat Sesat Agung". Capaian kinerja urusan kebudayaan selama periode 2021 hingga 2024 disajikan dalam Tabel 2.52. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan tradisional sebagai bagian penting dari identitas dan warisan budaya lokal.

Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Kebudayaan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Penyelenggaraan kegiatan seni (kali)	-	-	1	1
2.	Registratsi Kelompok Seni	5	10	22	21

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulang Bawang Barat, 2025

2.1.2.7. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak

Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan sistem pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak serta perlindungan anak disebut sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Penilaian terhadap penerapan konsep Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan skor yang meningkat dari 240 pada tahun 2019 dan 444 pada tahun 2020, menjadi 495 pada tahun 2021, dan mencapai 596,35 pada tahun 2022.

Gambar 2.44.
Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Tulang Bawang Barat

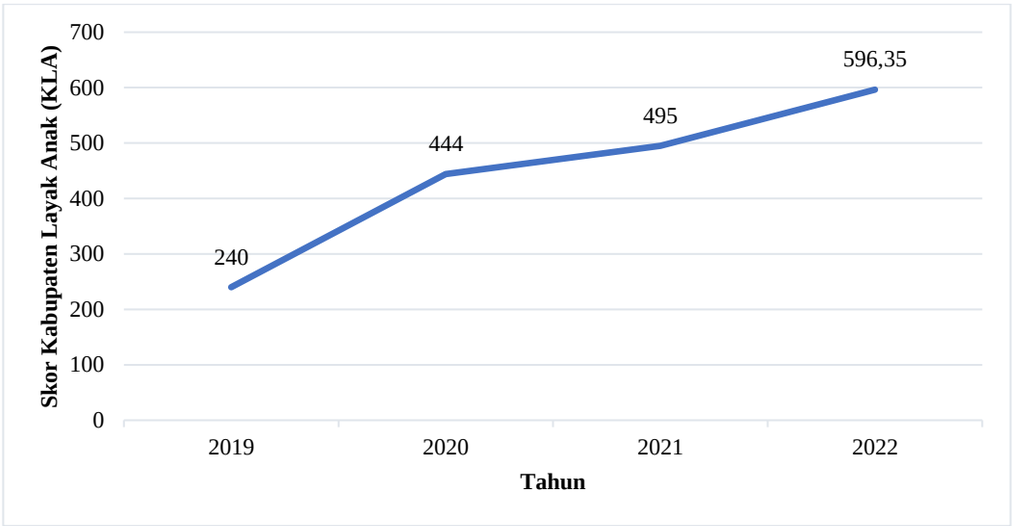

Sumber : Kementrian PPPA 2023

Tabel 2.53.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,69	1,63	1,63	1,63	1,62	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
2.	Rasio akseptor KB	69,29	68,29	74,1	73,8	76,08	52,7	67	70,30	73,2	73,1
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	64,02	71,20	74,1	73,87	76,08	52,7	67	70,30	73,2	73,1
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	15,38	15,34	15,34	15,33	15,23	15,1	20,5	20,5	19,9	19,5
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*UnmetNeed*) (%)	17,49	18,33	14,52	15,72	13,56	8,83	10,7	16,30	9,9	6,5
6.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	76,00	74,00	74,00	73,00	72,00	71,8	17,2	17,2	19,3	24,6
7.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 (semua cara dan caramodern) (%)	60,02	67,98	74,1	73,87	76,08	77,33	67	70,3	73,2	73,1
8.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	56,09	54,99	54,99	55,01	55,4	56,8	100	100	100	100
9.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yangber-KB (%)	70,69	70,81	80,89	80,89	86,5	86,8	87	88	88,5	88,6
10.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	83,09	83,12	83,3	83,3	83,6	84,0	85	85	87	87,5

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025

B. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional dan menduduki peringkat keempat dari 34 provinsi. (Gambar 2.42)

Gambar 2.45.
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Berdasarkan Provinsi Tahun 2022

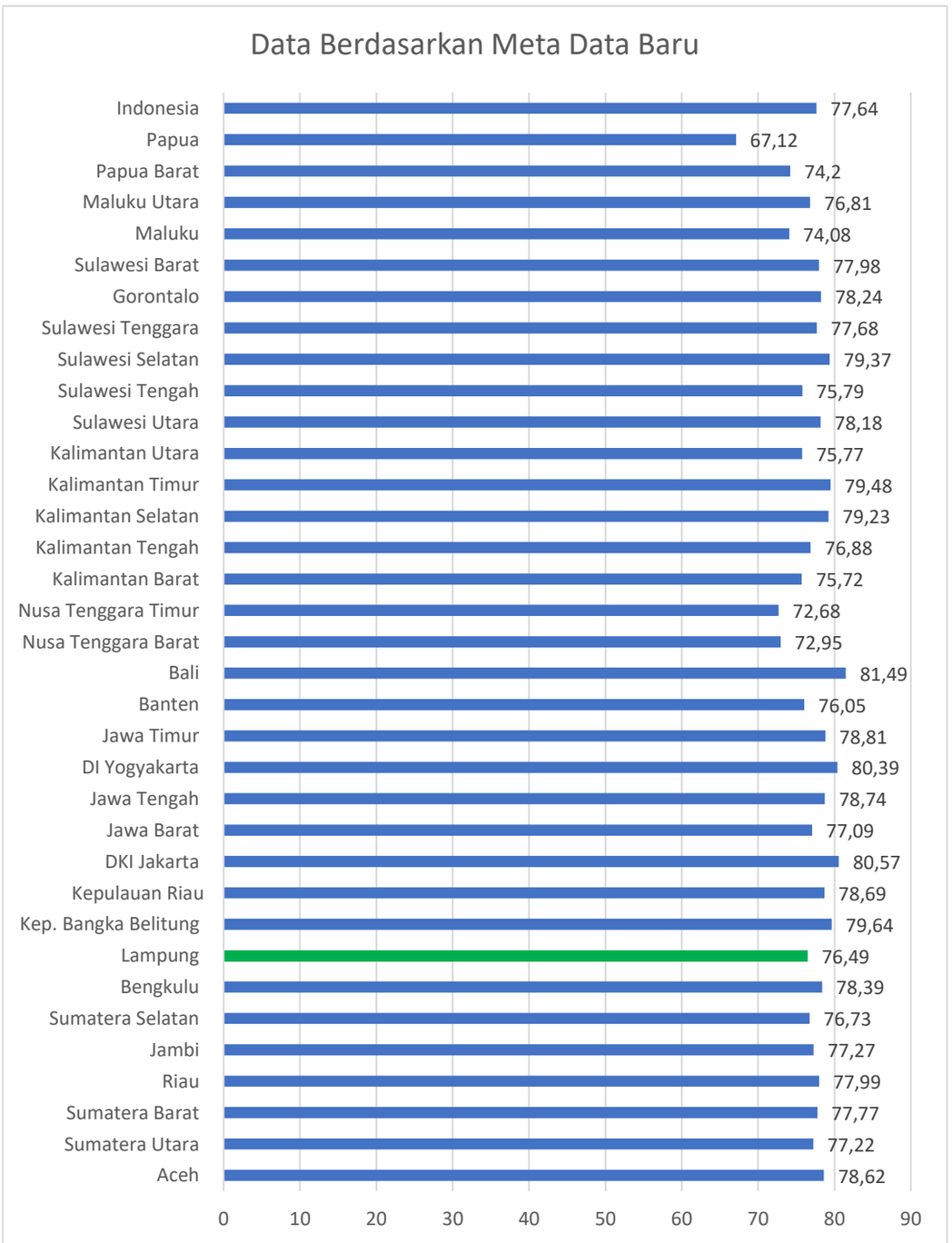

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Laporan IKK Tahun 2022 - 2023

Secara konseptual, kualitas keluarga dapat dipahami melalui definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diatur dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11. Definisi ini mengacu pada keadaan keluarga yang memiliki ketahanan dan kekuatan, serta kemampuan fisik dan materi untuk hidup secara mandiri

dan mengembangkan diri serta keluarga guna mencapai kehidupan yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin. Dengan demikian, kualitas keluarga dapat dianggap sebagai gabungan dari ketahanan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan gender, dan partisipasi keluarga dalam masyarakat. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan alat untuk merangkum berbagai aspek ini dalam satu ukuran kualitas keluarga.

C. Indeks Pembangunan Gender

Pemerintah terus berusaha untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan dengan fokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya ini diwujudkan melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini diikuti dengan Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengatur integrasi isu gender dalam berbagai sektor pembangunan, pembentukan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta dukungan pembiayaan yang responsif gender. Selain itu, Standar Pelayanan Minimal untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga telah diamanatkan.

Untuk menilai efektivitas pembangunan yang responsif gender, digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Index (GDI). IPG merupakan varian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang membedakan data antara laki-laki dan perempuan. Indeks ini berguna untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pembangunan manusia antara kedua gender. Kesetaraan gender tercapai jika nilai IPM sama dengan IPG, menunjukkan adanya kesetaraan dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan melibatkan pengembangan dan penerapan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai aspek pembangunan. Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak perempuan serta anak. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan terdapat peningkatan dalam pencapaian kesetaraan gender di tingkat lokal.

Kesenjangan gender dapat diukur secara statistik melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang sering digunakan untuk menilai pencapaian dasar pembangunan manusia dari sudut pandang gender. Meskipun IPG menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), fokusnya adalah pada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG berguna untuk memahami perbedaan dalam pembangunan manusia antara kedua gender. Dari tahun 2019 hingga 2024, IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan peningkatan.

Perkembangan IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IPG	88,45	88,64	88,96	89,04	89,01	89,72

Sumber : BPS, Provinsi Lampung 2025

Selain dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdapat pula Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah

1) keterlibatan perempuan di parlemen;
2) perempuan sebagai tenaga profesional;
3) sumbangan pendapatan perempuan.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, IDG tercatat sebesar 51,46, mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDG tahun 2018 yang mencapai 59,74. Namun, angka ini kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2023 menjadi 56,53 data rinci IDG Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan dalam gambar Gambar 2.43 dibawah ini.

Gambar 2.46
Grafik Perkembangan IDG Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2018 – 2023

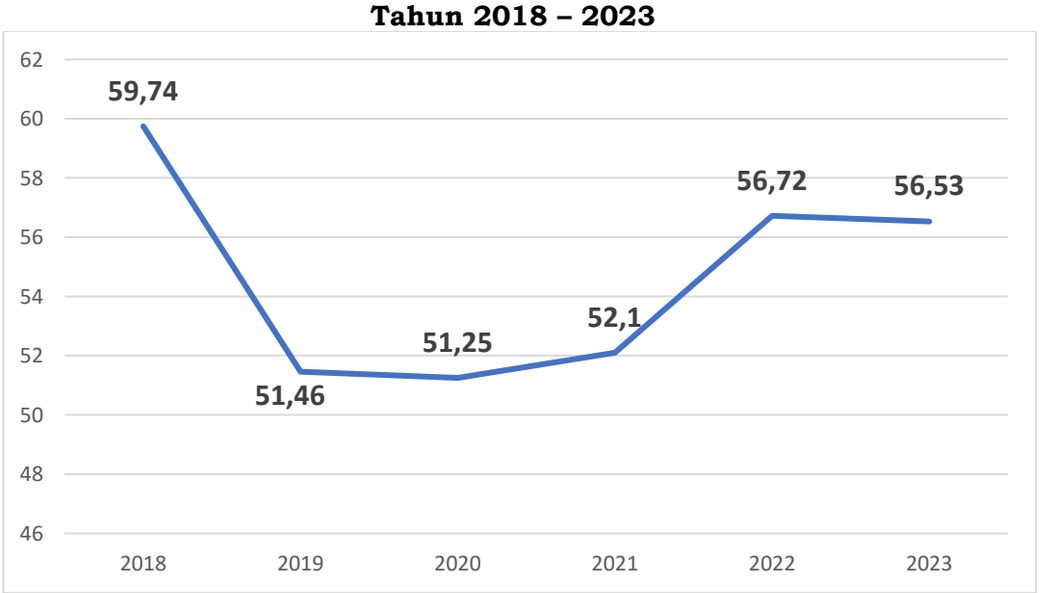

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2024

D. Indeks Ketimpangan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG, pengukuran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga dilakukan untuk mengevaluasi ketimpangan gender yang memengaruhi kualitas pembangunan manusia. IKG diukur berdasarkan tiga

aspek utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh ketimpangan gender berdampak pada pembangunan manusia.

Fluktuasi pada IKG di Kabupaten Tulang Bawang Barat terlihat setiap tahun. Pada tahun 2018, IKG adalah 0,535, yang meningkat menjadi 0,586 pada tahun 2019, sebelum menurun lagi menjadi 0,561 pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 0,572. Kemudian, kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kenaikan pada tahun 2023 sebesar 0,497 dan 0,499.

E. Skor Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak melibatkan pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria ini disebut sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, penilaian untuk kategori layak anak menunjukkan tren positif. Penilaian meningkat dari 240 pada tahun 2019, menjadi 444 pada tahun 2020, lalu mencapai 495 pada tahun 2021, dan akhirnya 604,36 pada tahun 2023.

Implementasi sistem pembangunan berbasis hak anak memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal. Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan kemajuan signifikan dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki kebijakan dan program terkait hak anak. Data penilaian yang semakin tinggi menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di wilayah tersebut. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin dekat dengan status sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel 2.55.
Skor Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KLA	240	444	495	596,35	604,36	Rilis Bulan Juli

Sumber : Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya sa2ing daerah, yang mencakup potensi, kekhasan, dan keunggulan wilayah tersebut, merupakan tujuan utama dari otonomi daerah. Daya saing ini menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, yang berhubungan langsung dengan pencapaian kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap

daya saing daerah dapat meliputi berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi lokal, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, iklim investasi, serta kualitas sumber daya manusia.

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau beban ketergantungan (dependency ratio) mengukur proporsi penduduk dalam kelompok usia produktif yang mampu menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi kelompok usia muda dan tua (kelompok usia tidak produktif). Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (keduanya tidak termasuk angkatan kerja) dengan jumlah penduduk berusia 15-64 tahun (angkatan kerja). Kabupaten Tulang Bawang Barat, komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif, yang berusia antara 15-64 tahun, mengalami peningkatan dari 64,61% pada tahun 2018 menjadi 68,39% pada tahun 2023. Persentase penduduk ini digambarkan secara rinci pada Gambar 2.44 di bawah ini.

Gambar 2.47
Persentase penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut kelompok umur, Tahun 2018 – 2023

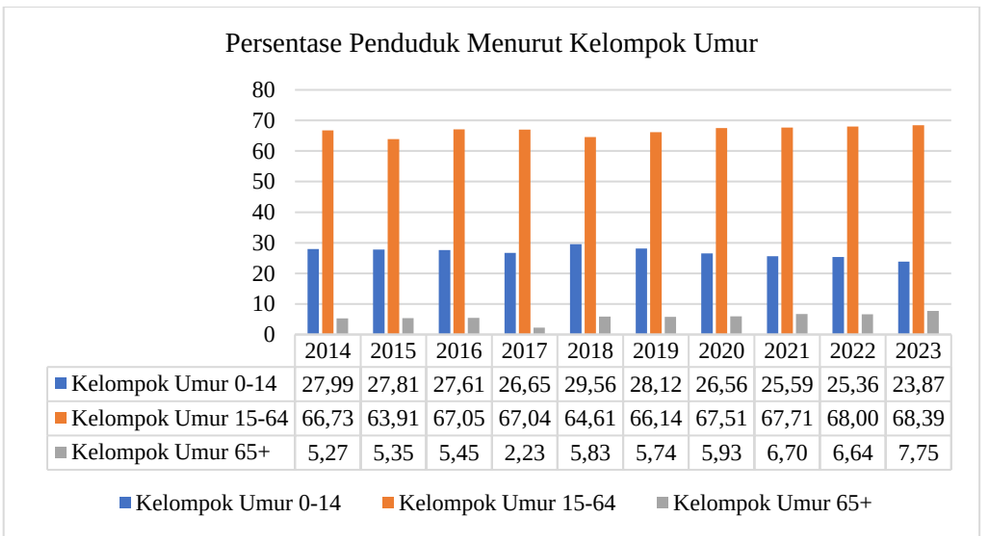

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kelompok Umur 0-14	27,99	27,81	27,61	26,65	29,56	28,12	26,56	25,59	25,36	23,87
Kelompok Umur 15-64	66,73	63,91	67,05	67,04	64,61	66,14	67,51	67,71	68,00	68,39
Kelompok Umur 65+	5,27	5,35	5,45	2,23	5,83	5,74	5,93	6,70	6,64	7,75

Berdasarkan Gambar 2.44, terlihat bahwa proporsi penduduk berusia 15–65 tahun di Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat setiap tahun dari 2014 hingga 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya bonus demografi di wilayah tersebut, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Bonus demografi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat karena diharapkan dapat mengurangi rasio ketergantungan. Dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat meningkat dan tingkat pengangguran terbuka dapat berkurang.

B. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam berbagai jenjang pendidikan secara umum. APK merupakan alat ukur dasar untuk menilai seberapa besar jumlah penduduk usia sekolah yang terdaftar dalam masing-masing tingkat pendidikan. Berdasarkan data dari Kemendikbud, pada tahun 2020, APK untuk tingkat SD adalah 90,52 yang menunjukkan bahwa jumlah siswa yang bersekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD. Hal ini disebabkan oleh rentang usia siswa di SD yang bervariasi, mulai dari kurang dari 7 tahun hingga lebih dari 12 tahun, dan pada tahun 2024, APK untuk jenjang SD mengalami peningkatan menjadi 101,19.

Sementara itu, untuk tingkat SMP, APK pada tahun 2020 tercatat sebesar 78,75 dan mengalami peningkatan menjadi 93,79 pada tahun 2024, selanjutnya di tingkat SMA terjadi penurunan yang signifikan dari APK sebesar 82,70 pada tahun 2020 menjadi 75,99 pada tahun 2024. Data mengenai Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.56.
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD (%)	90,52	87,22	86,61	86,10	101,19
2	SMP (%)	78,75	83,15	85,17	84,66	93,79
3	SMA (%)	82,70	89,04	85,65	85,04	75,99
	APK (%)	**83,99**	**86,47**	**85,81**	**85,27**	**90,32**

Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id

Berdasarkan Tabel 2.56. menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar tingkat SMA pada tahun 2024 mengalamai penurunan dari tahun sebelumya tahun 2023 sebesar 85,04 menjadi 75,99 ditahun 2024, yang artinya terjadi penurunan jumlah anak sekolah pada tingkat SMA yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah SMA.

C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur tingkat keterlibatan penduduk dalam pendidikan pada berbagai jenjang, mencerminkan seberapa banyak anak usia sekolah yang terdaftar di tiap tingkat pendidikan. Sebagai indikator utama dalam menilai capaian pendidikan, APM menunjukkan tren umum bahwa partisipasi pendidikan meningkat setiap tahunnya. Namun, bila diperinci menurut tingkat pendidikan, perkembangan APM menunjukkan fluktuasi, terutama pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas.

Data mengenai perkembangan APM di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 2.56. Tabel ini mengungkapkan variasi dalam tingkat partisipasi pendidikan di daerah tersebut, menggambarkan tren tahunan yang tidak selalu konsisten di masing-masing jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA.

Tabel 2.57.
Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan
Tahun 2020 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD (%)	82,96	80,90	80,85	80,49	97,71
SMP (%)	57,81	61,64	65,21	65,75	87,56
SMA (%)	55,38	59,78	59,06	59,79	64,88
APM (%)	**65,38**	**67,44**	**68,37**	**68,68**	**83,38**

Sumber :apkapm.data.kemdikbud.go.id

Berdasarkan data pada Tabel 2.57 mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga tahun 2024, terlihat bahwa capaian APM secara umum masih berada di bawah 100%, yaitu sebesar 83,38%. Meskipun demikian, ada tren peningkatan setiap tahunnya. Jika diperinci menurut jenjang pendidikan, tingkat partisipasi untuk pendidikan dasar sembilan tahun (SD & SMP) hampir mencapai angka 100%. Namun, untuk jenjang pendidikan SMA, angkanya masih berada di level 64,88%.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan mendesak untuk perhatian dan intervensi dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan capaian APM, terutama di tingkat SMA, guna mencapai partisipasi pendidikan yang lebih merata dan optimal.

D. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan sejauh mana anak-anak pada kelompok usia tertentu terlibat dalam pendidikan dan seberapa baik sistem pendidikan formal dapat menjangkau populasi usia sekolah. APS dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada usia pendidikan dasar dengan setiap 1.000 penduduk pada usia yang sama. Fluktuasi dalam nilai APS sangat dipengaruhi oleh perubahan jumlah siswa usia sekolah. Meskipun adanya peningkatan dalam jumlah siswa tidak selalu mencerminkan kemajuan dalam partisipasi sekolah, karena hal ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas pendidikan dan peningkatan akses ke sekolah, yang bisa menyebabkan partisipasi sekolah stagnan atau bahkan menurun.

Perubahan dalam Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.58. Data ini menunjukkan bagaimana fluktuasi APS dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penambahan jumlah penduduk usia sekolah serta ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam mengevaluasi tren partisipasi sekolah dan merencanakan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel 2.58.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020 – 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Umur	Tingkat Pendidikan	Sat	2020	2021	2022	2023	2024
1	7-12	SD / MI / Paket A	%	99,59	99,73	99.46	99,76	98,99
2	13-15	SMP / MTs / Paket B	%	93,72	93,84	92.89	93,41	94,02
3	16-18	SMA / SMK / MA / Paket C	%	74,58	74,85	71.57	71,30	69,47

Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tulang Bawang Barat 2025
Dan apkapm.data.kemdikbud.go.id

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat diamati bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat SD dan SMP hingga tahun 2024 hampir mencapai 100%, yang menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam partisipasi pendidikan pada kedua jenjang tersebut. Namun, untuk tingkat SMA, APS masih jauh dari angka ideal, yaitu baru mencapai 69,47% tahun 2024 yang mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu sebesar 71,30%, sehingga memerlukan upaya tambahan untuk meningkatkan angka partisipasi. Fluktuasi APS sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk; jika pertumbuhan penduduk melebihi pertumbuhan jumlah siswa, persentase APS akan menurun, dan sebaliknya.

E. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu proses pembinaan yang berlangsung dari lahir hingga usia enam tahun, bertujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan yang mendukung perkembangan fisik dan mental anak. Program ini dirancang untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar dengan optimal, dengan menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sejak dini. PAUD berfungsi untuk membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sesuai dengan tahap perkembangannya, agar mereka siap untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya.

Tujuan dari PAUD adalah untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan peserta didik, sehingga mereka menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, sehat, terampil, serta kreatif dan mandiri. PAUD juga bertujuan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial anak melalui lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Data mengenai jumlah PAUD, guru, dan murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun ajaran 2017/2018 hingga 2024/2025 dapat ditemukan dalam tabel 2.58 di bawah ini.

Tabel 2.59.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid PAUD (TK) Negeri/Swasta/
Raudatul Athfal (RA) Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2018 – 2024

No	Tahun Ajaran	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	2017/2018	202	1.870	31.227
2	2018/2019	212	704	9.329
3	2019/2020	212	694	9.169
4	2020/2021	142	526	6.013
5	2021/2022	147	561	6.008

No	Tahun Ajaran	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
6	2022/2023	130	630	6.390
7	2023/2024	160	675	8.164
8	2024/2025	153	651	6.266

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

F. Rasio Ketersediaan Sekolah atas Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah mengukur jumlah sekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan setiap 10.000 penduduk usia sekolah, memberikan gambaran tentang kapasitas sekolah dalam menampung populasi anak usia sekolah. Pada tahun 2023, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, terdapat 193 sekolah yang melayani 34.236 anak usia sekolah dasar (7-12 tahun). Dengan angka rasio ketersediaan sekolah sebesar 56,37, tampak bahwa kapasitas sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum mencukupi untuk seluruh penduduk usia sekolah dasar, menunjukkan adanya kekurangan fasilitas pendidikan pada jenjang tersebut. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dari tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2023 adalah sebesar 51,49. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menampung penduduk usia sekolah menengah pertama masih tergolong rendah. Dengan demikian, terdapat kekurangan sekolah yang dapat mengakomodasi seluruh anak usia sekolah menengah pertama. Data rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah pertama dari tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.60.
Ketersediaan Sekolah atas Penduduk Usia Sekolah Dasar
Tahun 2018-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	Rasio
1	2018	179	33.519	53,40
2	2019	180	33.866	53,15
3	2020	190	34.121	55,68
4	2021	191	34.537	55,30
5	2022	192	34.234	56,08
6	2023	193	34.236	56,37
7	2024	194		

Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024 (Jumlah sekolah)
Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id (Jumlah penduduk klpok usia 7-12 th)

Tabel 2.61.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah
Pertama Tahun 2018-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	Rasio
1	2018	71	13.878	51,16
2	2019	69	15.188	45,43
3	2020	72	15.488	46,49
4	2021	75	15.355	48,84

No	Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	Rasio
5	2022	78	15.077	51,73
6	2023	81	15.730	51,49
7	2024	81		

Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka (Jumlah sekolah)
Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id (Jumlah penduduk klpok usia 13-15 thn)

G. Rasio Guru dan Murid

Rasio antara jumlah murid dan guru diperoleh dari pembagian total murid dengan total guru. Sementara itu, rasio guru terhadap murid mengacu pada jumlah guru pendidikan dasar per 1.000 murid pendidikan dasar. Rasio ini mencerminkan ketersediaan tenaga pengajar dan digunakan untuk mengevaluasi jumlah murid yang ideal untuk setiap guru guna memastikan mutu pengajaran. Rasio yang lebih kecil menunjukkan kualitas pengajaran yang lebih baik. Informasi rinci mengenai rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk periode 2014 hingga 2023 dapat ditemukan dalam Tabel 2.62. Tabel tersebut menyediakan data yang diperlukan untuk menilai perkembangan rasio selama periode waktu tersebut.

Tabel 2.62.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2018-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun	Jumlah Guru Negeri/Swasta/ SD/MI	Jumlah Murid Negeri/Swasta/ SD/MI	Rasio	Jumlah Guru Negeri/Swasta/ SMP/MTS	Jumlah Murid Negeri/Swasta/ SMP/MTS	Rasio
2018	1.891	31.050	16,42	946	11.096	11,73
2019	2.024	31.492	15,56	1.004	13.557	13,50
2020	2.150	33.244	15,46	1.058	14.592	13,79
2021	2.159	32.474	15,04	1.102	15.344	13,92
2022	2.307	32.113	13,92	1.186	15.350	12,94
2023	2.325	32.162	13,83	1.241	15.838	12,76
2024	2.328	31.234	13,42	1.262	16.298	12,91

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan data rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama untuk tahun 2023, didapatkan angka sebesar 13,83 untuk sekolah dasar dan 12,76 untuk sekolah menengah pertama. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecukupan tenaga pengajar di kedua jenjang tersebut di Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena setiap guru menangani rasio guru terhadap murid yang lebih kecil dibandingkan dengan rasio ideal yang diharapkan. Rasio ideal untuk guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar adalah 18 murid per guru, sementara untuk pendidikan menengah pertama adalah 16 murid per guru. Dengan demikian, semakin sedikit jumlah murid yang ditangani oleh masing-masing guru diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Selain itu, perkembangan rasio guru terhadap murid dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada jenjang pendidikan dasar, rasio guru terhadap murid

menurun dari 16,42 pada tahun 2018 menjadi 13,42 pada tahun 2024. Namun tidak demikian dengan jenjang pendidikan menengah pertama, rasio guru terhadap murid terjadi fluktuatif yaitu dari 11,73 pada tahun 2018 menjadi 13,92 pada tahun 2021 dan menurun kembali pada tahun 2024 yaitu menjadi . Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa kondisi semakin baik dengan semakin sedikit jumlah murid per guru, walaupun tetap penting untuk memperhatikan distribusi jumlah guru di setiap sekolah agar kualitas pendidikan tetap optimal.

H. Daya Saing Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dipahami melalui kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB. Dengan memahami struktur ini, upaya pembangunan ekonomi dapat diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dan potensi lokal. Selain itu, struktur ekonomi tersebut juga menjadi dasar perencanaan untuk perbaikan atau penciptaan struktur ekonomi yang optimal dalam jangka panjang. Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan harga berlaku untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.45

Gambar 2.48.
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

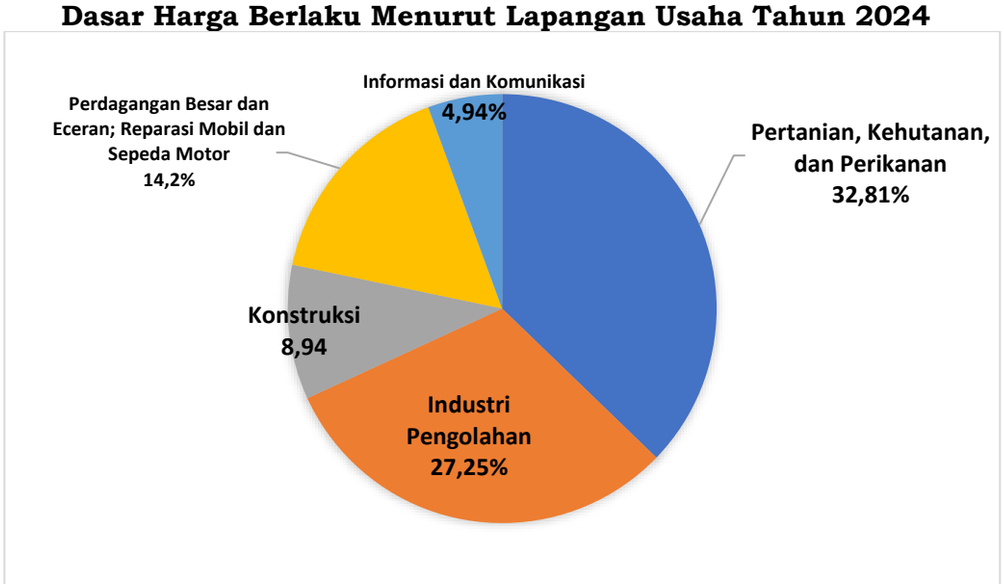

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan Gambar 2.40, struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 didominasi oleh lima sektor utama dari total 17 sektor yang menyumbang terhadap pembentukan PDRB. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sebagai sektor primer, memberikan kontribusi terbesar sebesar 32,81%. Sektor berikutnya adalah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 27,25%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 14,2%, sektor konstruksi sebesar 8,94%, dan sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi sebesar 4,94%. Untuk informasi lebih rinci mengenai kontribusi sektor-sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2018 hingga 2024, dapat dilihat pada Tabel 2.63 di bawah ini.

Pada tabel 2.63 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, di mana kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan dari 35,55% pada tahun 2018 menjadi 32,81% pada tahun 2024 akan tetapi sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama di sektor perdagangan besar, dan industri pengolahan.

Untuk secara lengkap data PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha dan perkekembangannya dari tahun 2018 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.64. sebagai berikut.

Tabel 2.63.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2018 – 2024

No	Sektor / Lapangan Usaha	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,55	34,07	35,14	34,52	34,98	34,10	32,81
2	Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,50	0,49	0,45	0,44	0,45	0,44
3	Industri Pengolahan	29,31	30,10	28,14	29,19	27,71	27,21	27,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08
6	Konstruksi	8,55	8,75	8,48	8,71	8,73	8,79	8,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	10,33	10,61	10,77	10,83	12,46	13,78	14,20
8	Transportasi dan Pergudangan	0,85	0,85	0,84	0,85	0,97	1,19	1,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,95	0,92	0,90	0,93	0,99	0,99
10	Informasi dan Komunikasi	5,07	5,14	5,54	5,35	4,92	4,88	4,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	0,53	0,55	0,56	0,54	0,53	0,52
12	Real Estate	1,95	2,02	2,00	1,95	1,90	1,81	1,87
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
14	Administrasi Pemerintahan,	2,93	2,91	3,09	2.99	2,81	2,65	2,71
15	Jasa Pendidikan	2,41	2,47	2,61	2,57	2,51	2,46	2,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,43	0,44	0,49	0,49	0,46	0,45	0,48
17	Jasa lainnya	0,46	0,47	0,45	0,44	0,46	0,52	0,56
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.64.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2018 – 2024 (dalam milayar rupiah)

No	Sektor / Lapangan Usaha	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan	3.549,66	3.787,65	3.899,85	4.013,53	4.129,18	4.629,47	4.906,81	5.116,95
2	Pertambangan dan Penggalian	51,03	54,38	56,74	56,42	54,02	57,63	65,09	69,09
3	Industri Pengolahan	2.855,20	3.122,54	3.445,37	3.244,84	3.491,06	3.666,33	3.916,00	4.296,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,7	3,97	4,32	4,70	5,03	5,26	5,64	5,8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	9,35	9,83	10,36	10,92	11,53	12,09	12,42	13,22
6	Konstruksi	836,81	910,96	1.001,68	969,01	1.042,02	1.155.33	1.265,46	1.394,03
7	Perdagangan Besar dan	1.040,83	1.101,12	1.214,07	1.230,15	1.294,82	1.648,56	1.982,71	2.215,03
8	Transportasi dan	83,16	90,05	96,98	96,06	101,08	128,41	171,39	205,00
9	Penyediaan Akomodasi dan	90,09	98,68	108,40	105,13	107,27	122,62	142,91	154,83
10	Informasi dan Komunikasi	489,16	539,80	588,85	632,89	640,02	650,58	702,66	771,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	55,61	58,73	60,72	62,47	67,56	71,28	75,63	80,67
12	Real Estate	193,67	207,28	231,00	228,59	232,86	251,29	259,95	292,07
13	Jasa Perusahaan	7,03	7,33	7,67	7,64	7,92	9,06	10,01	11,16
	Administrasi Pemerintahan,	296,81	312,02	333,09	353,07	357,42	372,02	381,03	422,78
15	Jasa Pendidikan	237,29	256,32	282,18	298,08	307,98	331,75	353,41	384,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,5	45,80	49,95	55,68	58,73	60,38	65,11	74,29
17	Jasa lainnya	44,46	48,49	54,08	51,16	52,05	60,69	74,18	87,13
PDRB		**9.854,34**	**10.654,95**	**11.445,30**	**11.420,34**	**11.960,55**	**13.233,01**	**14.390,40**	**15.594,89**

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025

1) Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah instrumen penting untuk mengevaluasi dan memantau derajat inklusivitas pembangunan di Indonesia. Alat ini digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil dan proses pembangunan mencakup seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu, tetapi juga merata di berbagai tingkatan pemerintahan, baik itu di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan menggunakan indeks ini, kita dapat lebih memahami bagaimana kebijakan dan program pembangunan berdampak pada berbagai kelompok masyarakat, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan kesempatan yang adil dalam menikmati hasil pembangunan.

Indeks pembangunan ekonomi inklusif terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Pembangunan ekonomi inklusif dianggap berhasil jika mampu mengurangi kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, dan meminimalkan kesenjangan sosial. Dengan kata lain, pembangunan ini harus memberikan manfaat yang merata dan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati hasil-hasilnya. Pendekatan ini mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil, sehingga menciptakan kondisi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki peran penting dalam mewujudkan ketiga pilar tersebut. Kontribusi daerah ini terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan yang inklusif sangat signifikan, mengingat potensi dan sumber daya lokal yang ada. Dengan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kapasitas, Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat terus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

a) Pengeluaran Penduduk

Pengeluaran penduduk berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan ini dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yang semuanya harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penduduk harus mengeluarkan biaya, yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan dan non-makanan. Ketika pendapatan terbatas, prioritas utama biasanya adalah pemenuhan kebutuhan makanan. Oleh karena itu, pola pengeluaran dapat dijadikan indikator untuk menilai kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin kecil persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, semakin baik tingkat ekonomi penduduk. Selama dua tahun terakhir (2023-2024), pengeluaran makanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih merupakan prioritas utama, dengan persentase pengeluaran makanan per kapita per bulan tetap di atas 50 persen dari total pengeluaran.

Dalam periode 2018 hingga 2024, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Misalnya, pada tahun 2018 persentase pengeluaran untuk makanan mencapai 42,58%, namun mengalami peningkatan menjadi 53,08% pada tahun 2023 dan angka tersebut kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 52,93%. Data lengkap mengenai pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan dan non-makanan di kabupaten tersebut dari tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar 2.46.

Gambar 2.49.
Persentase pengeluaran rata-rata per kapita
Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 – 2024

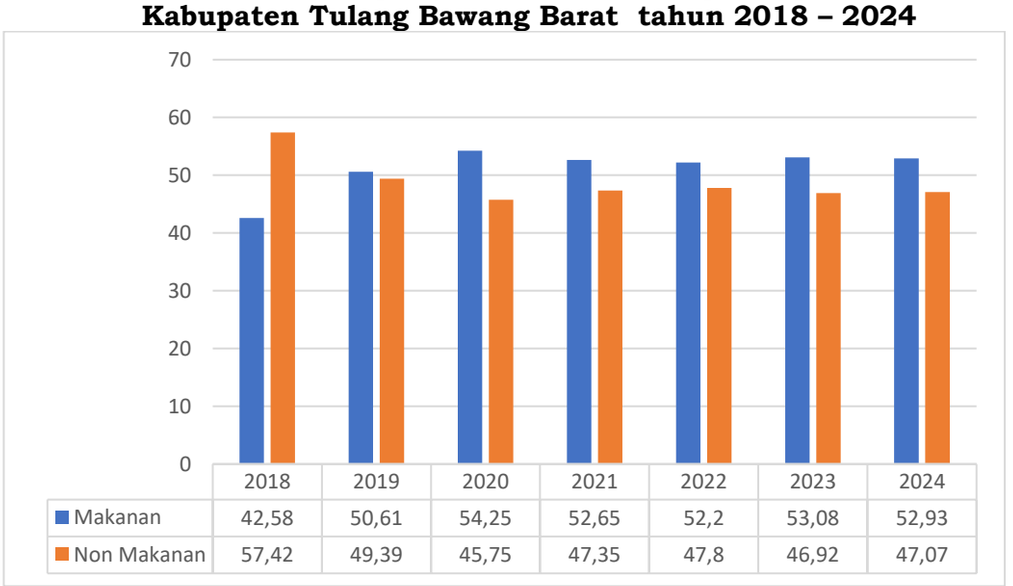

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	42,58	50,61	54,25	52,65	52,2	53,08	52,93
Non Makanan	57,42	49,39	45,75	47,35	47,8	46,92	47,07

Sumber : BPS Lampung, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2025

Selain analisis pola pengeluaran, status gizi makanan yang dikonsumsi juga penting dalam menilai kesejahteraan penduduk. Kemampuan beli penduduk mempengaruhi kualitas pangan yang dapat mereka pilih, baik dari segi jumlah, kualitas, dan ragam makanan. Pada tahun 2020, rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 1.810,96 kkal, yang masih belum mencapai angka kecukupan gizi yang dianjurkan di Indonesia, yaitu 2.100 kkal. Di sisi lain, konsumsi protein pada tahun yang sama mencapai 49,09 gram, yang juga masih kurang dari angka kecukupan yang dianjurkan, yaitu 57 gram. Data mengenai rata-rata konsumsi kalori dan protein kelompok pengeluaran dari tahun 2018 hingga 2024 disajikan pada tabel 2.65.

Tabel 2.65.
Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2019-2024

Tahun	Rata – Rata Konsumsi	
	Kalori (Kkal)	Protein (Gram)
2019	1.832,88	48,56
2020	1.810,96	49,09
2021	1.810,79	48,15
2022	1.771,03	49,75
2023	1.881,98	52,24
2024	1.896,11	54,06

Sumber : BPS, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2025

b) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) per kapita merupakan salah satu elemen kunci dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2018, PKRT menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia, yakni sebesar 56,07%. Pola pengeluaran ini bisa digunakan sebagai indikator untuk menilai kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan dan semakin besar proporsi pengeluaran untuk barang non-makanan dalam total pengeluaran, maka semakin baik kondisi ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2018, total pengeluaran rumah tangga tercatat sebesar Rp.747.374,- dan mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai Rp1.163.855,- pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi penduduk. PKRT per kapita dihitung dengan cara membagi total pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan jumlah rumah tangga. Data tentang PKRT per kapita di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2018 hingga 2024 dapat ditemukan secara rinci pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun	Total Pengeluaran RT	Kelompok Makanan	Kelompok Bukan Makanan
2018	747.374	389.265	358.110
2019	745.118	377.127	367.991
2020	804.484	436.451	368.032
2021	850.806	447.793	402.713
2022	957.922	500.064	457.858
2023	1.068.317	567.102	501.215
2024	1.163.855	616.035	547.820

Sumber :BPS Lampung, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2025

Kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga mencerminkan peningkatan dalam taraf hidup masyarakat. Dengan adanya data yang menunjukkan pertumbuhan pengeluaran dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami kemajuan.

2) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga melibatkan berbagai jenis pengeluaran untuk barang dan jasa yang langsung memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Kategori pengeluaran ini mencakup makanan dan minuman (kecuali di restoran), pakaian dan alas kaki beserta layanan perawatannya, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, serta restoran dan hotel. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga non makanan maka dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat meningkat, untuk data pengeluran rumah tangga non makanan Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2018 hingga 2024 terjadi secara fluktuatif. Data terkait perubahan persentase konsumsi rumah tangga non-pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk periode tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan perKapita Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 s.d. 2024

Tahun	Total Pengeluaran RT Non Pangan	Total Pengeluaran	Pengeluaran RT non pangan (%)
2018	358.110	747.374	47,90
2019	367.991	745.118	49,30
2020	368.032	804.484	45,70
2021	402.713	850.506	47.34
2022	457.858	957.922	47,80
2023	501.215	1.068.317	46,92
2024	547.820	1.163.855	47,07

Sumber : *BPS Lampung, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2025*

3) Daya Saing Iklim Investasi

Investasi PMDN di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Jenis investasi yang ada masih terkonsentrasi pada sektor perkebunan dan pengolahan awal hasil perkebunan, tanpa mencapai pengembangan produk industri hilir yang lebih kompleks. Untuk meningkatkan minat investor, Pemerintah Daerah harus aktif mempromosikan potensi dan kemudahan investasi di daerah ini. Kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera dengan empat akses pintu tol di Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi.

Penambahan jumlah investor dan nilai investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat mempercepat aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya upaya promosi dan fasilitas yang mendukung, diharapkan investasi dapat berkembang dari sektor perkebunan ke industri hilir yang lebih bernilai tambah. Data tentang pencapaian penanaman modal dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68.
Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun	∑ Investor Berskala Nasional (PMDN) (Investor)	∑ Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) (Juta)
2020	17	260.805,2
2021	13	562.375,5
2022	8	89.664,5
2023	8	529.436,13
2024	3	256.696,03

Sumber : DPMPTSP Tulang Bawang Barat 2025

Tabel 2.68. menunjukkan bahwa nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai investasi tercatat sebesar 260.805,2 juta rupiah dan jumlah ini melonjak menjadi 529.436,13 juta rupiah pada tahun 2023 akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2024 menjadi 256.696,03 juta rupiah. Pertumbuhan ini menggambarkan kemajuan yang pesat dalam menarik minat investor ke daerah tersebut. Peningkatan investasi ini mencerminkan potensi ekonomi yang terus berkembang di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ikim investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dapat dievaluasi melalui beberapa indikator utama seperti Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, dan Indeks Keamanan dan Ketentraman. Kabupaten ini telah menunjukkan upaya serius dalam mengembangkan tatanan demokrasi yang solid, yang terlihat dari skor Indeks Demokrasi Indonesia yang positif. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia berpotensi meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kepastian hukum di wilayah tersebut.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan digunakan untuk mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Rasio ini menggambarkan sejauh mana sektor industri pengolahan berperan dalam perekonomian daerah, baik dalam menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, maupun mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, rasio PDRB industri pengolahan dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2019, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 30,10%, kemudian menurun menjadi 28,41% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, rasio ini sempat meningkat sedikit menjadi 29,27%, tetapi kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 27,71%. Penurunan ini dapat mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor industri pengolahan, seperti penurunan permintaan, kurangnya investasi, atau gangguan pada rantai pasok, terutama selama periode pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sektor ini tetap menjadi salah satu kontributor utama

dalam perekonomian daerah. Untuk meningkatkan kontribusinya, diperlukan upaya strategis seperti pengembangan inovasi teknologi, peningkatan daya saing produk lokal, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi industri pengolahan di Tulang Bawang Barat.

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Indikator Rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum mengukur kontribusi sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan peran sektor pariwisata, perhotelan, restoran, dan usaha terkait dalam perekonomian daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, rasio PDRB sektor akomodasi, makan, dan minum menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, kontribusinya tercatat sebesar 0,95%, kemudian sedikit menurun menjadi 0,92% pada tahun 2020 dan 0,90% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, rasio ini kembali meningkat menjadi 0,93%. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan pola konsumsi masyarakat, tingkat kunjungan wisatawan, dan dampak pandemi COVID-19 yang sempat membatasi aktivitas sektor ini. Meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan sektor lain, pertumbuhan pada tahun 2022 menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan aktivitas di sektor akomodasi, makan, dan minum. Ke depan, sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui promosi pariwisata, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan produk kuliner lokal yang khas.

C. Tenaga Kerja

Saat ini, pembangunan di sektor ketenagakerjaan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya jumlah pencari kerja atau pengangguran, keterbatasan dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta rendahnya tingkat produktivitas kerja. Upaya untuk menangani masalah ini berfokus pada pengurangan angka pengangguran serta perlindungan bagi tenaga kerja dan perusahaan. Dalam konteks ini, angka pengangguran menjadi salah satu indikator kunci yang mencerminkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, angka pengangguran juga berfungsi sebagai ukuran efektivitas kinerja pemerintah dalam sektor ketenagakerjaan.

Pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan perlindungan kepada pekerja serta perusahaan. Dalam upaya tersebut, penting untuk memantau dan mengevaluasi indikator-indikator kunci seperti angka pengangguran sebagai tolok ukur untuk mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kinerja pemerintah dalam sektor ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan meningkatkan kesempatan kerja serta produktivitas. Dengan demikian, perbaikan dalam sektor

ketenagakerjaan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Untuk mengukur seberapa banyak angkatan kerja yang dapat diterima oleh pasar kerja, digunakan ukuran yang disebut tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Selama periode 2018 hingga 2022, TPAK menunjukkan tren peningkatan, yang menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang bisa diserap oleh pasar kerja juga meningkat. Kenaikan ini menandakan adanya penambahan dalam partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi. Data perkembangan TPAK dari tahun 2018 hingga 2024 dapat ditemukan dalam Tabel 2.69.

Tabel 2.69.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,21	70,60	71,58	72,32	70,21	70,77	70,90

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025

Peningkatan TPAK dari tahun 2018 hingga 2021 mencerminkan peningkatan kesempatan kerja yang tersedia dan penyerapan angkatan kerja yang lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 70,21 dan meningkat kembali menjadi 70,90 ditahun 2024. Peningkatan ini penting untuk evaluasi tren tenaga kerja dan perencanaan kebijakan ketenagakerjaan.

2) Pengangguran

Pengangguran terbuka mengacu pada penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka yang sebelumnya bekerja tetapi kini menganggur dan mencari kesempatan kerja baru. Tingkat pengangguran terbuka mengukur proporsi angkatan kerja yang sedang dalam pencarian pekerjaan aktif. Dari tahun 2018 hingga 2020, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kenaikan, namun setelahnya mengalami penurunan hingga tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat menjadi 4,12 persen. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam kondisi pasar kerja selama periode tersebut.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting yang menggambarkan seberapa banyak angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja. Kenaikan pengangguran yang terjadi antara tahun 2018 dan 2020, diikuti oleh penurunan hingga 2021, menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika pasar kerja. Namun, lonjakan pengangguran pada tahun 2022 sebesar 4,12 persen menunjukkan tantangan baru dalam penyerapan tenaga kerja. Data ini dapat dilihat lebih detail pada Tabel 2.70, yang

memberikan informasi lengkap tentang perubahan tingkat pengangguran selama periode tersebut.

Tabel 2.70.
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi, Nasional

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tulang Bawang Barat	2,95	3,57	3,46	3,35	4,12	3,89	4,12
Provinsi Lampung	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23	4,19
Nasional	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

3) Rasio Penduduk yang Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang terlibat dalam pekerjaan dengan total angkatan kerja. Rasio ini mencerminkan hubungan antara angkatan kerja dan kemampuan penyerapan tenaga kerja, atau bisa juga dianggap sebagai indikator permintaan tenaga kerja. Tingkat kesempatan kerja merujuk pada peluang yang dimiliki seseorang dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Ini menggambarkan peluang seseorang untuk diterima di pasar kerja. Selama periode 2018 hingga 2022, tingkat kesempatan kerja mengalami fluktuasi, dengan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 adalah 0,98 dan menurun menjadi 0,95 pada tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.71. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pemulihan pelaku usaha setelah pandemi Covid-19.

Tabel 2.71.
Tingkat Kesempatan Kerja Tahun 2018 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk >15 tahun yang bekerja (jiwa)	139.818	135.084	143.745	146.477	142.522	150.465	152.267
Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	142.462	139.066	148.901	151.550	148.645	156.555	158.807
Bekerja	139.818	135.084	143.745	146.477	142.522	150.465	152.267
Pengangguran	2.644	3982	5.156	5.073	6.123	6.090	6.540
Rasio	0,98	0,97	0,96	0,96	0,95	0,96	0,95
Tingkat Kesempatan Kerja	98,28%	97,06%	96,54%	96.65%	95,88%	96,11%	95,88%

Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat dalam Angka, 2025

Rasio penduduk yang bekerja menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja dibandingkan dengan keseluruhan angkatan kerja. Rasio ini berfungsi sebagai indikator efektivitas penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan peluang yang dimiliki individu dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang

tersedia. Selama periode 2018 hingga 2022, rasio kesempatan kerja mengalami variasi, dengan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 adalah 0,98 dan menurun menjadi 0,95 pada tahun 2022. Penurunan ini dapat dihubungkan dengan proses pemulihan pelaku usaha pasca pandemi Covid-19.

D. Indeks Inovasi Daerah

Pentingnya indeks inovasi daerah menjadi semakin menonjol dalam konteks pembangunan dan daya saing wilayah. Inovasi bukan lagi sekadar aspek pelengkap, melainkan elemen kunci yang dapat membentuk keberlanjutan dan pertumbuhan suatu daerah. Indeks inovasi daerah tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah untuk menghasilkan ide-ide baru, tetapi juga mengukur sejauh mana pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong transformasi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, daerah yang mampu berinovasi memiliki keunggulan dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Indeks inovasi daerah mencakup sejumlah variabel, seperti investasi dalam riset dan pengembangan, kerjasama antara sektor publik dan swasta, serta adopsi teknologi baru. Keberhasilan dalam mengukur dan meningkatkan indeks inovasi daerah akan membawa dampak positif, menciptakan lingkungan yang progresif dan siap bersaing dalam skenario global yang terus berubah. Oleh karena itu, pemahaman akan pentingnya indeks inovasi daerah menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan relevansi di tengah dinamika perubahan ekonomi dan teknologi saat ini.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 5 (lima) penelitian yang ada di bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya untuk penelitian yang telah dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan adalah adalah Kajian Potensi Pengembangan Pabrik Mini Minyak Sawit Merah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat, Kajian Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbangun, Kajian Standarisasi Desa Wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nilai Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Daerah Kab. Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.72.

Tabel 2.72.
Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2020-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Pengukuran Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi Daerah (IID)	-	35,93 (inovatif)	41,12 (inovatif)	39,25 (inovatif)	47,33 (inovatif)
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	46,79	67,55	73,24	73,237	74,48

Sumber : Kemendagri 2025

Indeks inovasi Daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 indeks inovasi daerah kabupaten Tulang Bawang Barat dengan sekor sebesar 35,93 termasuk katagori inovatif meningkat sebesar 11,4 persen atau menjadi sebesar 47,33 di tahun 2024 dan masih masuk dalam katagori inovatif, sedangkan untuk nilai IPKD juga setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 46,79 meningkat sebesar 27,69 persen pada tahun 2024 atau sebesar 74,48. Untuk nilai Indeks Daya Saing Daerah baru dinilai pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 2,42. Sedangkan pada tahun 2023 Tulang Bawang Barat tidak mendapatkan nilai IDSD karena ada indikator baru dimana terdapat 12 pilar yang salah satu dalam pilar tersebut belum dapat disediakan karena merupakan indikator baru, namun pada tahun 2024 untuk IDSD Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapatkan sekor sebesar 3,26.

2.1.3.3. Transformasi Digital

A. Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembangunan di sektor komunikasi dan informasi menunjukkan kemajuan yang signifikan, terlihat dari perkembangan dalam pengelolaan komunikasi, informasi, dan media massa. Sebagai contoh, jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017, terdapat 62 jaringan komunikasi, dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 95 jaringan pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Data ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan infrastruktur komunikasi di daerah tersebut.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah meluncurkan website resmi di alamat http://www.tulangbawangbaratkab.go.id/, yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Website ini mencakup berbagai informasi penting tentang Kabupaten Tulang Bawang Barat, termasuk profil pemerintah, visi dan misi, sejarah, serta berbagai kebijakan dan isu strategis. Selain itu, situs ini juga menyediakan data mengenai peta wilayah, lambang daerah, dan informasi terkait lainnya seperti pendidikan, pariwisata, dan pelayanan umum. Namun,

beberapa informasi penting masih belum lengkap atau diperbarui, dan belum semua organisasi perangkat daerah memiliki website.

Di samping website, media cetak di Tulang Bawang Barat meliputi surat kabar seperti Lampung Post, Radar, dan Tribun, serta beberapa surat kabar nasional lainnya. Mayoritas masyarakat juga telah memiliki radio dan televisi, yang berkontribusi pada penyebaran informasi lokal dan nasional. Ketersediaan wartawan dari media cetak dan elektronik cukup memadai, dan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan institusi media berjalan dengan baik. Hal ini menunjang penyampaian informasi secara efektif kepada publik. Tabel 2.73 menyajikan indikator kinerja komunikasi dan informasi dari tahun 2018 hingga 2022, memberikan gambaran tentang perkembangan dan pencapaian dalam bidang ini.

Tabel 2.73.
Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jaringan komu-nikasi	Jaringan	77	82	86	92	95	95	142
2	Website milik pemerintah Daerah	Web	1	3	3	1	13	23	46
3	Rasio wartel /warnet	%	18	18	18	0	0	6	0
4	Jumlah surat kabar nasional /lokal	Buah	225	60	232	195	-	271	105
5	Jumlah penyiaran radio/TV	Siaran	7	6	6	6	6	0	6
6	Jumlah Wartawan Media Cetak & Elektronik (L/P)	Orang	121	60	232	187	259	277	311
7	Jumlah Penyediaan Informasi bagi tamu	Buah	4	5	6	4	-	5	9

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. TBB, 2025

Dengan adanya berbagai saluran informasi, termasuk media massa dan situs web, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berusaha untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Meski sudah ada kemajuan, masih ada kekurangan dalam hal ketersediaan data yang lengkap dan terkini di beberapa sektor, yang perlu ditangani untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang wilayah. Selain itu, upaya untuk memperbarui informasi secara rutin dan memastikan semua organisasi perangkat daerah memiliki website akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi komunikasi. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui media yang tersedia.

Secara keseluruhan, perkembangan dalam bidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencerminkan usaha yang terus menerus untuk meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat. Ketersediaan berbagai platform media, baik digital maupun cetak, berperan penting

dalam mendukung transparansi dan keterbukaan pemerintah. Namun, perbaikan masih diperlukan dalam hal pembaruan data dan penyediaan website untuk semua organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja komunikasi dan informasi yang tercantum dalam Tabel 2.73 menunjukkan pencapaian yang telah diperoleh serta area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk pengembangan di masa mendatang.

2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Indikator Modal Tetap Bruto atau Gross Fixed Capital Formation (GFCF) mengukur investasi yang dilakukan untuk pengadaan barang modal tetap, seperti infrastruktur, bangunan, mesin, kendaraan, dan aset produktif lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Indikator ini mencerminkan tingkat pembangunan ekonomi dan investasi di suatu wilayah, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, nilai modal tetap bruto menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, modal tetap bruto tercatat sebesar 3.712,90 miliar rupiah, sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 3.661,79 miliar rupiah. Namun, sejak tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan, dengan nilai mencapai 3.871,30 miliar rupiah, 4.144,41 miliar rupiah pada tahun 2022, hingga akhirnya mencapai 4.452,66 miliar rupiah pada akhir periode.

Tren kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan aset produktif di wilayah tersebut. Investasi yang terus meningkat ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempertahankan tren positif ini, perlu didorong iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung pengembangan usaha dan infrastruktur.

B. Ekspor Barang dan Jasa

Indikator Ekspor Barang dan Jasa mencerminkan nilai transaksi barang dan jasa yang dikirim ke luar wilayah (baik domestik maupun internasional) dari suatu daerah. Indikator ini merupakan salah satu penentu utama kinerja ekonomi suatu wilayah, yang menunjukkan kontribusi sektor produksi lokal terhadap pasar eksternal. Nilai negatif pada indikator ini menunjukkan defisit, di mana nilai barang dan jasa yang keluar lebih kecil dibandingkan dengan arus masuk barang dan jasa dari luar.

Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, ekspor barang dan jasa dalam miliar rupiah menunjukkan tren fluktuatif dan masih mengalami defisit pada periode 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, nilai defisit tercatat sebesar -125,73 miliar rupiah, kemudian membaik menjadi -70,00 miliar rupiah pada tahun 2020. Tren perbaikan berlanjut pada tahun 2021 dengan defisit yang semakin kecil, yaitu -19,13 miliar rupiah, dan -10,32 miliar

rupiah pada tahun 2022. Namun, pada tahun berikutnya, defisit kembali melebar menjadi -34,47 miliar rupiah.

Meskipun terjadi perbaikan signifikan pada awal periode, peningkatan defisit pada tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja ekspor. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti penurunan daya saing produk lokal, hambatan perdagangan, atau ketergantungan pada impor bahan baku. Untuk memperbaiki kinerja ekspor, diperlukan penguatan sektor produksi lokal, diversifikasi produk unggulan, serta upaya perluasan pasar ekspor melalui kerja sama perdagangan yang lebih luas.

2.1.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks infrastruktur adalah salah satu elemen dari City Development Index (CDI) yang mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas-fasilitas dasar. Penghitungan indeks infrastruktur dilakukan dengan menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan telepon. Kota dengan indeks infrastruktur yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, semakin tinggi nilai indeks infrastruktur suatu kota, semakin baik pula tingkat perkembangannya.

Berdasarkan survei yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Tulang Bawang Barat didapatkan hasil sebagai berikut :

a. Hasil IKLI berdasarkan parameter umum menunjukkan hasil nilai indeks sebesar 2,946 yang jika dikonversi nilai indeks menghasilkan secor 73,46 dengan mutu pelayanan katagori C dan kinerja unit pelayanan pada katagori kurang baik. Komdisi ini tentunya memerlukan peningkatan pada seluruh indiktor pengukuran.
b. Hasil IKLI berdasarkan hasil capaian organisasi perangkat daerah menghasilkan nilai indeks sebesar 71,44 dengan katagori mutu layanan tingkat C dan kinerja unit pelayanan pada katagori kurang baik. Komdisi ini tentunya memerlukan peningkatan pada seluruh indiktor pengukuran.

Dari hasil pengukuran diatas yang kedua duanya menunjukan pencapaian IKLI di tahun 2024 masih dalam katagori kurang baik maka diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan ole pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu :

1) Penguatan program prioritas yang berkelanjutan
2) Integrasi antar *stakeholder* didalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan terhadap infrastruktur.
3) Peningkatan kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur agar dapat menyerap tenaga kerja sehingga menggerakkan perekonomian Daerah.

B. Jumlah Desa Mandiri

Indikator Jumlah Desa Mandiri menggambarkan jumlah desa yang telah mencapai status mandiri berdasarkan berbagai kriteria, seperti kapasitas pemerintahan desa, pelayanan dasar, dan daya saing ekonomi. Desa mandiri merupakan kategori tertinggi dalam klasifikasi perkembangan desa, menunjukkan desa tersebut mampu mengelola potensi secara mandiri, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, serta memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Berdasarkan data di Kabupaten Tulang Bawang Barat, jumlah desa mandiri mengalami peningkatan signifikan dalam periode 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 dan 2020, belum ada desa yang mencapai status mandiri (0 desa). Namun, pada tahun 2021, tercatat ada 1 desa* yang berhasil menjadi desa mandiri, dan jumlah ini tetap bertahan hingga tahun tersebut. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dengan jumlah desa mandiri mencapai 11 desa.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemberdayaan desa dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan kemandirian masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah desa mandiri dapat terus dilakukan melalui pendampingan, penguatan kelembagaan desa, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis komunitas.

C. Jaringan Jalan

Data panjang jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/249/II.03/HK/TUBABA/2023 adalah sepanjang 596,29 KM. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statisti (BPS) Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk persentase Kondisi Jalan Mantap sampai dengan 2023 adalah sebanyak 40,58 %, sedangkan untuk persentase Jalan Mantap di tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang Barat adalah sebanyak 43,90 hal ini didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Survei Kondisi Jalan dan Jembatan tahun 2025 yang disyahkan oleh Kepala Seksi Keterpadaun dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional Provinsi Lampung. Adapun kondisi jalan mantap tahun 2022 sebesar 40,00% dan tahun 2023 yaitu 40,58% mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu sebesar 63,80 ditahun 2022, hal ini disebabkan adanya perubahan kriteria kondisi jalan mantap berdasarkan pada verifikasi data teknis terkait survey kondisi jalan tahun 2023 di P2JN. Berikut data kondisi jalan mantap Kab. Tulang Bawang Barat tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.74
Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Mantap
Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan Mantap	63,76	63,80	40,00	40,58	43,90

Sumber: Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2025 dan Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang Barat

Gambar 2.50.
Kondisi jalan tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat

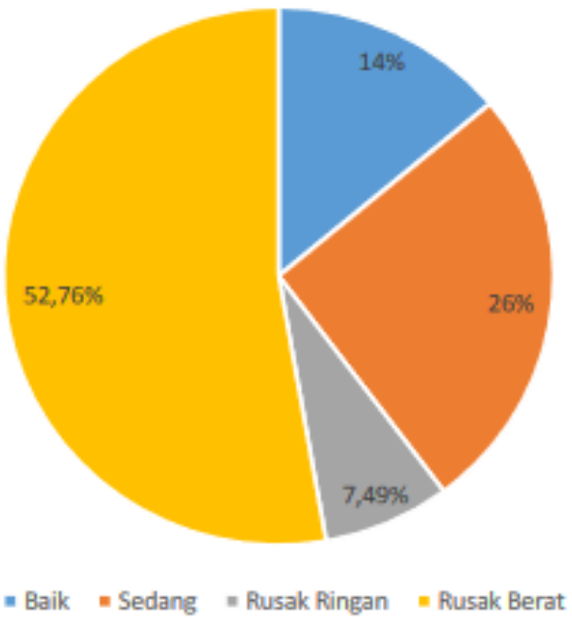

2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

Dalam stabilitas ekonomi secara makro dilihat dengan tingkat inflasi, dimana Inflasi merupakan fenomena di mana harga-harga barang dan jasa secara umum meningkat secara terus-menerus, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kenaikan konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas yang dapat mendorong konsumsi atau spekulasi, serta kendala dalam distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga berarti penurunan nilai mata uang secara berkelanjutan. Laju inflasi Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode 2020 - 2023 mengacu pada perkembangan Laju Inflasi Provinsi Lampung hal ini dikarenakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak ada perhitungan inflasi, selanjutnya untuk tahun 2024 menggunakan pendekatan pada laju inflasi yang diukur pada Kabupaten Mesuji hal ini dilakukan karena kedekatan dan karateristik wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Mesuji, dan data inflasi tingkat nasional sebagai pembanding yang disajikan dalam Tabel 2.75.

Tabel 2.75.
Laju Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Lampung	2,00	2,19	5,51	3,47	
Kabupaten Mesuji	-	-	-	-	1,78
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025

Inflasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 mengacu pada angka inflasi Kabupaten Mesuji, yang tercatat sebesar 1,78 persen, dengan angka inflasi tersebut diperkirakan ketersediaan barang tercukupi dan harga barang stabil. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengendalikan dan menstabilkan inflasi, iyalah dengan Gerakan K3W (Kandang, Kolam, Kebun dan Wisata) yang memanfaatkan pekarangan rumah warga secara optimal.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan reformasi hukum, mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, serta akses masyarakat terhadap keadilan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana kebijakan dan implementasi reformasi hukum dilakukan secara efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai pada indeks ini biasanya diberikan dalam skala tertentu, dengan predikat tertentu yang menunjukkan tingkat keberhasilan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Tulang Bawang Barat mencatat Indeks Reformasi Hukum sebesar 96,22 dengan predikat AA (Istimewa) yang dikeluarkan olah Kemenkumham RI Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja reformasi hukum di wilayah tersebut berada pada tingkat yang sangat baik dan unggul. Predikat "AA (Istimewa)" mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan hukum yang mendukung tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat.

Indeks ini juga mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan skor yang tinggi, Tulang Bawang Barat diharapkan mampu mempertahankan konsistensi dalam reformasi hukum serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan.

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada

Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Gambar 2.51
Capaian SPBE Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
Tahun 2024



Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 mencapai nilai 2,27 menunjukkan pencapaian yang dapat dikategorikan sebagai cukup dari skala 1-5. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintah. Dengan nilai 2,27 Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi untuk meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan public, dengan skor tersebut menunjukkan adopsi teknologi masih ada ruang untuk peningkatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga capaian SPBE Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,22 yaitu dengan capaian nilai SPBE senilai 2,49.

Peningkatan indeks ini dapat dicapai melalui investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, pelatihan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi, serta perbaikan regulasi terkait keamanan dan perlindungan data dalam konteks pelayanan publik berbasis elektronik. Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat merancang dan melaksanakan strategi yang lebih holistik untuk mengintegrasikan sistem elektronik yang dapat mendukung kebutuhan pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh.

Peningkatan indeks SPBE akan membawa dampak positif, termasuk peningkatan aksesibilitas pelayanan publik, pengurangan birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada teknologi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan kesadaran akan potensi peningkatan ini, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam indeks SPBE di masa mendatang.

Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029 bahwasannya disebutkan untuk untuk pemerintahan yang berbasis elektronik yang awalnya di ukur dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diukur sampai dengan tahun 2025, dan untuk selanjutnya dari tahun 2026 – 2030 akan diukur dengan indikator Indeks Pemerintahan Digital.

C. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem

Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Indeks pelayanan publik di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung pada Tahun 2024 beragam antara A (Sangat Baik) hingga C (Cukup). Dari hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan peforma pelayanan dengan **Indeks B-** dengan nilai 3,42. Indeks Pelayanan Publik merupakan tolok ukur yang mencakup sejumlah variabel yang mencerminkan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Faktor-faktor seperti responsivitas, kecepatan, dan kepuasan masyarakat menjadi bagian integral dari indeks ini. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa didengar dan melayani dengan baik, sehingga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berikut disajikan data capaian Indeks Pelayanan Publik kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2024 pada tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Indeks Pelayanan Publik pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2024

KABUPATEN/KOTA	IPP
Lampung Selatan	B (3,89)
Lampung Tengah	A- (4,46)
Lampung Utara	A- (4,42)
Lampung Barat	B (3,90)
Tulang Bawang	A- (4,50)
Tanggamus	A- (4,27)
Way Kanan	A- (4,37)
Lampung Timur	B (3,99)
Pesawaran	A- (4,32)
Tulang Bawang Barat	**B- (3,42)**
Pringsewu	A- (4,46)
Mesuji	A- (4,08)
Pesisir Barat	B (3,66)
Metro	A (4,60)
Bandar Lampung	A- (4,33)

Sumber : Menpan RB 2024

Nilai Indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Kriteria Penentuan Lokus Atau Unit Pelayanan Publik (UPP) yang akan dinilai, penentuan lokus penilaian difokuskan terlebih dahulu pada:

1) Layanan Administrasi Kependudukan,
2) Layanan Perijinan, dan
3) Layanan Kesehatan

ketiga layanan ini adalah sebagai layanan dasar yang juga banyak diakses oleh masyarakat.

D. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Reformasi birokrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui perampingan proses kerja, mengoptimalkan struktur birokrasi, dan meningkatkan kapasitas pegawai, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih efektif kepada masyarakat. Dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintah daerah dapat memberikan laporan kinerja yang lebih akurat dan terukur melalui berbagai indikator kinerja yang dapat diukur oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Perkembangan capaian IRB dan SAKIP pada tahun 2021 – 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung meningkat secara score yaitu sebesar 59,01 tahun 2021 dan 60,19 ditahun 2024 untuk capaian SAKIP, sedangkan untuk capaian IRB di tahun 2021 sebesar 44,80 dan meningkat menjadi 67,53 di tahun 2024, akan tetapi jika dilihat capaiannya secara predikat maka capaian SAKIP tahun 2022 dan 2024 masih sama yaitu predikat B sedangkan IRB mengalami perubahan yaitu predikat CC tahun 2022 dan B tahun 2024. Capaian SAKIP dan IRB di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2024 disajikan pada tabel 2.77.

Tabel 2.77.
Score dan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2024

Uaraian	SAKIP				IRB			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Score	59,01	60,08	60,67	60,19	44,80	51,10	58,15	67,53
Predikat	C	B	B	B	C	CC	CC	B

Sumber : Menpan RB 2024
Keterangan :
B : Baik (> 60 – 70)
CC : Cukup Memadai (> 50 - 60)

Berdasarkan capaian SAKIP kabupaten/kota se provinsi lampung yang di sajikan pada Tabel 2.71 menunjukan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 dengan capaian scor nilai SAKIP sebesar 60,19 dengan predikat B berada di urutan ke 9 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Grafik. 2.52
Capaian SAKIP Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung Tahun 2023

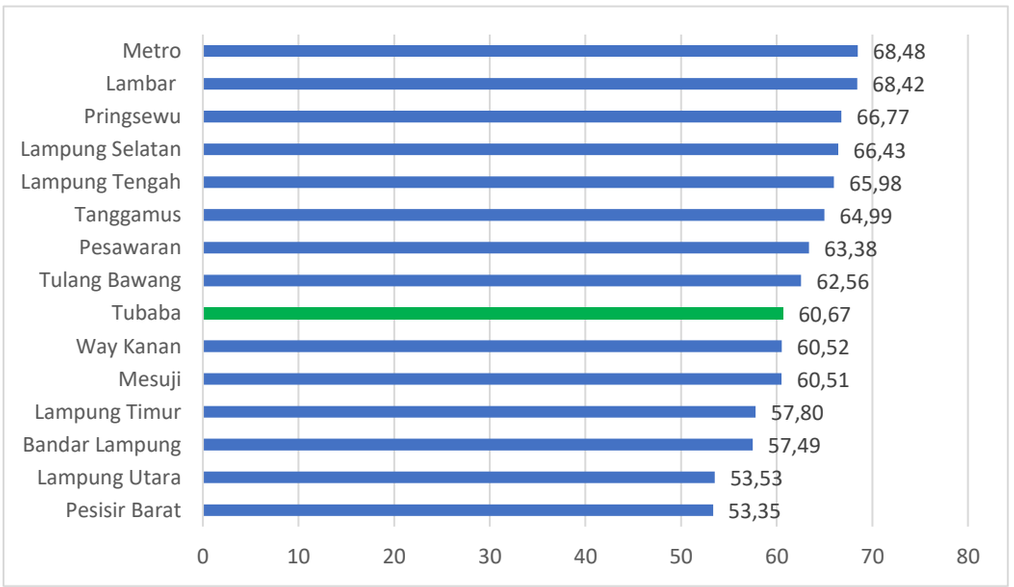

Sumber : Menpan RB 2023

Pentingnya reformasi birokrasi juga tercermin dalam upaya meningkatkan daya saing dan investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui birokrasi yang lebih responsif dan efisien, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada pelaku usaha dan investor. Selaian itu reformasi birokrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Pemerintah yang efisien juga dapat memberikan bantuan sosial dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Reformasi birokrasi dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif. Langkah-langkah seperti perbaikan dalam pengelolaan proyek dan implementasi kontrol internal yang lebih baik dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan yang mungkin timbul. SAKIP juga dapat membantu mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan keuangan dan menilai risiko yang terkait.

Melalui SAKIP, Pemerintah dapat menilai sejauh mana anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Reformasi birokrasi yang berhasil, dengan menghilangkan hambatan birokratis dan meningkatkan efisiensi operasional, membantu memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini menciptakan hubungan langsung antara peningkatan efektivitas birokrasi dan hasil keuangan yang lebih baik.

Tabel 2.78.
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tulang Bawang Barat Tahun 2014—2024

Tahun	Reformasi Birokrasi	SAKIP	Pengelolaan Keuangan
2014	NA	C	WTP
2015	NA	C	WTP
2016	NA	C	WTP
2017	NA	C	WTP
2018	C	C	WTP
2019	C	CC	WTP
2020	C	CC	WTP
2021	C	CC	WTP
2022	CC	B	WTP
2023	CC	B	WTP
2024	B	B	WTP

Sumber: Bagian Organisasi Tulang Bawang Barat 2024

Berdasarkan data capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan nilai, dari kategori C menuju B, meskipun berlangsung secara bertahap. Untuk mendorong percepatan perbaikan dan mencapai kategori BB atau bahkan A, diperlukan strategi konkret dan eksplisit yang berfokus pada penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

Strategi utama yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK), agar lebih berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya output. Pendampingan teknis secara berkala perlu difasilitasi oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda agar perangkat daerah memahami alur logis perencanaan kinerja hingga evaluasi.

Selain itu, dibutuhkan penguatan integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD benar-benar mendukung pencapaian sasaran kinerja. Penggunaan aplikasi e-SAKIP atau sistem informasi kinerja daerah perlu dioptimalkan agar pelaporan lebih sistematis, terdokumentasi, dan mudah dimonitor secara real time.Strategi lainnya adalah dengan mendorong komitmen pimpinan OPD dalam mengelola kinerja secara transparan dan akuntabel, termasuk memastikan adanya tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB. Monitoring dan evaluasi internal oleh Inspektorat juga harus ditingkatkan dari sisi frekuensi dan kedalaman substansi, bukan hanya bersifat administratif.

Selain upaya – upaya yang dilakukan diatas, dalam peningkatan SAKIP memerlukan pendekatan yang komprehensif, bukan hanya sekadar pemenuhan administrasi terutama untuk

perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan SAKIP perangkat daerah yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja yang Lebih Akuntabel

Dalam hal ini yang dilakuan adalah dengan memastikan rencana kerja tahunan (Renja) disusun dengan sasaran dan indikator kinerja yang dapat terukur dan menghindari indikator yang terlalu umum atau sulit diukur serta harus selaras dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah sehingga setiap program dan kegiatan berkontribusi terhadap visi dan misi kepala Daerah.

2. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja yang Efektif

Terkait strategi ini dilaksanakan dengan sistem Pengumpulan Data yang Akurat dengan metapkan mekanisme yang jelas dalam pengumpulan data kinerja, dapat menggunakan teknologi jika memungkinkan untuk mempermudah proses dan mengurangi kesalahan, serta melakukan analisis kinerja secara rutin atau berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, tidak harus menunggu di akhir tahun.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Organisasi

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kapasitas sdm dan budaya organisasi yaitu dengan memberikan pelatihan reguler kepada seluruh pegawai, terutama yang terlibat langsung dalam penyusunan SAKIP, tentang konsep, metodologi, dan praktik terbaik, serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan perangkat daerah hal ini sangat penting dalam implementasi SAKIP dan memastikan alokasi sumber daya yang memadai.

Dengan adanya hal – hal diatas diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan nilai SAKIP secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

E. Pertanahan

Pembangunan dan penataan pertanahan merupakan aspek krusial yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat kepemilikan tanah. Salah satu cara untuk membuktikan kepemilikan tanah adalah dengan menerbitkan sertifikat yang meliputi berbagai hak, seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan, dan Wakaf. Sertifikat ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam pengelolaan dan penggunaan tanah. Data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan bahwa tidak semua aset tanah pemerintah daerah telah disertifikasi. Dari total luas tanah yang mencapai 21.206.286,50 m^2, hanya 2.525.524,00 m^2 yang sudah bersertifikat, sedangkan sisanya sebesar 18.680.762,50 m^2 masih belum memiliki sertifikat.

Penataan dan pembangunan pertanahan yang efektif sangat penting untuk memastikan kepemilikan tanah yang sah melalui sertifikasi. Sertifikat tanah, yang mencakup Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan Wakaf, merupakan bukti hukum yang valid. Menurut data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga tahun 2022, hanya sebagian dari total tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah disertifikasi. Dari luas total tanah 21.206.286,50 m², hanya 2.525.524,00 m² yang telah mendapatkan sertifikat, sementara 18.680.762,50 m² lainnya masih belum disertifikasi. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melengkapi sertifikasi tanah yang masih tertunda.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan pasal 2 ayat 2, berisi sebagai berikut:

1. Pemberian izin lokasi, yang meliputi: (a) izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal; (b) perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c) penanaman modal adalah yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman asing maupun penanaman modal dalam negeri.
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanahbaik dengan cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian (secarasukarela).
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.
4. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuklain.
5. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang menjadi tanah objek land reform.
6. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yangberlaku.

7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang di kuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yangberlaku.
8. Pemberian izin membuka tanah. Diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini diartikan merupakan pelaksanaan dan penetapan letak tepat rencana kegiatan yang telah jelas anggarannya baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan yang akan membutuhkan tanah di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan data informasi pola penatagunaan tanah yang sesuai dengan kawasan rencana tata ruang wilayah. Adapun pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kawasan yang disiapkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan memegang peranan krusial dalam tata pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan administrasi kependudukan mencakup pengaturan dan penataan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi terkait. Tujuan dari administrasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan di berbagai sektor. Proses ini memastikan bahwa data kependudukan terkelola dengan baik dan dapat digunakan secara efektif. Capaian dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat ditemukan pada Tabel 2.79 di bawah ini.

Tabel 2.79.
Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,70	0,75	0,77	0,73	0,71	0,71	0,97
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,78	0,80	0,95	0,97	0,97	0,99	0,99
3	Kepemilikan KTP elekronik (%)	70,00	77,80	77,31	100,00	99,02	98,00	97,37
4	Kepemilikan Akta kelahiran (%)	90,00	96,00	95,00	97,00	97,41	99,79	99,79

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulang Bawang Barat, 2025

Administrasi kependudukan berperan penting dalam menjaga keteraturan dan keakuratan data penduduk di semua

tingkat pemerintahan. Aktivitas utama dalam administrasi ini meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa sipil, serta pengelolaan dan pemanfaatan informasi kependudukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan memfasilitasi pembangunan berbagai sektor. Melalui administrasi yang teratur, data kependudukan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan dan masyarakat.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang melibatkan inisiatif masyarakat untuk memulai kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi mereka sendiri. Proses ini hanya bisa berhasil jika seluruh warga masyarakat aktif berpartisipasi. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat terlihat ketika kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan, atau dikenal sebagai subjek, yang berarti mereka berfungsi sebagai penggerak utama. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak perubahan. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) memainkan peran penting sebagai ujung tombak dalam pelayanan masyarakat dan harus didorong untuk terlibat lebih aktif dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Dalam konteks ini, RT/RW diharapkan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam proses pembangunan. Mereka harus terlibat secara langsung dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain RT/RW, Perempuan Kelompok Kerja (PKK) juga merupakan aktor penting yang perlu mendapatkan perhatian. PKK berperan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan harus didorong untuk berkontribusi lebih dalam proses pembangunan. Data mengenai hasil kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan tiyuh dari tahun 2020 hingga 2025 dapat ditemukan dalam Tabel 2.80.

Tabel 2.80.
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
Tahun 2020 s.d. 2025 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan yang memiliki kompetensi dan tata kelola pemdes (Tiyuh)	-	-	-	103	103	103
2.	Jumlah Kelembagaan Desa yang ditata sesuai standar	-	-	-	103	103	103
3.	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	-	-	-	103	103	103
4.	Indeks Desa Membangun						
	a.Jumlah Desa (Tiyuh) b.Desa Mandiri	96 0	96 1	100 1	100 11	100 18	100 21
	c.Desa Berkembang	77	75	64	40	43	40
	d.Desa Maju	8	13	28	49	39	39
	e.Desa Tertinggal	8	4	0	0	0	0
5.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Berkembang	-	-	-	40	69	69

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Tulang Bawang Barat 2025

Penting untuk dicatat bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang memberikan manfaat, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan. Proses ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk RT/RW dan PKK. Melalui keterlibatan yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diharapkan masyarakat dapat menjadi motor penggerak dalam proses pembangunan.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja dalam pengendalian penduduk dan penanganan bencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dinilai melalui berbagai indikator pencapaian yang tersedia. Data yang relevan untuk evaluasi ini mencakup periode dari tahun 2018 hingga 2022. Informasi mengenai pencapaian kinerja tersebut disajikan dalam Tabel 2.81. Tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kinerja dalam dua bidang tersebut berkembang dari tahun ke tahun. Melalui data ini, evaluasi terhadap efektivitas pengendalian penduduk dan respons terhadap bencana dapat dilakukan secara komprehensif.

Tabel 2.81.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,63	1,62	1,6	1,6	1,6	1,60	1,6
2.	Rasio akseptor KB	73,8	76,08	52,7	67	70,30	73,2	73,1
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	73,87	76,08	52,7	67	70,30	73,2	73,1
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	15,33	15,23	15,1	20,5	20,5	19,9	19,5
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*UnmetNeed*) (%)	15,72	13,56	8,83	10,7	16,30	9,9	6,5
6.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	73,00	72,00	71,8	17,2	17,2	19,3	24,6
7.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 (semua cara dan caramodern) (%)	73,87	76,08	77,33	67	70,3	73,2	73,1
8.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	55,01	55,4	56,8	100	100	100	100
9.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yangber-KB (%)	80,89	86,5	86,8	87	88	88,5	88,6

No	Indikator	Capaian						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	83,3	83,6	84,0	85	85	2,2	87,5

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025

I. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antara wilayah dan memastikan adanya pemerataan pembangunan. Aksesibilitas yang baik terhadap infrastruktur transportasi mempererat hubungan antarwilayah dan mendukung pengembangan yang lebih merata. Sistem transportasi tidak hanya berfungsi sebagai penghubung utama tetapi juga sebagai titik distribusi yang vital, membantu pertumbuhan kota dan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata guna lahan yang ada perlu didukung oleh jaringan jalan yang dirancang dengan tepat. Pola jaringan jalan yang efisien akan mendukung perkembangan kota dan wilayah sesuai dengan rencana tata guna lahan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.82.
Sarana Perhubungan yang Tersedia Tahun 2018 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rambu	Unit	992	992	992	1.020	1.020	1.191	1.402
2	*Guardrail*	Unit	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936
3	Penerangan Jalan Umum	Unit	305	305	305	305	635	696	735
4	Terminal Tipe C	Unit	1	1	1	1	1	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025

Selama periode 2018 hingga 2024, fasilitas sarana perhubungan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan upaya untuk memperkuat perkembangan fisik daerah tersebut. Dengan adanya jaringan transportasi yang baik, pengembangan wilayah dan kota dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan efektif. Data mengenai fasilitas perhubungan yang disajikan dalam Tabel 2.82 menggambarkan kondisi infrastruktur transportasi selama periode tersebut. Evaluasi data ini penting untuk memahami bagaimana infrastruktur transportasi berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Informasi ini membantu dalam merencanakan dan mengoptimalkan infrastruktur untuk mendukung perkembangan daerah secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pengembangan infrastruktur transportasi yang baik di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan berpengaruh positif terhadap kemajuan daerah. Penataan dan perbaikan jaringan jalan yang sesuai dengan rencana tata guna lahan akan mendukung distribusi dan konektivitas yang lebih baik antara wilayah. Ini akan memungkinkan pengembangan kota dan wilayah yang lebih terstruktur dan merata. Data yang ada merupakan acuan penting untuk menilai efektivitas infrastruktur transportasi dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan di kabupaten tersebut. Dengan perencanaan yang tepat, infrastruktur transportasi dapat menjadi pendorong utama dalam kemajuan daerah.

J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Peran koperasi serta usaha mikro dan kecil sangat krusial dalam proses pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun, tidak semua koperasi yang ada saat ini berfungsi secara aktif. Masih terdapat berbagai masalah dalam pengembangan usaha yang mempengaruhi kinerja organisasi koperasi. Peningkatan yang signifikan dalam sektor usaha mikro dan kecil diperlukan, termasuk melalui upaya untuk memperbanyak jumlah enterpreneur. Selain itu, perlu ada peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil yang dikategorikan sehat, serta peningkatan jumlah koperasi yang juga dalam kondisi sehat.

Indikator pencapaian kinerja terkait urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk periode 2018 hingga 2022 dapat ditemukan pada Tabel 2.83. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam sektor koperasi dan usaha mikro serta kecil. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi serta usaha mikro dan kecil akan mendukung perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan untuk memecahkan masalah yang ada dan mendukung pertumbuhan sektor ini.

Tabel 2.83.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2018 s.d. 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi aktif (%)	44,3	45,6	46,03	47.28	49,2	49.2	37,68
2	Jumlah UMKM (Unit)	3.634	3.706	7.425	7.525	7.573	7.585	7.615
3	Koperasi yang ada (Unit)	124	125	126	129	132	132	138
4	Koperasi sehat (Unit)	27	27	28	32	32	32	32

Sumber :Dinas Koperindag Kab. Tulang Bawang Barat, 2025

K. Statistik

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola data yang terpadu dan berkualitas melalui pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI)**.** Implementasi kebijakan SDI ini diarahkan untuk memperkuat integrasi data lintas perangkat daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terpercaya.

Capaian pelaksanaan SDI dapat tercermin melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**.** Selama tiga tahun terakhir, IPS Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan dinamika sebagai berikut.

Tabel 2.84
Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2021-2023

Kabupaten Tulang Bawang Barat	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Statistik	1,70(Kurang)	1,42(Kurang)	2,72(Baik)

Sumber : BPS Tulang Bawang Barat

Pelaksanaan SDI di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga telah memperlihatkan praktik baik, seperti terbentuknya Tim Koordinasi SDI Daerah, tersusunnya Rencana Aksi SDI, dan pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Statistik Sektoral (EPSS) secara berkala. Selain itu, kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data dengan Diskominfo sebagai walidata dan perangkat daerah sebagai produsen data semakin diperkuat melalui berbagai pelatihan, asistensi teknis, serta sosialisasi kebijakan SDI.

Keberhasilan peningkatan IPS ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola data yang lebih baik di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

L. Persandian

Masalah utama dalam persandian terletak pada belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada, cakupan pengelolaan yang kurang efektif, serta keamanan informasi yang belum memadai. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa persandian adalah urusan pemerintahan wajib bagi semua pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Undang-undang tersebut menekankan bahwa fungsi persandian tidak hanya terbatas pada pengiriman dan penerimaan surat atau berita sandi, tetapi juga meliputi pengamanan informasi yang lebih luas.

Dalam RPJMD periode sebelumnya, urusan persandian tidak diatur sebagai urusan tersendiri, melainkan merupakan bagian dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, serta Kepegawaian dan Persandian. Hal ini menunjukkan bahwa persandian pada waktu itu dianggap sebagai bagian dari berbagai urusan pemerintahan lainnya. Dengan kata lain, fokus pada pengelolaan persandian masih terintegrasi dalam urusan yang lebih luas dan tidak mendapatkan perhatian khusus. Penataan ulang dan penguatan sarana, prasarana, serta pengelolaan persandian menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan informasi di masa depan.

M. Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan per tahun, dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah melakukan upaya-upaya meningkatkan minat baca bagi masyarakt terutama bagi anak-anak usia sekolah dengan Program antara lain:

1. Pengenalan Perpustakaan Usia Dini;
2. Mengadakan Perpustakaan Keliling ke Tiyuh-tiyuh;
3. Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar dan Tulang Bawang Udik.

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dari tahun 2020 – 2024 selalu meningkat. Jumlah pengunjung perpustakaan ditahun 2023 berjumlah 2.710 orang dan meningkat ditahun 2024 dengan 3.557 pengunjung. Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah Koleksi buku ditahun 2024 mencapai 6.044 judul buku. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (PILM) berdasarkan data dari Perpusnas RI di tahun 2023 yaitu 60,9 dan capaiannya meningkat ditahun 2024 menjadi 63,2. Berikut capaian kinerja urusan perpustakaan tahun 2020-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.85.

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020 – 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1700	2000	2640	2710	3557
2.	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	3000	4600	7300	9500	14655
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1 : 1200	1 : 736	1 : 736	1 : 749	1,19
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	142	167	220	265	296
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2100	2943	3440	3440	6044
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	6	9	15	15	15
7.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	-	-	2,8	60,9	64,11
8.	Tingkat Kegemaran Membaca				64,02	66,05

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

N. Kearsipan

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui sistem sentralisasi dimana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi dimana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 1 (satu) Pusat Informasi Arsip Daerah yang berfungsi menyediakan informasi tertentu bagi instansi yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengarsipan. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah rotasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan SIMARDI sehingga Perangkat Daerah dan BUMD yang ditinggal kembali menerapkan proses pengelolaan arsip secara manual.

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun 2022-2024 yaitu 85% dan peningkatan SDM pengelola kearsipan setiap tahunnya berjumlah 1 orang. Berikut capaian kinerja urusan kearsipan tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.86

Tabel 2.86
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020 – 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	75	80	85	85	85
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2025

O. Kelautan dan Perikanan

Potensi pengembangan perikanan budidaya dapat menjadi opsi utama dalam mencari mata pencaharian bagi warga Kabupaten Tulang Bawang Barat terutama yang bermukim di sekitar sungai Way Kiri dan Way Kanan. Produksi perikanan budidaya di tubaba mengalami variasi setiap tahunnya. Selama empat tahun terakhir, usaha budidaya ikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh ikan lele. Produksi tertinggi tercatat pada tahun 2019 dengan jumlah 2.887 ton, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2.664 ton, dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebanyak 2.666 ton. Produksi ikan nila menunjukkan peningkatan setiap tahun, dengan jumlah produksi mencapai 534 ton pada 2021, 551,12 ton pada 2022, dan meningkat menjadi 613 ton pada 2023. Sementara produksi

budidaya ikan mas juga mengalami fluktuasi, dari 445 ton pada 2021, meningkat menjadi 473 ton pada 2022, namun mengalami penurunan menjadi 447 ton pada 2023. Perkembangan budidaya perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2019 hingga 2024 tergambar dalam Tabel 2.87.

Tabel 2.87.
Produksi Perikanan Budi Daya Menurut Jenis Ikan
Tahun 2019 s.d. 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Jenis Budidaya	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lele (ton)	2.887	1800	2.563	2.644	2.666,37
Ikan Nila (ton)	1.062	664	534,2	551,12	613,15
Ikan Mas (ton)	464	425	445,6	473,22	447,37
Ikan Patin (ton)	512	321	261,5	276,59	225,28
Ikan Gurame (ton)	-	-	300,6	308,99	333,90
Ikan Lainnya (ton)	2.410	993	152,3	14,31	13,34

Sumber : Lampung Dalam Angka 2024

Sedangkan untuk data capaian perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, disajikan dalam matrik tabel sebagaimana tabel 2.88 dibawah ini.

Tabel 2.88
Capaian Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2020 s.d 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	4.691,93	4.832,69	4.268,63	4.299,41	4.536,77
2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	624,24	624,24	625,91	626,29	629,63
3	Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk	26,09	29,99	33,15	34,07	**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2025

***Realisasi Perhitungan difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Bulan Juli setiap tahunnya.*

P. Pariwisata

Kabupaten Tulang Bawang Barat masih kekurangan fasilitas penginapan berkualitas tinggi seperti hotel berbintang. Saat ini, pilihan penginapan di daerah ini terbatas pada hotel melati dan jenis penginapan lainnya. Pada tahun 2022, hotel melati hanya tersedia di Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah, dengan total 10 penginapan yang memiliki 110 kamar dan 145 tempat tidur. Data mengenai akomodasi, jumlah kamar, dan tempat tidur di hotel serta penginapan di Kabupaten Tulang

Bawang Barat dari tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Table 2.89.
Fasilitas Hotel/Penginapan tahun 2019-2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Akomodasi	5	6	10	8	9	7
Kamar	49	94	120	110	111	107
Tempat Tidur	69	122	151	145	149	166

Sumber : Lampung Dalam Angka 2025

Fasilitas penginapan di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memenuhi standar hotel berbintang, dan sebagian besar terdiri dari hotel melati dan penginapan sederhana lainnya. Pada tahun 2023, jumlah penginapan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 9 lokasi dengan total 111 kamar dan 149 tempat tidur.

Jumlah rumah makan di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan tersebar di sembilan kecamatan. Pada tahun 2019, terdapat 64 unit rumah makan, yang kemudian meningkat menjadi 67 unit pada tahun 2020. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 65 unit sebelum kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 73 unit. Fluktuasi jumlah ini mencerminkan perubahan dalam jumlah rumah makan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dalam periode tersebut, jumlah rumah makan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2020 mencatat penambahan jumlah rumah makan, namun angka tersebut turun pada tahun 2021 sebelum mengalami kenaikan lagi di tahun 2022. Perubahan ini menunjukkan dinamika yang terjadi dalam sektor rumah makan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk informasi lebih lengkap mengenai jumlah dan distribusi rumah makan dalam periode tersebut, Tabel 2.90 memberikan data yang terperinci.

Table 2.90.
Rumah makan/ Restoran tahun 2019-2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Makan/Restoran	64	67	65	73	81	98

Sumber : Lampung Dalam Angka 2025

Dalam hal pariwisata, jumlah objek wisata terdiri dari objek wisata sejarah, alam dan budaya. Sampai tahun 2018 jumlah objek pariwisata Berikut jenis dan lokasi objek wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91.
Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Jenis Objek Wisata	Objek Wisata	Kecamatan
1.	Wisata Budaya	Benteng Karang Talang	Tulang Bawang udik
2.	Wisata Buatan	Water Boom,	Tumijajar
3.	Wisata Buatan/ Wisata Budaya	Pemancingan, Tugu Rato Makam Minak Indah/ Tuan Rio Sanak, Lasengok, Uluan Nugik, Komplek Dunia Akhirat Islamic Center, Patung Megopak.	Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang udik
4.	Wisata Alam	Bawang Lambu Way Tulang Bawang, Embung Gunung Sari	Pagar Dewa, Lambu Kibang
5.	Wisata Budaya	Makam Tuan Rio mangku Bumi (Raja Tulang Bawang) Makam Tuan Rio Cikai Dilangek (Hulubalang kerajaan Tulang Bawang) Makam prajurit Hidayatullah (Putra Mahkota) Makam Tubagus Buang Makam ubagus Minak Saleh	

Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Dinas Porapar 2021

Selanjutnya capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan wisatawan domestik	Orang	386.403	497.514	432.196	443.845	449.335
2	Persentase objek wisata yang dipromosikan	%	90	98	90	90	90
3	Jumlah Objek wisata unggulan	Objek	15	16	16	16	16
4	Jenis kelas dan jumlah restoran	Unit	64	67	65	32	37

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2025

Festival tahunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Festival TUBABA, dilaksanakan setiap tahun dan menjadi salah satu acara utama yang menarik perhatian pengunjung. Meskipun ada fluktuasi dalam jumlah wisatawan, acara seperti Festival TUBABA berperan penting dalam mempromosikan destinasi wisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Perubahan dalam jumlah objek wisata unggulan dan promosi menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah.

Q. Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Luas total lahan sawah, yang terdiri dari sawah irigasi dan tadah hujan, mencapai 11.398 hektar. Potensi tanaman padi, khususnya dalam sub-sektor tanaman pangan, sangat tinggi dengan luas lahan sawah beririgasi sebesar 7.861 hektar dan lahan non-irigasi sebesar 3.536 hektar. Lahan sawah beririgasi terutama terpusat di tiga kecamatan, yaitu Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik. Sementara itu, lahan sawah non-irigasi tersebar di tujuh kecamatan dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Luas panen sektor tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 mencapai 42.503 Ha Luas panen tanaman pangan didominasi oleh tanaman ubi kayu yang mencapai 23.320 Ha, hal menunjukkan potensi produksi pangan di kabupaten. Kinerja sektor tanaman pangan, terutama padi, menunjukkan hasil yang positif meskipun ada perbedaan dalam jenis lahan yang digunakan. Lahan sawah beririgasi yang luas di kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik memberikan kontribusi besar terhadap hasil panen. Di sisi lain, lahan non-irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan juga mendukung produksi padi dengan cara yang signifikan. Informasi lebih rinci mengenai Rata-rata produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93.
Rata-rata produktivitas tanaman pangan
di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024

Komoditi	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jagung	Ku/Ha	51,21	57,96	57,96	59,06	54,85	64,13
Kacang Hijau	Ku/Ha	10,00	8,21	8,21	10,43	10,09	11,25
Kacang Tanah	Ku/Ha	14,39	14,46	14,46	13,83	14,49	15,06
Kedelai	Ku/Ha	13,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Padi	Ku/Ha	50,52	47,30	47,30	48,33	49,40	45,76
Ubijalar	Ku/Ha	187,19	153,38	153,38	188,51	192,18	203,04
Ubikayu / Ketela Pohon	Ku/Ha	216,96	230,68	230,68	274,50	254,73	240,52

Sumber : Dinas Tanama Pangan, Perkebunan dan Holtikultura 2025

Selain data rata-rata produktifitas diatas, untuk sektor pertanian dapat dilihat juga data produksi tanaman pangan selama tahun 2018-2024 diKabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana disajikan pada tabel 2.94 dibawah ini.

Tabel 2.94
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2018 – 2024

Komoditi	Sat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	Ton	118.344	94.676	74.945	80.060	80.636	81.703	62.073
Jagung	Ton	44.210	27.897	32.582	7.613	15.067	14.080	13.646

Komoditi	Sat	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kedelai	Ton	3.185	1.022	-	-	-	-	-
Kacang Hijau	Ton	14	5	29	15	101	12	7
Kacang Tanah	Ton	143	77	489	99	71	54	53
Ubijalar	Ton	466	655	629	566	423	538	305
Ubikayu / Ketela Pohon	Ton	536.318	531.688	603.444	679.552	679.722	594.030	535.189

Sumber : Dinas Pertanian Tulang Bawang Barat 2025

Pada tahun 2024, luas panen sektor tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai 59.545 hektar yang tersebar di delapan kecamatan. Tanaman ubi kayu menjadi komoditas dominan dengan luas panen mencapai 22,252 hektar. Data mengenai luas panen tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode 2019 hingga 2024 dapat ditemukan pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95
Luas Panen Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2018 – 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Komoditi	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jagung	Ha	5.448	5.621	1.289	2.747	2.567	2,128
Kacang Hijau	Ha	5	35	14	100	12	6
Kacang Tanah	Ha	54	338	72	49	37	35
Kedelai	Ha	777	0	0	0	0	0
Padi	Ha	18.740	15.845	16.565	16.323	16.539	13,565
Ubijalar	Ha	35	41	30	22	28	15
Ubikayu	Ha	24.507	26.159	24.756	26.684	23.320	22,252

Sumber : Dinas Tanama Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Kab. Tubaba 2025

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas untuk luas panen padi terjadi penurunan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini dikarenakan di tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat musim tanam padi hanya melakuak 1(satu) kali penanaman, hal ini dikarenakan suplai air irigasi yang merupakan sumber utama pengairan dalam penanaman padi yang berasal dari bendungan way rarem hanya cukup untuk 1(satu) kali tanam, dikarenakan bendung way rarem dalam proses rehab jaringan irigasi.

Selanjutnya untuk komoditas hortikultura yang memiliki nilai strategis di Indonesia meliputi cabe besar dan cabe rawit, yang juga memiliki peran penting di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kenaikan luas panen cabai rawit terlihat antara tahun 2022 dan 2023, dengan produksi cabai rawit meningkat dari 4.165 kuintal menjadi 6.131 kuintal. Sama halnya produksi cabai besar mengalami peningkatan dari 3.125 menjadi 5.129 kuintal Data terkait potensi sub sektor tanaman hortikultura di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada periode 2022-2023 disajikan dalam Tabel 2.96.

Tabel 2.96.
Potensi Sub Sektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dan 2024

Jenis Tanaman		Luas Panen			Produksi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Holtikultura	Bawang Daun	29	28	43	1.778	2.581	1.914
	Bawang Merah	-	-	-	-	-	-
	Bayam	91	90	82	3.285	3.010	2.395
	Cabai Rawit	60	80,75	64,50	4.165	6.131	4.742
	Kacang Panjang	86	80.50	102,00	6.740	7.175	7.091
	Kangkung	112	107,50	129,25	5.137	5.089	3.871
	Mentimun	65	59,25	89,50	6.287	7.415	7.784
	Petsai/sawi	28	37,75	57,50	541	2.122	1.309
	Terung	86	97,50	117,00	6.096	7.838	9.196
	Tomat	13	21,75	40,00	522	1.639	1.586
	Cabai Besar	47	65	31	3.125	5.129	2.103
	Cabai Keriting	67	83	81,25	8.279	7.526	6.024
	Jahe	14.970	69.285	15.435	30.660	49.465	13.815
	Kencur	21.320	23.625	23.290	55.745	33.671	14.185
	Kunyit	12.825	12.657	8.900	24.780	8.287	5.879
	Laos	8.694	9.556	9.943	17.186	12.156	7.460
	Melon	10	13,50	16,00	420	807	751
	Semangka	15	34	57,50	1.601	4.276	6.572

Sumber : *Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2025*

Secara keseluruhan, Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami variasi dalam produksi komoditas hortikultura dari tahun ke tahun. Data ini mencerminkan potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor hortikultura di daerah tersebut. Peningkatan produksi pada komoditas unggulan seperti pisang dan nangka/cempedak menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor ini, meskipun ada penurunan pada beberapa komoditas lainnya.

Kabupaten Tulang Bawang Barat, meiliki tiga komoditas perkebunan utama adalah kelapa sawit, karet dan kelapa. Pada tahun 2022, produksi kelapa sawit mencapai 3.341 sedangkan karet produksinya mencapai 20.516 ton. Luas area dan jumlah produksi dari ketiga komoditas besar tersebut untuk tahun 2022-2023 disajikan secara rinci dalam Tabel 2.97 di bawah ini. Data ini memberikan gambaran lengkap mengenai hasil perkebunan utama di wilayah tersebut.

Tabel 2.97.
Statistik Tanaman Perkebunan
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022-2024

Komoditas	Luas Produksi (ha)			Jumlah Produksi (ton)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Karet	32.578	32.560	32.560	22.411	20.516	20.516
Kelapa Sawit	4.038	4.039	4.039	3.364	3.341	3.441
Kelapa	328	338	338	298	281	280

Sumber : Lampung Dalam Angka 2025

R. Perdagangan

Kabupaten Tulang Bawang Barat, memiliki 27 pasar yang tersebar di setiap kecamatan, serta 3.869 toko dan warung kelontong sebagai bagian dari sarana perdagangan. Data mengenai jumlah pasar tradisional dan persentase pasar yang memenuhi syarat dari tahun 2019 hingga 2023 dapat ditemukan dalam Tabel 2.98.

Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019 s.d. 2024
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Sarana Perdagangan	Satuan	Jumlah					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasar	Unit	20	20	27	27	27	27
2	Toko/warung kelontong	Unit	2930	3570	3869	3869	3869	3869

Sumber : BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka, 2025

Pasar-pasar ini memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan di wilayah tersebut. Jumlah pasar dan toko yang ada memberikan gambaran tentang keberagaman dan ketersediaan fasilitas perdagangan. Informasi detail tentang pasar tradisional dan standarnya selama periode tersebut tercantum pada tabel tersebut.

S. Peternakan

Potensi subsektor peternakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan tren positif, tercermin dari peningkatan jumlah ternak yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah ternak sapi mencapai 27.310 ekor, sedangkan ternak kambing mencapai 92.559 ekor. Kenaikan paling signifikan terjadi pada ternak ayam pedaging, yang meningkat drastis dari 333.000 ekor pada tahun 2021 menjadi 1.178.000 ekor pada tahun 2022. Pertumbuhan ini menandakan peningkatan produktivitas dalam subsektor peternakan. Data produktivitas peternakan dapat diperoleh secara rinci di Tabel 2.99.

Tabel 2.99.
Populasi Ternak Tahun 2019-2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Ternak	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	19.634	22.708	24.181	27.310	28.425	34.419
2	Kambing / domba	67.732	65.944	65.974	92.559	103.365	164.140
3	Ayam Buras	506.526	378.38 0	326.97 4	402.973	671.926	705.525
4	Ayam Ras Petelur	54.344	55.450	55.450	103.079	112.800	239.393
5	Ayam Pedaging	747.353	333.000	333.000	1.178.000	1.238.000	1.299.900
6	Itik	35.481	2.619	2.619	12.721	7.896	12.700

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tubaba 2025

Data mengenai potensi peternakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tertera dalam tabel sebelumnya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengandung protein hewani. Pangan, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, sangat penting untuk dipenuhi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar, pemenuhan pangan juga menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Tingkat konsumsi pangan sering kali digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi ekonomi rumah tangga dan perekonomian nasional, serta dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Kebutuhan kalori umumnya diperoleh dari makanan pokok, sedangkan kebutuhan protein banyak dipenuhi melalui konsumsi produk hewani seperti daging, telur, dan susu.

Produk peternakan memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan pangan, setara pentingnya dengan produk pertanian. Produk-produk peternakan yang sering dikonsumsi mencakup daging, susu, dan telur. Daging, yang termasuk daging sapi, kambing, domba, dan ayam, adalah sumber protein hewani utama yang memberikan asam amino esensial bagi tubuh. Selain daging, susu juga merupakan produk peternakan yang penting, yang bisa dikonsumsi dalam bentuk segar maupun olahan seperti keju dan yogurt. Variasi dan kandungan gizi tinggi dari produk-produk peternakan menjadikannya pilihan populer di kalangan masyarakat. Perkembangan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait produk peternakan dapat ditelusuri lebih lanjut pada tabel 2.100.

Tabel 2.100.
Pola Konsumi Produk Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2021 – 2023

No	Pola Konsumsi	Data Konsumsi (Kg/Tahun)					
		2023		2022		2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Daging Sapi	98.999	95.169	96.900	92.070	92.158	88.847
2	Daging Kerbau	2.069	1.793	1.600	1.170	1.509	1.129
3	Daging Kambing	1.825.094	1.532.394	1.278.000	1.147.300	1.163.270	1.107.144
4	Daging Domba	12.302	11.932	11.800	11.830	11.563	11.415
5	Ayam Ras	989.720	1.745.000	983.560	1.243.900	949.135	1.200.363
6	Ayam Buras	2.048.200	2.516.400	1.679.500	2.386.300	1.620.717	2.302.779
7	Telur Ayam	9.372.059	15.853.500	6.962.175	15.471.500	6.718.498	14.929.997

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2024

Data tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang tren konsumsi produk peternakan dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Dengan memahami data ini, kita dapat mengevaluasi lebih baik bagaimana potensi peternakan dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan lokal.

T. Industri

Pertumbuhan industri, khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Ini mencerminkan peningkatan kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, terdapat 965 unit IKM, dan jumlah ini meningkat menjadi 979 unit pada tahun 2022. Peningkatan jumlah IKM tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor industri kecil dan menengah. Data terkait perkembangan IKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2019 hingga 2024 dapat ditemukan dalam Tabel 2.101 di bawah ini.

Tabel 2.101.
Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Kecil Menengah (IKM) / unit	616	960	965	979	979	979

sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2025

Secara rinci untuk data UMKM yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2023 data yang tercatat di Dinas KOPERINDAG dapat dilihat pada tabel 2.102 dibawah ini :

Tabel 2.102.
Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pertahun
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 – 2024

No	Jenis Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usaha Mikro	3.151	6.870	7.521	7.551	7.561	7.561
2	Usaha Kecil	496	496	-	24	24	24
3	Usaha Menengah	59	59	-	-	-	-
UMKM		3.706	7.425	7.521	7.575	7.585	7.585

Sumber : Dinas Koperindag 2025

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi merupakan alat krusial untuk menilai kesehatan demokrasi suatu negara. Di Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berfungsi memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi demokrasi di seluruh negeri. IDI mencakup berbagai aspek penting seperti partisipasi politik, hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan pers serta ekspresi.

Melalui evaluasi ini, kita bisa memahami lebih dalam tentang keberlanjutan dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Secara umum, Indeks Demokrasi Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung. Namun, antara tahun 2021 hingga 2022, Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang signifikan dan bahkan melampaui rata-rata IDI nasional. Pada tahun 2021, IDI Provinsi Lampung mencapai angka 80.18, yang lebih tinggi dibandingkan dengan IDI nasional yang sebesar 78.12. Data ini bisa dilihat lebih jelas pada Gambar 2.50

Gambar 2.53.
Indeks Demokrasi Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022

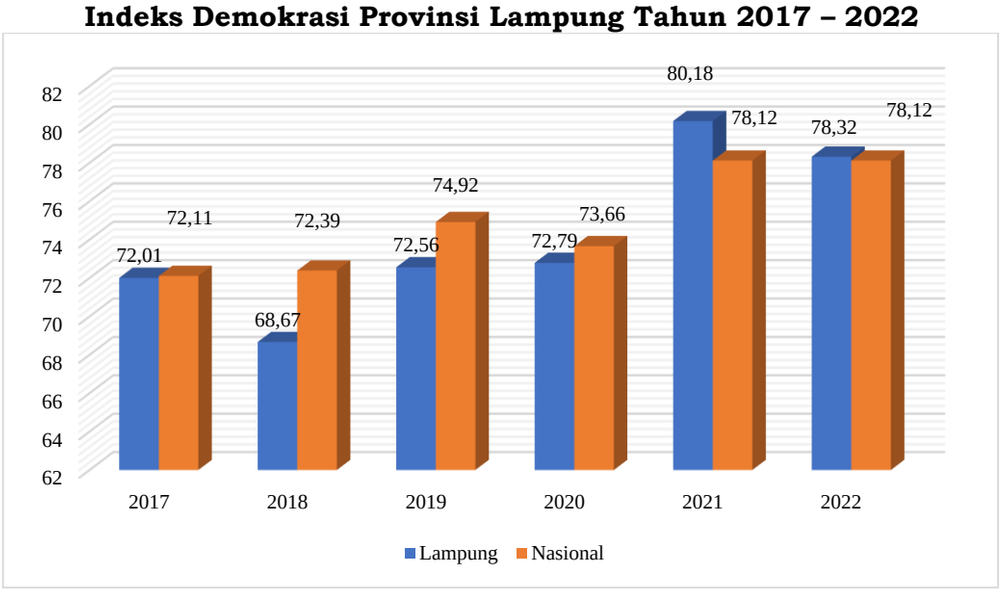

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2023

Aspek yang dinilai oleh Indeks Demokrasi mencerminkan seberapa efektif pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan kebebasan berpendapat menjadi indikator utama dalam penilaian demokrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi dalam proses politik juga berperan positif terhadap hasil IDI, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat mendukung penguatan demokrasi.

B. Indeks Rasa Aman

Indeks demokrasi dan indeks rasa aman memainkan peran krusial dalam menciptakan iklim investasi yang menguntungkan di suatu wilayah. Khususnya, indeks rasa aman berhubungan langsung dengan daya saing investasi, karena tingkat keamanan yang tinggi dapat menjadi faktor kunci bagi para investor dalam menentukan lokasi investasi mereka. Dengan indeks rasa aman yang tinggi, lingkungan bisnis menjadi lebih kondusif dan memberikan kepastian lebih bagi pelaku usaha. Sebaliknya, indeks rasa aman yang rendah dapat menurunkan minat investasi karena investor mungkin merasa risiko keamanan terlalu tinggi.

Angka kriminalitas di suatu daerah sering dijadikan indikator utama untuk menilai tingkat rasa aman masyarakat. Tingkat kriminalitas yang rendah umumnya dikaitkan dengan rasa aman yang tinggi di kalangan penduduk. Penurunan angka kejahatan, seperti tindak pidana jalanan, pencurian, dan kekerasan, dapat menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Namun, jika angka kriminalitas meningkat, masyarakat akan merasakan ancaman yang lebih besar terhadap keamanan pribadi dan harta benda mereka, yang berdampak negatif pada indeks rasa aman.

Tingkat kriminalitas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memengaruhi iklim investasi di daerah tersebut. Pada tahun 2020, angka kriminalitas di daerah ini tercatat sebesar 290 kasus, tetapi menurun menjadi 225 kasus pada tahun 2021, menurut data BPS Lampung. Namun, data dari tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan, dengan 299 laporan kriminal diterima oleh Polres Tulang Bawang Barat. Angka kriminalitas pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,010% dari jumlah penduduk, menunjukkan fluktuasi yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan rasa aman dan mendukung daya saing investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks ketentraman dan ketertiban memainkan peranan penting dalam menciptakan iklim investasi yang menguntungkan di suatu daerah. Tingkat ketentraman yang tinggi membangun fondasi yang solid untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas. Investor biasanya lebih memilih wilayah yang menunjukkan kestabilan sosial dan politik, karena ini memberikan kepastian yang dibutuhkan untuk perencanaan bisnis jangka panjang. Indeks ketentraman yang baik mencerminkan efektivitas pemerintah dalam mengelola ketertiban umum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Iklim investasi yang positif sering kali diperkuat oleh adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung ketertiban dan ketentraman. Kepastian hukum, penegakan aturan secara konsisten, serta lingkungan bisnis yang aman sangat dihargai oleh investor. Investasi untuk meningkatkan indeks ketentraman dapat melibatkan peningkatan keamanan fisik, penempatan polisi yang efektif, dan pelaksanaan program pencegahan konflik sosial. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi pengembangan bisnis.

Wilayah yang berhasil mencapai tingkat ketentraman dan ketertiban yang optimal memiliki peluang besar untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing. Keamanan lingkungan bisnis merupakan salah satu pertimbangan utama bagi investor dalam memutuskan lokasi investasi. Dengan demikian, investasi dalam meningkatkan indeks ketentraman dan ketertiban tidak hanya bermanfaat bagi kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan investasi di wilayah tersebut.

1. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Polisi Pamong Praja

Untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat, jumlah personil Satpol PP pada tahun 2022 mencapai 256 orang. Dengan jumlah tersebut, rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk adalah 8 orang. Namun, sebaran personil ini tidak merata, dengan sebagian besar personil terkonsentrasi di tiga kecamatan utama: Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Tumijajar.

Dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, selama lima tahun terakhir telah dilakukan 21 kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini meliputi sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Selain itu, telah dilaksanakan juga 5 kegiatan pembinaan personil untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan mereka dalam menjalankan tugas.

Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berusaha memastikan penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat wawasan kebangsaan di masyaraka

2. Pelayanan, Penanggulangan bencana Kebakaran

Saat ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki dua unit mobil pemadam kebakaran, sedangkan luas wilayah kabupaten tersebut mencapai 120.115 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 289.620 jiwa pada tahun 2022. Selama periode 2018 hingga 2022, terdapat delapan kejadian kebakaran yang tercatat. Dengan rasio mobil pemadam kebakaran terhadap luas wilayah sebesar 1:600,58, artinya setiap unit mobil pemadam kebakaran harus mencakup area seluas 600,58 hektar di kabupaten ini.

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran diatur dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub urusan Kebakaran Daerah, dengan fokus pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Gambaran menyeluruh mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk periode 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.103

Tabel 2.103.
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran & Tingkat Waktu Tanggap Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024.

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	2	2	2	2		4
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	273.215	286.162	287.707	289.620	295.481	310.637
3	LuasWilayah Kab.Tubaba (ha)	1.201,15	1.201,15	1.201,15	1.201,15	1.201,15	1.201,15
4	Jumlah Kejadian Kebakaran (kali)	4	3	11	8	104	20

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran thd Luas Wil Kab Tubaba (Km^2)	1:600,58	1:600,58	1:600,58	1:600,58	1:300,28	1:600,58
6	Persentase Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Tubaba	60%	50%	60%	60%	75%	75%
7	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani dalam Waktu Tanggap	4	3	11	8	104	20
8	Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangka Waktu WMK	20-30 menit	20-30 menit	20-30 menit	20-30 menit	15 - 30 menit	15-30 menit
9	Tingkat Waktu Tanggap (ResponTimeRate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	30-60 menit	30-60 menit	30-60 menit	30-60 menit	15 - 30 menit	15-30 menit
10	Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Km^2)	20 – 40	20 – 40	20 – 40	20 – 40	20 – 40	20 – 40
11	Jumlah Luas Potensi Kebakaran (Km^2)	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97
12	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran(%)	10 – 20 %	10 – 20 %	10 – 20 %	10 – 20 %	75%	75%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran 2025

3. Bencana Daerah

Tanggap bencana merupakan salah satu peran krusial dan rencana aksi yang diambil oleh pemerintah daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulang Bawang Barat telah mempersiapkan dan melaksanakan langkah-langkah antisipasi bencana, mencakup tahap pencegahan dan mitigasi. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk melakukan penanganan preventif guna meminimalkan kerusakan dan korban jiwa, termasuk tanggap darurat melalui upaya penyelamatan, pencarian, dan evakuasi korban bencana. Selain itu, BPBD juga memberikan bantuan berupa penampungan sementara, penanganan medis, penyediaan makanan, serta melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi perbaikan fisik dan nonfisik.

Mitigasi bencana menjadi titik tolak utama dalam manajemen penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa kegiatan penataan ruang harus berbasis mitigasi bencana. Melalui mitigasi, berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi atau meringankan dampak dan korban yang disebabkan oleh bencana, baik yang termasuk bencana alam maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Usaha-usaha mitigasi ini bertujuan untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan dari dampak bencana. Dengan pendekatan berbasis mitigasi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mampu mengurangi risiko bencana, sehingga kerusakan yang terjadi dapat diminimalkan dan masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi.

Gambar 2.54.
Peta Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
di Kabupaten Tulang Bawang Barat

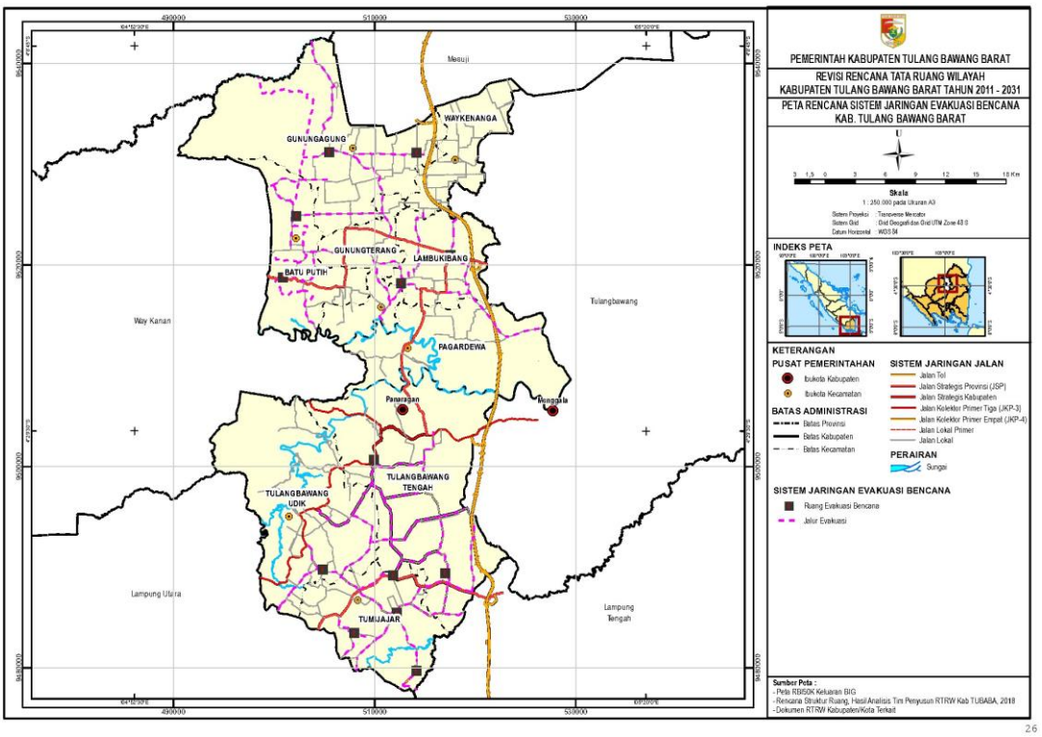

Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011 - 2031

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009–2029, Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung termasuk daerah yang rawan terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, kekeringan dengan tingkat bahaya tinggi, serta kebakaran hutan dan lahan dan cuaca ekstrem dengan tingkat bahaya sedang. Berdasarkan dokumen IRBI tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki nilai IRB sebesar 120,40 yang termasuk kategori sedang. Dalam hal perkembangan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlimas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan terkait.

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengimplementasikannya dalam berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan.

A. Capaian SPM Bidang Pendidikan

Secara keseluruhan, pencapaian SPM di bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan dasar, kesetaraan, dan usia dini, mengalami kemajuan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dalam rata-rata pencapaian SPM bidang pendidikan, yang meningkat dari 72,10% pada tahun 2019 menjadi 94,32% pada tahun 2023. Capaian pelaksanaan SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mencakup periode 2019 hingga 2023, dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.104. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan dasar di wilayah tersebut.

Tabel 2.104.
Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN SPM (%)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Capaian Rata-rata SPM %	**72,10**	**N/A**	**87,21**	**95,75**	**94,32**	**94,99**
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	97,15	N/A	93,26	96,25	94,83	95,57
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraaan	22,01	N/A	84,03	98,61	94,66	96,84
3.	Pendidikan Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	97,15	N/A	84,36	92,40	93,47	92,56

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat 2025

B. Capaian SPM Bidang Kesehatan

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan selama tahun 2020 hingga 2024 disajikan dalam bentuk matrik tabel, sebagai mana pada tebel 2.105 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.105.
Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2020 - 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN SPM (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
BIDANG KESEHATAN							
Capaian rata-rata SPM %			**71,32**	**72,94**	**93,71**	**88,76**	**93,71**
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah semua ibu hamil yang Mendapatkan pelayanan kesehatan	76,78	86,40	96,81	89,67	91.87
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu yang bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	79,36	85,51	98,74	93,98	94.04
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun	79,36	82,0	99,64	92,73	93.96
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	58,60	52,22	89,13	83,31	85.76
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	8,35	85,22	99,33	98,35	99.33
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	65,53	46,53	93,38	69,34	92.34
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	JumlahWarga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	86,68	84,14	92,81	82,12	84.09
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Estimasi penderita hypertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	64,52	50,72	85,10	88,96	95.41
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	83,9	94,28	95,27	97.72
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang terlayani Kesehatan	75,0	79,4	92,00	97,32	95.62
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan Kesehatan	73,3	53,71	89,44	96,25	94.96
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan Layanan Kesehatan	77,06	85,3	93,91	77,92	99.38

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas untuk pelaksanaan dan capain SPM bidang kesehatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya yaitu tahun 2020 rata-rata capain di 71,32 % yang meningkat menjadi 93,71% di tahun 2024.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat belum mencapai 100% disebabkan oleh sejumlah kendala, antara lain adanya kesenjangan antara data proyeksi dan sasaran riil, mobilitas penduduk yang tinggi, serta pelaporan yang belum tepat waktu. Selain itu, beberapa layanan terkendala oleh belum saatnya sasaran menerima pelayanan (seperti ibu hamil yang belum bersalin atau bayi yang belum waktunya imunisasi), serta adanya pelayanan yang dilakukan di luar wilayah sehingga tidak tercatat. Faktor lainnya termasuk kurangnya partisipasi masyarakat, terutama lansia dan usia produktif, serta adanya kasus aborsi yang mengurangi jumlah sasaran layanan.

C. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan. Penerapan ini bertujuan untuk memastikan standar pelayanan minimal dapat dicapai dan dijalankan dengan baik di daerah.

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dari tahun 2019 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data tersebut memberikan gambaran tentang upaya dan pencapaian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.106
Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN SPM (%)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
BIDANG PEKERJAAN UMUM								
Capaian rata-rata SPM %			**33,55**	**36,61**	**38,67**	**49,81**	**60,92**	**91.23**
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari	34,30	35,99	39,47	45,11	55,42	82.45
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limba Domestik	32,79	35,23	37,86	54,50	66,43	100.00

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat Tahun, 2025.

Selain pangan dan sandang, kebutuhan pokok lainnya adalah papan atau rumah sebagai tempat berlindung. Kualitas

perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu rumah tangga. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri mencapai 94,59 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 94,48 persen.

Fasilitas tempat buang air besar milik sendiri pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari 85,82 persen pada tahun sebelumnya menjadi 86,56 persen. Selain itu, jenis kloset yang digunakan rumah tangga berupa kloset leher angsa pada tahun 2020 tercatat sebesar 88,39 persen, naik dari 84,59 persen pada tahun sebelumnya. Ketersediaan air bersih juga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.

Persentase rumah tangga yang menggunakan sumur bor atau pompa meningkat pada tahun 2020 menjadi 11,89 persen dibandingkan tahun 2019. Selain itu, persentase rumah tangga yang menggunakan sumur atau mata air terlindung untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan lainnya pada tahun 2020 sebesar 22,87 persen, sedangkan yang menggunakan sumur atau mata air tidak terlindung sebesar 65,24 persen.

D. Capain SPM Bidang Sosial

Untuk memantau perkembangan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur penerapan standar pelayanan minimal melalui berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan. Implementasi SPM bertujuan untuk memastikan bahwa layanan sosial yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sosial. Data capaian SPM selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan pelaksanaan layanan dasar di bidang sosial.

Dalam upaya memenuhi standar pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara aktif mengimplementasikan program-program yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial. Seluruh kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi ini juga mencerminkan upaya untuk memperbaiki kualitas layanan sosial yang diberikan. Dengan menerapkan program-program tersebut, diharapkan dampak positif bagi masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Informasi terkait capaian pelaksanaan SPM dapat diakses melalui tabel yang disediakan di bawah ini.

Untuk informasi lebih detail mengenai capaian Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan. Tabel tersebut memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan dan pencapaian dalam pelayanan sosial selama periode tersebut. Dengan demikian, semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang diterapkan. Data tersebut penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan

perbaikan dan memastikan bahwa layanan sosial terus berkembang.

Tabel 2.107
Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN SPM (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
BIDANG SOSIAL							
Capaian rata-rata SPM %			**73,80**	**80,15**	**92,00**	**100**	**99.07**
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitas Sosial di Luar Panti	73,33	56,49	96,82	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	69,23	63,20	92,80	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	67,37	81,05	92,50	100	99.69
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	59,05	100	85,87	100	99.67
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota.	100	100	92,00	100	96.00

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat, 2025

E. Capai SPM Bidang Trantibumlinmas

Capaian pelaksanaan SPM tahun 2019-2024 untuk urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibumlimas dapat dilihat pada tabel 2.108 di bawah ini.

Tabel 2.108.
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlimas
Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN SPM (%)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
BIDANG TRANTIBUMLIMAS								
Capaian rata-rata SPM %			**76,67**	**80,00**	**87,00**	**89,84**	**100**	**100**
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda (%)	100	100	75,00	87,89	100	100
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	90,00	100	100
3.	PelayananInformasi Rawan Bencana	Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	NA	NA	60,00	87,33	100	100
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penduduk yang memperolehlayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	84,00	100	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	83,33	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat 2025

2.1.6. Kerajasama Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Selama kurun waktu 2023-2025 Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan beberapa keja sama ada sebanyak 33 kerja sama, seperti kerjasama dengan pemerintah daerah lain yaitu dengan Kabupaten Sumedang melakukan kerjasama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Dimana pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan studi tiru terkait aplikasi SPBE guna meningkatkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selain dengan daerah lain Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan milik pemerintah, hal ini dilaksasanakan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu bekerjasama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN dengan Program Pembibitan Calon Aparatur Sipil Negara Di Bidang Keuangan Negara Melalui Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Dan Program Studi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Angkatan 2024 di Politeknik Keuangan Negara STAN.

2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur Oleh APBN dan APBD Provinsi di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Rencana Pembangunan Infrastruktur tahun 2025-2029 adalah salah satu fokus utama dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029. RPJMN menetapkan prioritas nasional yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kunci utama. Rencana pembangunan infrastruktur dalam RPJMN tercantum pada arah pengembangan kewilayahan yang dibagi per wilayah bahkan Provinsi dengan lokus di beberapa kabupaten/kota, berdasarkan Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN di Provinsi Lampung yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dengan arah pengembangan dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu: 1)Kawasan Pertumbuhan; 2) Kawasan Komoditas Unggul; 3)Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi; 4)Kawasan Afirmasi serta 5)Kawasan Konservasi/Rawan Bencana dimana Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk ke dalam koridor ***kawasan sembada pangan air dan energi***, sebagai mana tergambar pada Gambar 2.52 Dibawah ini.

Gambar 2.52
Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Lampung yang tercantum dalam RPJMN tahun 2025-2029 Lokus Kabupaten Tulang Bawang Barat.

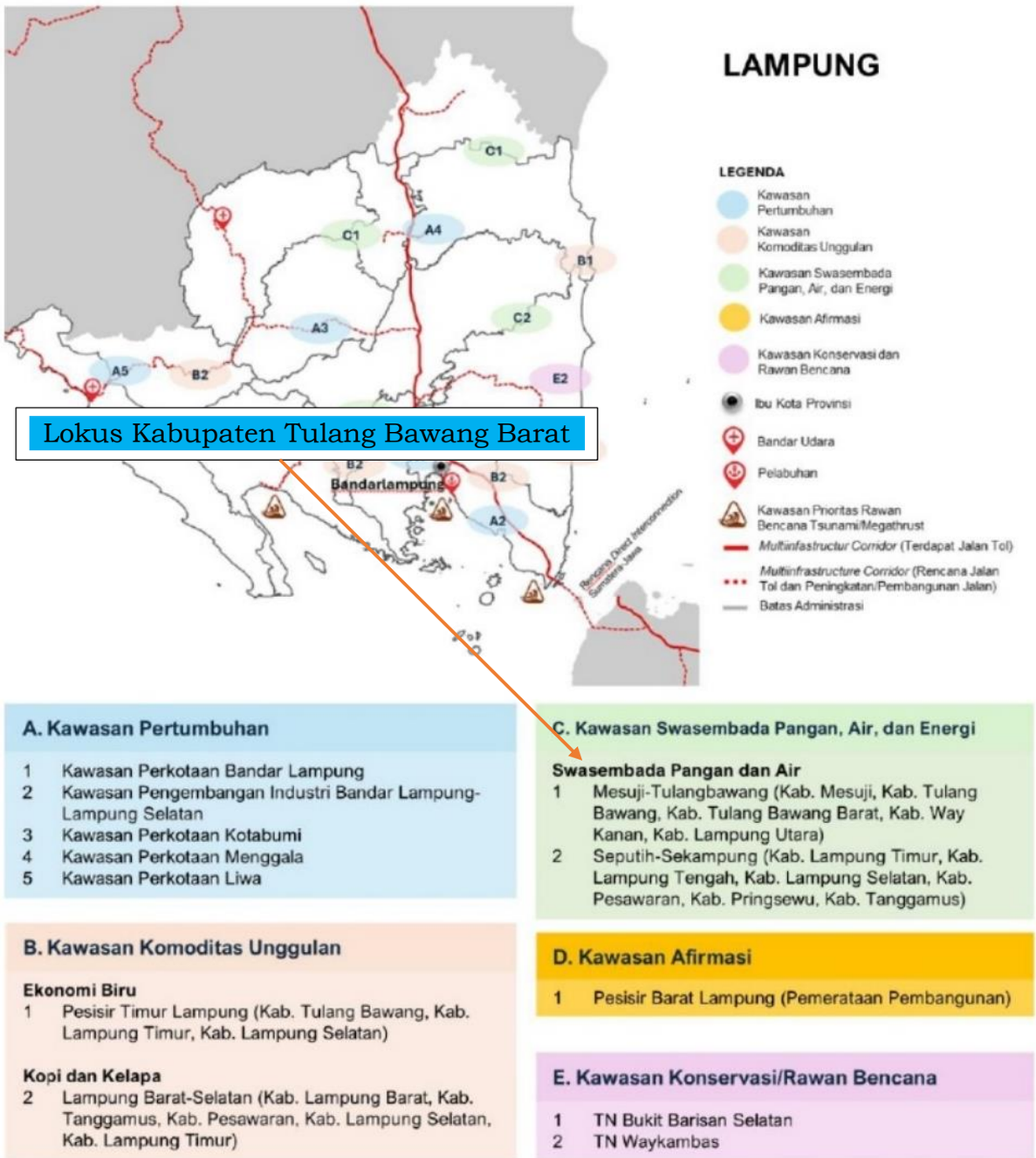

Sumber : Lampiran IV RPJM Nasional 2025-2029

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur yang melalui APBD Provinsi Lampung dalam Highlight Indikasi Intervensi pada RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029, bahwasanya Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk ke dalam Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi, dikawasan Mesuji – Tulang Bawang yang terdiri dari Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Utara dengan lokus pembangunan yang masuk ke Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah :

1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Rawajitu, D.I. Way Rarem, D.I. Way Umpu, D.I. Rawapitu, dan D.I.R. Rawa Mesuji Atas.
2) Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi)
3) Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan perternakan)
4) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
5) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
6) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu
7) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, Sub-DAS Way Umpu
8) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
9) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern /benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
10) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
11) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian

Selanjutnya untuk pembangunan infratruktur berdasrkan potensi wilayah dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk dalam Koridor Ekonomi Wilayah II : Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism dengan rencana :

1) Kawasan industri Tulang Bawang Barat
2) Dermaga Gunung Terang di Kabupaten Tulang Bawang Barat
3) Pengembangan Dermaga Gunung Terang
4) Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Megow Pak yang melintasi sungai Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji

Dari keseluruhan rencana pembangunan infrastruktur yang tercantum dalam RPJM Nasional tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 lokus Kabupaten/kota khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan mendukung melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

2.1.8. BUMD Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen strategis yang digunakan dalam upaya tersebut adalah pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tidak hanya dirancang sebagai entitas bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja BUMD menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan BUMD telah mendirikan BUMD yang bergerak dalam bidang keuangan yaitu PT. BPR Syariah Tani didirikan berdasarkan akta notaris Hi. Akta Notaris H. Asvi Maphilindo volta, SH Nomor 51 tanggal 18 Agustus 2015. Akta ini telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Keputusan No. AHU-2454149-AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 02September 2015.Pada Tahun 2019 terjadi perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dimuat dalam akta nomor 2 tanggal 13 desember 2019 dari Notaris Tubagus Lukman Suheru, Sh di Bandar Lampung, dam Telah Disahkan Oleh Kementerian Hukum dan Hak saksi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-024210.AH.01.11. Tahun 2019 Tanggal 16 Desember 2019.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ada perubahan besar yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diubah dua kali oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Komponen yang lebih adil, rasional, transparan, bepartisipasi, dan akuntabel termasuk dalam perubahan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dimiliki daerah, terkait dengan hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai elemen yang relevan termasuk dalam lingkup keuangan daerah, seperti:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Selain itu, semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan keuntungan bagi masyarakat. Jika program-program yang dicanangkan berhasil dilaksanakan, pengelolaan keuangan daerah akan dianggap baik. Pengawasan pendapatan daerah, pengeluaran, dan sumber pembiayaan adalah bagian dari pengelolaan keuangan. Jika sebuah daerah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah sambil meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk maju dan mandiri. Dan dengan melihat kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Dalam kerangka pengelolaan belanja daerah, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya. Berkaitan hal tersebut,

pemerintah daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, besaran Rekapitulasi Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*) dengan rincian, yaitu Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa, serta Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penjabaran kuantitatif dari tujuan, sasaran, tugas pokok, dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan instrumen penting untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD disusun dengan memperhitungkan pendanaan untuk mencapai berbagai sasaran, tugas, dan fungsi sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat selama satu tahun.

Untuk melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, kita harus melihat bagaimana APBD digunakan selama lima tahun terakhir. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah adalah tiga komponen utama APBD. Sebelum melakukan analisis, kita harus memahami pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan daerah. Dengan mempertimbangkan peluang dan kendala yang ada, hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan yang akan datang.

Dalam kinerja keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2020, Perubahan APBD dilakukan sebagai respons terhadap wabah Covid-19. Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran guna menangani dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin dalam realisasi pendapatan daerah yang mengalami

fluktuasi setiap tahunnya. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang mencerminkan kondisi ekonomi yang dinamis. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.865.445.745.442,98, mengalami peningkatan menjadi Rp.879.766.152.580,43 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, realisasi pendapatan sedikit menurun menjadi Rp.866.042.392.192,69, dan terus menurun hingga Rp.857.646.848.248,65 pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2024 dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.919.969.246.990,91.

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang berkontribusi pada total pendapatan daerah. Pengelolaan sumber pendapatan asli daerah yang efektif serta upaya mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan keuangan daerah yang berkelanjutan, sebab komponen terbesara dari pendapatn daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terbesar adalah bersumber dari dana tranfer pemerintah pusat, yang apa bila ada kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dana transfer ke daerah maka akan sangat berpengaruh terhadap postur pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Komponen APBD terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah Lain yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Pendapatan daerah secara umum mengalami peningkatan pada tahun-tahun awal, dengan kontribusi utama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja pendapatan yang menunjukan pendapatan terbesar bersumber dari dana transfer ini mencerminkan ketergantungan yang cukup tinggi pada pemerintah pusat, sementara PAD masih relatif rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan sendiri, meskipun masih terbatas dibandingkan dengan alokasi dana pusat. Secara keseluruhan, stabilitas pada sumber pendapatan ini membantu mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Pada bagian belanja daerah, kinerja pengeluaran APBD mencerminkan prioritas utama pada belanja pegawai dan belanja barang serta jasa, yang terus meningkat untuk menunjang layanan publik. Namun, belanja modal cenderung mengalami penurunan, yang dapat berdampak pada pengurangan alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur jangka panjang. Pergeseran prioritas ini menunjukkan adanya penekanan pada peningkatan kualitas layanan pemerintah, tetapi juga menandakan kebutuhan untuk strategi yang lebih seimbang antara belanja operasional dan belanja modal. Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan APBD ini memperlihatkan

bahwa pemerintah daerah berhasil menjaga stabilitas anggaran, meskipun perlu perhatian lebih pada optimalisasi belanja modal agar pembangunan infrastruktur dan layanan publik dapat berjalan secara berkesinambungan. Berikut gambaran perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada tabel 2.109 dibawah ini.

Tabel 2.109
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 s/d Tahun 2024
Kabupatten Tulang Bawang Barat

(Dalam Rupiah)

No	AKUN	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Pendapatan Daerah**					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	41.093.467.361,98	46.579.011.595,43	51.532.994.618,69	51.184.782.701,65	54.654.930.261,91
1.2	Pendapatan Transfer	631.141.021.983,00	796.929.767.985,00	811.977.397.574,00	806.461.701.547,00	865.314.316.729,00
1.3	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	193.211.256.098,00	36.257.373.000,00	2.532.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**865.445.745.442,98**	**879.766.152.580,43**	**866.042.392.192,69**	**857.646.848.248,65**	**919.969.246.990,91**
2	**Belanja Daerah**					
2.1	Belanja Operasi	666.672.931.374,00	549.807.397.920,00	563.899.096.735,10	554.652.058.884,07	627.740.608.621,62
2.2.	Belanja Modal	255.234.628.495,48	243.451.011.536,40	148.356.337.176,00	104.552.276.694,00	130.847.881.637,00
2.3.	Belanja Tidak Terduga	16.798.820.118,00	967.492.415,00	66.000.000,00	106.353.000,00	246.620.000,00
2.4.	Belanja Transfer	857.977.440,00	142.707.055.774,00	128.462.147.244,00	130.561.172.723,00	138.864.780.275,00
	Jumlah Belanja	**938.706.379.987,48**	**936.932.957.645,40**	**840.783.581.155,10**	**789.871.861.301,07**	**897.699.890.533,62**
	Surplus/Defisit	**(74.118.611.984,50)**	**(57.166.805.064,97)**	**25.258.811.037,59**	**67.774.622.947,58**	**22.269.356.457,29**
3	**Pembiayaan Daerah**					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	137.922.726.986,92	103.840.436.610,42	10.062.419.217,68	(2.900.729.513,67)	15.616.217.175,91
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.955.079.172,00	37.068.877.328,00	38.229.966.258,00	49.557.676.258,00	12.466.058.328,00
	Pembiayaan Netto	**124.967.647.814,92**	**66.771.559.282,42**	**(28.167.547.040,32)**	**(52.458.405.771,67)**	**3.150.158.847,91**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**50.849.035.830,42**	**9.604.754.217,45**	**(2.908.736.002,73)**	**15.316.217.175,91**	**25.419.515.305,20**

Sumber : BKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdaarkan tabel diatas jika dilihat dari perspektif belanja daerah, total pengeluaran pada tahun 2020 berjumlah Rp938.706.379.987,48, kemudian terus mengalami penurunaan hingga menjadi sebesar Rp789.871.861.301,07 pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp.897.699.890.533,00. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan, efisiensi pengeluaran, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pembiayaan.

2.2.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan ini memiliki peran penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah dengan efisien dan efektif. Neraca Daerah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, termasuk aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal laporan diterbitkan. Informasi ini membantu manajemen daerah dalam memahami likuiditas dan fleksibilitas keuangan mereka. Penyajian informasi tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan kekayaan daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis kinerja Neraca Daerah diperlukan untuk merumuskan perencanaan keuangan daerah yang komprehensif, mencakup rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban jangka pendek. Analisis solvabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

Pada analisis neraca daerah sebagai mana data yang tersedia di kabupaten Tulang Bawang Barat yakni data tahun 2020-2024, yang disajikan pada Tabel 2.110 dimana menunjukkan rekapitulasi perkembangan, rasio liquiditas, dan solvabilitas neraca daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Tahun 2020-2024.

Tabel 2.110
Realisasi Neraca Daerah dari Tahun 2020 s/d 2024 Kabupaten Tulang Bawang Barat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Akun	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Aset**					
1.1	Aset Lancar	80.721.615.296,06	59.739.415.588,90	57.292.228.693,26	91.457.292.847,32	108.456.745.144,82
1.2	Investasi Jangka Panjang	16.984.782.971,62	16.601.715.338,75	17.972.788.537.84	18.101.328.502,79	17.304.051.051.118,79
1.3	Aset Tetap	1.894.321.367.729,62	1.829.951.907.589,65	1.772.421.166.514,67	1.751.950.245.199,68	1.828.000.416.577,50
1.4	Aset Lainnya	12.877.307.375,57	14.427.753.761,25	16.364.079.300,92	14.530.763.486,00	13.213.920.329,69
	Jumlah Aset Daerah	**2.004.905.073.372,82**	**1.920.720.792.278,55**	**1.864.050.263.046,69**	**1.876.039.630.035,79**	**1.966.957.133.170,80**
2	**Kewajiban**					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	103.619.715.734,73	83.887.232.829,61	81.431.037.820,81	78.740.334.727,19	83.736.537.676,53
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	98.415.872.915,00	112.160.674.494,57	62.704.080.438,33	51.276.860.096,00	38.810.801.987,00
	Jumlah Kewajiban	**202.035.588.649,00**	**196.047.907.324,18**	**144.135.118.259,14**	**130.017.194.823,19**	**122.547.339.663,53**
3	**Ekuitas**					
3.1	Ekuitas	1.802.869.484.723,14	1.724.672.884.954,37	1.719.915.144.787,54	1.746.022.435.212,60	1.844.427.793.507,27
	Jumlah Ekuitas	**1.802.869.484.723,14**	**1.724.672.884.954,37**	**1.719.915.144.787,54**	**1.746.022.435.212,60**	**1.844.427.793.507,27**
	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	**2.004.905.073.372,87**	**1.920.720.792.278,55**	**1.864.050.263.046,69**	**1.876.039.630.035,79**	**1.966.975.133.170,80**

Sumber : BKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel diatas menunjukkan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama lima tahun terakhir, dengan fokus pada kategori aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pertumbuhan aset yang relatif stabil ini mencerminkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset secara efektif. Di sisi lain, total kewajiban justru menunjukkan pertumbuhan, kewajiban ini dapat mengindikasikan upaya daerah dalam peningkatan fasilitas untuk menunjang program kerja dan upaya untuk mencapai target.

Ekuitas dana secara keseluruhan tumbuh, hal ini mengindikasikan adanya penguatan dalam ekuitas yang dimiliki daerah dan beberapa investasi mengalami peningkatan nilai. Kombinasi antara pengurangan kewajiban dan pertumbuhan ekuitas menunjukkan perbaikan kondisi finansial dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Pertumbuhan kewajiban dan ekuitas secara keseluruhan, menunjukkan kestabilan antara aset dan kewajiban yang dimiliki. Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan kondisi neraca keuangan yang relatif sehat dan stabil di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun terakhir.

2.2.3. Proyeksi Kerangka Pendanaan

Hasil perhitungan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dari setiap komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Kinerja Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah selama lima tahun terakhir, dengan rata-rata sebesar 84,41%. Komponen utama dari Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat, dengan rata-rata kontribusi sebesar 91,70%. Pendapatan Transfer memiliki rata-rata kinerja sebesar 96,31%, yang masih di bawah target, tetapi memberikan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan daerah (91,07%), dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,30%.

Oleh karena itu, dalam menentukan proyeksi angka pendapatan, perlu dilakukan penyesuaian agar proyeksi tersebut lebih realistis dan tidak terlalu optimis. Tujuannya adalah agar perencanaan keuangan lebih berpegang pada prinsip konservatif dan kehati-hatian. Apalagi, jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat berfluktuasi, bahkan beberapa pos pendapatan menunjukkan tren pertumbuhan negatif. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dalam melakukan proyeksi terhadap pendapatan maupun belanja daerah, dengan pendektan asumsi yang digunakan yakni rata-rata laju pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir dengan angka yang digunakan adalah 1% - 2,5%. Berdasarkan asumsi tersebut didapatkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah lainnya di kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2026-2030. Secara rinci dapat di lihat pada Tabel 2.111.

Tabel 2.111
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2026 s/d Tahun 2030 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Akun	Base Laine (2024)	Proyeksi Anggaran Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**Pendapatan Daerah**						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	55.782.929.096,00	68.596.453.613,00	69.625.400.418,00	71.017.908.427,00	72.438.266.596,00	73.887.031.928,00
1.2	Pendapatan Transfer	892.264.509.441,00	833.047.175.937,00	845.542.883.576,00	862.453.741.249,00	879.702.816.075,00	897.296.872.399,00
1.3	Lain – lain pendapatan Daerah Yang Syah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**948.047.438.537,00**	**901.643.629.550,00**	**915.168.283.994,00**	**933.471.649.676,00**	**952.141.082.671,00**	**971.183.904.327,00**
2	**Belanja Daerah**						
2.1	Belanja Operasi	659.406.172.435,00	632.680.653.903,00	636.305.863.712,00	649.281.980.987,00	662.517.620.607,00	676.017.973.020,00
2.2.	Belanja Modal	136.124.094.151,00	155.046.101.261,00	100.621.792.780,00	107.304.228.636,00	111.503.313.209,00	119.800.919.474,00
2.3.	Belanja Tak Terduga	350.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.4.	Belanja Transfer	158.960.610.126,00	154.916.874.386,00	157.240.627.502,00	160.385.440.053,00	163.593.148.855,00	166.865.011.833,00
	Jumlah Belanja	**954.840.876.712,00**	**943.643.629.550,00**	**895.168.283.994,00**	**917.971.649.676,00**	**938.641.082.671,00**	**963.683.904.327.00**
	Surplus / Devisit	**(6.793.438.175,00)**	**(42.000.000.000,00)**	**20.000.000.000,00**	**15.500.000.000,00**	**13.500.000.000,00**	**7.500.000.000,00**
3	**Pembiayaan Daerah**						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	19.293.438.175,00	55.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.500.000.000,00	13.000.000.000,00	25.000.000.000,00	20.500.000.000,00	18.500.000.000,00	12.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**6.793.438.175,00**	**42.000.000.000,00**	**(20.000.000.000,00)**	**(3.000.000.000,00)**	**(13.500.000.000,00)**	**(7.500.000.000,00)**

Sumber : BKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dari sajian tabel proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun 2026 – 2030 menyajikan gambaran proyeksi untuk pendapatan daerah, belanja daerah, dan struktur pembiayan daerah.

a. Pendapatan Daerah,

Pendapatan daerah merupakan salah satu bagian penting dan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Tahun 2026-2030 pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, serta mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan daerah, dimana komponen terbesar pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat masih diproyeksikan dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat, adapun untuk kebijakan sektor pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menekankan pentingnya penguatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perluasan basis pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta penguatan sinergi dalam pemanfaatan dana transfer.

Selain itu, kebijakan fiskal daerah menyelaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat serta arah pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional. Dalam hal ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat akan menyelaraskan strategi pendapatan dengan prioritas Provinsi Lampung dan Nasional, seperti transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan investasi melalui kebijakan yang adaptif guna meningkatkan kapasitas fiskalnya daerah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, serta menciptakan tata kelola keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang lebih efisien dan tepat. Adapun untuk kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan diarahkan dan difokuskan pada:

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak. Melakukan penyesuaian regulasi daerah terkait tarif dan jenis retribusi agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal dan potensi yang dimiliki. Mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif dan legal untuk menghasilkan pendapatan tambahan, termasuk melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Peningkatan peran BUMD sebagai penyumbang pendapatan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan model bisnis.

2) Peningkatan Kualitas Pendapatan Transfer

Mengoptimalkan penerimaan dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui pemenuhan indikator kinerja dan kelengkapan dokumen perencanaan. Memperkuat sinergi program pemerintah pusat dan daerah agar

kebijakan fiskal nasional memberikan nilai tambah langsung bagi pendapatan daerah. Mendorong kinerja fiskal daerah agar memenuhi syarat penerimaan Dana Insentif Fiskal dan dana tambahan lainnya.

3) Pengembangan Sumber Pendapatan Alternatif

Meningkatkan kapasitas penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti pendapatan dari hibah, bantuan keuangan, kerja sama pemerintah-swasta, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mendorong pelibatan CSR dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya pada sektor sosial, pendidikan, dan lingkungan.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah, merupakan instrumen dalam mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam periode 2026-2030 merancang kebijakan belanja daerah yang lebih efektif, efisien, dan berbasis kinerja, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan, kebijakan belanja daerah harus difokuskan pada:

1. Meningkatkan proporsi belanja produktif seperti belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Mengoptimalkan belanja operasi agar lebih efisien, terutama dalam pengelolaan belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial.
3. Menjaga fleksibilitas anggaran dengan alokasi belanja tidak terduga yang memadai guna mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana alam dan krisis ekonomi.

Seluruh kebijakan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini harus selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mendukung prioritas pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional, seperti peningkatan daya saing ekonomi, penguatan sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan pendekatan yang berbasis hasil (performance-based budgeting), diharapkan belanja daerah dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah, merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menutupi defisit anggaran serta mendukung program pembangunan strategis tahun 2026-2030 merancang kebijakan pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal, optimalisasi sumber pembiayaan, serta efisiensi dalam pengelolaan utang daerah.

Dalam kerangka perencanaan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan daerah akan mempertimbangkan:

1. Optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memastikan anggaran yang tidak terserap dapat dimanfaatkan kembali secara efektif.
2. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk melakukan pinjaman daerah dan selektif dalam penggunaan pinjaman daerah untuk proyek strategis yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah.
3. Efisiensi dalam pengeluaran pembiayaan, terutama dalam pengelolaan cicilan pokok utang dan penyertaan modal daerah, agar tidak membebani APBD dan tetap menjaga keseimbangan fiskal.
4. Memperkuat peran pembiayaan kreatif, seperti kerja sama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan tradisional.

Seluruh kebijakan pembiayaan daerah ini harus selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta mendukung kebijakan fiskal Provinsi Lampung dan Nasional, termasuk dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong kemandirian fiskal. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan akuntabel, pembiayaan daerah diharapkan dapat menjadi instrumen yang strategis dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Menurut Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis terhadap realisasi pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat diperlukan untuk menentukan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak bisa dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib, mengikat, dan menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Contoh belanja periodik yang wajib dan mengikat termasuk gaji dan tunjangan pegawai, anggota dewan, bunga, serta belanja sejenis lainnya. Dalam perkembangannya pendapatan daerah diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1% - 2,5% seiring dengan tumbuhnya perekonomian daerah. Saat ini porsi terbesar pendapatan daerah mayoritas berasal dari penerimaan pajak. Kedepan usaha-usaha lainnya yang legal sesuai peraturan perundang-undangan perlu dioptimalkan.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan bagian penting untuk menyesuaikan Visi dan Misi Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Keadaan dan kondisi Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah digambarkan dan diuraikan pada bab sebelumnya yang menunjukkan fakta bahwa masih ada

persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis, sehingga dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan didaerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun kedepan.

Untuk isu strategis pembangunan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data kondisi eksisting Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan yang disandingkan dengan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan lokal. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD yang mendasari perumusan program prioritas.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

A. Tantangan Secara Global dan Nasional

1) Tantangan Secara Global

Kondisi global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk lima tahun yang akan datang diantaranya adalah:

Pertama, pemulihan perekonomian global yang diprediksikan mengalami pertumbuhan, meskipun bisa dikatakan belum pulih sepenuhnya atau ada perlambatan. Perekonomian negara-negara maju mulai ke arah tumbuh kembali walau terlihat lambat dan tidak lagi terseret permintaan negara-negara berkembang. Perekonomian di kawasan Eropa, Jepang, Cina, dan negara-negara emerging market lainnya diperkirakan akan tumbuh sekitar 2-5 persen. Demikian pula perekonomian Amerika Serikat yang mulai pulih, dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat. Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara sedang berkembang Eropa. Ditambah dengan gejolak harga minyak dunia dimana disatu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kedua, pergeseran peran ekonomi Kawasan Asia Pasifik dalam perekonomian global. Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41 persen penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Tren ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahap, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang

dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Kerjasama tersebut antara lain Trans Pacific Partnerships (TPP), ASEAN Regional Forum (ARF), Shanghai Cooperation Organization (SCO), East Asia Summit (EAS), serta Expand ASEAN Maritime Forum (EAMF).

Ketiga, stabilitas politik global yang dinamis. Kebijakan proteksi ekonomi Amerika Serikat dengan jargon America First, dan diikuti dengan penarikan diri AS dari komitmen Kemitraan Trans Pasifik/TPP, akan memberikan pengaruh pada inisiatif perdagangan dunia, termasuk Indonesia, karena AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor komoditas Indonesia. Selain itu, ketegangan politik di kawasan Korea Utara dan Timur Tengah saat ini, serta di negara Arab Saudi juga dapat mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi dan politik regional dan global. Gerakan radikalisme dan terorisme juga terus menjadi tantangan stabilitas politik nasional, serta merebaknya peredaran NAPZA lintas negara yang semakin tidak terbendung. Perkembangan transportasi dunia yang semakin cepat, berakibat pada terbukanya kemudahan akses distribusi barang dan jasa, serta pergerakan manusia lintas negara. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan, untuk bisa lebih pro aktif mengantisipasi perubahan dan pergerakan tersebut.

Keempat, keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2016. Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Tulang Bawang Barat kedepan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipanya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA. Disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

Kelima, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan

minuman dan industri olahan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Kabupaten Tulang Bawang Barat serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

2) Tantangan Secara Nasional

Tantangan secara nasional juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tulang Bawang Barat lima tahun kedepan, antara lain:

Pertama, kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa potensi kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.

Kedua, bonus demografi. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati manfaat bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan bergesernya struktur umur penduduk dimana penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Perubahan struktur tersebut memungkinkan meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply). Apabila dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (human capital), penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, serta didukung dengan kebijakan menjaga penurunan fertilitas, dan peningkatan literasi tentang tabungan (saving) maka manfaat adanya bonus demografi akan dapat terwujud.

B. Permasalahan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Mendasarkan pada kondisi yang tergambarkan pada Bab 2, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Tulang Bawang Barat yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan, identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan terhadap urusan yang bersifat makro (lintas sektor) dan seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1) Permasalahan Makro (Lintas Sektor)

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat selama lima tahun terus mengalami peningkatkan dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 70,04 dengan Kategori Tinggi. Namun capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan capaian 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

b) Kemiskinan

Presentase Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat selama lima tahun terus mengalami penurunan dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 7,22%. tetapi penurunan tersebut sangat kecil dan tidak sangat signifikan.

c) Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 sebesar 4,55%, jika dilihat dari trend 3 tahun terkahir 2022 – 2024 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan capain tersebut dibawah Provinsi Lampung.

d) Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan sebesar 0,23% dari tahun 2023 (3,89%) menjadi 4,12% pada tahun 2024.

e) Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami kenaikan sebesar 0,023 point dari tahun 2023 (0,274) menjadi 0,297 pada tahun 2024.

2) Permasalahan sesuai bidang urusan pemerintahan

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Tulang Bawang Barat tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

a. Harapan lama sekolah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 mencapai 12,12 setara dengan Usia Kelas 1 Sekolah Menengah Pertama dan masuk dalam katergori rendah.
b. Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024 mencapai 7,80 setara dengan kelas 1 Sekolah Menengah Pertam dan masih dalam kategori rendah, dikarenakan untuk pendidikan dasar dilaksankan 9 Tahun.
c. Berdasarkan data rasio guru dan murid jenjang pendidikan dasar tahun 2024 yaitu sebesar 13,24, jika dilihat dari data tersebut sudah cukup ideal karena 1 guru mendidik 20 murid, tetapi

dimungkinkan pemerataan penempatan tenaga pendidik pendidikan dasar antar wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

d. Perlu peningkatan aktivitas promosi budaya dengan memanfaatkan “Balai Adat Sesat Agung” yang sudah dibangun, sekaligus menjadi simbol penyatuan keberagaman budaya daerah lain yang ada dan berkembang di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bentuk penguatan nilai-nilai kebangsaan.
e. Perlunya pengembangan kesenian tradisonal lokal untuk mengurangi masuk dan berkembangnya seni budaya asing yang sering bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.
f. Rendahnya minat generasi muda dalam kesenian lokal dan partisipasi pelestarian seni budaya

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

a. Jumlah Dokter Tenaga Medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi) belum pernah mencapai target ideal dalam pemberian pelayanan jika dibandingan dengan rasio 100.000 penduduk.
b. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru mencapai 71,01%, meningkat menjadi 77,42% pada 2023. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan menjadi 87,23%, dan mencapai 88,00% pada tahun 2025. Meskipun tren ini menunjukkan arah positif, capaian tersebut masih belum mencapai target nasional UHC sebesar 98%.
c. Tingginya angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular.
d. Masih kurangnya infrastruktur kesehatan rujukan seperti Rumah Sakit Tulang Bawang Barat masih Tipe D.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan dan Jembatan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah dengan pusat-pusat pertumbuhan. Dalam pelaksanaanya, perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B//II.03/HK/TUBABA/2023 untuk pajang jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sepanjang 596,29 KM dengan jumlah ruas jalan sebanyak 202 ruas, dan berdasarkan berita acara pemerikasaan hasil survei kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2025 yang telah disetujui oleh seksi keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional Provinsi Lampung untuk capaian persentase jalan mantap Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 sebesar 43,90%.
b. Perlu ada peningkatan status tipe jalan kabupaten terutama jalur utama penopang perekonomian

Sumber Daya Air

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan lahan pertanian. Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Jaringan irigasi Kondisi baik 1487,04 Ha dari 3671,10 Ha sehingga presentasi jaringan irigasi dengan kondisi baik adalah 40,66%.
b. Proporsi kebutuhan air dengan ketersediaan air baku tidak seimbang.
c. Perawatan jaringan irigasi yang berfungsi dengan optimal belum maksimal.

Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu:

a. Masyarakat yang mendapatkan akses air minum sampai denga tahun 2024 penduduk 104.344 SR. persentase yang mendapat akses air minum baru sebesar 54,32 %
b. Masyarakat yang mendapat akses pengelolaan air limbah hingga tahun 2024 sebanyak 67.414 SR dari 104.344 SR dengan persentase 64,61 %.

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

a. Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni capainnya masih rendah, Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2024 sebanyak 3.726 (4,91%), jumlah yang tertangani sebanyak 1.627 (43,67%).

b. Luasnya kawasan Kumuh yang belum tertangani.
c. Kurang tertatanya ruang terbuka hijau.
d. Jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman, masih perlu ditingkatkan.
e. Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masih belum baik dan perlu ditingkatkan.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan keadaan yang kondusiv di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas ketertiban umum, menjaga kerukunan antar umat beragama dan penanggulangan bencana. Namun demikian, masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut:

a. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024 sebesar 112,66, dengan indeks resiko bencana banjir sebesar 28,37 kategori tinggi, Kekeringan 18,91 kategori tinggi dan Kebakaran Hutan& lahan sebesar 18,91 kategori tinggi.
b. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah terutama yang terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
c. Kasus kriminalitas di kabupaten tulang bawang barat pada tahun 2024 sebanyak 450 kasus dengan capaian rasio kriminalitas sebesar 150,65% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

6) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Tulang Bawang Barat senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain **:**

a. Penurunan angka kemiskinan yang tidak signifikan, dilihat dari trend penurunan kemiskinan tahun 2023 – 2024, penurunannya hanya 0,03%
b. Belum optimalnya penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
c. Keterbatasan program bantuan sosial yang tepat sasaran.
d. Kurangnya program perlindungan sosial yang komprehensif.

b) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Ketimpangan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 sebesar 0,475 masih tinggi, jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung sebesar 0,399.
b. Upaya perlindungan perempuan dan anak, perlu lebih dioptimalkan.
c. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
d. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi yang dapat berperan dalam pengurangan kemiskinan, belum sepenuhnya optimal.

2) Pangan

a. Perlu peningkatan dan pemerataan ketersediaan pangan utama di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
b. Promosi diversifikasi pangan yang berkualitas perlu terus ditingkatkan untuk mencukupi ketersediaan energi dan protein per kapita, utamnya di wilayah rawan pangan.

3) Lingkungan Hidup

a. Capaian IKLH masih rendah dibandingkan capaian Provinsi
b. Pengelolaan persampahan secara terpadu dan berkualitas, masih belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
c. Masih kurangnya prasarana dan sarana, serta sistem pengelolaan persampahan.
d. Perlu peningkatan area lindung dan serapan air yang tersebar di wilayah kabupaten.
e. Perlu pengendalian penggunaan lahan di sempadan sungai Way Kiri dan Way Kanan sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, dan industri, dan diarahkan sebagai kawasan lindung dan ruang terbuka hijau (RTH) agar indeks tutupan lahan dapat meningkat.

4) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Perlu peningkatan dokumen administrasi kepentdudukan dan pencatatan sipil, terutama KTP-elektronik dan akte kelahiran.
b. Perlu peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

5) Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh

a. Perlu peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun tiyuh dalam segala aspeknya.

b. Jumlah tiyuh yang berstatus berkembang dan mandiri harus lebih ditingkatkan.

6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran penduduk tentang norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
b. Perlu peningkatan pelayanan dan keikutsertaan masyarakat dalam Keluarga Berencana.

7) Perhubungan

a. Perlu peningkatan fungsi terminal dalam menunjang poerhubungan antar-titik di seluruh wilayah kabupaten dan antara wilayah kabupaten ke wilayah sekitarnya.
b. Perlu peningkatan jumlah dan jenis sarana dan prasarana perhubungan di seluruh wilayah kabupaten.

8) Komunikasi dan Informatika

a. Perlu peningkatan kualitas dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informartika milik pemerintah kabupaten seperti *web-site* resmi, untuk menunjang semua urusan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan para pihak yang memerlukan.
b. Perlu peningkatan kerjasama dan pembinaan terhadap masyarakat dan berbagai institusi media cetak dan elektronik yang ada dan berkembang dalam era teknologi informasi saat ini.
c. Perlu meningkatkan kinerja terus menerus dalam mencapai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government* yang berkualitas.

9) Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

a. Perlu mengembangkan koperasi pada segala lini usaha, agar secara aktif dapat berperan penting dalam pembangunan ekonomi wilayah.
b. Perlu terus meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat menjadi penyokong perekonomian daerah dan sebagai penyedia lapangan kerja dan penyerap tenaga kerja.
c. Masih diperlukan peningkatan dan pengembangan sarana perdagangan dan infrastruktur perindustrian di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara merata.
d. Perlu pembinaan dan standarisasi yang dapat meningkatkan kinerja industri UMKM.
e. Rendahnya keterampilan tenaga kerja industri.
f. Persaingan dengan produk impor dan Regulasi yang rumit dan tidak mendukung.

g. Industri besar perlu dibina untuk mengelola isu lingkungan secara lebih baik.

10) Penanaman Modal

a. Informasi mengenai investasi yang telah berjalan dan pengelolaan data potensi untuk promosi dalam menunjang peningkatan jumlah investasi, harus lebih dioptimalkan.
b. Sistem pelayanan investasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi, masih perlu ditingkatkan.

11) Kepemudaan dan Olahraga

a. Fasilitas dan sarana prasarana ditingkat tiyuh untuk menunjang aktivitas kepemudaan dan olah raga, perlu ditingkatkan.
b. Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk.
c. Masih diperlukannya pembinaan dan pengembangan keolahragaan, terutama di kalangan pemuda.

12) Pariwisata

a. Belum banyak tersedia fasilitas penunjang pariwisata yang berstandar baik, di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang meliputi hotel dan restoran.
b. Promosi objek dan paket wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum optimal.

13) Perpustakaan dan Kearsipan

a. Perlu dibangun perpustakaan daerah dan penyediaan koleksi buku yang dapat diakses oleh masyarakat dan para pihak; baik secara fisik maupun virtual.
b. Perlu peningkatan persandian sebagai upaya pengamanan data dan informasi yang melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat; karena pada satu sisi dituntut adanya keterbukaan informasi, namun di sisi lain pengamanan informasi dalam kategori tertentu, menjadi sangat penting.

c) Urusan Pilihan

1) Perikanan

a. Keberadaan ikan lokal seperti tapah, baung, lais, gabus, dan belida di perairan umum darat (PUD) meliputi sungai dan rawa (bawang) yang dahulu dikenal sebagai simbol (ikon) daerah Tulang Bawang Barat; sudah sangat menurun dan cenderung terancam punah, oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya perlindungan dan *re-stocking* ikan lokal dan perbaikan lingkungan perairannya.

b. Perlu peningkatan pembinaan usaha budidaya perikanan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dari ikan bagi wilayah kabupaten, bahkan untuk diekspor ke wilayah lain.
c. Rendahnya prasarana infrastruktur perikanan dab teknologi pascapanen dan pengolahan produk perikanan

2) Pertanian

a. Luas panen padi tahun 2024 menurun sebesar 17,98% dari tahun 2023.
b. Penurunan Produktivitas sektor Padi pada tahun 2024 sebesar 45,76% jika di bandingkan dengan tahun 2023 sebesar 49,40% dikarenakan suplay air yang kurang saat musim tanam dan kurang maksimalnya penanganan hama penyakit
c. Kekurangan infrastruktur irigasi dan suplay air untuk persawahan
d. Minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern dan akses permodalan serta pasar.
e. Kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk petani.
f. Kecenderungan peningkatan alih fungsi lahan pertanian
g. Intensifikasi pertanian belum dilakukan secara maksimal sehingga produktivitas lahan pertanian baik pangan, perkebunan, dan hortikultura masih rendah.
h. Perlu peningkatan dan pembinaan perkebunan dengan komoditas andalan yang meliputi karet, kelapa sawit, dan kelapa, untuk dapat menjadi pendukung perekonomian wilayah dan penyerap tenaga kerja yang besar.
i. Layanan sub-sistem penunjang pertanian seperti penyediaan pupuk dan pestisida masih sering terjadi keterlambatan pada saat musim tanam.
j. Harga hasil pertanian pada saat terjadi panen raya tidak stabil.

3) Peternakan

a. Masih diperlukan peningkatan dan pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai dengan potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan produk ternak; dan sebagai penyedia lapangan kerja.
b. Penyebaran penyakit ternak yang tinggi.
c. Keterbatasan pakan ternak berkualitas.
d. Rendahnya produktivitas ternak.
e. Kurangnya akses pasar untuk peternak.
f. Perlu pengembangan hilirisasi produk ternak untuk peningkatan nilai tambah.

4) Tenaga Kerja

a. Ketrampilan dan minat pemuda pada sektor pertanian dalam arti luas sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, perlu ditingkatkan.
b. Pembentukan wirausaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran, memerlukan fasilitasi yang lebih baik.
c. Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial, harus mulai dijalankan dan ditingkatkan.
d. Pelatihan berbasis kompetensi bagi calon tenaga kerja baru, dan penyaluran kerja, harus lebih difasilitasi.

d) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Unsur pendukung urusan pemerintahan diselenggarakan oleh perangkat daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Kondisi kinerja unsur pendukung saat ini yang perlu ditingkatkan meliputi peningkatan percepatan Reformasi Birokrasi; dan peningkatan percepatan penyelesaian peraturan daerah yang memiliki urgensi tinggi.
b. Meningkatkan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, agar pemanfaatan aset yang produktif dapat lebih ditingkatkan.
c. Menyelesaikan sertifikasi tanah adat secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat

e) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

a. Kualitas dan kuantitas SDM perencanaan yang belum optimal
b. Belum maksimalnya jenis dan kualitas penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
c. Kinerja daerah dalam pengembangan inovasi, pengelolaan keuangan, dan daya saing daerah masih kurang.

2) Keuangan Daerah

a. Pendapatan asli daerah (PAD) tergolong rendah yaitu hanya sebesar 5,95% dari total pendapatan.
b. Adanya tren penurunan realisasi anggaran dalam lima tahun terakhir.

3) Statistik

a. Perlu pengembangan sistem informasi dan penyediaan data statistik daerah yang seragam, akurat, berkualitas, dan mudah diakses, (Portal Satu Data

Kabupaten Tulang Bawang Barat) untuk kebutuhan perencanaan pembangunan dan pengembangan

b. Perlu peningkatan pelayanan data statistik yang lebih beragam seperti data spasial.

4) Pertanahan

a. Masih adanya konflik status lahan yang melibatkan warga dan perusahaan.
b. Belum semua Aset pemda yang berupa tanah memiliki sertifikat

5) Kearsipan

a. Perlu pengembangan sistem kearsipan dan penyiapan SDM handal kearsipan secara terus menerus, karena kearsipan merupakan sistem penunjang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

6) Kepegawaian dan Diklat

a. Masih kurangnya tingkat pemahaman penggunaan jasa pelayanan kepegawaian terhadap peraturan perundangundangan kepegawaian;
b. Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi mengingat kompleksnya tugas dan tanggung jawab pelayanan kepegawaian baik yang dilakukan dengan propinsi maupun pusat

f) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada OPD dalam satu tahun belum bisa menjangkau secara keseluruhan OPD yang ada mengingat jumlah aparatur pengawas /auditor terbatas.
b. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada sekolah SD dan SMP serta desa untuk prosentase cakupan pembinaan belum optimal mengingat keterbatasan aparatur pengawas yang ada

g) Unsur Kewilayahan

a. Tingkat pemahaman tentang mekanisme perencanaan ditingkat Kecamatan dan Tiyuh/Kelurahan belum optimal.
b. Belum optimalnya pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan
c. Ada batas wilayah yang belum terselesaikan.

h) Unsur Pemerintah Umum

a. Belum sumua organisasi kemasyarakatan terdata dan dan terpantau oleh kesbangpol sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan.
b. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi kebangpol.

c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik serta proses demokrasi dapat menghambat partisipasi aktif dalam pembangunan

2.3.2. Isu Strategis

Penentuan isu strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil evaluasi rencana pembangunan yang sudah lalu, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045; hasil dari proses partisipatori dalam bentuk diskusi terfokus (*focus group discussion*, FGD), dan selanjutnya telaah terhadap RPJMD Provinsi, RPJM Nasional tahun 2025 – 2029 dan isu strategis global, nasional, regional yang relevan untuk pembangunan daerah.

Isu Strategis merupakan acuan yang mendasari dan sekaligus sebagai petunjuk arah yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan isu strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029. Berikut disajikan keselarasan isu strategis pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tabel 2.112 dibawah ini.

Tabel 2.112
Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Isu Global	Isu RPJM Nasional	Isu RPJMD Prov. Lampung	Isu Kabupaten Tulang Bawang Barat
1. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan 2. Krisis energi 3. Pemulihan ekonomi pasca covid-19 4. Perang dan ketegangan geopolitik 5. Isu kesehatan mental dan kesejahteraan 6. Krisis pengungsi dan migrasi 7. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi 8. Transformasi digital dan keamanan siber 9. Krisis pangan global	1. Rendahnya produktivitas 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 3. Pergeseran struktur kelas masyarakat 4. Kebutuhan hidup tingai pada usia produktif 5. Krisis lingkungan 6. Dinamika geopotitik dan geoekonomi 7. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	1. Belum optimalnya hilirisasi pada kinerja sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah 2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi 3. Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan 4. Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. 5. Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. 6. Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang terintegrasi dan berkelanjutan. 7. Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja secara optimal 8. Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi 9. Belum optimalnya pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sebagai modal	1. Optimalisasi Pengupayaan Sumber Ekonomi Unggulan, Potensial, dan Berdaya Ungkit 2. Pertumbuhan Ekonomi Belum Maksimal dan Melambat 3. Penurunan Angka Kemiskinan sangat kecil 4. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 5. Penyediaan Infrastruktur yang Merata 6. Pengendalian Lingkungan Hidup 7. Tata Kelola Pemerintahan 8. Pembangunan Berkelanjutan 9. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 10. Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya

		sosial dalam mendukung stabilitas, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 10. Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup 11. Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal 12. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlantar	

Secara lebih lengkap, uraian masing-masing isu-isu strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat yang akan dilingkup dalam RPJMD 2025-2029, disajikan dalam bentuk uraian berikut.

(1) Optimalasasi Pengupayaan Sumber Ekonomi Unggulan, Potensial, dan Berdaya Ungkit

Isu tentang pemanfaatan sumber ekonomi unggulan, potensial, dan berdaya ungkit berkaitan dengan optimalisasi pendukung perekonomian utama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu sektor pertanian dalam arti luas berikut industri atau hilirisasinya. Beberapa komoditas pertanian sangat efektif dalam pengendalian inflasi, utamanya komoditas pokok seperti beras, oleh karena itu peningkatan sektor pertanian menjadi sangat penting. Begitu juga halnya dengan perlunya peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas hasil pertanian, sebagai bentuk hilirisasi dari yang selama ini masih menghasilkan produk primer (yang sampai saat masih menjadi praktek umum di tingkat petani). Peran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dapat dilakukan melalui pembinaan sektoral dan lintas sektoral, serta meningkatkan kemudahan dan akses perizinan dan kemudahan berusaha. Kebijakan pemerintah daerah untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri dan produk lokal juga menjadi kunci keberhasilan dalam upaya peningkatan sumber ekonomi unggulan, potensial, dan berdaya ungkit. Sebab dengan optimalnya pengupayaan sumber ekonomi unggulan, potensial dan berdaya ungkit akan mempengaruhi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah mengalami perlambatan pertumbuhan di empat tahun terkhir pasca Pandemi Covid-19, yang hanya tumbuh rata -rata 0,55 % dan masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

(2) Pertumbuhan Ekonomi Belum Maksimal dan Melambat

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDRB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dikatakan belum optimal hal ini terlihat dari pertumbuhannya dalam lima tahun terkahir masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan berada di urutan ke-12 dari Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yaitu sejak pasca pandemi covid-19 dimana sebelum adanya pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat selalu ada di atas

pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, sebagai besar perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat ditopang dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan akan tetapi hasil dari sektor-sektor tersebut belum maksimal, hal ini terlihat dari produktivitas yang masih rendah, selain pertumbuhan belum optimal dalam lima tahun terkahir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat juga mengalami perlambatan yang hanya tumbuh rata – rata 0,03% dan hanya berada di angka 4,57 sedangka sebelum pandemi pertumbuahan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di angka 5,00.

(3) Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendasar dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penangggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya dipahami sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam konteks Pembangunan Daerah kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan, penyelesaian permasalahan kemiskinan tentunya tidak mudah karena kemiskinan mempunyai sifat yang kompleks dan multidimensional. Dampak dari kemiskinan dapat menyebabkan beberapa hal seperti secara sosial ekonomi dapat menjadi beban pemerintah dan masyarakat, rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dengan mengalokasikan berbagai program unggulan sebagai bentuk komitmen bersama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pencapaian target penurunan angka kemiskinan tentu diperlukan upaya dan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, apalagi pasca pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang terjadi secara global sangat berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga seluruh sektor kehidupan manusia yang berpengaruh pada angka kemiskinan termasuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan yaitu dapat terlihat penurunan kemiskinan dari tahun 2022 – 2024 hanya mengalami penurunan rata – rata sebesar 0,34%.

(4) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan tahun 2024, IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat terus menunjukan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,04 dan angka ini masih dibawah angka capaian Provinsi Lampung (73,17) dan nasional sebesar (75,02) dan jika dibandingakan dengan capaian dari masing – masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung capaian IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat ini berada di urutan ke-14 dari 15 Kabupaten/Kota. Kondisi ini diukur dari indikator angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan, adapun capaian harpan lama sekolah ditahun 2024 sebesar 12,12 tahun, dan rata- rata lama sekolah sebesar 7,80 tahun yang capaian ini masih dibawah capaian provinsi, sehingga gambaran tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi sektor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Isu pendidikan yang utama adalah bagaimana sistem pendidikan yang ada dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah yang memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Isu lain adalah terkait pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat, serta memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter.

Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan lima tahun kedepan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Paska terjadinya bonus demografi yang diproyeksikan terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan sepuluh tahun kedepan adalah terjadinya penuaan penduduk (population ageing) dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk

memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial oleh pemerintah daerah secara sinergis perlu ditingkatkan antara lain melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, pelayanan penyakit ketuaan (senecsent diseases) dan degeneratif, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta pemberian literasi tentang pentingnya tabungan (savings) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari tua.

Isu kesehatan juga masih menjadi hal penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia. Meskipun angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat terus menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi lebih baik, namun angka kesakitan dan angka kematian masih terjadi. Sehingga penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kedepan. Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang kedepan akan mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Apalagi dengan melihat gejala penuaan penduduk sebagai dampak bonus demografi, serta tren penyakit katastropik yang semakin meningkat dan berdampak pada beban pembiayaan jaminan kesehatan yang semakin tinggi, maka upaya-upaya kesehatan masyarakat mulai mengarah pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi “kebinekatunggalikaan”, serta banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang cenderung meningkat telah mengkawatirkan semuanya dan dapat mengancam kualitas sumber daya manusia. Ancaman peredaran NAPZA juga telah menjadi isu krusial secara nasional, bahkan Indonesia telah menetapkan “darurat narkoba” sebagai implikasi peredaran NAPZA yang semakin tak terkendali. Kelompok anak dan remaja merupakan salah satu yang menjadi sasaran korban penyalahgunaan NAPZA. Isu ini menjadi isu penting tersendiri yang harus tetap diperhatikan, mengingat bonus demografi yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bukan hanya pemahaman tentang budaya bangsa, namun isu pentingnya adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penguatan identitas dan bangunan nilai

masyarakat demikian penting ditegaskan untuk memastikan jalinan hubungan antar masyarakat untuk maju dan berkembang bersama, maupun sikap dalam menghadapi tantangan global yang pada satu sisi membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya, pada sisi lain menghadirkan ancaman melunturnya identitas dan kekuatan budaya, sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme.

Upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan menguatkan identitas kebudayaan lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui pengakuan keragaman budaya dan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hidup di masyarakat. Ekspresi kebudayaan dipahami dalam cakupan ekspresi kebudayaan materiil yang menunjuk pada hasil karya dan kerja produktif masyarakat berbasis potensi wilayah maupun ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal; maupun ekspresi kebudayaan non-materiil menyangkut hasil karya dan kreatifitas seni budaya maupun ekspresi upacara adat, kenduri dan perayaan. Keseluruhan ekspresi kebudayaan materiil dilandasi bangunan sistem nilai yang menjadi preferensi sikap, watak dan perilaku masyarakat.

(5) Penyediaan Infrastruktur yang Merata

Isu infrastruktur yang merata merupakan bentuk koordinasi dan keterpaduan ideal yang harus dicapai dalam penataan ruang serta penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan dasar perlu dicapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang baik memperlihatkan bahwa daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maksimal. Infrastruktur yang berkualitas minimal dapat memfasilitasi kehidupan sosial dan lingkungan secara efektif, membantu mendorong ekonomi yang baik, dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Isu penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditunjukkan oleh pemenuhan kondisi jalan mantap, perencanaan dan penanganan pembangunan permukiman, pemenuhan sarana prasarana lingkungan perkotaan, dan pemenuhan kebutuhan irigasi dengan kondisi baik.

Infrastruktur yang sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat dan menunjang pembangunan wilayah, antara lain adalah irigasi. Kabupaten Tulang Bawag Barat yang merupakan salah satu wilayah penghasil bahan pangan (padi) yang ada di Provinsi Lampung, untuk infrastruktur jaringan irigasi yang kondisi baik mengaliri sawah di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah seluas 822,48 Ha dari luas areal baku seluas 3.657,1 Ha atau baru sebesar 22,40%. Dengan adanya peningkatan prosentase jaringan irigasi yang kondisi baik di Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi

sehingga bisa lebih baik dari rata – rata produktivitas komoditas di Provinsi Lampung, yang mana produktivitas baru mencapai 4,83 ton/ha di tahun 2022, sedangkan rata – rata provinsi lampung 5,18 ton/ha.

(6) Pengendalian Lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan permbangunan berkelanjutan. Target permbangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat jangka panjang. Manajemen kebencanaan, dan kualitas serta daya dukung lingkungan hidup menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah yang berpotensi rawan bencana banjir, gempa bumi, kekeringan dengan tingkat bahaya tinggi serta kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrim dengan tingkat bahaya sedang. Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam Kategori sedang. Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan, dan Way Kiri merupakan lokasi yang sering terjadi banjir.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu 1) Indeks Kualitas Udara (IKU); 2) Indeks Kualitas Air (IKA); dan 3) Indeks Tutupan Lahan (ITL). Komponen IKLH yang perlu diperhatikan di Tulang Bawang Barat adalah IKA dan ITL. Ekspolitasi lahan sempadan sungai way kiri dan way kanan sebagai lahan perkebunan menyebabkan peningkatan erosi dan sedimentasi pada sungai oleh karena itu diperlukan upaya konservasi pada sempadan sungai.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Tulang Bawang, dapat diidentifikasi isu-isu pada aspek pembangunan lingkungan hidup sebagai berikut: (1) Dampak Alih Fungsi Lahan; (2) Ancaman dampak perubahan iklim; (3) Belum optimal pelayanan persampahan; (4) Sanitasi tidak layak dan tercemarnya air bersih di masyarakat; (5) Dampak Pengembangan Infrastruktur dan sarana pendukungnya; dan (6) Pelayanan pendidikan anak dan masyarakat belum optimal karena belum meratanya sarana, prasarana, dan kualitas pengajar.

(7) Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih memerlukan optimalisasi. Terdapat tiga isu yang mendasari belum optimalnya tata kelola pemerintahan yaitu: 1) belum

optimalnya sumber daya aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat 2) rendahnya tingkat kedisiplinan aparatur dan 3) belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance terdiri dari 5 (lima) unsur tersebut yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen, Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

Keberhasilan upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* dinilai melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

(8) Pembangunan Berkelanjutan

Isu strategis pembangunan berkelanjutan, terkait erat dengan isu Pengendalian lingkungan hidup dan kualitas perumahan dan permukiman. Pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai isu strategis, merupakan hal yang sejalan dengan isu internasional berupa tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals,* SDGs). Beberapa komponen dari isu strategis pembangunan berkelanjutan, antara lain meliputi: (1) Penyediaan akses perumahan yang layak; (2) Penyediaan Akses air minum dan sanitasi; (3) Konektivitas antar wilayah; (4) Ketahanan Bencana; (5) Penyelesaian RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat; (6) Kualitas Lingkungan Hidup; dan (7) Pemanfaatan energi yang belum efisien.

(9) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Isu strategis Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, merupakan isu yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan. Isu ini menghendaki perbaikan dan percepatan reformasi birokrasi, aspek pelayanan umum, profesionalitas ASN, akuntabilitas dan manajemen ASN, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Pengelolaan data pembangunan daerah (SIPD), Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), serta indikator penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik lainnya.

(10) Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya

Isu strategis Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Berbudaya, berkaitan erat dengan beberapa isu strategis lainnya. Isu strategis yang terkait meliputi: Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Untuk Semua; dan Penurunan Angka Kemiskinan.

Dengan demikian, perumusan kebijakan dalam pengelolaan isu ini akanberkaitan dengan pengelolaan isu lainnya.

(11) Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dalam menganalisis isu mengenai muatan lingkungan hidup, tahapan pertama yang dilakukan adalah menjaring isu-isu yang telah muncul dari dokumen perencanaan sebelumnya (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031, dan Dokumen Capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2005-2025, Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tulang Bawang Barat, RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, RPJMD Teknoratis Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan konsultasi publik, dari hasil analisis dan kesepakatan konsultasi publik didapatkan 88 isu pembangunan berkelanjutan. Dari 88 longlist isu pembangunan berkelanjutan dapat dikelompokkan menjadi shortlis isu pembangunan berkelanjutan menjadi sebanyak 10 shortlist isu PB di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berdasarkan hasil Proses dan Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di ketahui rekapituasi isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 yaitu sebagi berikut :

1. Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi tantangan pendidikan yang belum optimal, termasuk keterbatasan tenaga pendidik, tingginya angka putus sekolah dan minat belajar di wilayah pedesaan.
2. Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadapi masalah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan an kesehatan masyarakat.
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi isu akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang tidak memadai, dan pengelolaan limbah yang buruk yang berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat
4. Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi masalah infrastruktur dasar yang belum memadai, menghambat peningkatan kualitas hidup dan konektivitas wilayah.
5. Alih Fungsi lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat berpotensi menggangu ketahanan pangan
6. Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi isu perubahan iklim yang meningkatkan risiko bencana alam, yang dapat mempengaruhi ketahanan masyarakat dan lingkungan.

Selanjutnya shortlist isu PB tersebut dilakukan analisis cross cutting dengan 6 muatan lingkungan hidup sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2016, yaitu: Karakteristik wilayah; Tingkat pentingnya potensi dampak; Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan; Keterkaitan dengan materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program; Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau Hasil KLHS dari kebijakan, rencana, dan/atau program pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Setelah dilakukannya Cross Cutting dan Analisis Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan, maka didapatkan 4 isu PB paling strategis yakni:

1. Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadapi masalah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
2. Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi isu akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang tidak memadai, dan pengelolaan limbah yang buruk yang berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat,
3. Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi masalah infrastruktur dasar yang belum memadai, menghambat peningkatan kualitas hidup dan konektivitas wilayah.
4. Kabupaten Tulang Bawang Barat menghadapi isu perubahan iklim yang meningkatkan risiko bencana alam, yang dapat mempengaruhi ketahanan masyarakat dan lingkungan.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAEAH

Pembangunan daerah Tulang Bawang Barat tahun 2025 - 2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan. visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat tahun 2020-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

A. RPJMD Tahun 2025 – 2029 Sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPD Tahun 2025-2045

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki cita – cita untuk mewujudkan “Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” di tahun 2045. Tulang Bawang Barat akan menjadi daerah dengan pendapatan perkapita sejajar dengan daerah lain yang disertai penurunan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta menjadi daerah yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2045 memiliki sasaran utama visi, yang akan dicapai di tahun 2045 adalah 1) Peningkatan Pendapatan Perkapita, 2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, 3) Daya Saing Daerah, 4) Peningkatan Daya Saing SDM, 5) Penurunan Emisi GRK menuju Net zero emission.

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2045 telah dirumuskan setrategi dengan 8 (delapan) misi agenda pembangunan, yang diturunkan menjadi 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama. (Gambar 3.1)

Gambar 3.1
Setrategi Pencapaian Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan (RPJPD 2025-2045)



RPJMD tahun 2025-2029 merupakan implemetasi tahap pertama RPJPD tahun 2025-2045. Untuk itu didalam RPJMD tahun 2025-2029 merumuskan upaya – upaya transformative sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap I RPJPD tahun 2025 – 2029. (Gambar 3.2)

Gambar 3.2
Fokus Arah Kebijakan RPJPD tahun 2025 – 2045 (Tahap I)

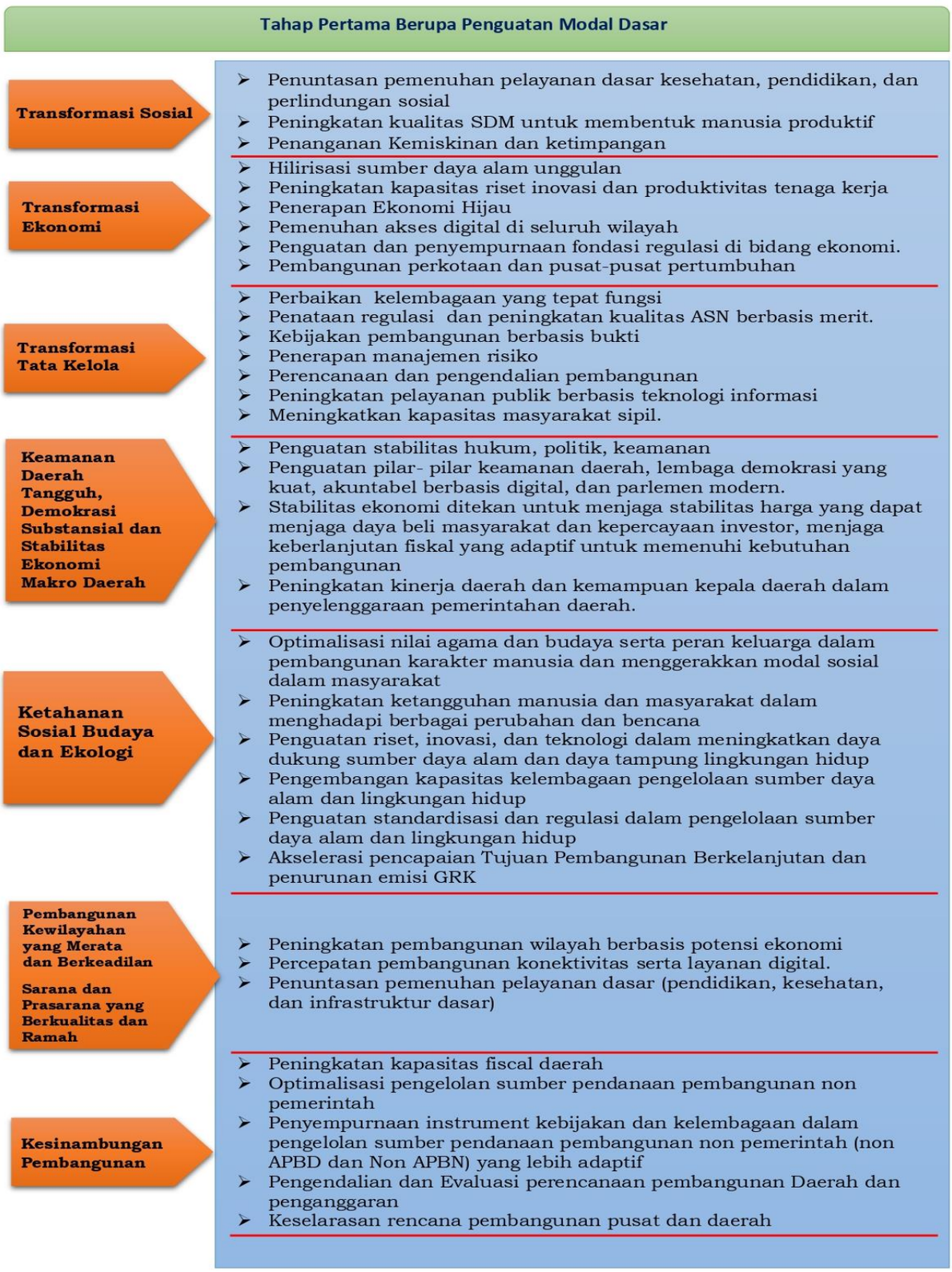

Selajutnya sesuia dengan peraturan perundang -undangan, bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 disusun dengan mengitegrasikan kebijakan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program kepala daerah.

B. Visi

Visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2045 tahap pertma yang menitik beratkan kepada penguatan modal dasar dan merupakan bagian integral dari Visi RPJM Nasional dan Visi RPJMD Provinsi Lampung, sehingga dalam perumusan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat selain memperhatikan faktor internal dan ekternal, juga mengacu pada visi Presiden dan wakil Presiden dalam RPJM Nasional yakni ***"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*** dan visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Lampung yaitu "**Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas**", serta mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang, sehingga sehingga dirumuskan visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

"Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju"

Visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut mengandung 5 (lima) kata kunci yaitu Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif, dan Maju. Adapun penjelasan dari masing – masing kata kunci pada visi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Sejahtera. Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi. serta terjaminnya rasa aman dalam segala aktivitas Pada tahun 2029, kesejahteraan masyarakat Tulang Bawang Barat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dapat terwujud. Kondisi ini ditandai dengan tenaga kerja yang berkualitas, upah minimum dan perlindungan sosial yang terjamin, adanya perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat (gender, agama, budaya, lanjut usia), derajat kesehatan yang tinggi. Selain itu juga ditandai dengan terpenuhinya layanan infrastruktur secara kualitas, kuantitas, dan keterjangkauan.

Merata. Konsep merata secara umum menunjukkan pembangunan yang mencakup seluruh daerah. Pembangunan yang merata diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan suatu wilayah. Selain itu, pemerataan Pembangunan juga mampu mendorong kesetaraan sosial dan ekonomi. Pada tahun 2029 diharapkan setiap desa dan kelurahan maupun masyarakat mendapatkan perhatian dan akses yang sama dalam hal infrastruktur, layanan publik, dan sumber daya. Selain itu, akses terhadap pembangunan bagi setiap masyarakat memiliki status yang sama. Pemerataan infrastruktur membuat semua daerah atau wilayah dapat terhubung satu dengan lainnya. Pemerataan layanan publik memberikan akses yang sama bagi seluruh masyarakat terutama pada layanan sosial dasar pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, masyarakat ataupun daerah mudah dalam mengakses sumber daya yang ada. Dengan cara ini,

diharapkan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal dan luput dari perhatian pemerintah.

Kreatif. Visi pembangunan daerah yang kreatif berfokus pada peningkatan daya saing melalui pemberdayaan kreativitas masyarakat. Pada Tahun 2029, diharapkan kreatifitas masyarakat meningkat dalam mengoptimalkan potensi lokal, baik di sektor ekonomi kreatif, seni, dan budaya maupun dalam pengembangan produk unggulan daerah. Dengan dukungan terhadap industri kreatif dan kolaborasi lintas sektor, visi ini diharapkan mampu menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun perekonomian lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Inovatif. Inovatif dalam visi pembangunan daerah berarti mengutamakan teknologi dan pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Pada tahun 2029, pemanfaatan teknologi digital diharapkan meningkat selaras dengan meningkatnya efisiensi administrasi, kemudahan dalam akses informasi, serta peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan warga dengan cepat dan tepat.

Maju. Prinsip pembangunan yang berlandaskan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sumber daya manusia yang tangguh serta mendorong inovasi yang berdaya saing. Pada tahun 2029, pertumbuhan ekonomi, pemerataaan ekonomi dan menurunnya kesenjangan antar wilayah dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Tulang Bawang Barat dapat terwujud, ditandai dengan basis sektor unggulan yang kuat, berdaya saing, dan nilai tambah yang tinggi. Hal tersebut didorong dengan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, dan adopsi teknologi yang mendorong munculnya inovasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas.

Adanya keselarasan antara visi dari RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional sangat penting hal ini dikerenakan untuk memastikan sinergi antara pembangunan di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional dalam mewujudkan tujuan **Indonesia Emas 2045**. Keselarasan dari visi tersebut digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tebel 3.1.
Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Unsur Visi	RPJMD Tulang Bawang Barat	RPJMD Provinsi Lampung	RPJM Nasional	Keselarasan
Kata Kunci "Sejahtera dan Merata"	Menekankan pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat	Fokus pada kemajuan daerah Lampung yang berkeadilan dan berkelanjutan	Fokus pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia	Ketiganya memiliki fokus pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan sebagai fondasi keadilan sosial
Kata Kunci "Kreatif dan Inovatif"	Mendorong tumbuhnya masyarakat dan pemerintahan yang kreatif dan inovatif dalam pembangunan	Mengembangkan potensi SDM unggul, ekonomi kreatif, dan daya saing daerah	Meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional berbasis teknologi dan SDM unggul	Visi TUBABA sejalan dengan prioritas inovasi dan SDM yang menjadi target pembangunan daerah dan nasional
Kata Kunci "Maju"	Mengarah pada kemajuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan	Mewujudkan "Lampung Maju" di segala sektor (ekonomi, infrastruktur, SDM, tata kelola)	Mendukung visi "Indonesia Maju" dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045	TUBABA menjadi bagian dari daerah kontributor dalam pencapaian visi nasional jangka panjang

Selanjutnya dalam rangka pengukuran ketercapain visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat akan digunakan indikator dalam visi RPJPD tahun 2025-2045 Kabupaten Tulang Bawang Barat hal ini dikarenakan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 merupakan iplementasi tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2045 adapun indikator tersebut disajikan dalam bentuk matrik di tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2.
Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029
Mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 - 2045

Sasaran Visi	Indikator	Capaian Th. 2024	Target RPJPD (Tahap1) Th.2025-2029	Target Capain Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan Pendapatan per Kapita	Pendapatan per kapita (Rp Juta)	52,21	76,82-95,94	55,87	61,30	68,10	75,30	83.30	92,80
	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,55	5,5 – 8,0	4,88	5,18	5,43	5,68	5,88	6,08
	Kontribusi Sektor Industri Dalam PDRB (%)	27,25	28,90	28,01	28,22	28,43	28,64	28,90	28,93
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,22	5,00 – 4,00	6,72 – 7,0	6,90-7,15	6,00-6,90	5,67-6,39	5,30-6,00	4,95-5,75
	Rasio gini (Indeks)	0,297	0,266	0,292	0,219 – 0,269	0,273 – 0,284	0,270– 0,280	0,268 – 0,275	0,265 – 0,723
	Persentase Desa Mandiri	18	23	23	26	29	34	39	43
Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,26	2,88	3,27	3,28	3,30	3,31	3,34	3,35
	Kontribusi PDRB Provinsi Lampung Terhadap Nasional (Persentase) *)	3,20	2,25	3,18	3,18	3,18	3,17	3,17	3,17
Peningkatan daya saing Sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia *)	==	0,57 – 0,59	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55
	Indeks Pembangunan Manusia	70,04	72,00	70,46	71,20	71,73	72,29	72,85	73,30
Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton CO2e) (%) *)	9,52	55.964,58	40.657,30	43.947,44	47.596,35	51.701,54	55.964,58	60.601,45
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,89	67,81	66,80	67,05	67,31	67,56	67,81	68,06

**) Angka yang digunakan adalah angka Provinsi Lampung*

C. Misi

Misi merupakan landasan strategis yang menggambarkan tindakan, strategi, dan pendekatan yang diambil untuk mencapai tujuan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi. Faktor-faktor ini juga mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan wilayah. Selain itu, misi pembangunan merupakan penjabaran dari visi pembangunan.

Berdasarkan visi pembangunan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 ***"Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif, dan Maju"*** dirumuskan beberapa misi Pembangunan yakni :

1) Meningkatnya Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
2) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif;
3) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif;
4) Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya; dan
5) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan.

Adapun uraian dari misi (agenda) Pembangunan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatknya Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (Transformasi Sosial)

Misi ini merupakan upaya dalam membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing, sehingga mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, adaptif, kreatif dan inovatif. Dengan demikian Misi Pertama ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dengan upaya 1). Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan dasar hingga rujukan yang merata dan berkelanjutan. 2). Penguatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan. 3). Pengembangan pendidikan berbasis teknologi, kreativitas, dan kewirausahaan. 4). Penguatan sistem kesehatan masyarakat berbasis pencegahan dan promotif. 5). Peningkatan literasi digital dan inovasi lokal di kalangan generasi muda. 6). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan vokasi dan keterampilan kerja, dan 6). Mendorong perlindungan sosial yang optimal, dan menjunjung tinggi etika dan moral. Sejalan dengan misi ini ini denga misi RPJMD adalah pelaksanaan transformasi sosial yaitu dengan mendorong pembangunan manusia dan pengusaaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan ditempuh dengan melaksanakan arah kebijakan berupa peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada seluruh jenjang, mendorong pemerataan guru dan peningkatan kompetensi guru, mendorong integrasi kurikulum dengan penguatan karakter,

literasi digital, dan kewirausahaan lokal, memberikan dukungan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu, mengembangkan sekolah dan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), mengadakan sekolah non formal (kejar paket) yang berkolaborasi dengan dana desa.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas akses dan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pemerintah daerah mendorong tersedianya layanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat melalui kebijakan memperluas cakupan layanan kesehatan dasar melalui peningkatan kapasitas Puskesmas dan Posyandu, memperkuat program kesehatan ibu dan anak, gizi balita, dan imunisasi, meningkatkan kualitas SDM kesehatan dan penyebaran tenaga medis merata ke seluruh wilayah, meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan yang terjangkau dan responsive, dan mengembangkan sistem layanan kesehatan berbasis digital, penguatan layanan yang bersifat pencegahan, pengendalian penyakit dan dengan menerapkan 6 pilar pada transformasi kesehatan yaitu pilar layanan primer, pilar layanan tranformasi rujukan, pilar layanan transformasi sistem ketahanan kesehatan, pilar layanan tarnsformasi pembiayaan kesehatan, pilar layanan transformasi SDM kesehatan, dan pilar layanan transformasi teknologi kesehatan, serta memberikan pemahaman perilaku hidup sehat pada masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit yang responsif, serta fasilitas dan jaminan kesehatan nasional tertata dan berkelanjutan.

Sedangkan terkait SDM yang kreatif dan inovatif pemerintah daerah melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan kewirausahaan, mendorong partisipasi pemuda dalam inkubasi usaha, riset, dan inovasi lokal, membangun kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan dunia industry, menyediakan ruang kreatif, laboratorium inovasi, dan program kompetisi inovasi daerah.

2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif (Transformasi Ekonomi)

Misi ini ditujukan pada peningkatan produktivitas melalui modernisasi pertanian, penyediaan bibit serta pupuk, obat dan pakan, meningkatkan nilai tambah produk, penguatan daya tarik wisata dan promosi daerah, pembinaan atlet, kemudahan perizinan, pelatihan ketenagakerjaan, serta pasar murah dan bantuan subsidi operasional. Misi ini juga beririsan pada agenda transformasi ekonomi yang diupayakan untuk mewujudkan perekonomian yang maju dan merata. Upaya ini penting dalam mendayagunakan potensi ekonomi lokal dan kemampuan berproduksi masyarakat dalam rangka mendorong masyarakat untuk mampu menciptakan nilai tambah berbagai kegiatan masyarakat perkotaan dan perdesaan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat melalui hilirisasi, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga menguatkan perekonomian daerah.

Meningkatkan produktifitas dan daya saing sektor – sektor ekonomi produktif sebagai mana perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditopang oleh beberapa sektor yang membrikan konribusi terbesar yaitu Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sebagai sektor primer, memberikan kontribusi terbesar sebesar 32,81%. Berdasarkan nilai kontribusi tersebut dimana pertanian, kehutanan, dan perikanan masih meberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan konsen dalam mengebangkan sektor pertanian yang didalamnya ada peternakan serta sektor perikanan. Untuk sektor pertanian di fokuskan pada penekanan biaya produksi tanaman pangan yang mana diharpakan dengan adanya biaya produksi tanaman pangan menurun maka hasil tanaman pangan dapat bersaing harga dipasaran, adapun upaya yang akan dilaksanakan adalah dengan Diversifikasi Tanaman dan Pembuatan Pupuk Organik madiri melalui pelaksanaan SL-PTT (sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu).

Selanjut pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga akan mendorong perkembangan UMKM dengan mengadakan fasilitasi pinjaman KUR bagi UMKM yang ada diKabupaten Tulang Bawang Barat dalam pengembangan usahanya, serta memfasilitasi pembetukan Koperasi Merah Putih di tiyuh – tiyuh dan memantau perkembangan BUMDES yang ada di tiyuh.

3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif (Transformasi Tatakelola)

Misi ini ditujukan untuk membangun pemerintahan yang terintegrasi, taat azas, dan kolaboratif dengan berbagai pihak. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif, meliputi pemerintahan yang baik atau *good governance* dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam memberikan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat; meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem kelembagaan serta sarana parasana pemerintahan daerah. Pada dasarnya misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif, melalui pengembangan, penataan dan implementasi regulasi daerah yang berkualitas, akuntabel, dan sinergis dengan wilayah tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu juga mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sistem organisasi perangkat daerah melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah agar lebih optimal; peningkatan pengawasan terkait operasionalisasi sistem organisasi perangkat daerah; serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya lainnya adalah meningkatkan tata kelola regulasi daerah dan inovasi kebijakan seiring dengan perkembangan wilayah yang semakin dinamis.

4. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya

Misi ini mendorong penciptaan kondisi masyarakat yang aman dan harmonis dalam mencapai kesejahteraan. Melalui program-program yang mendorong keadilan sosial dan pelestarian serta pengembangan budaya lokal, diharapkan setiap individu merasa dihargai dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, misi ini juga mendukung dua misi (agenda) RPJPD 2025-2045 yakni dalam hal keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal, mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, akan ditempuh melalui pembangunan demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat dan etika politik lokal yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan meletakkan hukum di atas segala permasalahan yang timbul. Perwujudan masyarakat yang partisipatif, demokratis, menghargai keberagaman, akan memberikan rasa aman dan keamanan daerah yang tangguh. Serta terus berupaya untuk menekan kejadian kriminalitas di wilyah Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena dengan kecilnya kejadian kriminalitas secara simultan akan memberikan kondusifitas yang tinggi bagi pertumbuhan perekonomian wilayah, dan pada akhirnya mewujudkan ekonomi daerah yang stabil.

Dalam hal mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, nilai-nilai pembangunan harus menjiwai pembangunan keluarga berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang religius dan berbudaya. Misi ini bertujuan meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat sebagai modal dasar dan modal sosial pembangunan. Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas berkaitan erat. Terbangunnya masyarakat kuat yang berbasis keluarga, akan sangat mendukung terwujudnya budaya yang humanis religius dan mengharhagai keberagaman, dan hal ini-lah sebagai bentuk hakiki dari ketahanan sosial budaya, dengan ketahanan sosial budaya yang kuat, tentu secara bersamaan akan memberikan ruang pertumbuhan bagi ketahanan ekologi yang berakar pada masyarakat secara utuh. Dengan demikian, penghargaan masyarakat terhadap kelestarian alam dan keberlanjutan pembangunan, yang diwujudkan dalam bentuk ekonomi hijau.

5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan

Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, mencakup jalan, jembatan, serta sarana prasarana lainnya seperti layanan pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, jaringan internet, dan infrastruktur kebencanaan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan akan memudahkan akses antarwilayah, mendukung aktivitas ekonomi, serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Misi ini juga mencakup pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tulang Bawang Barat. Pembangunan infrastruktur tidak hanya

berfokus pada area perkotaan atau pusat ekonomi saja, melainkan juga menjangkau daerah-daerah terpencil agar tercipta kesetaraan dan inklusivitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berupaya untuk terus meningkatkan infarastruktur terutama jalan dengan melibatkan dunia usaha yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui dana CSR perusahaan.

Pengembangan wilayah dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini meliputi pembangunan yang memperhatikan dampak lingkungan, mengedepankan pelestarian sumber daya alam, dan mendukung adaptasi perubahan iklim. Dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, selain penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk teknologi yang dimaksud adalah teknologi konstruksi berkelanjutan serta inovasi dalam sistem pengelolaan air, limbah, dan energi terbarukan. Misi ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pemeliharaan infrastruktur agar tercipta rasa memiliki, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan misi ini, diharapkan Tulang Bawang Barat dapat mewujudkan wilayah yang maju, adil, dan ramah lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

D. Misi Kepala Daerah sebagai Prioritas Pembangunan Dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 memuat prioritas pembangunan daerah untuk jangka menengah. Prioritas pembangunan daerah ini merupakan implementasi lansung dari misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat yang berisikan langkah – langkah startegis dalam mencapai pembangunan dalam jangka menengah tahun 2025 – 2029.(Gambar 3.3).

Gambar 3.3.
Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Prioritas Pembangunan Daerah



Prioritas daerah adalah struktur pokok rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap prioritas daerah diterjemahkan dalam program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC) yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya oleh perangkat daerah.

Prioritas daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran daerah tahunan yang diselaraskan dengan agenda RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2045 di tahap ke-1, keterkaitan yang erat antara prioritas daerah dan strategi RPJPD menjadi integrasi kebijakan yang kuat dan Tangguh untuk mewujudkan "Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" di tahun 2045.

Tabel 3.3
Keterkaitan RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Tulang Bawang Barat

RPJMD 2025-2029	Arah Tujuan Pembangunan RPJPD 2025-2045	Agenda Pembangunan RPJPD 2025 – 2045
Prioritas Daerah (PD) 1	Kesehatan Untuk Semua Pendidikan Berkualitas Yang Merata Perlindungan Sosial yang Adaptif	Transformasi Sosial
	Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya kehidupan masyarakat inklusif harmonis, dan berbudaya serta lingkungan hidup yang berkualitas.
Prioritas Daerah (PD) 2	Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi Transformasi Digital Integrasi Ekonomi Domistik dan Global Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi	Transformasi Ekonomi
	Stabilitas Ekonomi Makro Daya Saing Daerah	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
Prioritas Daerah (PD) 3	Regulasi dan Tata Kelola Yang berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola
	Hukum Berkeadailan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
	Berketahanan Energi Air, dan Kemandirian Pangan	Terwujudnya kehidupan masyarakat inklusif harmonis, dan berbudaya serta lingkungan hidup yang berkualitas.
Prioritas Daerah (PD) 4	Beragama Maslahat dan Berbudaya Maju	Terwujudnya kehidupan masyarakat inklusif harmonis, dan berbudaya serta lingkungan hidup yang berkualitas.
Prioritas Daerah (PD) 5	Lingkugan Hidup Berkualitas Berketahanan Energi Air, dan Kemandirian Pangan Resiliennsi terhadap bencana dan perubahan Iklim	Terwujudnya kehidupan masyarakat inklusif harmonis, dan berbudaya serta lingkungan hidup yang berkualitas.

RPJMD 2025-2029	Arah Tujuan Pembangunan RPJPD 2025-2045	Agenda Pembangunan RPJPD 2025 – 2045
		Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
		Sarana dan Parsarana Yang Berkualitas dan Ramah
		Kesinambungan Pembangunan

Selanjtnya dalam rangka mewujudkan visi dengan menjalankan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat maka dirumuskan Program Prioritas dan Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) yang mempedomani progam prioritas dan PHTC nasional yang ada pada RPJM Nasional tahun 2025 – 2029 serta mendukung program prioritas dan PHTC Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029.

a) Program Prioritas dan Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) RPJM Nasional tahun 2025 – 2029

Visi Presiden periode 2025 – 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi terebut mengandung makna pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad dan berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju di tahun 204. Visi presiden akan dicapai dengan delapan misi presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. (Gambar 3.4)

Gambar 3.4
Visi dan misi Presiden



Sumber : Lampiran 1 RPJMN tahun 2025-2029

Berdasarkan Asta Cita Presiden ada 17 program prioritas presiden yang termuat didalamnya yang mencakup pembangunan diberbagi sektor serta langkah – langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quik wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur, guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 3.5.
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Program Prioritas RPJM Nasional
1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin Teredianya Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat Untuk Rakyat
8. Penguatan Pendidikan, Sain dan Teknologi, serta Digitalisasi
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional Yang Kondusif
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempua, Anak, serta Penyandang Disabilitas
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida Langsung ke Petani
13. Menjamin Pengembangan Hunian Berkualitas Terjangkau, Bersanitasi Baik, untuk Masyarakat Pendesaan / Perkotaan dan Rakyat Yang Membutuhkan
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM, Melalui Program Kridit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota – Kota Inovatif, Karateristik, Mandiri Lainnya
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas – luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Program Hasil Terbaik Cepat RPJM Nasional
1. Memberikan Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil
2. Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah dan Nasional
4. Membangun Sekolah – Sekolah Unggul Terintegrasi di Setiap Kabupaten dan Memperbaiki Sekolah – Sekolah yang Perlu Renovasi
5. Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu – Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut
6. Menaikan Gaji ASN (Terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh) TNI/POLRI dan Pejabat Negara
7. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk Yang Membutuhkan, Terutama Generasi Melenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara Terhadap Produk Domistik Bruto (PDB) ke 23%

Sumber : Lampiran 1 RPJMN tahun 2025-2029

b) Program Prioritas dan Program Hasil Cepat Terbaiak (PHTC) RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025 – 2029

Visi Gubernur Lampung tahun 2025-2029 “Bersama Lampung Maju Indonesia Emas” dari visi Gubernur tersebut bahwasannya untuk mewujudkan Lampung Maju yaitu Daerah Lampung mengalami lompatan dalam pembangunan berkelanjutan meliputi perekonomian, pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan tidak dapat diwujudkan tanpa ada kebersamaan dari seluruh elemen dan pemangku kepentingan sehingga sinergi dan kolaborasi harus dilaksanakan sehingga dukungan untuk terwujudnya Indonesia Emas dapat terpenuhi. Visi Gubernur akan dicapai dengan misi yang dituangkan dalam tiga cita (Gambar 3.6.).

Gambar 3.6
Visi dan Misi Gubernur Lampung



Dari tiga cita gubernur diatas dirumuskan program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC) Gubernur Lampung dalam upaya mewujudkan visi dan misi (tiga cita), adapun program prioritas dan PHTC Gubernur yang akan dilaksanakan adalah untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan tepat dan cepat, guna

mendukung berbagai pembangunan di Provinsi Lampung lima tahun kedepan. (Gambar 3.7).

Gambar 3.7.
Program Unggulan dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
Gubernur Lampung Tahun 2025-2029



c) Program Prioritas dan Program Hasil Cepat Terbaiak (PHTC) RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029

Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 mengusung misi "Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju" dari visi tersebut telah dirumuskan lima misi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawag Barat lima tahun yang akan datang. (Gambar 3.8.)

Gambar 3.8.
Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029.



Berdasarkan visi dan misi kepala daerah dirumuskan program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 selain untuk mewujudkan visi dan misi, program prioritas dan PHTC Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas dan PHTC dari Presiden dan Gubernur Lampung. (Gambar 3.8)

Gambar 3.9
Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025-2029





d) Keselarasan visi dan Misi serta Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Visi, Misi, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Lampung.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan maka visi, misi, program prioritas dan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat harus selaras dan mendukung visi, misi, program prioritas dan PHTC dari RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Lampung.

RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional jangka menengah tahun 2025-2029 yang di jadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029. Keterhubungan yang digambarkan antara RPJM Nasional dan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah pada visi dan misi daerah yang mendukung Asta Cita Presiden sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Keselarasan Visi dan Misi
RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 Dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

No	RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029	RPJM Nasional Tahun 2025-2029
	Visi	
	"Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju"	"**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**"
	Misi	
1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Bekualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri disentra Produksi melalui peran aktif koperasi.
2	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
		Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Bekualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri disentra Produksi melalui peran aktif koperasi.
		Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
		Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
4	Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

No	RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029	RPJM Nasional Tahun 2025-2029
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Bekualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri disentra Produksi melalui peran aktif koperasi.
		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disebutkan bahwa Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2045, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia yang setara dengan negara maju di tahun 2045 dan mencapai-cita-cita Indonesia Emas 2045 dan jika dilihat visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat juga menyatakan hal yang akan dicapai adalah kemajuan dan kesejahteraan yang merata di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga dapat dikatakan jika kemajuan dan kesejahteraan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa terwujud makan akan mendukung ketercapaian dari visi RPJM Nasional.

Selanjutnya Asta Cita atau 8 misi tersebut dielaborasi lebih rinci ke dalam 17 program prioritas dan 45 program hasil terbaik cepat (quick win) serta 320 program kerja. Asta Cita harus menjadi rujukan dan mewarnai dokumen-dokumen perencanaan di daerah. Program prioritas nasional mencakup swasembada pangan, energi dan air; system penerimaan negara; reformasi politik, hukum, dan birokrasi; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pelayanan Kesehatan; Pendidikan, sains dan teknologi; pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional; kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas; lingkungan hidup, saprodi pertanian langsung ke petani; hunian berkualitas dan terjangkau; pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM; hilirisasi dan industrialisasi; kerukunan antar umat bergama dan kebebasan beribadah; serta pelestarian seni-budaya, ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. Guna mendukung upaya rencana pembangunan Nasional dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 telah menetapkan misi sebagai mana yang tercantum pada tabel sandingan visi dan misi diatas. Pada RPJM Nasional tahun 2025 - 2029 untuk Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam Kawasan pengembangan perkotaan Menggala – Lampung yaitu Peningkatan tipe Rumah Sakit dari Tipe D ke Tipe C untuk RS. Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala) dan termasuk dalam Kawasan Swasembada Pangan dan Air, Mesuji – Tulang Bawang yaitu pada pelaksanaan :

- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
- Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
- Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu
- Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian;
- Reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani;
- peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen

Pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat siap mendukung pelaksanaan RPJM Nasional tahun 2025 – 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, hal ini dapat kita lihat dari program prioritas dan PHTC RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mendukung dari Program Prioritas dan PHTC dari RPJM Nasional tahun 2025 - 2029. (gambar 3.10.)

Gambar 3.10
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Program Prioritas Nasional.

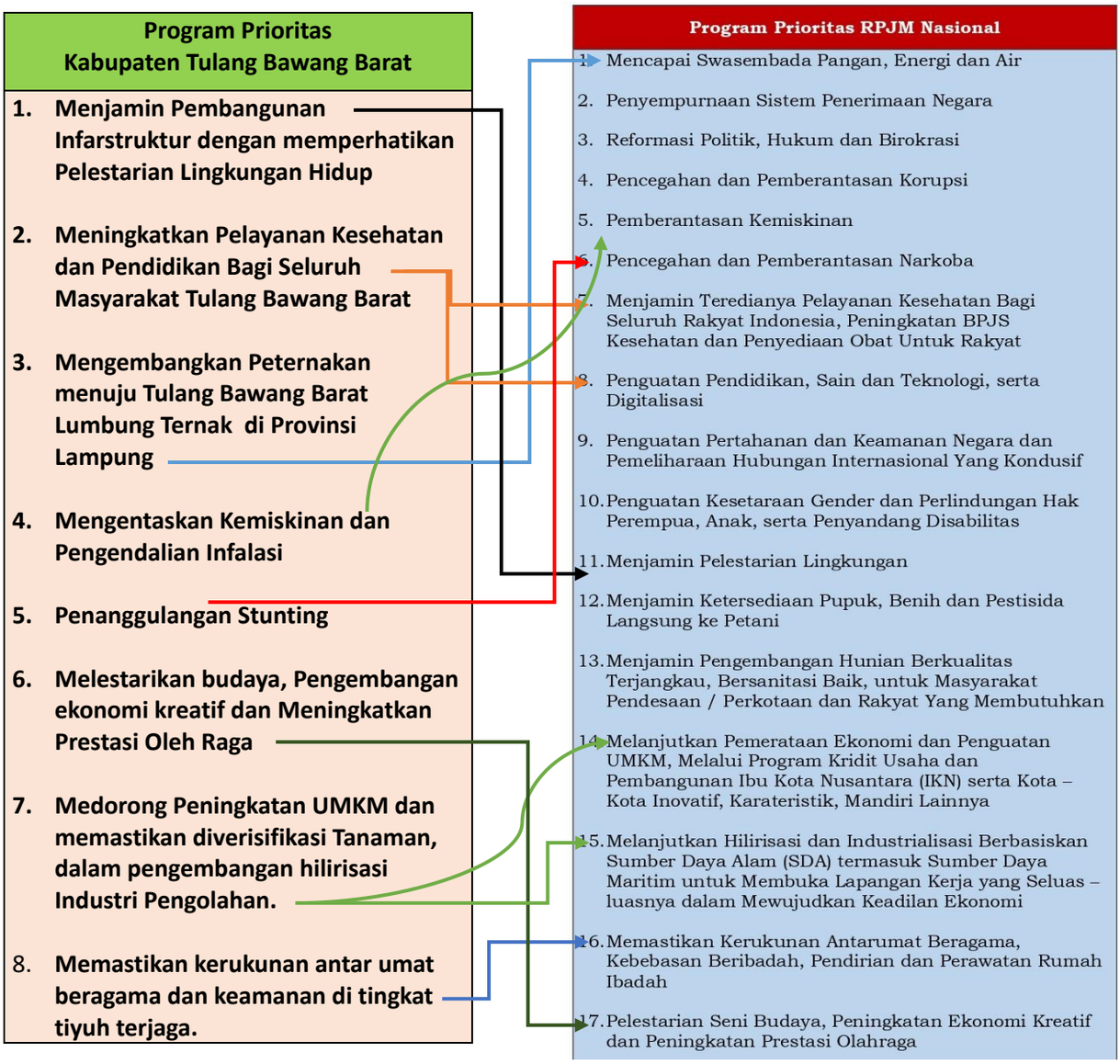

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwasannya program prioritas yang ditetapkan oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat mendukung apa yang menjadi program prioritas Nasional dalam RPJM Nasional tahun 2025-2029.

Selain dari program prioritas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah merumuskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai dukungan terhadap PHTC RPJM Nasional, adapun dukungan yang dimaksud akan digambarkan pada gambar dibawah ini.(Gambar 3.11.)

Gambar 3.11
Dukungan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap PHTC RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029.

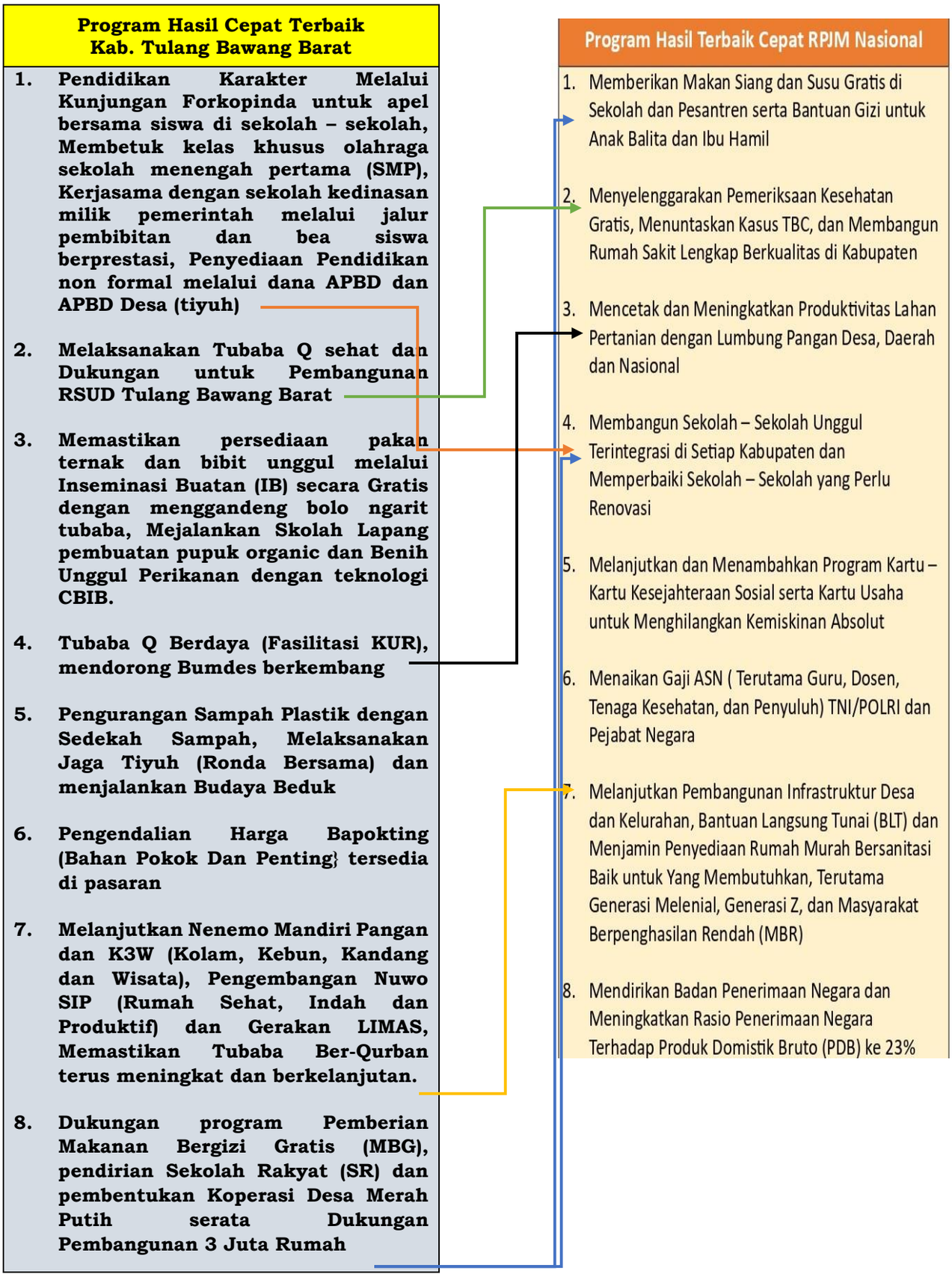

Kemudian sebagai bentuk kesinambungan perencanaan dan pembangunan antara pusat dan daerah khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat, salah satunya dukungan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana disajikan dalam tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5
Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan

URAIAN	NASIONAL	PROVINSI	KAB/KOTA
Arah Kebijakan	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan.	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, Dan Berkelanjutan Serta Pemerintahan Yang Efektif Dan Berintegritas	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif
Tujuan	Menurunkan Angka Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem	Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan
Sasaran	Mempercepat Penurunan Kemiskinan Dan Peningkatan Pemerataan	Pengentasan Kemiskinan Tepat Waktu Dan Tepat Sasaran	Menurunnya Kemiskinan dan angka pengangguran
Indikator	Tingkat Kemiskinan: (7-8% Tahun 2025) (4,5-5% Tahun 2029) Tingkat Kemiskinan Ekstrem: (0,5-1 Tahun 2025) (0% Tahun 2029)	Angka Kemiskinan: (9,5-10% Tahun 2025) (5,79-6-79% Tahun 2029)	Tingkat Kemiskinan : (6,79-7,18 tahun 2025) (6,55 tahun 2030) Kemiskinan Ekstrim : (0,62 tahun 2025) (0,50 tahun 2029)
Sasaran Pembangunan Kewilayahan	Sumatera: Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi, Serta Kawasan Omoditas Unggulan Potensi : Kelapa Sawit: Sumatera Memiliki Perkebunan Sawit	15 Kabupaten Kota: Pertanian (Arti Luas): - Peningkatan ProduksiPertanian (Padi) - Hilirisasi Yang Dilakukan Petani - Peningkatan Kapasitas Sdm (Petani) - Peningkatan Kapasitas Kop erasi/Bumdes	• Pemberian Bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Bantuan Maju Sejahtera (MANTRA) bersumber dari Dana APBD

URAIAN	NASIONAL	PROVINSI	KAB/KOTA
	Seluas 10,2 Juta Hektare Dan Menghasilkan 67 Persen Produksi Sawit Nasional. • Komoditas Perkebunan Potensial Lainnya: - Karet (70 Persen Produksi Nasional) - Kopi (62 Persen Produksi Nasional) - Tebu (36 Persen Produksi Nasional) - Kelapa (32 Persen Produksi Nasional) • Ketahanan Pangan: Sumatera Berkontribusi 27 Persen Dalam Produksi Beras Nasional, Serta Berkontribusi Sekitar 16 Persen Dalam Produksi Perikanan Nasional.		• Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat yang kurang mampu yang bersumber dari Jamkesda dan yang bersumber dari Jamkes Prov dan dari APBN. • Memberikan bantuan kepada Siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah melalui Program Indonesia Pintar PIP • Memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi dan tidak mampu • Memberikan bantuan benih sayuran, pupuk dan pestisida • melaksanakan Pelatihan Usaha bagi Ibu- Ibu Selaku Kepala Keluarga • Akan memberikan bantuan Benih ikan • Bimtek perbibitan ternak sapi • Bimtek pengelolaan pakan ternak • Bimtek pengembangan usaha dan pasca panen
Lokus	(Kopi & Kelapa) Lampung Barat Lampung Selatan	500 Desa Unit Produksi Pupuk Organik Cair (Penduduk Dengan Kategori Kesejahteraan Desil 1) 24 Desa Penerima Bantuan Dryer Dan	500 KPM Penerima Melalui Program Maju dan Sejahtera Memberikan bantuan benih sayuran, pupuk dan pestisida, Benih ikan, bibit ternak sapi,

URAIAN	NASIONAL	PROVINSI	KAB/KOTA
		Mocaf Desa Dengan Kelembagaan Desa: (Koperasi/ Bumdes/ Gapoktan/ Pokdarwis, Dst)	pengelolaan pakan ternak, Bimtek pengembangan usaha dan pasca panen kepada Kelompok Tani.

Selain selaras dengan RPJM Nasional, Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, maka dalam menyusun RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 harus diselaraskan dan mendukung dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029. Sebagai bentuk keselarasan yang dimaksud adalah keselarasan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap RPJMD Provinsi Lampung sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Keselarasan Dokumen
RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029
dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029
	Visi	
	“Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju”	**”Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”**
	Misi	
1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Memperkuat Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Produktif
2	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif
3	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradap, Berkeadilan dan Berkelanjutan
4	Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	

Berdasarkan tabel penyelasan yang telah disajikan diatasa dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan antara Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dikatakan telah selaras dan saling mendukung dalam pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan oleh masing masing kepala daerah

Selajutnya pelaksanaan program prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 sebagai dukungan terhadap program unggulan Gubernur Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025 – 2029 dapat terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.12
Dukungan Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Program Unggulan Gubernur Provinsi Lampung.

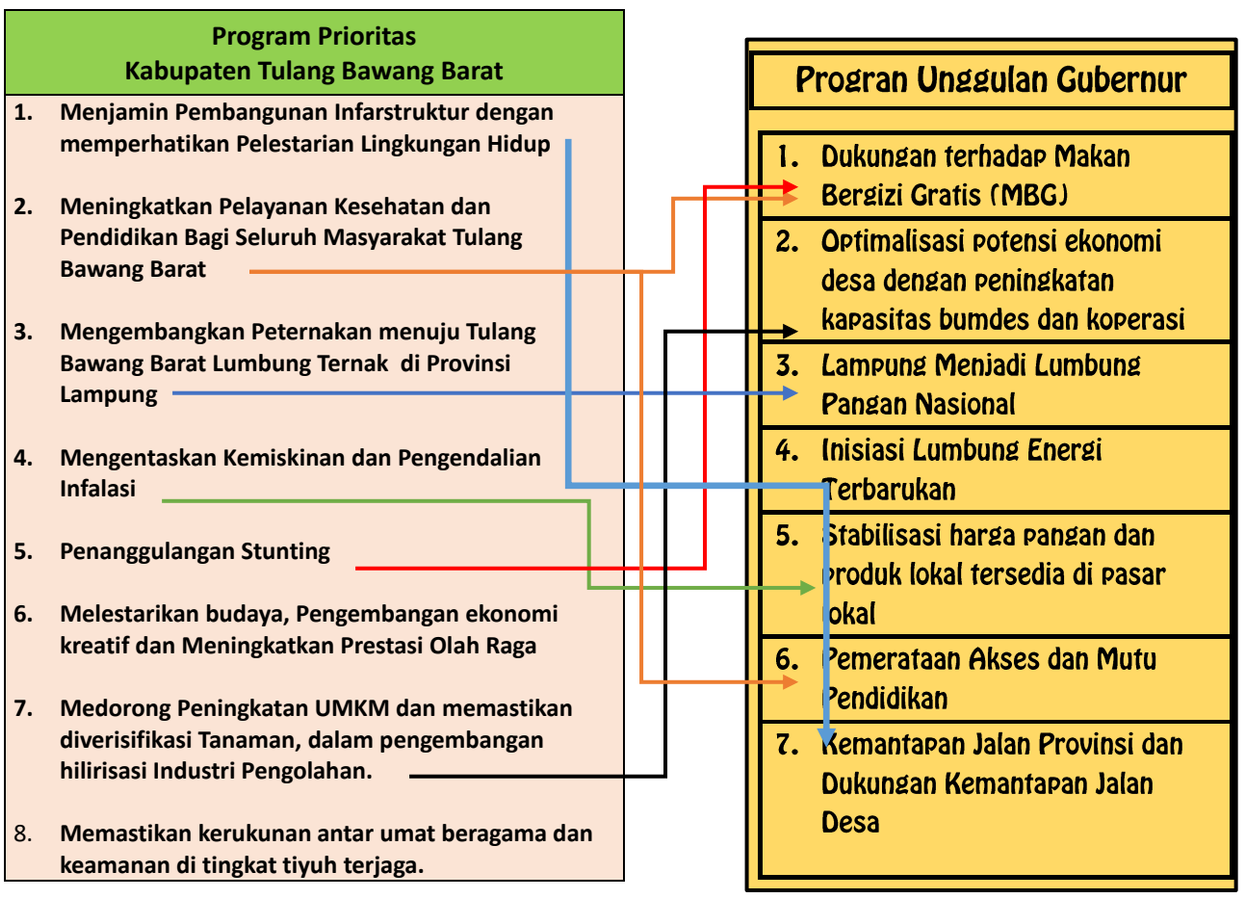

Selain program prioritas Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mendukung program unggulan RPJMD Provinsi Lampung pada gambar diatas, maka rumusan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 harus mendukung terhadap PHTC Provinsi Lampung tahun 2025-2029 sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 3.13.
Dukungan PHTC Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap PHTC Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029

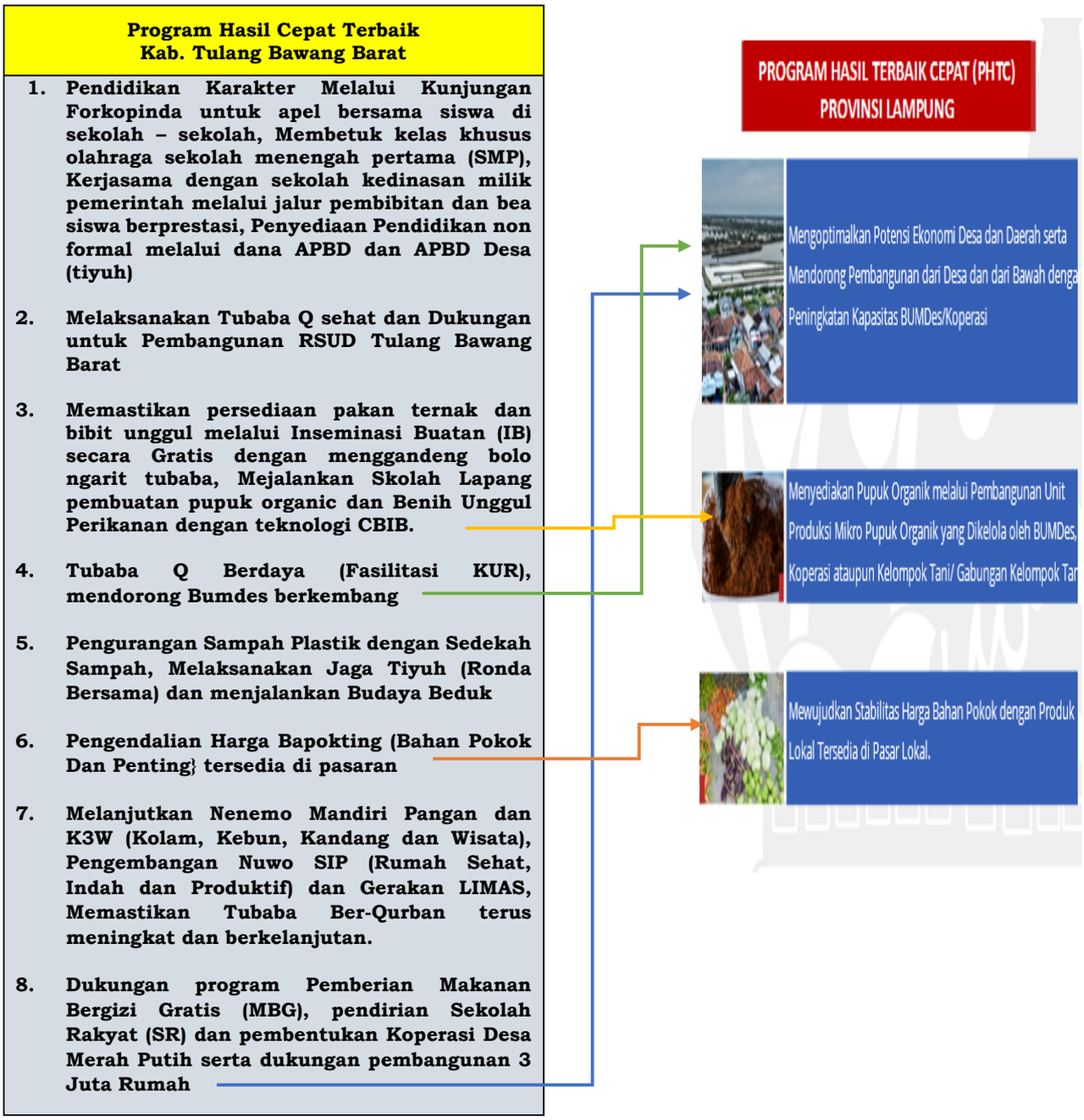

Gambar 3.12 dan Gambar 3.13 menggambarkan dukungan dari program prioritas dan program hasil cepat terbaik Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat terhadap program unggulan dan program hasil terbaik cepat Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sedangkan untuk program – program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dapat mendukung dari program unggulan Provinsi Lampung 1). Dukungan Terhadap Makan Bergizi Gratis, 2). Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi, 3). Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional, 4). Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan 5). Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal

6). Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan, 7). Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan Desa, akan disajikan dalam bentuk matrik yaitu pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Dukungan Program Perangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Terhadap Program Unggulan Provinsi Lampung

No	Program Unggulan Prov. Lampung	Nama Program Dukungan Untuk Unggala Prov. Lampung	Perangkat Daerah Pengampu
1	Dukungan Terhadap Makan Bergizi Gratis	1. Program Pengawasan Keamanan Pangan, 2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, 3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, 6. Program Pengembangan UMKM, 7. Program Administrasi Pemerintah Desa, 8. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, 9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Dinas Perikanan 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh 6. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perekebunan
2	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, 4. Program Penyuluhan Pertanian, 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, 9. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, 10. Program Pengembangan UMKM, 11. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	1. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program Unggulan Prov. Lampung	Nama Program Dukungan Untuk Unggala Prov. Lampung	Perangkat Daerah Pengampu
3	Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi	1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, 2. Program pengunaan dan pemasaran produk dalam negeri, 3. Program perencanaan dan pembangunan industri, 4. Program Administrasi Desa, 5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh 3. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 4. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
4	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Pengelolaan Energi Merupakan Kewenangan di Tingkat Provinsi	
5	Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal	1. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan, 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting, 3. Program Perekonomian dan Pembangunan, 4. Program Penyuluh Pertanian, 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 8. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan Desa	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Dari penjelasan diatas terkait penyelarasan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, dan penyelarasan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap Visi dan Misi Gubernur Lampung selajutnya dibawah ini disajikan matrik penyelasaran (sandingan) dari misi Bupati, Gubernur dan Priseden yaitu pada tabel dibawah ini.

Tebel 3.8

Penyelarasan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

No	Misi Tulang Bawang Barat	No	Misi (Cita) Provinsi Lampung	No	Asta Cita Nasional
Misi Kab. Ke-2	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif	Cita Ke-1	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	ACN Ke-2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
				ACN Ke-3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
				ACN Ke-5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
				ACN Ke-6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Misi Kab Ke-1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Cita Ke-2	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	ACN Ke-3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
				ACN Ke-4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,

No	Misi Tulang Bawang Barat	No	Misi (Cita) Provinsi Lampung	No	Asta Cita Nasional
					kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Misi Kab Ke-4	Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	Cita Ke-3	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	ACN Ke-1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Misi Kab Ke-5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan			ACN Ke-2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Misi Kab Ke-3	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif			ACN Ke-7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
				ACN Ke-8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2025 – 2029

Dalam rangka memberikan arah pembanunan dalam RPJMD, ditentukan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 – 2029. Tujuan dan sasaran pembangunan menuntun kepada pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode pembangunan 5 (lima) tahunan.

A. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan hasil atau keadaan yang ingin dicapai dalam periode tertentu sebagai langkah menuju visi misi pembangunan daerah. Tujuan bersifat lebih luas dan tidak spesifik, namun menunjukkan arah dari keseluruhan rencana pembangunan. Biasanya, tujuan ini dikaitkan dengan prioritas pembangunan dan menggambarkan keadaan akhir yang diinginkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun tujuan yang dirumuskan untuk visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 ada 5 (lima) tujuan yaitu sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia Tulang Bawang Barat semakin berkualitas, Inovatif dan Berdaya Saing;
2) Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan;
3) Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transparan;
4) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, dan berbudaya; dan
5) Meningkatnya kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

B. Sasaran

Sasaran adalah pernyataan yang lebih spesifik dan terukur terkait tujuan yang ingin dicapai. Sasaran mencerminkan langkah konkret dan memiliki indikator kinerja yang dapat dievaluasi. Sasaran berfungsi sebagai penjabaran lebih rinci dari tujuan untuk memastikan arah yang lebih jelas dalam mencapai visi pembangunan daerah, untuk sasaran dari misi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2029 dirumuskan kedalam 17 (tujuh belas) sasaran yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
3) Meningkanya Iptek dan Inovasi Daerah;
4) Meningkatnya akses layanan keluarga berencana, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak serta kesetaraan gender;
5) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah;
6) Terjaganya stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
7) Menurunnya Kemiskinan dan angka pengguran;
8) Meningkatnya produktivitas UMKM dan BUMD;
9) Meningatnya perkembangan desa (tiyuh);
10) Meningkatnya standar kehidupan layak masyarakat;

11) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
12) Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah;
13) Meningkatya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
14) Meningkatnya pembangunan kebudayaan;
15) Meningkatnya Infrastruktur;
16) Meningkatnya akses dan kualitas layanan irigasi, air bersih dan permukiman; dan
17) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini.

Tabel 3.9
Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Terget Capaian Tulang Bawang Barat							Kondisi Akhir
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Sumber Daya Manusia Tulang Bawang Barat semakin berkualitas, Inovatif dan Berdaya Saing		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	70,04	70,85	71,35	71,90	72,35	72,95	73,25	73,25
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,23	74,37	74,74	75,11	75,15	75,27	75,60	75,60
				Prevalensi Stunting	13,4	12,75	12,15	11,70	11,00	10,65	10,20	10,20
				Cakupan kepesertaan JKN (%)	87,23	87,48	87,93	88,25	88,97	89,35	89,92	89,92
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,80	7,82	7,92	8,02	8,12	8,13	8,20	8,20
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,12	12,30	12,36	12,42	12,47	12,58	12,72	12,72

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Terget Capaian Tulang Bawang Barat							Kondisi Akhir
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	NA	6,46	6,54	6,58	6,62	6,66	6,70	6,70
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	63,11	63,32	63,32	63,78	64,00	64,50	65,00	65,00
			Meningkanya Iptek dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	47,33 (Inovatif)	50,44 (Inovatif)	53,55 (Inovatif)	55,11 (Inovatif)	56,66 (Inovatif)	58,22 (Inovatif)	59,77 (Inovatif)	59,77 (Inovatif)
			Meningkatnya akses Layanan Keluarga Berencana, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,72	89,97	90,21	90,46	90,70	90,95	91,19	91,19
				Indeks Perlindungan anak	64,11 (2023)	64,60	65,13	65,66	66,20	66,73	66,85	66,85
2	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor-	Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas,		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,55	4,69	4,76	4,83	4,90	4,97	5,10	5,10

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Terget Capaian Tulang Bawang Barat							Kondisi Akhir
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sektor Ekonomi Produktif	menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan										
			Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Persentase Peningkatan Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	4,1	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	27,25	28,01	28,22	28,43	28,64	28,90	28,93	28,93
				Rasio PDRB Perdaganagan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,20	14,40	14,95	15,51	15,75	15,90	16,25	16,25
				Pertumbuhan Investasi (%)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%
			Terjaganya stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Tingkat Inflasi *)	1,57	2,8-3,5	2,7-3,5	2,6-3,6	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5
				PDRB Perkapita	52.210	55,57	61,30	68,10	75,30	83,30	92,80	92,80
				Rasio Gini	0,297	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269
			Menurunnya Kemiskinan dan	Tingkat Kemiskinan	7,22	6,72-7,00	6,90-7,15	6,00-6,90	5,67-6,39	5,30-6,00	4,95-5,75	4,95-5,75

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Terget Capaian Tulang Bawang Barat							Kondisi Akhir
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			angka penganguran	Kemiskinan Ekstrim	0,69 (2023)	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,47
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,12	3,89	3,62	3,52	3,42	3,32	3,22	3,22
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,05	54,50	55,14	55,79	56,43	57,08	57,75	57,75
			Meningkatnya Produktivitas UMKM dan BUMD	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	90,36	90,36	90,34	90,33	90,31	90,30	90,29	90,29
				Return on aset (ROA) BUMD (%)	3,83	3,89	4,08	4,26	4,52	4,78	5,04	5,04
				Rasio Kewirausahaan Daerah	2,42 (2023)	2,64	2,75	2,85	2,96	3,07	3,27	3,27
			Meningatnya perkembangan Desa (Tiyuh)	Persentase Desa Mandiri (%)	18	22	24	29	30	34	36	36
			Meningkatnya Standar Kehidupan Layak Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	9,646	9,852	9,995	10,115	10,345	10,678	10,958	10,958

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Terget Capaian Tulang Bawang Barat							Kondisi Akhir
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif	Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transparan		Indeks RB	B (67,53)	B (68,50)	B (68,95)	B (69,35)	B (69,75)	B (69,95)	BB (70,15)	BB (70,15)
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Hukum	45,36	60,24	67,68	75,12	82,56	90,00	90,10	90,10
				Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)	64,42	65	67	69	72	75	76	76
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,49 (cukup)	2,66 (Baik)						
				Indeks Pemerintahan Digital			1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5
				Indeks Pelayanan Publik	3,42 (B-)	3,52 (B)	3,62 (B)	3,72 (B)	3,82 (B)	3,92 (B)	4,02 (A-)	4,02 (A-)
				Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,26	3,27	3,28	3,30	3,31	3,34	3,35	3,35
			Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B (60,19)	B (60,79)	B (61,39)	B (61,99)	B (62,59)	B (63,19)	B (63,79)	B (63,79)
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Maturitas SPIP	(3,036)	3,25	3,32	3,35	3,37	3,40	3,45	3,45
				Indeks Kepuasan Masyarakat	76,74 (Baik)	76,97 (Baik)	77,20 (Baik)	77,43 (Baik)	77,66 (Baik)	77,89 (Baik)	78,12 (Baik)	78,12 (Baik)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Terget Capaian Tulang Bawang Barat							Kondisi Akhir
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah IKKD)	NA	NA	70	72	74	76	78	78
4	Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, dan berbudaya		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,2 (2023)	76,80	77,08	77,37	77,66	77,95	78,23	78,23
			Meningkatya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	150,65	122,93	120,91	118,88	116,86	114,83	112,80	112,80
				Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah)		40%	44%	48%	52%	56%	60%	60%
				Indeks Risiko Bencana (IRB)	120,28	119,91	118,8	117,69	116,58	114,36	113,25	113,25
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	65%	65,50%	66%	66,50%	67%	67,50%	68%	68%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Terget Capaian Tulang Bawang Barat							Kondisi Akhir
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Persentase Kelompok Seni Yang Aktif Terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun Terakhir	NA	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	C (72,45)	C (74,45)	C (76,45)	B (78,45)	B (80,45)	B (82,45)	B (84,45)	B (84,45)
			Meningkatnya Infrastruktur	Persentase Jalan Mantap Kabupaten	43,90	43,90	44,34	44,79	45,23	45,69	46,69	46,69
				Pesentase Panjang Jalan Yang Dilengkapi Fasilitas Keselamatan	NA	79%	82,25%	85,50%	88,75%	92%	95%	95%
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Minum dan Permukiman	Persentase Luas Areal Fungsi Irigasi Dalam Kondisi Baik	40,66	40,83	40,88	41,00	41,02	41,94	42,53	42,53
				Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses		2,28	2,31	2,38	2,45	2,53	2,62	2,62

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Terget Capaian Tulang Bawang Barat							Kondisi Akhir
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Terhadap Air Minum Aman								
				Persentase Rumah Layak Huni di Tangani	43,67	46,35	49,03	51,71	54,39	57,08	59,76	59,76
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,89	66,80	67,05	67,31	67,56	67,81	68,06	68,06

Perumusan tujuan dilakukan dengan beberapa tahapan. Dimulai dengan menganalisis visi dan misi kepala daerah, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan, lalu merumuskan arah pembangunan. Perumusan sasaran diawali dengan menentukan sasaran yang spesifik dan dapat diukur menggunakan indikator kuantitatif. Kemudian menentukan batas waktu pencapaian agar mudah dalam mengevaluasi pada akhir periode RPJMD. Tahap akhir dalam penentuan sasaran yakni memastikan bahwa sasaran dapat diterjemahkan ke dalam program kerja atau kegiatan yang real dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

3.1.3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

A. *Keselarasan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah* (Renstra PD)

Renstra PD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya RPJMD adalah rencana induk pembangunan suatu daerah, sedangkan Renstra PD adalah rencana operasional masing-masing perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

B. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Keterkaitan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat ialah RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjabarkan perencanaan dari RPJMD pada setiap tahunnya, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan kata lain RPJMD dan RKPD sama-sama bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah dimana RPJMD merupakan peta besar yang menunjukkan tujuan dan arah perjalanan pembangunan daerah selama 5 tahun sedangkan RKPD merupakan rencana perjalanan tahunan yang lebih detail, berisi daftar kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam peta besar RPJMD. Keterkaitan antara dokumen Perencanaan Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat digambarkan pada gambar 3..... yaitu sebagai berikut.

Gambar 3.13
Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.



C. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023-2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mulai dari Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, merupakan dokumen perencanaan spasial dalam lingkup waktu 20 (dua puluh) tahun, yang sangat terkait erat dengan RPJMD untuk itu RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat disinkronka dengan RTRW tahun 2023 – 2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat, adapun keterhunungan antara dokumen tersebut disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Sinkronisasi RPJMD tahun 2025-2029 dengan RTRW tahun 2023-2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat

RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**	
Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju	1.	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif		
	2.	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi

RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**	
		– Sektor Ekonomi produktif		inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
				sosialisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
				Pengendalian secara ketat alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
				pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan
				pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi kawasan tanaman pangan
				Penelitian dan pengembangan kawasan perkebunan
				pengembangan kawasan perkebunan berbasis agropolitan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikan dan pola tanam
				pengembangan agribisnis Tanaman Tangan
				pengembangan agribisnis Hortikultura
				pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Hortikultura
				Pengembangan kegiatan perkebunan
				pengembangan agribisnis Perkebunan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan agribisnis di Kawasan Perikanan Budi Daya
				Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
				Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan
				peningkatan pengelolaan budi daya perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budidaya
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
				Pengembangan dan peningkatan Kawasan Industri Lambu Kibang

RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**	
				pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan, penataan dan pemantapan kawasan pariwisata
				Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata
				menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreati	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian dan Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan peternakan skala kecil di Kawasan Permukiman Perdesaan
	3.	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif		
	4.	Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	Program Penanggulangan Bencana	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana
				Pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana
			Program Penanganan Bencana	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
				Pengembangan sistem pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.
	5.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Panaragan
				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan
				Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Panaragan
				Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Panaragan

RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**	
				Penyusunan Revisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Panaragan
				Perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Pusat Pelayanan Kawasan antara lain di: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya.
				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Daya Murni
				Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Daya Murni
				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Kibang Budi Jaya
				Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Kibang Budi Jaya
				Perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain di: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.
				Pengembangan dan Pemantapan Sistem Pusat Permukiman di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.
				Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Kawasan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.
				Pengembangan dan Penataan Kawasan Perumahan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.
				Penetapan batas Kawasan Perlindungan Setempat
				penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai
				Pemetaan zona Kawasan Permukiman Perkotaan eksisiting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten
				Pengembangan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)

RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**	
				pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung
			Program Pengembangan Permukiman	Pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perkotaan
				Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan
				Pengembangan dan Pemantapan Sistem Pusat Permukiman Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Panaragan
				Pembangunan dan pengembangan kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik
				Pembangunan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Panaragan
				Pengembangan dan peningkatan kawasan agropolitan
				Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawsan permukiman di kawasan strategis
				Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis
				Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan
				pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan.
				perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan
				Pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimasi dampak perubahan iklim pada Kawasan Permukiman Perkotaan
				Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan
				Pemenuhan RTH 20% dalam Kawasan Permukiman Perdesaan
				Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Kawasan di Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan
				Pengembangan dan Penataan Kawasan Perumahan di Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan
				Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Panaragan.

RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**	
				Pengaturan dan Pemantapan Kegiatan Perdagangan dan Jasa di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Panaragan
				Peremajaan Kota dan Revitalisasi Fungsi Kawasan di Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Perkotaan Panaragan
				Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Pusat Pelayanan Kawasan antara lain: Perkotaan Daya Murni; Perkotaan Kibang Budi Jaya.
				Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.
				Peremajaan Kota dan Revitalisasi Fungsi Kawasan di Pusat Pelayanan Lingkungan antara lain: Perkotaan Karta; Tiyuh Tunas Jaya; Tiyuh Toto Mulyo; Tiyuh Balam Jaya; Tiyuh Pagar Dewa; Tiyuh Margo Mulya.
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan embung/situ/danau/waduk
				Pembangunan dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan embung/situ/danau/waduk
				pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai
				Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer
				Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder
				Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier
				Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir
				Pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer
				Pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer
				Pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Sekunder
				Program penyelenggaraan jalan dan jembatan di Jalan Lokal Primer

RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**	
				Program penyelenggaraan jalan dan jembatan di Jalan Lingkungan Primer
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Unit Air Baku
				Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Unit Distribusi
				Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sumur Pompa
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengembangan layanan internet
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	pengembangan, pemeliharan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
			Program Pengelolaan Persampahan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten
				Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
				Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
				Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
				Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan.
			Program Perencanaan Lingkungan hidup	Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindugan dan pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase
				Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Drainase Primer
				Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Drainase Sekunder
				Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Drainase Tersier

RPJMD 2025 - 2029			INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 – 2043 (waktu pelaksanaan 2023 - 2024)
Visi	**Misi**	**PROGRAM**	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan embung/situ/danau/waduk
			Pembangunan dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan embung/situ/danau/waduk
			pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai
		Program Kawasan Permukiman	Penyusunan Materi Teknis dan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
		Program Pengembangan Perumahan	Pemetaan zona Kawasan Permukiman Perkotaan eksisiting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kabupaten
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah	Pengembangan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	identifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan
			perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan
			Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan
			Pemenuhan RTH 20% dalam Kawasan Permukiman Perdesaan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Pengembangan dan pemantapan Alur- Pelayaran Kelas III antara lain: Pagar Dewa-arah menggala; dan Pagar Dewa-sungai Way Kanan.
			Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yakni Dermaga Pagar Dewa, Dermaga Karta, Dermaga Penumangan, dan Dermaga Panaragan

Sumber : RT/RW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043

Selain disinkronkan dengan RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 – 2043, RPJMD tahun 2025 – 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat juga disinkronkan dengan RTRW Provinsi Lampung sebagaimana yang disajikan pada tabel dibwah ini.

Tabel 3.11
Sinkronisasi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RTRW Tahun 2023-2043
Kabupaten Tulang Bawang Barat dan RTRW tahun 2023-2043 Provinsi Lampung

RANWAL RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2029)	INDIKASI PROGRAM PERDA NO 14 Tahun 2023 TTG RTRW PROV LAMPUNG 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2027)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**		
Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju	2.	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian secara ketat alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan Pertanian berupa Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
				pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi kawasan tanaman pangan	Perwujudan Kawasan Pertanian, Kawasan Pertanian berupa Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan
				pengembangan kawasan perkebunan berbasis agropolitan	Kawasan Pertanian berupa Pengembangan Kawasan Perkebunan
				Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Perwujudan Kawasan Perikanan,Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Tangkap, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
				Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan	Pengembangan kawasan perikanan yang memperhatikan lingkungan
				peningkatan pengelolaan budi daya perikanan	Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Budidaya, Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
				Pengembangan dan peningkatan Kawasan Industri Lambu Kibang	Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri berupa Kawasan Industri Tulang Bawang Barat

RANWAL RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2029)	INDIKASI PROGRAM PERDA NO 14 Tahun 2023 TTG RTRW PROV LAMPUNG 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2027)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**		
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan, penataan dan pemantapan kawasan pariwisata	Pengembangan kawasan pariwisata berupa destinasi pariwisata daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya, Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di Kabupaten lampung Timur dan KPPD di Kabupaten
	5.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
				Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
				Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis	Pembinaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
				perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Perwujudan Kawasan Permukiman, Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
				Pemenuhan RTH 20% dalam Kawasan Permukiman Perdesaan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
				Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Kawasan di Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Panaragan	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

RANWAL RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2029)	INDIKASI PROGRAM PERDA NO 14 Tahun 2023 TTG RTRW PROV LAMPUNG 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2027)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**		
					Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) SP. Bujung Tenuk - BTS. Kab. Lamteng/Kab.TL Bawang;
					Pemantapan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, Kolektor Primer Tiga (JKP-3), Panaragan Jaya - Sp. Panaragan; Penumangan - Tegal Mukti; Sp. Tujok - Panaragan Jaya; Bandar Sakti – Sp. Daya Murni; Sp. Daya Murni – Gunung Batin; aaaa. Adijaya – Tulang Randu; Penumangan – Unit VI; Sp. Unit VIII – Gedong Aji;
				Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Unit Distribusi	Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Penyusunan dokumen perencanaan Jaringan, Rencana Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang
				perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Perwujudan Kawasan Permukiman, Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

RANWAL RPJMD 2025 - 2029				INDIKASI PROGRAM PERDA NO 3 Tahun 2023 TTG RTRW TUBABA 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2029)	INDIKASI PROGRAM PERDA NO 14 Tahun 2023 TTG RTRW PROV LAMPUNG 2023 - 2043 (waktu pelaksanaan Tahap I dan II (2023 - 2027)
Visi	**Misi**		**PROGRAM**		
			Dan Utilitas Umum (Psu)	Pemenuhan RTH 20% dalam Kawasan Permukiman Perdesaan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pengembangan dan pemantapan Alur-Pelayaran Kelas III antara lain: Pagar Dewa-arah menggala; dan Pagar Dewa-sungai Way Kanan.	Pemanfaatan penggunaan pinggiran sungai untuk kegiatan kepelabuhan
				Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yakni Dermaga Pagar Dewa, Dermaga Karta, Dermaga Penumangan, dan Dermaga Panaragan	Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau, Pelabuhan Pagar Dewa; Pelabuhan Karta; Pelabuhan Panaragan; Pelabuhan Penumangan;

Sumber : RTRW Tulang Bawang Barat dan RTRW Provinsi Lampung

3.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas

3.2.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan sesuatu yang ditetapkan sebagai panduan atau garis besar strategis dalam mencapai tujuan tertentu, hal ini adalah suartu prinsip-prinsip mendasar yang memandu suatu organisasi, pemerintah, atau individu dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan. Secara umum, arah kebijakan berfungsi sebagai petunjuk (Kompas). Ia tidak merinci setiap langkah yang harus diambil, tetapi memberikan kerangka kerja yang jelas tentang ke mana tujuan akhir dan bagaimana cara mencapainya secara umum.

Arah kebijakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan rumusan perencanaan yang menyeluruh tentang bagaimana pemerintah daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, dan dirancang untuk menjawab tantangan serta peluang lima tahun ke depan yang disusun dalam rangkaian kerja untuk menjabarkan misi yang selaras dengan strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025–2029, adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 disajikan dalam bentuk matrik tabel yang telah disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencaangna Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu pada tabel 3.12. dibawah ini.

Tabel 3.12
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2025 – 2029

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pemdidikan serta Kesehatan Dalam Peningkatan Kualitas SDM	
2	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Ekonomi Produktif	
3	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Asas, dan Kolaboratif	
4	Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang merata dengan memperhatikan keberlanjutan.	

3.2.2. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, maka selain arah kebijakan disusun juga strategi yang selaras dengan arah kebijakan. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Strategi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawag Barat disusun dalam tahapan pembangunan, yaitu tahapan I (tahun 2026) hingga tahapan V (tahun 2030). Penahapan strategi pembangunan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan secara terukur dan konsisten. Dengan adanya pembangian tahap pembangunan menjadi 5 (lima) tahapan, maka strategi pembangunan lebih fokus pada pencapaian tujuan spesifik di setiap tahapan, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Setiap tahap pembangunan diarahkan untuk memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan daya saing ekonomi, menuntaskan pelayanan dasar, serta memastikan keberlanjutan pembangunan sosial dan lingkungan menuju perwujudan Tulang Bawang Barat yang Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju, adapun untuk penahapan strategi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026-2030 ditampilkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Strategi Pembangunan RPJMD
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Visi :							
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan							
1	Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pemdidikan serta Kesehatan Dalam Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan Dasar. 2. Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan 3. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 4. Pengendalian penyakit tidak menular, gangguan	1. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan Dasar. 2. Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan 3. Memperluas usaha pelayanan promotif-preventif dan membudayakan kebiasaan prilaku hidup sehat, dengan memenuhi ketersediaan air minum dan sanitasi, Kesehatan, ruang terbuka hijau, dan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan. 2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan Dasar. 3. Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan 4. Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan.	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan. 2. Pendampigan peran lintas sektor dalam peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan 3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan 4. Memberdayakan masyarakat local untuk menjadi tenaga Kesehatan yang siap ditempatkan di	1. Memastikan keberlanjutan dari program-program yang telah berjalan dalam pelayanan Masyarakat terutama Kesehatan 2. Memperkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang bertugas di pelayanan primer Kesehatan 3. Pengembangan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			mental, dan penyakit menular melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya 5. Meningkatkan dan pemertaan akses pelayanan Kesehatan universal. 6. Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana -prasarana pelayanan Kesehatan rujukan yang memadai serta terjangkau (Rumah Sakit Umum Daerah)	fasilitas koloboratif pendukung Kesehatan 4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 5. Miningkatkan dan pemerataan kompetensi tenaga Kesehatan 6. Peningkatan kualitas pelyanan Kesehatan berbasis teknologi serta distribusi tenaga Kesehatan yang merata 7. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk. 8. Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana -	5. Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningaktan layanan kesehatan 6. Memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 7. Mendorong penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan 8. Medorong pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Transformasi Kesehatan	pelayanan Kesehatan primer 5. Memperkuat budaya hidup sehat di masyarakat serta pengembangan kualitas dan akses sanitasi 6. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan. 7. Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan 8. Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan.	bioteknologi untuk Kesehatan 4. Penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi, dan respon terutama untuk kedaruratan kesehatan dan dampak perubahan iklim. 5. Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan belanja strategis untuk mendukung pencapaian target

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
				prasarana pelayanan Kesehatan rujukan yang memadai serta terjangkau (Rumah Sakit Umum Daerah)	9. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk	9. Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningaktan layanan kesehatan 10. Memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 11. Mendorong penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan 12. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk	pembangunan Kesehatan. 6. Memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 7. Mendorong penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan 8. Medorong pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Transformasi Kesehatan 9. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Pendididikan 2. Meningkatkan akses layanan untuk Pendidikan di daerah bukan perkotaan 3. Percepatan wajib belajar 13 tahun (satu tahun pra sekolah dan dua belas tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah/SD&SMP). 4. Pengembangan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar	1. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Pendididikan 2. Meningkatkan akses layanan untuk Pendidikan di daerah bukan perkotaan 3. Peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Usia Dini dan wajib belajar Sembilan tahun (SD&SMP). 4. Penguatan kurikulum Pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang berbasis pengembangan karakter, minat dan bakat siswa 5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik (guru) serta tenaga kependidikan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga pendidik, 2. Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. 3. Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningaktan layanan pendidikan. 4. Pemberdayaan masyarakat lokal yang diarahkan untuk menjadi guru dan tenaga kependidikan berkualitas	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga pendidik. 2. Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. 3. Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningaktan layanan pendidikan. 4. Memperkuat Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan terutama untuk	1. Memastikan keberlanjutan dari program-program yang telah berjalan dalam pelayanan Masyarakat untuk Pendidikan 2. Memperkuat inovasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. 3. Memperkuat pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningaktan layanan 4. Memperkuat program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			(SD dan SMP) yang memenuhi standar serta aman dari bencana termasuk adanya transportasi khusus untuk peserta didik yang sesuai dengan karakter wilayah dan pemerataan akses. 5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pendidikan dasar dan Menengah serta ketersediaan sarana prasaran Pendidikan yang memadai dan terjangkau 6. Memberikan bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik khusunya bagi	6. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja 7. Meningkatkan program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 8. Mengadakan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan 9. Mendorong dan mendukung pendidikan anak usia	5. Memperluas program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mengembangkan pembelajaran, dan memanfaatkan aplikasi edukasi untuk memperluas jangkauan pendidikan	pendidikan dasar (SD & SMP) 5. Memperkuat program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 6. Memperluas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mengembangkan pembelajaran, dan	A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 5. Memperkuat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mengembangkan pembelajaran, dan memanfaatkan aplikasi edukasi untuk memperluas jangkauan pendidikan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			masyarakat yang berprestasi atau yang memiliki penghasilan rendah 7. Mendorong program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 8. Menyusun regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat	dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya 10. Mendorong penegakkan regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat 11. Mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan kebijakan yang tepat.	7. Mendorong dan mendukung pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya 8. Mendorong penegakkan regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat	memanfaatkan aplikasi edukasi untuk memperluas jangkauan pendidikan 7. Mengadakan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan 8. Memperkuat dukungan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya 9. Memperkuat penegakkan	6. Melakukan evaluasi terhadap kualitas pendidikan dan akreditasi lembaga pendidikan untuk memastikan standar terpenuhi dan mendorong perbaikan berkelanjutan 7. Memperkuat dukungan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya 8. Memperkuat penegakkan regulasi serta kebijakan yang mendukung

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
						regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat 10. Mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan kebijakan yang tepat.	tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat
		Meningkatkan Iptek dan Inovasi Daerah	1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah 2. Mendorong penelitian dan	1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah 2. Mendorong penelitian dan pengembangan	1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah 2. Mendorong penelitian dan	1. Mendorong penelitian dan pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga	1. Mendorong penelitian dan pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga 3. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah 4. Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset. 5. Penyusunan Kebijakan IPTEK dan Inovasi Daerah dengan merumuskan kebijakan dan strategi daerah yang	(litbang) di perguruan tinggi, lembaga pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga 3. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah 4. Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset. 5. Melibatkan generasi muda melalui kompetisi sains dan inovasi, program mentoring, dan dukungan terhadap startup berbasis teknologi.	pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga 3. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah 4. Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset. 5. Melibatkan generasi muda melalui kompetisi sains dan inovasi, program mentoring, dan	pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah 3. Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset. 4. Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator dengan	pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah 3. Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset. 4. Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			jelas dan terarah untuk mendukung pengembangan IPTEK dan inovasi. 6. Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan komersialisasi inovasi. 7. Penguatan Sinergi Antar-Lembaga dalam perumusan dan implementasi kebijakan IPTEK dan inovasi.	6. Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator dengan calon investor atau pengguna teknologi. 7. Penyusunan Kebijakan IPTEK dan Inovasi Daerah dengan merumuskan kebijakan dan strategi daerah yang jelas dan terarah untuk mendukung pengembangan IPTEK dan inovasi. 8. Penguatan Sinergi Antar-Lembaga dalam perumusan dan implementasi kebijakan IPTEK dan inovasi.	dukungan terhadap startup berbasis teknologi. 6. Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator dengan calon investor atau pengguna teknologi. 7. Edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan KI (paten, merek, hak cipta). Sediakan layanan konsultasi dan bantuan pendaftaran KI 8. Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang	calon investor atau pengguna teknologi. 5. Edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan KI (paten, merek, hak cipta). Sediakan layanan konsultasi dan bantuan pendaftaran KI 6. Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan	dengan calon investor atau pengguna teknologi. 5. Edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan KI (paten, merek, hak cipta). Sediakan layanan konsultasi dan bantuan pendaftaran KI 6. Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
					mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan komersialisasi inovasi.	komersialisasi inovasi.	komersialisasi inovasi.
		Meningkatkan akses layanan keluarga berencana, kualitas hidup, dan perlindungan terhadap perempuan, anak serta kesetaraan gender	1. Memperkuat sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak. 2. Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 3. Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko 4. Peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku	1. Memperkuat sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak. 2. Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 3. Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko 4. Peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas	1. Optimalisasi sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak. 2. Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 3. Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko 4. Penguatan pemahaman dan perubahan perilaku	1. Optimalisasi sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak. 2. Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 3. Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko 4. Penguatan pemahaman dan	1. Evaluasi sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak. 2. Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 3. Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 5. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 6. Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 7. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit.	pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 5. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 6. Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 7. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. 8. Memperluas akses pendidikan yang berkualitas, dengan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah	masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 5. Penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 6. Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 7. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit.	perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 5. Penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 6. Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 7. Memberikan edukasi tentang pentingnya	4. Optimalisasi pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 5. Evaluasi Pelaksanan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 6. Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			8. Memperluas akses pendidikan yang berkualitas, dengan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah bagi anak Perempuan. 9. Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa keterampilan digital, bagi perempuan. 10. Mendorong pembentukan dan penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat 11. Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu	bagi anak Perempuan. 9. Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa keterampilan digital, bagi perempuan. 10. Mendorong pembentukan dan penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat 11. Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	8. Memperluas akses pendidikan yang berkualitas, dengan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah bagi anak Perempuan. 9. Mendorong pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih dan fasilitas sanitasi di fasilitas publik dan sekolah, dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak. 10. Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa	pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. 8. Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa keterampilan digital, bagi perempuan. 9. Memberikan dukung perempuan dalam memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 10. Menghubungkan UMKM perempuan dengan pasar yang lebih luas, baik	oleh perempuan dan anak 7. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. 8. Memberikan dukung perempuan dalam memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 9. Menghubungkan UMKM perempuan dengan pasar yang lebih luas, baik daring maupun luring. 10. Melaksanakan gerakan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif 12. Bangun jejaring sistem rujukan antar lembaga agar korban Kekerasan perempuan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 13. Mengumpulkan dan menganalisis data secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia untuk	(UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif 12. Perkuat jejaring sistem rujukan antarlembaga agar korban Kekerasan perempuan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 13. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. 14. Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 15. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan,	keterampilan digital, bagi perempuan. 11. Memberikan dukung perempuan dalam memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 12. Menghubungkan UMKM perempuan dengan pasar yang lebih luas, baik daring maupun luring. 13. Melaksanakan gerakan kampanye kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi, siber) dan cara pencegahan. 14. Mendorong pembentukan dan	daring maupun luring. 11. Melaksanakan gerakan kampanye kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi, siber) dan cara pencegahan. 12. Penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat 13. Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah	kampanye kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi, siber) dan cara pencegahan. 11. Penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat 12. Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			mengidentifikasi kesenjangan gender dan merumuskan kebijakan yang tepat. 14. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. 15. Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	16. Pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang 17. Pemberdayaan perempuan, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, 18. Peningkatan partisipasi Perempuan di berbagai bidang pembangunan	penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat 15. Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif 16. Optimaliassi jejaring sistem rujukan antarlembaga agar korban Kekerasan perempuan	Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif 14. Optimasliasi jejaring sistem rujukan antar lembaga agar korban mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 15. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses penanganan kasus kekerasan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi	Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif 13. Bangun dan perkuat jejaring sistem rujukan antarlembaga agar korban mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 14. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses penanganan kasus kekerasan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 17. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. 18. Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	16. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. 17. Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	15. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. 16. Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
		Mendorong Terciptanya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1. Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian 3. Penyediaan sarana prasarana olahraga	1. Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian 3. Penyediaan sarana prasarana olahraga	1. Penguatan Sistem Pembinaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian 3. Pengembangan sarana prasarana olahraga	1. Penguatan Sistem Pembinaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian	1. Penguatan Sistem Pembinaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			4. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 5. Membangun sinergi organisas Olahraga 6. Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.	4. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 5. Membangun sinergi organisas Olahraga 6. Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.	4. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 5. Membangun sinergi organisas Olahraga 6. Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.	3. Pengembangan sarana prasarana olahraga 4. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 5. Membangun sinergi organisas Olahraga 6. Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.	3. Pengembangan sarana prasarana olahraga 4. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 5. Membangun sinergi organisas Olahraga 6. Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.
Misi 2. “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif”							
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Ekonomi Produktif	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan (Pertanian, Peternakan dan Perikanan)	1. identifikasi kebutuhan pelatihan bagi petani, peternak, dan perikanan. 2. Melaksanakan pelatihan secara intensif tentang praktik terbaik dalam budidaya, penggunaan	1. Membuat Pusat Pembelajaran Komunitas di tingkat desa yang dikelola oleh penyuluh. 2. Mempermudah akses pelaku usaha ke program kredit mikro atau pembiayaan dari perbankan	1. Mendorong pelaku usaha (pertanian, Peternakan dan Perikanan) untuk mengolah hasil mentah menjadi produk bernilai tambah 2. Jalin kemitraan strategis dengan sektor swasta guna	1. Fasilitasi pengurusan sertifikasi produk (misalnya, PIRT, BPOM) agar produk dapat masuk ke pasar yang lebih besar. 2. Mengembangkan "Agregator Lokal" yang dikelola oleh	1. Mendorong penggunaan teknologi Smart Farming atau Smart Fishery yang terjangkau untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			teknologi sederhana dan manajemen keuangan dasar. 3. Petakan dan perbaiki infrastruktur dasar untuk pertanian, peternakan dan perikanan 4. Mengumpulkan data akurat mengenai potensi lahan, jumlah populasi ternak, dan hasil perikanan. 5. Mendorong penggunaan teknologi modern pertanian, Perikanan dan Peternakan dan penggunaan bibit unggul. 6. Mempermudah akses petani	dengan bunga rendah 3. Perkenalkan aplikasi sederhana untuk pencatatan transaksi dan manajemen stok. 4. Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas 5. Mempermudah akses petani terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau, 6. Mendorong petani untuk asuransi pertanian dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen 7. Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan	menjamin ketersediaan pasar yang stabil dan harga yang lebih baik 3. pelatihan tentang pemasaran digital, mulai dari cara membuat foto produk yang menarik, branding produk lokal, hingga penggunaan media sosial untuk promosi. 4. Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas 5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di daerah 6. Mempermudah akses petani	komunitas atau BUMDes. Yang bertugas mengumpulkan produk dari para petani, peternak, dan nelayan, lalu mendis tribusikannya ke pasar yang lebih luas 3. Mengenbangkan platform penjualan online khusus untuk produk lokal atau bekerja sama dengan marketplace yang sudah ada untuk memperluas jangkauan pasar 4. Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas	2. Mendorong penggunaan model ekonomi sirkular yang memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai untuk mengurangi biaya produksi dan dampak lingkungan. 3. Membuat kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan bibit unggul, varietas tanaman yang tahan hama, atau teknik budidaya yang lebih efisien 4. Memperluas Pengembangan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau, 7. Mengarahkan petani untuk asuransi pertanian dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen 8. Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan		terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau. 7. Membangun infrastruktur pemasaran dan memfasilitasi akses petani ke pemasaran online 8. Memperkuat kelompok tani, koperasi pertanian, atau badan usaha milik petani lainnya 9. Mengarahkan petani untuk asuransi pertanian dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen 10. Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif	5. Memperkuat Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di daerah 6. Memperluas Kemudahan akses petani terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau, 7. Memperkuat kelompok tani, koperasi pertanian, atau badan usaha milik petani lainnya 8. Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan	industri pengolahan hasil pertanian di daerah 5. Memperluas Kemudahan akses petani terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau,

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
					dari alih fungsi lahan		
		Meningkatkan peran investasi terhadap ekonomi daerah	1. Penguatan dasar dan pondasi pelayanan perizinan dan Investasi 2. Pengembangan Kawasan Industri 3. Pembangunan infrastruktur dasar 4. Penataan kelembagaan dan konsolidas kebijakan 5. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi	1. Diversifikasi investasi di sektor teknologi, dan pariwisata, melalui insentif dan kebijakan investasi 2. Membentuk kemitraan strategis untuk menarik investasi. 3. Pengembangan kawasan pariwisata guna meningkatkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Perluasan Promosi dan Fasilitasi Investasi	1. Peningkatan Realisasi Persebaran Investasi 2. Optimalisasi pengembangan sektor industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian dan Perikanan 3. Mendoron Implementasi industri yang mengadopsi teknologi canggih 4. Peningkatan pembangunan fasilitas konektifitas wilayah ditetapkan untuk industry	1. Peningkatan Realisasi dan Persebaran Investasi 2. mendorong investasi yang ramah lingkungan dan penerapan teknologi energi terbarukan 3. Transformasi ekonomi berkelanjutan	1. Penguatan regulasi kebijakan dan efektivitas strategi yang diterapkan 2. Pengembangan rencana investasi jangka panjang berdasarkan perubahan dinamika pasar 3. Pengembangan pusat inovasi dan riset di bidang teknologi informasi untuk mendukung investasi jangka panjang

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
					5. Penguatan Inovasi Layanan dan Reformasi Birokrasi		
		Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro	1. Mendorong tim pemantau untuk mematau harga secara berkala. 2. Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan. 3. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain. 4. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna	1. Memperkuat tim pemantau untuk mematau harga secara berkala. 2. Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan. 3. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain. 4. Memperkuat koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna	1. Memperkuat tim pemantau untuk mematau harga secara berkala. 2. Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan. 3. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain. 4. Memperkuat koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna	1. Memaksimalkan tim pemantau untuk mematau harga secara berkala. 2. Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan. 3. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain. 4. Memaksimalkan koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi	1. Memaksimalkan tim pemantau untuk mematau harga secara berkala. 2. Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan. 3. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain. 4. Memaksimalkan koordinasi untuk mendapatkan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			menyusun kebijakan. 5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan birokrasi 6. Mendorong Kemudahan dan kecepatan proses perizinan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha 7. Mendorong Kawasan transmigrasi dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	menyusun kebijakan. 5. Fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dan keunggulan komparatif di daerah. 6. Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah 7. Mendorong adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor 8. Mendorong masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.	menyusun kebijakan. 5. Memperluas Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah 6. Memperkuat adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor 7. Memperluas Jangkauan masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal. 8. Memperluas akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pendampingan	terkini guna menyusun kebijakan. 5. Memperkuat Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah 6. Memperkuat adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor 7. Memperluas Jangkauan masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal. 8. Memperluas akses permodalan, pelatihan manajemen, dan	informasi inflasi terkini guna menyusun kebijakan. 5. Memaksimalkan Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah 6. Memaksimalkan adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor 7. Memaksimalkan Jangkauan masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal. 8. Memaksimalkan akses

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
				9. Memberikan akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pendampingan pemasaran bagi UMKM 10. Penetapan Kawasan Transmigrasi 11. Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema transmigrasi yang lebih fleksibel 12. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain 13. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna	pemasaran bagi UMKM 9. Pembangunan Kawasan Transmigrasi 10. Memperluas Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema	pendampingan pemasaran bagi UMKM 9. Pengembangan Kawasan Transmigras 10. Memperluas Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema	permodalan, pelatihan manajemen, dan pendampingan pemasaran bagi UMKM 9. Memaksimlakan Pengembangan Kawasan Transmigras 10. Memperluas Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
				menyusun kebijakan.			
		Menurunkan Angka Kemiskinan dan Penganguran	1. Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasanan yang memadai dan guru yang kompeten. 2. Menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. 3. Memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. 4. Memastikan seluruh masyarakat,	1. Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasanan yang memadai dan guru yang kompeten. 2. Menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. 3. Memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. 4. Memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok	1. Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasanan yang memadai dan guru yang kompeten. 2. Memperluas pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. 3. Memperluas beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. 4. Memastikan seluruh masyarakat,	1. Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasanan yang memadai dan guru yang kompeten. 2. Memperluas pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. 3. Memperluas beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. 4. Memastikan seluruh	1. Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasanan yang memadai dan guru yang kompeten. 2. Memaksimalkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. 3. Memperluas beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 5. Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. 6. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin. 7. Mendorong pelatihan kewirausahaan, akses permodalan,	miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 5. Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. 6. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin. 7. Memberikan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pendampingan bisnis, dan fasilitas	terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 5. Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. 6. Memperluas akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin. 7. Memperluas pelatihan kewirausahaan, akses permodalan,	masyarakat, terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 5. Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. 6. Memperluas akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani	anak-anak dari keluarga miskin. 4. Memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 5. Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. 6. Memperkuat akses terhadap sanitasi layak

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM. 8. Mendorong Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin. 9. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya	pemasaran bagi UMKM. 8. Mendorong Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin. 9. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas. 10. Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu	pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM. 8. Memperluas Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin. 9. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya	pengeluaran keluarga miskin. 7. Memperluas pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM. 8. Memperkuat Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan)	dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin. 7. Meningkatkan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM. 8. Meningkatkan Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			meningkatkan produktivitas. 10. Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi. 11. Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko. 12. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam	bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi. 11. Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko. 12. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. 13. Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan 14. Mengembangkan pusat informasi yang	meningkatkan produktivitas. 10. Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi. 11. Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko. 12. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam	sebagai investasi pada SDM keluarga miskin. 9. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas. 10. Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi. 11. Mendorong kepesertaan	tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin. 9. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas. 10. Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			menyerap tenaga kerja. 13. Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan 14. Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. 15. Mengadakan bursa kerja dan pameran karir 16. Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru. 17. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis	menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. 15. Mengadakan bursa kerja dan pameran karir 16. Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru. 17. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis 18. Mempermudah akses ke modal usaha 19. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang. 20. Adanya regulasi yang melindungi hak-hak	menyerap tenaga kerja. 13. Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan 14. Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. 15. Mengadakan bursa kerja dan pameran karir 16. Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru.	dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko. 12. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. 13. Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan	atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi. 11. Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko. 12. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			18. Mempermudah akses ke modal usaha 19. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang. 20. Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.	pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.	17. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis 18. Mempermudah akses ke modal usaha 19. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang. 20. Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.	14. Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. 15. Mengadakan bursa kerja dan pameran karir 16. Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru. 17. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis 18. Mempermudah akses ke modal usaha	13. Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan 14. Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. 15. Mengadakan bursa kerja dan pameran karir 16. Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
						19. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang. 20. Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.	17. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis 18. Mempermudah akses ke modal usaha 19. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang. 20. Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
		Meningkatkan Produktivitas	1. Mendorong pemanfaatan	1. Mendorong pemanfaatan media	1. Memperkuat pemanfaatan	1. Memperkuat pemanfaatan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
		UMKM dan BUMD	media sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk. 2. Mendorong Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan. 3. Mendorong pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik.	sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk. 2. Mendorong Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan. 3. Mendorong pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. 4. Memperluas pelatihan	media sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk. 2. Memperkuat Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan. 3. Memaksimalkan pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan membuat	media sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk. 2. Memperkuat Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan. 3. Memaksimalkan pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan	media sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk. 2. Memaksimalkan Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan. 3. Memaksimalkan pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			4. Memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM. 5. Mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Menyediakan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan bunga terjangkau. 7. Melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan	kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM. 5. Mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Memperluas penyediaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan bunga terjangkau. 7. Memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik untuk UMKM. 8. Melanjutkan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan	keputusan bisnis yang lebih baik. 4. Memperluas pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM. 5. Memperkuat pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Memperluas Penyediaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan bunga terjangkau.	membuat keputusan bisnis yang lebih baik. 4. Memaksimalkan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM. 5. Memperkuat pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Memperkuat Penyediaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan	pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. 4. Memaksimalkan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM. 5. Mengoptimalkan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Mengoptimalkan skema pembiayaan yang mudah

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. 8. Mendorong strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. 9. Mendorong kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi. 10. Menyediakan infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas	baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. 9. Memperkuat strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. 10. Memperluas kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi. 11. Memperkuat infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk membantu UMKM meningkatkan	7. Mengoptimalkan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. 8. Memperkuat strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. 9. Memperluas kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan	bunga terjangkau. 7. Memperkuat riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. 8. Mengoptimalkan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. 9. Memaksimalkan kemitraan dengan universitas, sektor industri,	diakses dan dengan bunga terjangkau. 7. Mengoptimalkan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. 8. Memaksimalkan kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi. 9. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			digital, untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 11. Melaksanakan deregulasi dan pengurangan birokrasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM. 12. Mendorong BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan. 13. Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja.	efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 12. Memperkuat BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan. 13. Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja. 14. Mengikutsertakan tenaga operasional dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan BUMD. 15. BUMD dapat menjadi pusat pertumbuhan UMKM lokal melalui fasilitasi pembiayaan,	kewirausahaan dan inovasi. 10. Memperluas infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 11. Melaksanakan deregulasi dan pengurangan birokrasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM. 12. Mendorong BUMD untuk fokus pada	BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi. 10. Memperluas infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 11. Melakukan evaluasi menyeluruh dan Identifikasi hal-hal yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar	membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 10. Melaksanakan deregulasi dan pengurangan birokrasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM. 11. Melakukan evaluasi menyeluruh dan Identifikasi hal-hal yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar atau tidak memberikan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			14. Mengikutsertakan tenaga operasional dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan BUMD. 15. BUMD dapat menjadi pusat pertumbuhan UMKM lokal melalui fasilitasi pembiayaan, pelatihan, dan integrasi dalam rantai pasok BUMD. 16. Mendukung kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki jaringan lebih luas atau	pelatihan, dan integrasi dalam rantai pasok BUMD. 16. Memaksimalkan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki jaringan lebih luas atau keahlian yang dapat meningkatkan daya saing BUMD. 17. Optimalisasi potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah.	produk atau layanan unggulan. 13. Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja. 14. Mengikutsertakan tenaga operasional dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan BUMD.	atau tidak memberikan kontribusi nyata, lalu lakukan revitalisasi (perbaikan). 12. Memperkuat BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan. 13. Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja.	kontribusi nyata, lalu lakukan revitalisasi (perbaikan). 12. Megoptimalkan BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			keahlian yang dapat meningkatkan daya saing BUMD. 17. Optimalisasi potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah.				
		Meningkatkan Perkembangan Desa (Tiyuh)	1. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh. 2. Mendorong pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.	1. Memperluas pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh. 2. Memperkuat pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.	1. Memperluas pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh. 2. Memperluas pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.	1. Mengoptimalkan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh. 2. Memaksimalkan pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.	1. Mengoptimalkan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh. 2. Memaksimalkan pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			3. Memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif. 4. Melakukan pemetaan potensi tiyuh dan mengembangkan produk unggulan tiyuh yang memiliki nilai jual tinggi dan daya saing. 5. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil,	3. Memberikan pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh. 4. Memperkuat edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif. 5. Fasilitasi akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun	3. Memperluas pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh. 4. Mengotimalkan edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif.	3. Memperkuat pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh. 4. Mengoptimalkan edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif.	3. Memaksimalkan pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh. 4. Memaksimalkan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta mendorong pembentukan kelompok usaha bersama. 6. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh harus memadai, hal ini untuk mobilitas barang, jasa, dan masyarakat. 7. Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh.	program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana desa. 6. Mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh 7. Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh. 8. Membangun atau memperbaiki fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh. 9. Memberikan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan,	5. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta mendorong pembentukan kelompok usaha bersama. 6. Memperluas akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana desa.	5. Memaksimalkan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta mendorong pembentukan kelompok usaha bersama. 6. Memperluas akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha	mendorong pembentukan kelompok usaha bersama. 5. Memperluas akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana desa. 6. Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh, 7. Memaksimalkan pembangunan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			8. Membangun fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh. 9. Memberikan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. 10. Memberikan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik.	pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. 10. Mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan. 11. Memperkuat pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik.	7. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh harus memadai, hal ini untuk mobilitas barang, jasa, dan masyarakat. 8. Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh. 9. Pengembangan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh. 10. Memperkuat edukasi dan melibatkan	Rakyat (KUR) atau dana desa. 7. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh harus memadai, hal ini untuk mobilitas barang, jasa, dan masyarakat. 8. Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh. 9. Mengembangkan fasilitas penunjang	fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh. 8. Mengoptimalkan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. 9. Memperkuat promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			11. Memberikan dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh. 12. Mendorong kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat. 13. Mempromosikan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antarwarga.	12. Memperkuat dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh. 13. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas dan daya tarik tiyuh. 14. Memperkuat promosi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antar warga.	masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. 11. Memperluas Promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan. 12. Memperkuat pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola	kegiatan ekonomi tiyuh. 10. Mengoptimalkan edukasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. 11. Memperkuat promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan.	kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan. 10. Mengoptimalkan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. 11. Memperkuat dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. 13. Memberikan dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh. 14. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas dan daya tarik tiyuh. 15. Mendorong kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat.	12. Mengoptimalkan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. 13. Memperkuat dukungan dalam pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh. 14. Memperluas pelestaarian nilai-nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas	penggerak ekonomi di tiyuh. 12. Memaksimalkan Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas dan daya tarik tiyuh. 13. Mengotimalkan kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
					16. Memperkuat promosi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antarwarga	dan daya tarik tiyuh.	
		Meningkatkan Standar Kehidupan Layak Masyarakat	1. Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau 2. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 3. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. 4. Mengembangkan program pendidikan vokasi yang relevan	1. Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau 2. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 3. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. 4. Mengembangkan program pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan	1. Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau 2. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 3. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. 4. Mengembangkan program pendidikan vokasi	1. Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau 2. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 3. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. 4. Mengembangkan program pendidikan vokasi	1. Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau 2. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 3. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. 4. Mengembangkan program pendidikan vokasi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional. 5. Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital. 6. Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit. 7. Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional 8. Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita, serta	pasar kerja lokal dan nasional. 5. Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital. 6. Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit. 7. Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional 8. Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.	yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional. 5. Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital. 6. Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit. 7. Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional 8. Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan	yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional. 5. Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital. 6. Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit. 7. Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional 8. Melaksanakan peningkatan gizi,	yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional. 5. Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital. 6. Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit. 7. Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 9. Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. 10. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 11. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.	9. Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. 10. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 11. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. 12. Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 9. Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. 10. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 9. Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. 10. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan	8. Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 9. Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. 10. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			12. Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 13. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan. 14. Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan 15. Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta	13. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan. 14. Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan 15. Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim. 16. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. 17. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan	11. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. 12. Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 13. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan. 14. Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan 15. Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur	Menengah (UMKM). 11. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. 12. Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 13. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan. 14. Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan	kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 11. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. 12. Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 13. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan. 14. Memberikan program pemberdayaan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			dampak perubahan iklim. 16. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. 17. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 18. Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.	perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.	untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim. 16. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. 17. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.	15. Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim. 16. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. 17. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Memastikan penegakan hukum	khusus bagi kelompok rentan 15. Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim. 16. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. 17. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
						yang adil dan konsisten.	Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.
	Misi 3 : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif						
	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Asas, dan Kolaboratif	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	1. Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparatur sipil negara (ASN) dan petugas layanan publik mengenai standar pelayanan, etika pelayanan, komunikasi efektif, manajemen keluhan, dan penggunaan teknologi terbaru. 2. Menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat	1. Pelatihan bagi petugas untuk memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan bidang layananya 2. Memperkuat penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran. 3. Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi	1. Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparatur sipil negara (ASN) dan petugas layanan publik mengenai standar pelayanan, etika pelayanan, komunikasi efektif, manajemen keluhan, dan penggunaan teknologi terbaru. 2. Memperkuat penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan	1. Pelatihan bagi petugas untuk memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan bidang layananya 2. Mengoptimalkan penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran. 3. Memberikan apresiasi bagi	1. Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparatur sipil negara (ASN) dan petugas layanan publik mengenai standar pelayanan, etika pelayanan, komunikasi efektif, manajemen keluhan, dan penggunaan teknologi terbaru. 2. Mengoptimalkan penanaman nilai-nilai

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran. 3. Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan 4. Penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status. 5. Mempergunakan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami	peningkatan kualitas pelayanan 4. Memperluas penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status. 5. Memperkuat penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami kebutuhan masyarakat 6. Mengimplementasikan konsep e-government secara menyeluruh, mencakup semua	internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran. 3. Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan 4. Memperluas penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status. 5. Memperkuat Penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan,	petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan 4. Memaksimalkan penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status. 5. Menghubungkan berbagai sistem dan data antar instansi untuk mempermudah proses layanan, menghindari duplikasi data, dan mempercepat alur kerja	integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran. 3. Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan 4. Memaksimalkan Penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			kebutuhan masyarakat 6. Mendorong Implementasi konsep e-government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir, 7. Mengkaji ulang dan Menyederhanakan peraturan serta prosedur yang berbelit-belit atau tumpang tindih 8. Tersedianya SOP layanan yang mudah dipahami, dan dapat diakses oleh public 9. menyediakan berbagai saluran pengaduan yang	aspek layanan publik dari hulu ke hilir, 7. Mengkaji ulang dan Menyederhanakan peraturan serta prosedur yang berbelit-belit atau tumpang tindih 8. Tersedianya SOP layanan yang mudah dipahami, dan dapat diakses oleh public 9. Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik) untuk berbagai jenis layanan 10. menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 11. Melakukan survei kepuasan	mengidentifikasi hambatan, dan memahami kebutuhan masyarakat 6. Mengimplementasikan konsep e-government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir, 7. Mengkaji ulang dan Menyederhanakan peraturan serta prosedur yang berbelit-belit atau tumpang tindih 8. Tersedianya SOP layanan yang mudah, transparan, dan dapat diakses oleh public	6. Mengotimalkan penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami kebutuhan masyarakat 7. Memperluas implementasi konsep e-government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir, 8. Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik)	pengajuan layanan, informasi, dan tracking status. 5. Memaksimalkan keterhubungan berbagai sistem dan data antar instansi untuk mempermudah proses layanan, menghindari duplikasi data, dan mempercepat alur kerja 6. Mengoptimalkan penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			mudah diakses dan responsive 10. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala 11. Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia 12. Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh	masyarakat secara berkala 12. Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia 13. Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh	9. Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik) untuk berbagai jenis layanan 10. Memastikan semua informasi terkait layanan mudah diakses melalui berbagai media 11. menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 12. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala 13. Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah	untuk berbagai jenis layanan 9. Memastikan semua informasi terkait layanan mudah diakses melalui berbagai media 10. menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 11. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala 12. Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia 13. Menjaga keamanan area	kebutuhan masyarakat 7. Mengoptimalkan Implementasi konsep e-government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir, 8. Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik) untuk berbagai jenis layanan 9. Memastikan semua informasi terkait layanan mudah diakses

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
					disabilitas dan lansia 14. Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh	pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh	melalui berbagai media 10. menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 11. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala 12. Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia 13. Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1. Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah. 2. Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public 3. Mendorong pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time 4. Memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat 5. Menyelenggarakan forum atau	1. Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah. 2. Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public 3. Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time 4. memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat 5. Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat,	1. Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah. 2. Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public 3. Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time 4. memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat 5. Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang	1. Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah. 2. Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public 3. Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time 4. memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat	1. Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah. 2. Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public 3. Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time 4. memfasilitasi interaksi dua arah antara

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan, 6. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 7. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan 8. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam berpartisipasi dan mengawasi kinerja pemerintah daerah	termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan, 6. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 7. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan 8. Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran 9. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh aparatur pemerintah daerah mengenai manajemen keuangan publik, pengadaan barang	melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan, 6. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 7. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan 8. Meningkatkan kapasitas dan independensi Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal 9. Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam	5. Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan, 6. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 7. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan 8. Meningkatkan kapasitas dan independensi Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal	pemerintah dan masyarakat 5. Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan, 6. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 7. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan 8. Meningkatkan kapasitas dan independensi Inspektorat

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			9. Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran 10. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh aparatur pemerintah daerah mengenai manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, etika pemerintahan, dan regulasi terkait akuntabilitas 11. Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan	dan jasa, etika pemerintahan, dan regulasi terkait akuntabilitas 10. Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi. 11. Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi. 12. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan	fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran 10. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh aparatur pemerintah daerah mengenai manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, etika pemerintahan, dan regulasi terkait akuntabilitas 11. Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi.	9. Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran 10. Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi. 11. Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan	Daerah sebagai pengawas internal 9. Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran 10. Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi. 11. Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi. 12. Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi. 13. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu. 14. Menerapkan sistem pengadaan barang	keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu. 13. Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi. 14. Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen	12. Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi. 13. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu. 14. Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan	indikator yang dapat diverifikasi. 12. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu. 13. Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi. 14. Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit	setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi. 12. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu. 13. Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi. 15. Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen		meningkatkan efisiensi. 15. Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen	eksternal yang independen	potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi. 14. Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen
Misi 4 "Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya"							
	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum	1. Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum	1. Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari	1. Mengoptimalkan kegiatan Siskamling 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari	1. Mengoptimalkan kegiatan Siskamling 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			3. Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini 5. Mendorong terbangunnya koordinasi yang erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh	3. Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini 5. Mengajak pihak keamanan untuk patroli rutin, sambang warga, di titik-titik rawan kejahatan 6. Membangun koordinasi yang erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan,	pelanggaran hukum 3. Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini 5. Mengajak pihak keamanan untuk patroli rutin, sambang warga, di titik-titik rawan kejahatan 6. Meningkatkan koordinasi yang	pelanggaran hukum 3. Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini 5. Mengajak pihak keamanan untuk patroli rutin, sambang warga, di titik-titik rawan kejahatan	konsekuensi dari pelanggaran hukum 3. Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini 5. Mengoptimalkan koordinasi yang erat antara Polri,

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Kamtibmas 6. Mengatasi akar masalah kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial 7. Melakukan penataan kota dan lingkungan yang aman 8. Mendorong Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas 9. Mengembangkan sistem deteksi dini untuk	pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Kamtibmas 7. Mengatasi akar masalah kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial 8. Melakukan penataan kota dan lingkungan yang aman 9. Pemerintah daerah membuat peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas 10. Mengembangkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi	erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Kamtibmas 7. Mengatasi akar masalah kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial 8. Melakukan penataan kota dan lingkungan yang aman 9. Menguatkan peraturan daerah	6. Mengoptimalkan koordinasi yang erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Kamtibmas 7. Menguatkan peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas 8. Meningkatkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi konflik	TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Kamtibmas 6. mengoptimalkan peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas 7. Mengoptimalkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi konflik

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			mengidentifikasi potensi konflik sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu 10. Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat.	potensi konflik sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu 11. Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat.	(Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas 10. Meningkatkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi konflik sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu 11. Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat.	sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu 9. Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat.	sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu 8. Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat.
		Meningkat Kebudayaan di Masyarakat	1. Memastikan kebijakan di sektor lain selaras dan mendukung tujuan	1. Memastikan kebijakan di sektor lain selaras dan mendukung tujuan	1. Memastikan kebijakan di sektor lain selaras dan mendukung	1. Melakukan Revisi peraturan daerah terkait kebudayaan agar	1. Melakukan Revisi peraturan daerah terkait kebudayaan agar

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			pembangunan kebudayaan 2. Mengkaji undang-undang serta peraturan Daerah terkait kebudayaan 3. Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif 4. Melakukan pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi sistematis terhadap seluruh warisan budaya, baik benda maupun tak benda 5. Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal	pembangunan kebudayaan 2. Mengkaji undang-undang serta peraturan daerah terkait kebudayaan 3. Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif 4. Melakukan pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi sistematis terhadap seluruh warisan budaya, baik benda maupun tak benda 5. Mengadakan pelatihan dan magang untuk generasi muda agar	tujuan pembangunan kebudayaan 2. Mendorong Revisi peraturan Daerah terkait kebudayaan agar lebih relevan dengan tantangan 3. Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif 4. Melakukan pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi sistematis terhadap seluruh warisan budaya,	lebih relevan dengan tantangan 2. Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif 3. Melakukan upaya konservasi dan restorasi terhadap situs-situs bersejarah, bangunan cagar budaya 4. Mengadakan pelatihan dan magang untuk generasi muda agar dapat mempelajari dan	lebih relevan dengan tantangan 2. Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif 3. Melakukan upaya konservasi dan restorasi terhadap situs-situs bersejarah, bangunan cagar budaya 4. Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			sebagai penjaga utama warisan budaya 6. Menyediakan ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi. 7. Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya-karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional	dapat mempelajari dan mewarisi keterampilan tradisional 6. Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya 7. Menyediakan ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi. 8. Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya-karya kebudayaan dan	baik benda maupun tak benda 5. Melakukan upaya konservasi dan restorasi terhadap situs-situs bersejarah, bangunan cagar budaya 6. Mengadakan pelatihan dan magang untuk generasi muda agar dapat mempelajari dan mewarisi keterampilan tradisional 7. Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya	mewarisi keterampilan tradisional 5. Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya 6. Memelihara ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi. 7. Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan	5. Memelihara ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi. 6. Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya-karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			8. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif, 9. Mengembangkan program-program pendidikan kebudayaan melalui sanggar, komunitas, perpustakaan, museum, dan media massa 10. Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan 11. Mendukung adanya penelitian ilmiah di	produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional 9. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif, 10. Mengadakan festival budaya, pameran seni, pertunjukan, dan kampanye promosi yang efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya 11. Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan	8. Memelihara ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi. 9. Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya-karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional 10. Melakukan pelatihan dan	pemasaran karya-karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional 8. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif, 9. Mengadakan festival budaya, pameran seni, pertunjukan, dan kampanye promosi yang efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya 10. Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis	7. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif, 8. Mengembangkan program-program pendidikan kebudayaan melalui sanggar, komunitas, perpustakaan, museum, dan media massa 9. Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			bidang kebudayaan untuk menghasilkan pengetahuan baru 12. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan 13. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, komunitas (seniman, budayawan), swasta, dan media massa 14. Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas	12. Mendukung adanya penelitian ilmiah di bidang kebudayaan untuk menghasilkan pengetahuan baru 13. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan 14. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, komunitas (seniman, budayawan), swasta, dan media massa 15. Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas	pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif, 11. Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan 12. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan 13. Membangun kemitraan	digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan 11. Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas budaya di berbagai wilayah Kabupaten	10. Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas budaya di berbagai wilayah Kabupaten

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			budaya di berbagai wilayah Kabupaten	budaya di berbagai wilayah Kabupaten	strategis antara pemerintah, akademisi, komunitas (seniman, budayawan), swasta, dan media massa 14. Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas budaya di berbagai wilayah Kabupaten		
Misi Ke-5 "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan"							
	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang merata dengan	Meningkatkan Infrastruktur Daerah	1. Melakukan survei dan analisis kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah secara detail,	1. Melakukan survei dan analisis kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah secara detail, berdasarkan	1. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi	1. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi	1. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	memperhatikan keberlanjutan.		berdasarkan data demografi, potensi ekonomi, dan kondisi geografis, unruk prioritaskan pembangunan yang paling mendesak dan berdampak luas 2. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang daerah 3. Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) an dampak sosial 4. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan	data demografi, potensi ekonomi, dan kondisi geografis, untuk prioritaskan pembangunan yang paling mendesak dan berdampak luas 2. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang daerah 3. Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) an dampak sosial 4. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur 5. Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai	dengan tata ruang daerah 2. Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) an dampak sosial 3. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur 4. Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif 5. Memaksimalkan penyerapan dana	dengan tata ruang daerah 2. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur 3. Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif 4. Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk	dengan tata ruang daerah 2. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur 3. Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah 4. Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional,

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			pemeliharaan nfrastruktur 5. Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah 6. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur. 7. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien,	alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif 6. Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah 7. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur.	transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah 6. Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional, organisasi nirlaba, untuk proyek-proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan. 7. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait	infrastruktur daerah 5. Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional, organisasi nirlaba, untuk proyek-proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan. 6. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas 7. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur 8. Memperkuat sistem pengawasan	organisasi nirlaba, untuk proyek-proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan. 5. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas 6. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur 7. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas,

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			cepat, dan berkualitas 8. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur 9. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 10. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil	8. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas 9. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur 10. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 11. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil	dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur. 8. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas 9. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur 10. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu,	internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 9. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil 10. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-	ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 8. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil 9. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			11. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur. 12. Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur daerah 13. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya infrastruktur, cara memelihara, dan manfaatnya bagi perekonomian lokal	12. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur. 13. Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur daerah 14. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya infrastruktur, cara memelihara, dan manfaatnya bagi perekonomian lokal 15. Merancang dan membangun	dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 11. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil 12. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul	isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur. 11. Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur daerah 12. Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 13. Prioritaskan pembangunan	lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur. 10. Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur daerah 11. Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 12. Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			14. Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 15. Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan 16. Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.	infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 16. Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan 17. Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.	dari pembangunan infrastruktur. 13. Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur daerah 14. Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 15. Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan 16. Tingkatkan ketersediaan infrastruktur digital (jaringan	infrastruktur yang ramah lingkungan 14. Tingkatkan ketersediaan infrastruktur digital (jaringan internet, fiber optic) untuk mendukung ekonomi dan konektivitas masyarakat. 15. Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.	13. Tingkatkan ketersediaan infrastruktur digital (jaringan internet, fiber optic) untuk mendukung ekonomi dan konektivitas masyarakat. 14. Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
					internet, fiber optic) untuk mendukung ekonomi dan konektivitas masyarakat. 17. Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.		
		Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Bersih dan Permukiman	1. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jaringan irigasi yang ada (primer, sekunder, tersier) 2. Membangun Sistem Penyediaan Air	1. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jaringan irigasi yang ada (primer, sekunder, tersier) 2. Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada	1. Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada jaringan yang rusak khususnya di area potensial 2. Integrasikan pompa air bertenaga surya	1. Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada jaringan yang rusak khususnya di area potensial 2. Integrasikan pompa air bertenaga surya	1. Integrasikan pompa air bertenaga surya atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada 3. Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri. 4. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak. 5. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan	jaringan yang rusak khususnya di area potensial 3. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada 4. Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri. 5. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak. 6. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata	atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik 3. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada 4. Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah-daerah yang belum terlayani 5. Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri.	atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik 3. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada 4. Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah-daerah yang belum terlayani 5. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan	2. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada 3. Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah-daerah yang belum terlayani 4. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak. 5. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh 6. Melaksanakan program penataan kawasan kumuh secara terpadu 7. Identifikasi dan menyediakan lahan yang terjangkau untuk pembangunan permukiman layak huni 8. Mendorong P3A untuk menyusun dan menegakkan aturan lokal tentang pembagian air yang adil dan berkelanjutan 9. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan	Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh 7. Melaksanakan program penataan kawasan kumuh secara terpadu 8. Identifikasi dan menyediakan lahan yang terjangkau untuk pembangunan permukiman layak huni 9. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan bertanggung jawab	6. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak. 7. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh 8. Melaksanakan program penataan	sanitasi yang layak. 6. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh 7. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan	(RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh 6. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 7. Melaksanakan pelatihan manajemen,

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 10. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang 11. Melakukan penanaman kembali hutan di daerah hulu dan tangkapan air 12. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air.	10. Mendorong P3A untuk menyusun dan menegakkan aturan lokal tentang pembagian air yang adil dan berkelanjutan 11. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 12. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang 13. Melakukan penanaman kembali	kawasan kumuh secara terpadu 9. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan bertanggung jawab 10. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 11. Melaksanakan pelatihan	bertanggung jawab 8. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 9. Melaksanakan pelatihan manajemen, operasional, dan keuangan 10. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah	operasional, dan keuangan 8. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang 9. Melakukan penanaman kembali hutan di daerah hulu dan tangkapan air untuk menjaga ketersediaan air. 10. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			13. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih. 14. Mendorong pembentukan komite atau kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih di tingkat lokal 15. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses	hutan di daerah hulu dan tangkapan air 14. Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan 15. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air. 16. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih. 17. Mendorong pembentukan komite atau kelompok	manajemen, operasional, dan keuangan 12. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang 13. Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan 14. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat	pelanggaran tata ruang 11. Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan 12. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air. 13. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan	tanam dan penggunaan air. 11. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih. 12. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			dan kualitas layanan permukiman.	masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih di tingkat lokal 18. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman.	untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air. 15. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih. 16. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman.	pengawasan proyek air bersih. 14. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman.	

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meninjau ulang dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup agar lebih responsif terhadap isu-isu terkini, seperti perubahan iklim, polusi plastik, dan tata kelola sumber daya alam. 2. Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu 3. Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami 4. Melindungi daerah aliran sungai (DAS)	1. Meninjau ulang dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup agar lebih responsif terhadap isu-isu terkini, seperti perubahan iklim, polusi plastik, dan tata kelola sumber daya alam. 2. Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu 3. Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan	1. Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu 2. Mengoptimalkan sistem perizinan yang berbasis risiko untuk kegiatan usaha 3. Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan 4. Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami	1. Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu 2. Mengoptimalkan sistem perizinan yang berbasis risiko untuk kegiatan usaha 3. Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan 4. Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami	1. Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu 2. Mengoptimalkan sistem perizinan yang berbasis risiko untuk kegiatan usaha 3. Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan 4. Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			dan mengendalikan pencemaran air. 5. Mendorong praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air. 6. Mendorong industri untuk mengadopsi teknologi bersih dan praktik produksi yang lebih efisien 7. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif 8. Mendorong operasional bank sampah 9. Memperketat pengawasan	4. Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami 5. Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air. 6. Memperkuat praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air. 7. Mendorong industri untuk mengadopsi teknologi bersih dan praktik produksi yang lebih efisien 8. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif	5. Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air. 6. Memperkuat praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air. 7. Mendorong industri untuk mengadopsi teknologi bersih dan praktik produksi yang lebih efisien 8. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse,	5. Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air. 6. Optimalisasi praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air. 7. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif 8. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah modern	5. Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air. 6. Optimalisasi praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air. 7. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif 8. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah modern

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas kesehatan 10. Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui 11. Melakukan kampanye tentang isu-isu lingkungan, seperti bahaya sampah plastik, pentingnya konservasi, dan gaya hidup berkelanjutan, melalui berbagai media 12. Mendorong penggunaan energi terbarukan,	9. Mendorong operasional bank sampah 10. Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan 11. Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui 12. Melakukan kampanye tentang isu-isu lingkungan, seperti bahaya sampah plastik, pentingnya konservasi, dan gaya hidup berkelanjutan, melalui berbagai media 13. Meningkatkan pemahaman	Recycle) secara massif 9. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah modern 10. Memperkuat operasional bank sampah 11. Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan 12. Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui	9. Memperkuat operasional bank sampah 10. Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan 11. Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui 12. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan	9. Mengotimalkan operasional bank sampah 10. Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan 11. Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui 12. Membangun dan mengoptimalkan sistem pemantauan kualitas lingkungan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
			teknologi pengolahan limbah, dan inovasi dalam efisiensi energi di berbagai sektor. 13. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan.	masyarakat tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pentingnya tindakan individu maupun kolektif. 14. Mendorong penggunaan energi terbarukan, teknologi pengolahan limbah, dan inovasi dalam efisiensi energi di berbagai sektor. 15. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan.	13. Melakukan kampanye tentang isu-isu lingkungan, seperti bahaya sampah plastik, pentingnya konservasi, dan gaya hidup berkelanjutan, melalui berbagai media 14. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pentingnya tindakan individu maupun kolektif. 15. Mendorong penggunaan energi terbarukan, teknologi	pentingnya tindakan individu maupun kolektif. 13. Membangun dan mengoptimalkan sistem pemantauan kualitas lingkungan dengasn berbasis teknologi. 14. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan	dengasn berbasis teknologi. 13. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan. 14. Mencari dan memanfaatkan bantuan teknis dan finansial dari negara atau lembaga donor

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
				16. Mencari dan memanfaatkan bantuan teknis dan finansial dari negara atau lembaga donor untuk program lingkungan.	pengolahan limbah, dan inovasi dalam efisiensi energi di berbagai sektor. 16. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan.	program lingkungan. 15. Mencari dan memanfaatkan bantuan teknis dan finansial dari negara atau lembaga donor untuk program lingkungan.	untuk program lingkungan.

3.2.3. Program Prioritas

Implementasi pelaksanaan dari strategi yang telah disusun secara bertahap adalah melalui Program Perangkat Daerah khususnya Program Prioritas yang mana Program Prioritas merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dijadikan instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

Program prioritas daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029, adapun untuk penjabaran tujuan, sasaran serta program prioritas ditampilkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Visi : Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju					
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan					
Sumber Daya Manusia Tulang Bawang Barat semakin berkualitas, Inovatif dan Berdaya Saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
			Prevalensi Stunting		
			Cakupan Kepesertaan JKN (%)		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ANC Minimal 6 Kali (K6)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Anti Gen		
			Cakupan Penemuan Kasus TBC		
			Angka Keberhasilan Pengobatan TBC		

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Cakupan Keaktifan Kepesertaan JKN		
			Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal		
			Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		
			Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terkreditasi		
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah angka kelahiran ternak sapi (ekor)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persntase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			yang Tepenuhi Kebutuhan Dasarnya serta Meningkatn ya Fungsi Sosial		
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Dirumuskan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		
			Harapan Lama Sekolah (tahun)		
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Apk PAUD (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APK SD/MI/Paket A (%)		
			APK SMP/MTs/PAKET B (%)		
			APM SD/MI/Paket A (%)		

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			APM SMP/MTs/PAKET B(%)		
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indek pemerataan guru	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik		
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Meningkanya Iptek dan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah (IID)		
		Meningkatnya fasilitasi,pembinaan,bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dlan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	Meningkatnya akses layanan keluarga berencana, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, anak serta kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
			Indeks Perlindungan anak		
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran,perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persetase Korban Kekerasan Pada Anak Yang Mendapat Pelayanan dan Pendampingan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
Misi 2 : Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif					
Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah		Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan		
			Rasio PDRB Industri Pengolahan		
			Rasio PDRB Perdaganagan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
			Pertumbuhan Investasi (%)		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
			Peningkatan Produksi Hortikultura		
			Peningkatan Produksi Perkebunan		
		Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
			Persentase		

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase kelompok yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Persentase kelompok yang menerapkan manajemen pakan yang baik(%)		
			Persentase kelompok yang mengalami peningkatan produksi dan produktivitas ternak (%)		
			Jumlah angka kelahiran ternak sapi (ekor)		
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakana dan Kesehatan Hewan
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Persentase unit usaha pengolahan/ penjualan yang menghasilkan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH		
		Meningkatnaya produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Yang Diberdayakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
		Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah Kelompok Pokmaswas Yang Di Bina	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnya kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
	Terjaganya stabilitas Ekonomi Makro Daerah		Tingkat Inflasi *)		
			PDRB Perkapita		
			Rasio Gini		
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan Holtikutura dan Perkebunan
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase unit usaha pengolahan/ penjualan yang menghasilkan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan
			Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura		
			Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Nelayan Yang di Berdayakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnaya produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Yang Diberdayakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah Poklahsar Yang Diberdayakan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Dirumuskan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya kualitas	Persentase Luas	PROGRAM PEMBANGUNAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		pembangunan kawasan transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	KAWASAN TRANSMIGRASI	
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRAS	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Menurunnya Kemiskinan dan angka penganguran		Tingkat Kemiskinan		
			Kemiskinan Ekstrim		
			Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
		Menigkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
					Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Nelayan Yang di Berdayakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
		Meningkatnaya produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Yang Diberdayakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
			Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura		
			Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan		
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Anti Gen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Cakupan Keaktifan Kepesertaan JKN		
			Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Kemantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik dan bermanfaat bagi masyarakat TUBABA	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang berizin sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Memperoleh Rumah Layak Huni		
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
		Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persntase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepenuhi Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			serta Meningkatnya Fungsi Sosial		
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam,Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
		Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
	Meningkatnya Produktivitas UMKM dan BUMD		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kabupaten (%)		
			Return on aset (ROA) BUMD (%)		
			Rasio Kewirausahaan Daerah		

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NDUSTRI	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatanya hubungan pekerja dan perusahaan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Meningatnya perkembangan Desa (Tiyuh)		Persentase Desa Mandiri (%)		
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
		Menigkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				MASYARAKAT HUKUM ADAT	
Misi 3 : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif					
Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Akuntabel dan Transparan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Hukum		
			Indeks Integritas Nasional (hasil Survei Penilaian Integritas Oleh KPK)		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
			Indeks Pelayanan Publik		
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)		
		Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Seluruh Perangkat Daerah
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Cakupan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dirumuskan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Pengurangan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (n-1)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan aplikasi umum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh Kecamatan
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran, Kematian, Pernikahan dan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Pravelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP		
			Opini BPK		
			Maturitas SPIP		
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)		
		Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Seluruh Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
		Pengurangan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (n-1)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
			Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik		
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Cakupan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dirumuskan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
Misi 4 : Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya					
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, dan berbudaya	Meningkatya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		Tingkat Kriminalitas (Rasio)		
			Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah)		
			Indeks Risiko Bencana (IRB)		
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)		
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase berkurangnya gangguan ketenteraman masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Menigkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan		Persentase Kelompok Seni Yang Aktif Terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun Terakhir		
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pendidikan dan Kebiudayaan

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
		Menigkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan					
Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Infrastruktur		Persentase Jalan Mantap Kabupaten		
			Pesentase Panjang Jalan Yang Dilengkapi Fasilitas Keselamata		
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Kemantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Minum dan Permukiman		Persentase Luas Sawah Beririgasi		
			Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Aman		
			Persentase Rumah Layak Huni di Tangani		
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik dan bermanfaat bagi masyarakat TUBABA	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Mayarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	Hidup		(IKLH)		
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi/Misi/Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.2.4. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan dengan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025–2029 secara substantif telah mengakomodasi arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional tahun 2025–2029. Keselarasan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung sasaran provinsi dan nasional melalui pendekatan pembangunan wilayah yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari koridor Sumatera dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan RPJMN, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Lampung, dimana provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan sentra pangan nasional, hilirisasi komoditas unggulan, serta konektivitas antar wilayah. Strategi pembangunan dalam RPJMD diarahkan untuk mendorong transformasi struktural di kawasan pedesaan dan pesisir, peningkatan nilai tambah komoditas berbasis sumber daya lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk.

Di sisi lain, pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dalam RPJMD juga sejalan dengan prinsip RPJMN yaitu penguatan konektivitas untuk pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta percepatan pembangunan wilayah. Penataan ruang, pengembangan kawasan strategis provinsi di Kabupaten, serta integrasi pembangunan perkotaan dan perdesaan menjadi elemen utama dalam mewujudkan struktur wilayah yang produktif, inklusif, dan resilien. Secara teknokratik, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadopsi pendekatan tematik-holistik-integratif-spasial (THIS), serta memastikan bahwa program prioritas daerah memberikan kontribusi langsung terhadap target provinsi dan nasional, hal ini tercermin melalui penyelarasan target makro, peta kebijakan sektoral dan kewilayahan, serta sinergi lintas perangkat daerah dan lintas wilayah.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari orkestrasi pembangunan provinsi dan nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan wilayah Lampung sebagai wilayah yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global dan dinamika domestic yang didalamnya ada wilayah Kabuipaten Tulang Bawang Barat. Berikut Tabel Keselarasan Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Tebel 3.15
Keselarasan Stratetgi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 dengan Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029.

No	RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat		Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional
	Arah Kebijakan	Strategi	
1	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dengan Memperhatikan Keberlanjutan	1. Melakukan survei dan analisis kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah secara detail, berdasarkan data demografi, potensi ekonomi, dan kondisi geografis, kemudiam prioritaskan pembangunan yang paling mendesak dan berdampak luas. 2. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang daerah (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW) untuk mencegah pembangunan yang tidak teratur dan memaksimalkan efisiensi lahan. 3. Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan dampak sosial, untuk meminimalkan risiko negatif dan memastikan keberlanjutan proyek. 4. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta memastikan seefisien mungkin penggunaan anggaran. 5. Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif yang memiliki prospek pengembalian investasi. 6. Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah	**RPJMD Provinsi Lampung** Klaster II diarahkan sebagai Koridor Wilayah 2 Wilayah Pengembangan (WP): Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji. Arahan Pembangunan: Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Mulya Asri

No	RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat		Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional
	Arah Kebijakan	Strategi	
		7. Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional, organisasi nirlaba, untuk proyek-proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan. 8. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur. 9. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas 10. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 11. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 12. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil, dan membangun rasa kepemilikan terhadap proyek. 13. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur. 14. Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam.	

No	RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat		Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional
	Arah Kebijakan	**Strategi**	
2	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dengan Memperhatikan Keberlanjutan	1. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jaringan irigasi yang ada (primer, sekunder, tersier) untuk mengidentifikasi kerusakan, kebocoran, atau inefisiensi. 2. Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada jaringan yang rusak khususnya di area potensial. 3. Integrasikan pompa air bertenaga surya atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik. 4. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada. 5. Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah-daerah yang belum terlayani, termasuk permukiman padat penduduk dan daerah terpencil. 6. Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri. 7. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak. 8. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh. 9. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan bertanggung jawab. 10. Mendorong P3A untuk menyusun dan menegakkan aturan lokal tentang pembagian air yang adil dan berkelanjutan.	**RPJM Nasional** 1. Kawasan pengembangan perkotaan Menggala – Lampung yaitu Peningkatan tipe Rumah Sakit dari Tipe D ke Tipe C untuk RS. Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala) 2. Kawasan Swasembada Pangan dan Air, Mesuji – Tulang Bawang • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan / pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri. • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri.

No	RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat		Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional
	Arah Kebijakan	Strategi	
		11. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 12. Melaksanakan pelatihan manajemen, operasional, dan keuangan kepada pengelola air bersih (PDAM, BUMDes, atau kelompok masyarakat). 13. Sederhanakan proses perizinan untuk pembangunan dan pengelolaan SPAM. 14. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang. 15. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan merawat fasilitas umum. 16. Melakukan penanaman kembali hutan di daerah hulu dan tangkapan air untuk menjaga ketersediaan air. 17. Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan. 18. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air. 19. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih. 20. Mendorong pembentukan komite atau kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih di tingkat lokal.	• Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian. • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani

No	RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat		Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional
	Arah Kebijakan	Strategi	
		21. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman.	

Selanjutnya dari penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembanguan kewilayahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tertera pada RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029 ada program – program yang diampu oleh perangkat daerah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan kewilayahan tersebut, sebagai mana disajikan dalam mastrik tabel 3.16 dibawah ini.

Tebel 3.16
Program – Program Dalam Mendukung Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional.

Pembangunan Kewilayah	Program – Program	Perangkat Daerah Pengampu
RPJMD Provinsi Lampung Klaster II diarahkan sebagai Koridor Wilayah 2 Wilayah Pengembangan (WP): Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji. Arahan Pembangunan: Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Mulya Asri	1. Program Pengelolaan Sumberdaya Air 2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 4. Program Pengembangan UMKM 5. Proggram Perencanaan dan Pembangunan Industri 6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 7. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 8. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 9. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 10. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 11. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 12. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 13. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan 4. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Ketahanan Pangan 8. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan perkebunan 9. Dinas Peternakan dan Keshetan Hewan.
RPJM Nasional 1. Kawasan pengembangan perkotaan Menggala – Lampung yaitu Peningkatan tipe Rumah Sakit dari Tipe D ke Tipe C untuk RS. Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala) 2. Kawasan Swasembada Pangan dan Air, Mesuji – Tulang Bawang		

Pembangunan Kewilayah	Program – Program	Perangkat Daerah Pengampu
	14. Program Penyuluhan Pertanian 15. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

1.2.5. Penyelarasan Sasaram RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta memperkuat sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Keselarasan ini menjadi landasan strategis agar pembangunan di Tubaba mampu menjawab tantangan lokal sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Pada tingkat nasional arah kebijakan Pembangunan wilayah dalam RPJMN 2025 – 2029 dengan tujuan mengoptimalkan peran dan fungsi wilayah Lampung sebagai bagian dari Kawasan strategi nasional di Pulau Sumatera, yang diselerasakan oleh Provinsi Lampung dengan diwujudkan melalui dukungan terhadap pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, danintegrasi Kawasan hinterland dengan pusat kegiatan ekonomi nasional. Kedua Arah kebijakan tersebut diseleraskan oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mendukung Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi dengan strategi menjaga ketersedia pangan dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan peningkatan fungsi saluran irigasi. Dengan demikian, pembangunan kewilayahan Kabupaten Tubaba dalam RPJMD 2025–2029 tidak hanya bersifat lokal dan parsial, tetapi dirancang secara integratif agar selaras dan saling mendukung dengan kebijakan pembangunan Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Keselarasan ini diyakini akan memperkuat daya saing wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan visi pembangunan Tubaba sebagai kabupaten yang “Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif, dan Maju” berikut disajikan keselarasan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 pada tabel dibawah ini.

Tebel 3.17
Penyelarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat
dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG		SASARAN RPJMN	
MISI 1 : **Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan**	**SASARAN :**	**KET**	**SASARAN :**	**KET**
SASARAN :				
• Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat • Meningkatnya Standar Kehidupan Layak Masyarakat	• Generasi sehat, serdas berakhlak dan berbudaya	• MISI 2	• Terwujudnya Pendidkan berkualitas dan merata • Terwujudnya Masyarakat yang bebas dari pelyalahgunaan narkoba	• PN 4 • PN 7
• Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	• Mendukung Prestasi Pemuda dan Olah Raga	• MISI 2	• Meningkatnya Prestasi Olahraga Indinesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat	• PN 4
• Meningkanya Iptek dan Inovasi Daerah	• Lampung Pusat Tekhnologi terpadu	• MISI 2	• Menguatnya Iptek, Inovasi dan Produktivitas tenagakerja	• PN 4

RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG		SASARAN RPJMN	
• Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraangender	• Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat	• MISI 2	• Terwujudnya Kesehatan untuk semua	• PN 4
MISI 2 : **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif**				
SASARAN :	**SASARAN :**		**SASARAN :**	
• Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	• Mendorong investasi dan hilirisasi industry	• MISI 1	• Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan • Terwujudnya transformasi ekonomi hijau • Perkotaan sebgai pusat pertumbuhan ekonomi • Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	• PN 2 • PN 6 • PN 6 • PN 5

RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG		SASARAN RPJMN	
	• Lampung menjadi lumbung pangan nasioanal	• MISI 1	• Terwujudnya peningkatan intyegrasi ekonomi domestic dan global • Meningkatnya total aset sector keuangan terhadap PDB • Tercapianya peniungkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiscal secara komprenhensif melelui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan • Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)	• PN 5 • PN 3 • PN 7 • PN 2

RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG		SASARAN RPJMN	
			• Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)	• PN 2
• Terjaganya stabilitas Ekonomi Makro Daerah	• Mendorong investasi dan hilirisasi industry	• MISI 1	• Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan • Terwujudnya transformasi ekonomi hijau • Perkotaan sebgai pusat pertumbuhan ekonomi • Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan • Terwujudnya peningkatan intyegrasi ekonomi domestic dan global	• PN 2 • PN 6 • PN 6 • PN 5

RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG		SASARAN RPJMN	
	• Lampung menjadi lumbung pangan nasioanal	• MISI 1	• Meningkatnya total aset sector keuangan terhadap PDB • Tercapianya peniungkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiscal secara komprenhensif melelui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan • Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus) • Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara	• PN 5 • PN 3 • PN 7 • PN 2

RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG		SASARAN RPJMN	
			berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)s	• PN 2
• Menurunnya Kemiskinan dan angka pengguran	• Pengentasan kemiskinan tepat waktu dan tepat sasaran	• MISI 3	• Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan • Meningktanya akses hunina layak, terjangkau dan berkelanjutan	• PN 4 • PN 4
• Meningkatnya Produktivitas UMKM dan BUMD	• Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai daya ungkit ekonomi daerah	• MISI 1	• Meningkatan nilai tambah pariwisata • Meningktanya proprosi PDB ekonomi kreatif	• PN 3 • PN 3
• Meningatnya perkembangan Desa (Tiyuh)	• Mewujudkan system ekonomi berbasis Desa	• MISI 1	• Mewujudkan pemngunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	• PN 6

RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG		SASARAN RPJMN	
MISI 3 : **Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif**				
SASARAN :	**SASARAN :**		**SASARAN :**	
• Meningkatnya kualitas pelayanan publik	• Mewujudkan birokrasi berintegritas	• MISI 3	• Terwujudnya supremasi hukum yang transparan adil dan tidak memihak serta system politik yang fungsional • Terwujudnya birokrasi Pemerintahan yang adftif dan melayani	• PN 2 • PN 2
• Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	• Mewujudkan birokrasi berintegritas	• MISI 3	• Terwujudnya birokrasi Pemerintahan yang adftif dan melayani	• PN 2
MISI 4 : **Membangun Kehidupan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Berkeadilan, dan Berbudaya**				
SASARAN :	**SASARAN :**		**SASARAN :**	

RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG		SASARAN RPJMN	
• Meningkatya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	• Mewujudkan birokrasi berintegritas	• MISI 3	• Terwujudnya supremasi hukum yang transparan adil dan tidak memihak serta system politik yang • Terjaganya kedaulayan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan • Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berenegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia	• PN 2 • PN 1 • PN 4
• Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	• Membangun semangat Lampung bersama • Penguatan ketahanan keluarga	• MISI 3 • MISI 3	• Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju • Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetarfaan gender, dan masyarakat inklusif	• PN 8 • PN 4 • PN 4

RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG		SASARAN RPJMN	
	• Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok terlantar	• MISI 3	• Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetarfaan gender, dan masyarakat inklusif	
MISI 5 : **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan**				
SASARAN :	**SASARAN :**		**SASARAN :**	
• Meningkatnya Infrastruktur Jalan Kondisi Mantap Berkeselamatan	• Pembangunan Aksesbilitas dan konektivitas infrastruktur berkelnjutan • Melanjutkan Kota Baru 'Bandar Negara' berbasis eco-city	• MISI 1 • MISI 1	• Terwujudnya pengembangan infrastruktur berkelanjutan • Terwujudnya pengembangan infrastruktur berkelanjutan	• PN 3 • PN 3

RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	SASARAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG		SASARAN RPJMN	
• Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Bersih dan Permukiman	• Pengentasan kemiskinan tepat waktu dan tepat sasaran • Lampung menjadi lumbung pangan nasioanal	• MISI 3 • MISI 1	• Meningktanya akses hunina layak, terjangkau dan berkelanjutan • Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)s	• PN 4 • PN 2
• Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	• Peningktan Kualitas Lingkungan Hidup	• MISI 3	• Terwujidnya resiliensi terhadap berncan dan perubahan iklim	• PN 7

1.2.6. Penyelarasan Indikator Makro

Salah satu keselaran dari dari RPJMD tingkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lamoung dan RPJM Nasional dapat digambarkan dari penyelarasan indikator makro RPJMD sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.18
Penyelarsan Indikator Makro RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

No	Indikator Makro		
	RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat	**RPJMD Provinsi Lampung (Lampiran IV RPJM N)**	**RPJM Nasional**
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
2	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks Modal Manusia (IMM)
4	PDRB Perkapita	PDRB Perkapita	
5	Kontibusi PDRB Kabupaten	Kontribusi PDRB Provinsi	
6	Indeks Gini	Rasio Gimi	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif *)	Penurunan Intensitas Emisi GRK	
9	IKLH Daerah	IKLH Daerah	

*) untuk angka target menggunakan angka dari Provisi

Berdasarkan tabel yang disajikan untuk indikator makro RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat telah selaras dengan RPJM D Provinsi Lampung tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional tahun 2025-2029 hanya satu indikator yang tidak selaras yaitu Indeks Modal Manusia (IMM), hal ini dikarenakan untuk Indeks Modal Manusia perhitunganya belum sampai di timgkat Kabupaten/Kota sehingga di kabupaten/kota masih menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BAB IV
PROGRAM PRANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

4.1.1. Daftar Program, Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sub bab ini menyajikan rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama lima (5) tahun periode RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilengkapi dengan penyajian kerangka pendanaan, bertujuan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka tinjauan terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang memadai.

Gambaran kerangka pendanaan anggaran pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama lima (5) tahun ke depan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.
Kerangka Pendaanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026-2030

No.	Akun	Base Laine (2024)	Proyeksi Anggaran Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	**Pendapatan Daerah**						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	55.782.929.096,00	68.596.453.613,00	69.625.400.418,00	71.017.908.427,00	72.438.266.596,00	73.887.031.928,00
1.2	Pendapatan Transfer	892.264.509.441,00	833.047.175.937,00	845.542.883.576,00	862.453.741.249,00	879.702.816.075,00	897.296.872.399,00
1.3	Lain – lain pendapatan Daerah Yang Syah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**948.047.438.537,00**	**901.643.629.550,00**	**915.168.283.994,00**	**933.471.649.676,00**	**952.141.082.671,00**	**971.183.904.327,00**
2	**Belanja Daerah**						
2.1	Belanja Operasi	659.406.172.435,00	632.680.653.903,00	636.305.863.712,00	649.281.980.987,00	662.517.620.607,00	676.017.973.020,00
2.2.	Belanja Modal	136.124.094.151,00	155.046.101.261,00	100.621.792.780,00	107.304.228.636,00	111.503.313.209,00	119.800.919.474,00
2.3.	Belanja Tak Terduga	350.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.4.	Belanja Transfer	158.960.610.126,00	154.916.874.386,00	157.240.627.502,00	160.385.440.053,00	163.593.148.855,00	166.865.011.833,00
	Jumlah Belanja	**954.840.876.712,00**	**943.643.629.550,00**	**895.168.283.994,00**	**917.971.649.676,00**	**938.641.082.671,00**	**963.683.904.327.00**
	Surplus / Devisit	**(6.793.438.175,00)**	**(42.000.000.000,00)**	**20.000.000.000,00**	**15.500.000.000,00**	**13.500.000.000,00**	**7.500.000.000,00**
3	**Pembiayaan Daerah**						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	19.293.438.175,00	55.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.500.000.000,00	13.000.000.000,00	25.000.000.000,00	20.500.000.000,00	18.500.000.000,00	12.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**6.793.438.175,00**	**42.000.000.000,00**	**(20.000.000.000,00)**	**(3.000.000.000,00)**	**(13.500.000.000,00)**	**(7.500.000.000,00)**

Sumber : BKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel. 4.2

Program Perangkat Daerah dan Indikasi Pagu Perprogram RPJMD Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
1			**URUSAN WAJIB**																
			TERKAIT PELAYANAN DASAR																
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					**190.918.371.415**		**193.916.940.361**		**198.788.719.027**		**203.204.597.820**		**208.554.820.406**		**208.554.820.406**	
1	01		**PENDIDIKAN**																
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,37)	B (61,39)	15.392.911.728	B (61,99)	15.515.597.210	B (62,59)	15.908.441.421	B (63,19)	16.264.523.211	B (63,79)	16.695.947.478	B (63,79)	16.695.947.478	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APM PAUD (%)	-	78	171.334.631.542	81	173.991.860.226	84	178.342.926.506	88	182.279.767.895	90	187.059.443.648	90	187.059.443.648	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					APK SD/MI/Paket A (%)	100	100		100		100		100		100		100		
					APK SMP/MTs/PAKET B (%)	100	100		100		100		100		100		100		
					APM SD/MI/Paket A (%)	100	100		100		100		100		100		100		
					APM SMP/MTs/PAKET B(%)	100	100		100		100		100		100		100		
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	70	100	1.296.000.000	100	1.348.000.000	100	1.402.000.000	100	1.458.000.000	100	1.516.000.000	100	1.516.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indek pemerataan guru	0,70	1,00	2.470.544.287	1,30	2.509.316.487	1,50	2.572.358.088	1,65	2.629.500.273	1,80	2.698.733.016	1,80	2.698.733.016	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	63	70		75		80		85		90		90		
2			**URUSAN PENUNJANG**																
2	22		**KEBUDAYAAN**																
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembaudayaan (%)	NA	2,00	121.223.959	2,50	121.223.959	2,70	121.223.959	2,90	121.223.959	3,00	121.223.959	3,00	121.223.959	
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	5	9	303.059.898	9	307.816.056	9	315.549.324	9	322.558.915	9	331.051.646	9	331.051.646	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan				1	123.126.422	2	126.219.730	3	129.023.566	4	132.420.658	4	132.420.658	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			DINAS KESEHATAN					**99.071.164.875**		**100.628.303.154**		**103.156.389.550**		**105.447.898.640**		**108.224.261.650**		**108.224.261.650**	
1	**02**		**KESEHATAN**																
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,85)	B (62,32)	46.822.592.771	B (64,10)	46.878.249.574	B (65,45)	47.638.254.120	B (66,95)	47.873.682.326	B (68,45)	47.873.910.172	B (68,45)	47.873.910.172	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ANC Minimal 6 Kali (K6)	80%	82%	51.064.453.982	86%	52.555.935.458	88%	54.237.393.269	89%	56.242.244.467	90%	59.018.379.631	90%	59.018.379.631	DINAS KESEHATAN
					Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Anti Gen	72%	76%		80%		84%		87%		90%		90%		
					Cakupan Penemuan Kasus TBC	53%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
					Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
					Cakupan Keaktifan Kepesertaan JKN	50,66%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
					Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal	93,71%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	NA	20%		25%		30%		35%		40%		40%		
					Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terkreditasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM bidang Kesehatan	20%	25%	656.338.588	30%	659.938.588	35%	709.895.817	40%	738.291.649	45%	738.291.649	45%	738.291.649	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi,alat kesehatan,dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	57%	63%	60.000.000	66%	62.400.000	69%	64.896.000	70%	67.491.840	70%	67.491.840	70%	67.491.840	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 75 Persen Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	70%	75%	467.779.534	75%	471.779.534	75%	505.950.344	75%	526.188.358	75%	526.188.358	75%	526.188.358	DINAS KESEHATAN
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**132.967.271.690**		**84.271.678.869**		**86.388.837.836**		**88.307.873.362**		**90.632.952.537**		**90.632.952.537**	
1	**03**		**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (61,91)	B (62,00)	8.729.018.904	B (63,00)	9.075.538.697	B (65,00)	9.435.920.805	B (67.00)	9.808.717.090	BB (70,00)	9.810.717.736	BB (70,00)	9.810.717.736	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik dan bermanfaat bagi masyarakat TUBABA	40,66	40,88	1.708.000.000	41,00	1.750.000.000	41,02	1.500.000.000	41,94	1.750.000.000	42,53	2.000.000.000	42,53	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	2,28	2,38	12.061.288.786	2,45	7.911.740.337	2,53	8.776.209.951	2,62	9.155.258.349	2,70	7.549.468.681	2,70	7.549.468.681	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan	31,08	31.27	1.000.000.000	31,46	1.000.000.000	31,65	1.000.000.000	31,84	1.000.000.000	32,00	1.000.000.000	32,00	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	NA	0,19	4.550.000.000	0,285	4.097.047.835	0,375	4.550.000.000	0,474	4.550.000.000	0,574	4.550.000.000	0,574	4.550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Kualitas Sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi baik	15,09	15,69	1.600.000.000	15,74	1.600.000.000	15,77	1.600.000.000	15,84	1.600.000.000	15,92	1.600.000.000	15,92	1.600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur dalam Kondisi Baik	NA	10	3.900.000.000	10	3.900.000.000	10	3.900.000.000	10	3.900.000.000	10	1.900.000.000	10	1.900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang berizin sesuai dengan rencana tata ruang	NA	50	51.060.164.000	53	7.500.000.000	57	8.985.861.000	60	9.244.418.000	63	5.864.307.000	63	5.864.307.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	persentase kualitas bangunan gedung kabupaten yang sesuai standarnya	43	50	3.400.000.000	53	3.400.000.000	57	3.400.000.000	60	3.400.000.000	63	3.400.000.000	63	3.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Kemantapan Jalan	43,90	44,34	42.330.000.000	44,79	41.888.200.000	45,23	41.449.728.000	45,69	42.214.717.120	46,69	50.308.305.805	46,69	50.308.305.805	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Prosentase ketersediaan tenaga lokal jasa konstruksi yang bersertifikat.	22,33	31,17	1.528.800.000	32,93	1.049.152.000	34,11	1.091.118.080	34,95	1.134.762.803	35,58	2.200.153.315	35,58	2.200.153.315	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Sesuai dengan Perencanaan Penataan Ruang	78	80	1.100.000.000	82	1.100.000.000	84	700.000.000	86	550.000.000	88	450.000.000	88	450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN					**6.012.225.525**		**6.054.415.852**		**6.196.471.828**		**6.325.234.262**		**6.481.241.176**		**6.481.241.176**	
1	**04**		**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (59,94)	B (61,19)	3.507.680.615	B (62,54)	3.516.842.659	B (64,04)	3.605.196.347	B (65,29)	3.685.281.940	B (67,04)	3.782.312.612	B (67,04)	3.782.312.612	DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana atau Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Layak Huni	90	90	596.479.793	90	599.563.305	90	604.576.938	90	609.121.396	90	614.627.403	90	614.627.403	DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (ha)	80,51	90	399.166.253	90	405.430.683	90	415.616.325	90	424.848.798	90	436.034.744	90	436.034.744	DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya Perumahan dan Berkurangnya Permukiman Kumuh	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha Yang ditangani	80,51	90	12.122.396	90	12.312.642	90	12.621.973	90	12.902.357	90	13.242.066	90	13.242.066	DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase RTH kawasan perumahan dan permukian yang tertangani	100	100	1.105.610.997	100	1.122.962.222	100	1.151.174.421	100	1.176.746.530	100	1.207.729.372	100	1.207.729.372	DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
2			**Wajib bukan pelayanan dasar**																
2	**10**		**PERTANAHAN**																
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselsaikannya kasus tanah garapan belum bersirtifikat yang dilakukan melalui mediasi	100	100	30.216.284	100	30.690.492	100	31.461.530	100	32.160.414	100	33.007.173	100	33.007.173	DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelsaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	95	95	360.949.187	95	366.613.848	95	375.824.293	95	384.172.828	95	394.287.807	95	394.287.807	DINAS PERUMAHAAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					**8.693.597.437**		**8.832.369.255**		**9.054.265.007**		**9.255.395.835**		**9.499.083.371**		**9.499.083.371**	
1	**05**		**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	CC (58,75)	2.978.893.923	CC (59,95)	3.027.980.390	B (60,73)	3.104.052.383	B (61,85)	3.173.005.598	B (62,87)	3.256.548.424	B (62,87)	3.256.548.424	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase berkurangnya gangguan ketenteraman masyarakat	60	60	5.714.703.514	60	5.804.388.864	60	5.950.212.624	60	6.082.390.237	60	6.242.534.948	60	6.242.534.948	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					**3.823.041.275**		**3.885.375.612**		**3.982.987.960**		**4.071.465.789**		**4.178.664.388**		**4.178.664.388**	
1	**05**		**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (55,68)	CC (56,30)	2.326.529.148	CC (56,50)	2.365.377.539	CC (56,70)	2.424.802.950	CC (56,90)	2.478.667.365	CC (57,00)	2.543.928.792	CC (57,00)	2.543.928.792	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	75	75,5	1.496.512.127	76,0	1.519.998.072	76,5	1.558.185.010	77,0	1.592.798.424	77,5	1.634.735.596	77,5	1.634.735.596	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					**3.518.665.800**		**3.576.223.333**		**3.666.068.842**		**3.747.506.652**		**3.846.175.654**		**3.846.175.654**	
1	**05**		**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (56,55)	CC (58,77)	1.928.854.264	CC (59,93)	1.977.155.419	B (61,35)	2.051.950.535	B (63,89)	2.119.746.363	B (65,97)	2.201.886.913	B (65,97)	2.201.886.913	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Prosentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100	100	1.589.811.536	100	1.599.067.914	100	1.614.118.307	100	1.627.760.289	100	1.644.288.740	100	1.644.288.740	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			DINAS SOSIAL					**7.608.775.846**		**7.730.522.703**		**7.924.736.746**		**8.100.776.310**		**8.314.063.593**		**8.314.063.593**	
1	**06**		**SOSIAL**																
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,22)	B (62,33)	3.959.934.677	B (63,92)	4.024.417.390	B (65,21)	4.125.522.887	B (66,89)	4.117.166.977	B (68,62)	4.178.201.778	B (68,62)	4.178.201.778	DINAS SOSIAL
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan pelayanan Sosial di Luar Panti	100	100	406.100.263	100	412.473.515	100	422.836.094	100	432.228.946	100	443.609.205	100	443.609.205	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	3.042.721.374	100	3.090.473.201	100	3.168.115.211	100	3.238.491.504	100	3.323.758.523	100	3.323.758.523	DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persntase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepenuhi Kebutuhan Dasarnya serta Meningkatn ya Fungsi Sosial	100	100	84.856.771	100	86.188.496	100	88.353.811	100	90.316.496	100	92.694.461	100	92.694.461	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam,Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	10	115.162.761	100	116.970.101	100	119.908.743	100	122.572.388	100	125.799.625	100	125.799.625	DINAS SOSIAL
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan Baik	0	0	0	0	0	0	0	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	DINAS SOSIAL

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**3.504.721.266**		**3.553.801.760**		**3.643.083.982**		**3.724.011.198**		**3.822.061.582**		**3.822.061.582**	
2	**08**		**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (56,28)	B (60,15)	2.882.406.153	B (60,87)	2.921.720.166	B (61,25)	2.995.122.591	B (62,50)	3.061.656.037	B (63,74)	3.142.267.113	B (63,74)	3.142.267.113	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100	100	66.032.970	100	67.069.278	100	68.754.260	100	70.281.563	100	72.132.023	100	72.132.023	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	15.341.852	100	15.582.624	100	15.974.106	100	16.328.954	100	16.758.883	100	16.758.883	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persetase Tingkat Partisipasi dan Keterlibatan Perempuan Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	100	100	335.095.445	100	340.354.363	100	348.905.091	100	356.655.645	100	366.046.117	100	366.046.117	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak	-	61,98	175.501.183	62,48	178.255.461	62,78	182.733.776	63,20	186.793.012	63,90	191.711.130	63,90	191.711.130	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persetase Korban Kekerasan Pada Anak Yang Mendapat Pelayanan dan Pendampingan	100	100	30.343.662	100	30.819.869	100	31.594.158	100	32.295.988	100	33.146.317	100	33.146.317	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			DINAS KETAHANAN PANGAN					**3.299.560.715**		**3.351.343.324**		**3.435.539.179**		**3.511.856.009**		**3.604.320.508**		**3.604.320.508**	
2	**09**		**PANGAN**																
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (58,65)	CC (59,96)	2.699.494.844	B (61,33)	2.741.860.146	B (62,97)	2.810.743.945	B (64,55)	2.873.181.616	B (66,27)	2.948.830.304	B (66,27)	2.948.830.304	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,25	89,70	521.263.024	90,25	529.443.616	91,30	542.744.837	92,90	554.801.333	92,90	569.408.831	92,90	569.408.831	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	82,00	83,00	48.496.857	84,00	49.257.957	85,00	50.495.465	86,00	51.617.168	87,00	52.976.209	87,00	52.976.209	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan dilaksanakan	82,40	90,20	30.305.990	92,70	30.781.606	94,50	31.554.932	95,00	32.255.891	95,50	33.105.165	95,50	33.105.165	DINAS KETAHANAN PANGAN
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP					**6.493.435.675**		**6.595.342.283**		**6.761.037.179**		**6.911.226.392**		**7.093.193.729**		**7.093.193.729**	
2	**11**		**LINGKUNGAN HIDUP**																
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (59,12)	B (60,12)	3.852.912.136	B (60,62)	3.917.694.717	B (61,12)	4.023.027.857	B (61,62)	4.118.503.952	B (62,12)	4.234.181.571	B (62,12)	4.234.181.571	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	NA	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Air	64,29	67,34	151.062.024	67,54	153.432.760	67,74	157.287.454	67,94	160.781.426	67,94	165.014.679	67,94	165.014.679	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Udara	91,95	71,91		72,31		72,71		73,11		73,11		73,11		
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	3	5	160.015.626	7	162.526.877	10	166.610.043	12	170.311.107	15	174.795.269	15	174.795.269	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola3	55	100	24.244.792	100	24.625.284	100	25.243.946	100	25.804.713	100	26.484.132	100	26.484.132	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	100	100	88.493.490	100	89.882.288	100	92.140.403	100	94.187.203	100	96.667.081	100	96.667.081	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	99.009.669	100	100.563.505	100	103.089.964	100	105.379.997	100	108.154.573	100	108.154.573	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima masyarakat	100	100	6.061.198	100	6.156.321	100	6.310.986	100	6.451.178	100	6.621.033	100	6.621.033	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup (%)	100	100	6.061.198	100	6.156.321	100	6.310.986	100	6.451.178	100	6.621.033	100	6.621.033	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	41,32	42,50	1.830.575.542	43	1.859.304.208	45	1.906.015.539	47	1.948.355.637	50	1.999.654.360	50	1.999.654.360	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**5.070.180.903**		**5.149.751.251**		**5.279.128.539**		**5.396.398.736**		**5.538.481.813**		**5.538.481.813**	
			KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (68,20)	B (69,75)	4.342.837.148	B (70,97)	4.410.992.717	BB (72,55)	4.521.810.162	BB (73,93)	4.622.257.341	BB (75,29)	4.743.957.863	BB (75,29)	4.743.957.863	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	2,03	30	436.406.253	35	443.255.120	40	454.391.026	45	464.484.837	50	476.714.370	50	476.714.370	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	70	70		72		74		77		80		82		
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	99,79	99,85	109.101.563	99,88	110.813.780	99,90	113.597.757	99,95	116.121.209	100	119.178.592	100	119.178.592	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		100		
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		100		
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100		100		100		100		100		100		
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	98	98	163.652.345	98	166.220.670	98	170.396.635	98	174.181.814	98	178.767.889	98	178.767.889	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Pengelolaan Profile Kependudukan	98	98	18.183.594	98	18.468.963	98	18.932.959	98	19.353.535	98	19.863.099	98	19.863.099	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH					**4.840.656.986**		**4.916.625.235**		**5.040.145.694**		**5.152.107.142**		**5.287.758.207**		**5.287.758.207**	
2	**13**		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,26)	B (60,76)	3.624.780.676	B (61,26)	3.681.667.218	B (61,76)	3.774.161.806	B (62,26)	3.858.000.776	B (62,76)	3.959.579.004	B (62,76)	3.959.579.004	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100	45	60.000.000	45	60.000.000	45	80.000.000	45	90.000.000	45	90.000.000	45	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Efektifitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	20	20	30.000.000	20	30.000.000	20	50.000.000	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	70	70	444.891.930	70	451.873.970	70	463.226.407	70	473.516.487	70	485.983.816	70	485.983.816	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Menigkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD)	60	60	680.984.380	60	693.084.046	60	672.757.480	60	730.589.879	60	752.195.387	60	752.195.387	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**3.659.105.869**		**3.716.531.104**		**3.809.901.578**		**3.894.534.469**		**3.997.074.600**		**3.997.074.600**	
2	**14**		**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (59,30)	B (63,40)	2.877.211.333	B (63,50)	2.922.365.680	B (63,60)	2.995.784.322	B (63,70)	3.062.332.468	B (63,80)	3.142.961.354	B (63,80)	3.142.961.354	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2,1	2,20	121.223.959	2,20	123.126.422	2,20	126.219.730	2,20	129.023.566	2,20	132.420.658	2,20	132.420.658	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Angka Kelahiran Remaja Umnur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	24,4	23,20		22,40		22,10		19,50		19,30		19,30		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)	73,1	74,10	121.223.959	75,10	123.126.422	76,10	126.219.730	77,10	129.023.566	78,10	132.420.658	78,10	132.420.658	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9,6	9,40		9,00		8,80		8,50		8,00		8,00		
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	100	100	539.446.618	100	547.912.579	100	561.677.796	100	574.154.868	100	589.271.929	100	589.271.929	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			DINAS PERHUBUNGAN					**6.451.284.117**		**6.552.529.208**		**6.717.148.510**		**6.866.362.784**		**7.047.148.896**		**7.047.148.896**	
2	**15**		**PERHUBUNGAN**																
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,31)	B (63,91)	3.911.570.123	B (65,23)	3.988.651.267	B (67,75)	4.113.981.238	BB (70,04)	4.227.582.864	BB (70,04)	4.365.221.147	BB (70,04) Sangat Baik	5.365.221.147	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	0,83	0,841 (84,1%)	2.525.167.119	0,848 (84,8%)	2.549.102.770	0,852 (85,2%)	2.588.020.905	0,857 (85,7%)	2.623.297.092	0,860 (86,0%)	2.666.037.270	0,860 (86,0%)	1.666.037.270	DINAS PERHUBUNGAN
					Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	79	62%		67%		72%		76%		82%		82%		
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Laut	Rasio Konektivitas perain sungai	3,75	5 Unit	14.546.875	6,25 Unit	14.775.171	6,25 Unit	15.146.368	7,5 Unit	15.482.828	7,5 Unit	15.890.479	7,5 Unit	15.890.479	DINAS PERHUBUNGAN
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**14.016.807.995**		**14.267.566.426**		**14.626.010.739**		**14.950.911.932**		**15.344.558.078**		**15.344.558.078**	
2	**16**		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,58)	B (61,00)	3.487.498.562	B (61,25)	3.542.230.628	B (61,50)	3.691.222.148	B (61,75)	3.991.885.866	B (61,99)	4.002.616.999	B (61,99)	4.002.616.999	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	76	76	5.762.251.910	77	5.938.668.192	77	6.082.977.834	78	6.044.922.323	78	6.358.653.628	78	6.358.653.628	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan aplikasi umum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah	81	82,00	4.551.751.534	83,00	4.576.104.395	84,00	4.615.700.892	85,00	4.651.591.960	85,00	4.695.077.121	85,00	4.695.077.121	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik	60	63,00	185.000.000	63,00	210.563.211	63,00	236.109.865	65,00	262.511.783	65,00	288.210.329	65,00	288.210.329	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**21**		**PERSANDIAN**																
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Sistem Elektronil yang telah menerapkan prinsip - prinsip keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	0,1	1,00	30.305.990	1,00	70.781.606	1,00	91.554.932	1,00	112.255.891	1,00	120.105.165	1,00	120.105.165	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					**7.154.561.240**		**7.266.843.413**		**7.449.408.443**		**7.614.889.088**		**7.815.383.329**		**7.815.383.329**	
2	**17**		**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (66,03)	B (67,53)	4.469.638.552	B (67,03)	4.323.120.004	B (67,53)	4.305.848.957	B (68,00)	4.326.092.068	B (68,33)	4.281.875.395	B (68,33)	4.281.875.395	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Kualitas Layanan izin Usaha Sinpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	40	45	50.000.000	50	75.000.000	60	90.000.000	65	110.000.000	70	130.000.000	70	130.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	57	64	51.931.343	71	52.746.342	86	54.071.490	93	55.272.630	100	56.727.916	100	56.727.916	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	54	57	50.000.000	59	70.000.000	61	95.000.000	63	115.000.000	65	135.000.000	65	135.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Perlatihan	11	13	115.000.000	15	114.000.000	17	144.000.000	20	174.000.000	22	204.000.000	22	204.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	11	13	50.000.000	15	70.000.000	17	90.000.000	20	110.000.000	22	130.000.000	110	130.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Peresentase Usaha Kecil Bertransformasi dari Informal ke Formal	11	13	75.000.000	15	233.000.000	17	283.000.000	20	333.000.000	22	393.000.000	22	393.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	135	137	51.931.343	140	52.746.342	145	54.071.490	147	55.272.630	150	56.727.916	150	56.727.916	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3			**URUSAN PILIHAN**																
3	**30**		**PERDAGANGAN**																
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi	22	24	275.635.100	26	317.445.985	28	360.521.232	30	404.899.974	31	351.899.074	31	351.899.074	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	36	45	378.950.427	55	384.897.595	55	394.567.383	64	403.332.276	64	413.951.708	64	413.951.708	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	36	36	89.025.159	45	90.422.301	45	92.693.982	55	94.753.080	55	97.247.856	55	97.247.856	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang	5	5	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	30	100	44.512.579	100	45.211.151	100	46.346.991	100	47.376.540	100	48.623.928	100	48.623.928	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	35	40	691.876.325	45	703.519.175	50	722.449.850	55	690.608.998	60	760.398.202	60	760.398.202	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
3	**31**		**PERINDUSTRIAN**																
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	30	40	587.060.412	45	520.734.518	50	462.837.068	55	401.280.893	60	441.931.333	60	441.931.333	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri Yang Diterbitkan	100	100	62.000.000	100	82.000.000	100	102.000.000	100	122.000.000	100	132.000.000	100	132.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Jumlah Informasi Industri Yang Tersaji Pada Sistem	979	984	62.000.000	987	82.000.000	990	102.000.000	992	122.000.000	995	132.000.000	995	132.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU					**6.451.734.510**		**6.552.986.670**		**6.717.617.465**		**6.866.842.155**		**7.047.640.889**		**7.047.640.889**	
2	**18**		**PENANAMAN MODAL**																
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (69,64)	BB (70,02)	5.287.388.149	BB (70,15)	5.371.936.681	BB (70,25)	5.509.408.239	BB (70,45)	5.634.015.247	BB (70,98)	5.784.987.509	BB (70,98)	5.784.987.509	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100	100	42.428.386	100	43.094.248	100	44.176.905	100	45.158.248	100	46.347.230	100	46.347.230	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100	100	60.611.980	100	61.563.211	100	63.109.865	100	64.511.783	100	66.210.329	100	66.210.329	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	100	912.816.412	100	927.141.960	100	950.434.563	100	971.547.451	100	997.127.557	100	997.127.557	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	48.489.584	100	49.250.569	100	50.487.892	100	51.609.426	100	52.968.263	100	52.968.263	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					**8.225.097.034**		**8.354.179.970**		**8.564.062.175**		**8.754.303.661**		**8.984.797.822**		**8.984.797.822**	
2	**19**		**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,19)	B (61,37)	3.570.387.941	B (62,79)	3.626.420.856	B (63,98)	3.717.527.488	B (65,29)	3.800.108.387	B (66,78)	3.900.162.352	B (66,78)	3.900.162.352	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda		70	90.917.969	70	92.344.817	70	94.664.797	70	96.767.674	70	99.315.494	70	99.315.494	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas		10	1.836.542.981	15	1.865.365.299	20	1.912.228.903	20	1.954.707.023	20	2.006.172.973	20	2.006.172.973	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		70	242.447.918	70	246.252.845	70	252.439.459	75	258.047.132	75	264.841.317	75	264.841.317	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3			**URUSAN PILIHAN**																
3	**26**		**PARIWISATA**																
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Domestik	NA	3	2.301.453.870	3	2.338.357.090	3	2.388.027.984	3	2.440.002.406	3	2.503.388.041	3	2.503.388.041	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Kualita Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intlektual	NA	70	50.000.000	70	50.000.000	70	60.331.842	70	62.745.116	70	65.254.921	70	65.254.921	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Terfalidasi	NA	100	133.346.355	100	135.439.065	100	138.841.702	100	141.925.922	100	145.662.724	100	145.662.724	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH					**3.932.163.913**		**3.993.874.464**		**4.094.212.639**		**4.235.161.196**		**4.295.353.309**		**4.295.353.309**	
2	**23**		**PERPUSTAKAAN**																
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (59,42)	B (60,82)	3.397.268.077	B (61,37)	3.451.368.774	B (62,77)	3.539.333.721	B (63,95)	3.669.066.933	B (64,17)	3.715.670.676	B (64,17)	3.715.670.676	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63	63,32	412.161.461	63,78	418.629.836	64,00	429.147.080	64,50	438.680.124	65	450.230.238	65	450.230.238	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Mingkatnya Pelestarian Koleksi Naskah Kuno	Persentase Koleksi Naskah Kuno Yang Dimiliki	NA	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2	**24**		**KEARSIPAN**																
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	85	86	72.734.375	87	73.875.853	88	75.731.838	89	77.414.140	90	79.452.395	90	79.452.395	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			URUSAN PILIHAN																
			DINAS PERIKANAN					**3.343.443.667**		**3.395.914.966**		**3.481.230.595**		**3.558.562.411**		**3.652.256.654**		**3.652.256.654**	
3	**25**		**KELAUTAN DAN PPERIKANAN**																
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (58,10)	CC (60,31)	2.797.935.851	B (60,61)	2.841.846.065	B (60,91)	2.913.241.812	B (61,22)	2.977.956.364	B (61,53)	3.056.363.692	B (61,53)	3.056.363.692	DINAS PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Nelayan Yang di Berdayakan	3	5	181.835.939	5	184.689.634	3	189.329.594	5	193.535.349	5	198.630.987	5	198.630.987	DINAS PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnaya produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Yang Diberdayakan	NA	5	212.141.928	5	215.471.239	5	220.884.527	5	225.791.240	5	231.736.152	5	231.736.152	DINAS PERIKANAN
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah Kelompok Pokmaswas Yang Di Bina	NA	6	60.611.980	6	61.563.211	6	63.109.865	6	64.511.783	6	66.210.329	6	66.210.329	DINAS PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah Poklahsar Yang Diberdayakan	NA	2	90.917.969	2	92.344.817	2	94.664.797	2	96.767.674	2	99.315.494	2	99.315.494	DINAS PERIKANAN
			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					**7.006.299.913**		**7.116.255.304**		**7.295.037.108**		**7.407.088.557**		**7.653.428.031**		**7.653.428.031**	
3	**27**		**PERTANIAN**																
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,08)	B (61,93)	5.212.304.117	B (63,69)	5.294.104.917	B (64,23)	5.427.108.805	B (66,79)	5.497.666.225	B (68,97)	5.693.732.060	B (68,97)	5.693.732.060	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	4,5	4,7	1.161.934.073	4,8	1.180.169.221	4,9	1.209.818.632	4,9	1.236.693.460	5,0	1.269.254.658	5,1	1.269.254.658	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	2,7	2,8		2,9		3,0		3,1		3,2		3,3		
					Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	0,88	0,92		0,96		1		1,05		1,1		1,15		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	9983 Ha	9983 Ha	61.096.875	9983 Ha	62.055.717	9983 Ha	63.614.744	9983 Ha	65.027.877	9983 Ha	66.740.012	9983 Ha	66.740.012	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	90	90	90.917.969	90	92.344.817	90	69.664.798	90	71.767.674	90	74.315.494	90	74.315.494	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase Penanganan dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	90	90		90		90		90		90		90		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan						100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	10	10	480.046.878	10	487.580.632	10	499.830.129	10	510.933.321	10	524.385.807	10	524.385.807	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	5	5		5		5		5		5		5		
			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					**4.620.320.400**		**4.692.830.733**		**4.810.728.799**		**4.917.593.997**		**5.047.070.508**		**5.047.070.508**	
3	**27**		**PERTANIAN**																
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (58,35)	CC (62,00)	3.337.159.400	B (62,50)	3.217.830.733	B (63,00)	3.190.728.799	B (63,50)	3.277.593.997	B (63,50)	3.304.570.508	B (63,50)	3.304.570.508	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase kelompok yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna (%)	34	38	1.063.652.000	40	1.230.000.000	42	1.310.000.000	44	1.320.000.000	46	1.392.500.000	46	1.392.500.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
					Persentase kelompok yang menerapkan manajemen pakan yang baik(%)	36	40		42		44		46		48		48		
					Persentase kelompok yang mengalami peningkatan produksi dan produktivitas ternak (%)	60	68		71		75		80		84		84		
					Jumlah angka kelahiran ternak sapi (ekor)	6497	7.413		7.636		7.865		8.022		8.134		8.134		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang termanfaatkan (%)	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	83	85	169.609.000	86	190.000.000	87	250.000.000	88	260.000.000	89	285.000.000	89	285.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
					Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	8	10		11		12		13		14		14		
					Persentase unit usaha pengolahan/ penjualan yang menghasilkan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH	84	86		87		88		89		90		90		
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Prosentase kelompok yang memiliki akses permodalan (%)	28	32	44.900.000	34	50.000.000	36	55.000.000	38	55.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
					Prosentase kelompok dan unit usaha yang menerapkan teknologi pasca panen (%)	24	26		27		28		29		30		30		
					Prosentase kelompok yang menerapkan pola budidaya ternak yang baik (%)	30	34		36		38		40		42		42		
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					**2.767.885.453**		**2.811.324.063**		**2.881.953.005**		**2.945.972.511**		**3.023.537.727**		**3.023.537.727**	
2	**07**		**TENAGA KERJA**																
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (55,32)	CC (56,89)	2.043.235.453	CC (57,99)	2.058.574.063	B (61,29)	2.099.653.005	B (62,89)	2.133.922.511	B (64,19)	2.181.987.727	B (64,19)	2.181.987.727	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	100	100	75.700.000	100	76.500.000	100	77.400.000	100	78.850.000	100	79.450.000	100	79.450.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	100	100	48.400.000	100	49.250.000	100	50.450.000	100	51.600.000	100	52.900.000	100	52.900.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatanya pekerja yang terlindungi	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	100	100	94.550.000	100	96.000.000	100	98.450.000	100	100.600.000	100	103.200.000	100	103.200.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
3			**URUSAN PILIHAN**																
3	**32**		**TRANSMIGRASI**																
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRAS	Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan	100	100	450.000.000	100	475.000.000	100	500.000.000	100	525.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Mandiri		25	36.000.000	26	36.000.000	27	36.000.000	28	36.000.000	29	36.000.000	29	36.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRAS	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
			SEKRETARIAT DAERAH					**45.050.783.641**		**45.757.801.128**		**46.907.375.141**		**47.949.372.334**		**49.211.842.857**		**49.211.842.857**	
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,30)	B (62,00)	35.476.092.035	B (62,50)	36.032.846.333	B (63,00)	36.938.100.143	B (63,50)	37.758.640.549	B (64,00)	38.752.796.851	B (64,00)	38.752.796.851	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Dirumuskan	NA	100	7.717.513.883	100	7.838.630.916	100	8.035.560.973	100	8.214.062.370	100	8.430.332.388	100	8.430.332.388	SEKRETARIAT DAERAH
				Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Cakupan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dirumuskan	NA	100		100		100		100		100		100		
				Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	100		100		100		100		100		100		
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yang Dirumuskan	NA	100	1.857.177.723	100	1.886.323.878	100	1.933.714.025	100	1.976.669.415	100	2.028.713.618	100	2.028.713.618	SEKRETARIAT DAERAH
				Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	NA	66,50		67,00		67,25		68,00		68,50		68,50		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					**40.791.016.484**		**41.431.182.084**		**42.472.058.374**		**43.415.529.747**		**44.558.627.641**		**44.558.627.641**	
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**																
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (59,81)	B (60,27)	29.606.703.087	B (61,38)	30.071.344.435	B (62,43)	30.826.827.331	B (64,58)	31.511.612.345	B (65,77)	32.341.289.143	B (65,77)	32.341.289.143	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	11.184.313.397	100	11.359.837.650	100	11.645.231.043	100	11.903.917.402	100	12.217.338.498	100	12.217.338.498	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
					Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100		100		100		100		100		100		
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					**12.569.862.473**		**12.775.745.091**		**13.106.759.549**		**13.406.797.782**		**13.770.320.272**		**13.770.320.272**	
5	**01**		**PERENCANAAN**																
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,54)	B (61,67)	8.082.447.293	B (62,55)	8.217.905.364	B (63,73)	8.434.413.137	B (64,89)	8.630.660.190	B (65,97)	8.868.430.608	B (65,97)	8.868.430.608	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	1.421.952.192	100	1.444.268.009	100	1.480.552.379	100	1.513.441.267	100	1.553.289.025	100	1.553.289.025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	-		-		-		-		-		100		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	2.132.038.503	100	2.165.498.266	100	2.219.902.115	100	2.269.214.868	100	2.328.961.570	100	2.328.961.570	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100		100		
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																
5	05	02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	NA	85	600.000.000	87	600.000.000	90	620.000.000	92	630.000.000	95	650.000.000	95	650.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
				Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	NA	78		80		82		85		90		90		
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya fasilitasi,pembinaan,bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dlan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	NA	100	333.424.485	100	348.073.452	100	351.891.917	100	363.481.457	100	369.639.069	100	369.639.069	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					**243.304.978.022**		**234.625.691.311**		**240.834.234.233**		**246.461.783.437**		**253.280.050.334**		**253.280.050.334**	
5	**02**		**KEUANGAN**																
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (61,54)	B (62,25)	35.531.441.434	B (62,89)	36.091.400.708	B (63,39)	36.998.125.570	B (63,97)	37.819.999.390	B (64,59)	38.815.771.224	B (64,59)	38.815.771.224	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan serta akuntasi dan pelaporan	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	98	98	206.147.016.541	98	196.882.244.294	98	202.142.557.966	98	206.910.612.932	98	212.687.527.576	98	212.687.527.576	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Capaian Pengelolaan BMD	98	98	1.626.520.047	98	1.652.046.309	98	1.693.550.697	98	1.731.171.115	98	1.776.751.534	98	1.776.751.534	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			BADAN PENDAPATAN DAERAH					**7.962.973.371**		**8.087.942.594**		**8.291.136.113**		**8.475.314.838**		**8.698.463.435**		**8.698.463.435**	
5	**02**		**KEUANGAN**																
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,64)	B (61,98)	6.956.814.511	B (62,25)	7.065.993.289	B (62,85)	7.243.512.358	B (63,17)	7.404.419.241	B (63,95)	7.599.371.971	B (63,95)	7.599.371.971	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	5,94	7,50	1.006.158.861	8,00	1.021.949.305	8,50	1.047.623.755	9,00	1.070.895.597	10,00	1.099.091.464	10,00	1.099.091.464	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**8.473.018.078**		**8.605.991.835**		**8.822.200.314**		**9.018.176.063**		**9.255.617.783**		**9.255.617.783**	
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**																
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,98)	B (61,99)	4.648.341.556	B (63,17)	4.721.291.647	B (64,37)	4.839.904.737	B (65,49)	4.947.418.047	B (66,67)	5.077.679.803	B (66,67)	5.077.679.803	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100%	100%	1.040.222.793	100%	1.056.547.830	100%	1.083.091.499	100%	1.107.151.219	100%	1.136.301.669	100%	1.136.301.669	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	21,60%	22%		22,40%		22,90%		23,40%		23,90%		23,90%		
				Meningkatnya tata Kelola pengembangan karir	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	21,80%	22,20%		22,60%		23,10%		23,60%		24%		24%		
				Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	83%	85%		87%		89%		91%		93%		93%		
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	21,6%	22%	2.784.453.729	22,40%	2.828.152.358	22,90%	2.899.204.078	23,40%	2.963.606.797	23,90%	3.041.636.311	23,90%	3.041.636.311	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
			INSPEKTORAT DAERAH					**15.413.900.729**		**15.655.803.232**		**16.049.124.242**		**16.405.638.380**		**16.837.586.368**		**16.837.586.368**	
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**																
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (62,93)	B (63,97)	6.683.604.222	B (65,27)	6.788.495.295	B (65,39)	6.959.042.778	B (66,59)	7.113.630.474	B (67,79)	7.300.926.956	B (67,79)	7.300.926.956	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pengurangan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK (n-1)	80	82	1.423.968.090	82	1.446.315.544	82	1.482.651.354	82	1.515.586.869	82	1.555.491.119	82	1.555.491.119	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Capaian Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	76	82	7.306.328.417	83	7.420.992.393	85	7.607.430.110	85	7.776.421.038	85	7.981.168.292	85	7.981.168.292	INSPEKTORAT DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																
			KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH					**4.323.785.803**		**4.391.642.384**		**4.501.973.690**		**4.601.980.223**		**4.723.146.864**		**4.723.146.864**	
7	**01**		**KECAMATAN**																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	CC (56,75)	4.115.167.359	CC (59,89)	4.179.749.927	B (61,46)	4.284.757.855	B (61,06)	4.379.939.171	B (62,25)	4.495.259.639	B (62,25)	4.495.259.639	KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	B (77,03)	B (77,47)	57.288.477	B (77,54)	58.187.550	B (77,57)	59.649.397	B (77,59)	60.974.444	B (77,60)	62.579.855	B (77,60)	62.579.855	KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	24.552.204	100	24.937.521	100	25.564.027	100	26.131.905	100	26.819.938	100	26.819.938	KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	126.777.762	100	128.767.386	100	132.002.411	100	134.934.703	100	138.487.431	100	138.487.431	KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
			KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK					**2.065.585.836**		**2.098.002.704**		**2.150.710.861**		**2.198.486.604**		**2.256.371.085**		**2.256.371.085**	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**		**KECAMATAN**																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	CC (56,85)	1.972.851.461	CC (57,53)	2.004.126.851	CC (57,86)	2.054.979.024	CC (58,03)	2.101.072.465	CC (58,12)	2.156.918.690	CC (58,12)	2.156.918.690	KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	B (83,52)	B (84,12)	20.000.000	B (84,22)	20.000.000	B (84,27)	20.000.000	B (84,30)	20.000.000	B (84,31)	20.000.000	B (84,31	20.000.000	KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	18.183.594	100	18.468.963	100	18.932.959	100	19.353.535	100	19.863.099	100	19.863.099	KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	54.550.782	100	55.406.890	100	56.798.878	100	58.060.605	100	59.589.296	100	59.589.296	KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			KECAMATAN GUNUNG TERANG					**1.710.979.278**		**1.737.831.025**		**1.781.490.584**		**1.821.064.493**		**1.869.011.736**		**1.869.011.736**	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**		**KECAMATAN**																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	CC (55,81)	1.611.752.618	CC (56,84)	1.637.047.124	CC (57,35)	1.678.174.686	CC (57,60)	1.715.453.543	CC (57,73)	1.760.620.131	CC (57,73)	1.760.620.131	KECAMATAN GUNUNG TERANG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	B (77,92)	B (79,12)	24.244.792	B (79,27)	24.625.284	B (79,35)	25.243.946	B (79,38)	25.804.713	B (79,40)	26.484.132	B (79,40)	26.484.132	KECAMATAN GUNUNG TERANG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	20.431.086	100	20.751.727	100	21.273.073	100	21.745.632	100	22.318.178	100	22.318.178	KECAMATAN GUNUNG TERANG
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	54.550.782	100	55.406.890	100	56.798.878	100	58.060.605	100	59.589.296	100	59.589.296	KECAMATAN GUNUNG TERANG
			KECAMATAN GUNUNG AGUNG					**1.821.726.104**		**1.850.315.888**		**1.896.801.406**		**1.938.936.821**		**1.989.987.554**		**1.989.987.554**	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**		**KECAMATAN**																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	CC (59,25)	1.724.746.936	CC (59,94)	1.751.814.750	B (60,24)	1.795.825.622	B (60,45)	1.835.717.969	B (60,53)	1.884.051.027	B (60,53)	1.884.051.027	KECAMATAN GUNUNG AGUNG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	C (70,81)	C (72,00)	24.244.792	C (72,19)	24.625.284	C (72,29)	25.243.946	C (72,34)	25.804.713	C (72,37)	26.484.132	C (72,37)	26.484.132	KECAMATAN GUNUNG AGUNG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	18.183.594	100	18.468.963	100	18.932.959	100	19.353.535	100	19.863.099	100	19.863.099	KECAMATAN GUNUNG AGUNG
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	54.550.782	100	55.406.890	100	56.798.878	100	58.060.605	100	59.589.296	100	59.589.296	KECAMATAN GUNUNG AGUNG

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			KECAMATAN LAMBU KIBANG					**1.779.683.673**		**1.807.613.653**		**1.853.026.361**		**1.894.189.361**		**1.944.061.927**		**1.944.061.927**	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**		**KECAMATAN**																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	CC (59,75)	1.687.416.209	B (60,23)	1.713.898.163	B (60,46)	1.756.956.455	B (60,58)	1.795.985.365	B (60,64)	1.843.272.294	B (60,64)	1.843.272.294	KECAMATAN LAMBU KIBANG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	B (78,44)	B (78,54)	24.327.646	B (79,72)	24.709.439	B (80,31)	25.330.215	B (80,61)	25.892.899	B (80,75)	26.574.639	B (80,75)	26.574.639	KECAMATAN LAMBU KIBANG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	13.202.614	100	13.409.813	100	13.746.708	100	14.052.076	100	14.422.056	100	14.422.056	KECAMATAN LAMBU KIBANG
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	54.737.204	100	55.596.238	100	56.992.983	100	58.259.022	100	59.792.937	100	59.792.937	KECAMATAN LAMBU KIBANG
			KECAMATAN WAY KENANGA					**1.873.005.641**		**1.902.400.196**		**1.950.194.228**		**1.993.515.708**		**2.046.003.461**		**2.046.003.461**	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**		**KECAMATAN**																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	CC (58,35)	1.776.026.474	CC (59,08)	1.803.899.058	CC (59,44)	1.849.218.445	CC (59,62)	1.890.296.856	CC (59,71)	1.940.066.935	CC (59,71)	1.940.066.935	KECAMATAN WAY KENANGA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	B (78,34)	B (79,06)	24.244.792	B (79,18)	24.625.284	B (79,24)	25.243.946	B (79,27)	25.804.713	B (79,29)	26.484.132	B (79,29)	26.484.132	KECAMATAN WAY KENANGA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	18.183.594	100	18.468.963	100	18.932.959	100	19.353.535	100	19.863.099	100	19.863.099	KECAMATAN WAY KENANGA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	54.550.782	100	55.406.890	100	56.798.878	100	58.060.605	100	59.589.296	100	59.589.296	KECAMATAN WAY KENANGA

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			KECAMATAN TUMIJAJAR					**3.517.161.870**		**3.572.359.465**		**3.662.107.913**		**3.743.457.725**		**3.842.020.121**		**3.842.020.121**	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**		**KECAMATAN**																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	CC (58,89)	3.401.910.043	B (60,05)	3.455.298.901	B (60,62)	3.542.106.434	B (60,91)	3.620.790.542	B (61,06)	3.716.123.204	B (61,06)	3.716.123.204	KECAMATAN TUMIJAJAR
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	B (80,62)	B (80,75)	28.812.957	B (81,10)	29.265.141	B (81,28)	30.000.370	B (81,36)	30.666.796	B (81,41)	31.474.229	B (81,41)	31.474.229	KECAMATAN TUMIJAJAR
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	21.609.717	100	21.948.856	100	22.500.277	100	23.000.097	100	23.605.672	100	23.605.672	KECAMATAN TUMIJAJAR
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	64.829.152	100	65.846.567	100	67.500.832	100	69.000.291	100	70.817.016	100	70.817.016	KECAMATAN TUMIJAJAR
			KECAMATAN PAGAR DEWA					**1.629.823.285**		**1.655.401.387**		**1.696.990.064**		**1.734.686.885**		**1.780.359.872**		**1.780.359.872**	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**		**KECAMATAN**																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	CC (56,50)	1.531.930.089	CC (57,55)	1.555.971.876	CC (58,08)	1.595.062.584	CC (58,34)	1.630.495.194	CC (58,47)	1.673.424.893	CC (58,47)	1.673.424.893	KECAMATAN PAGAR DEWA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	C (69,99)	C (72,50)	24.244.792	C (72,91)	24.625.284	C (73,12)	25.243.946	C (73,23)	25.804.713	C (73,28)	26.484.132	C (73,28)	26.484.132	KECAMATAN PAGAR DEWA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	19.097.623	100	19.397.337	100	19.884.656	100	20.326.373	100	20.861.551	100	20.861.551	KECAMATAN PAGAR DEWA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	54.550.782	100	55.406.890	100	56.798.878	100	58.060.605	100	59.589.296	100	59.589.296	KECAMATAN PAGAR DEWA

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
			KECAMATAN BATU PUTIH					**1.714.764.429**		**1.741.675.580**		**1.785.431.725**		**1.825.093.182**		**1.873.146.498**		**1.873.146.498**	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7	**01**		**KECAMATAN**																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	CC (58,25)	1.617.785.262	CC (59,05)	1.643.174.442	CC (59,45)	1.684.455.942	CC (59,65)	1.721.874.330	CC (59,75)	1.767.209.972	CC (59,75)	1.767.209.972	KECAMATAN BATU PUTIH
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	C (74,31)	C (75,05)	24.244.792	C (75,17)	24.625.284	C (75,23)	25.243.946	C (75,26)	25.804.713	C (75,27)	26.484.132	C (75,27)	26.484.132	KECAMATAN BATU PUTIH
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksannya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	18.183.594	100	18.468.963	100	18.932.959	100	19.353.535	100	19.863.099	100	19.863.099	KECAMATAN BATU PUTIH
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	54.550.782	100	55.406.890	100	56.798.878	100	58.060.605	100	59.589.296	100	59.589.296	KECAMATAN BATU PUTIH
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH					**6.190.207.317**		**6.287.355.123**		**6.445.312.453**		**6.588.488.179**		**6.761.958.064**		**6.761.958.064**	
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**																
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (58,32)	CC (58,99)	2.668.651.304	CC (59,35)	2.710.532.554	B (60,11)	2.778.629.310	B (61,05)	2.840.353.589	B (61,95)	2.915.137.940	B (61,95)	2.915.137.940	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	55	60	672.792.973	65	683.351.644	70	700.519.499	75	716.080.791	75	734.934.654	75	734.934.654	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100	666.731.775	100	677.195.323	100	694.208.512	100	709.629.612	100	728.313.621	100	728.313.621	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	50	65	218.203.126	75	221.627.560	80	227.195.513	85	232.242.419	95	238.357.185	95	238.357.185	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir Kinerja Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	Target	Rp (Dalam Ribu)	
(1)			(2)	(3)		(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi,sosial,dan budaya masyarakat	Persentase Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	157.591.147	100	160.064.349	100	164.085.648	100	167.730.636	100	172.146.856	100	172.146.856	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	1.806.236.991	100	1.834.583.693	100	1.880.673.970	100	1.922.451.132	100	1.973.067.809	100	1.973.067.809	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
TOTAL								**943.643.629.550**		**895.168.283.994**		**917.971.649.676**		**938.641.082.671**		**963.683.904.327**		**963.683.904.327**	

4.1.2.Keselarasan Program Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Program Prioritas Nasional

Dalam melaksanakan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan dengan program – peogram yang di ampu oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana program – program tersebut selaras dalam mendukung program prioritas nasional. Adapun keselarasan program pembangunan daerah dengan program prioritas nasional disajikan dalam bentuk matrik tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Keselarasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi dengan Program Prioritas Nasional.

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).			
	01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	➢ Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ➢ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	➢ Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ➢ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	01.04 PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	01.05	Program Peningkatan	Program Peningkatan	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.			
	02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	02.02 PP: Pembangunan dan Industri Pertahanan	➢ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya ➢ Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	➢ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya ➢ Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	02.03 PP: Komponen Cadangan dan Pendukung	==	==	==

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Program Pengaturan Pertahanan Di Wilayah Pesisir , Laut Dan Pulau	==	==
	02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	==	==	==
	02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	==	==	==
	02.10 PP: Swasembada Pangan	➢ Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan ➢ Program Penanganan	➢ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ➢ Program Penanganan	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
		Kerawanan Pangan ➢ Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ➢ Program Penyuluhan Pertanian ➢ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kerawanan Pangan ➢ Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ➢ Program Penyuluhan Pertanian ➢ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Perkebunan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	02.12 PP: Swasembada Air	➢ Program Pengelolaan Aspek Kegeologian ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air ➢ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ➢ Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air ➢ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	02.13 PP: Ekonomi Syariah	➢ Program Perekonomian Dan Pembangunan ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	➢ Program Perekonomian Dan Pembangunan ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	02.14	➢ Program Pengelolaan	➢ Program Pengelolaan	1. Badan Pendpatan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	PP: Ekonomi Digital	Pendapatan Daerah ➢ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ➢ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) ➢ Program Pengembangan Umkm	Pendapatan Daerah ➢ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ➢ Program Pengembangan UMKM	Daerah 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	➢ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ➢ Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	➢ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah ➢ Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup
	02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	➢ Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ➢ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan ➢ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil ➢ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	➢ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan ➢ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup
	02.17	➢ Program Perencanaan	➢ Program Perencanaan	1. Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Lingkungan Hidup ➢ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Lingkungan Hidup ➢ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) ➢ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	➢ Program Perencanaan Lingkungan Hidup ➢ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	➢ Program Perencanaan Lingkungan Hidup ➢ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.20 PP: Pekerjaan Hijau / Green Jobs	➢ Program Pengelolaan Persampahan ➢ Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	➢ Program Pengelolaan Hutan ➢ Program Pengelolaan Hutan Adat	==	==

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	➢ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ➢ Pengelolaan Perikanan Tangkap ➢ Pengelolaan Perikanan Budidaya	==	==
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.			
	03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimedia	➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLAJ) ➢ Program Pengelolaan Pelayaran ➢ Program Pengelolaan Perkeretaapian	➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLAJ) ➢ Program Pengelolaan Pelayaran Program Pengelolaan	Dinas Perhubungan
	03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	==	==
	03.03	➢ Program Pemberdayaan Usaha	➢ Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) ➢ Program Pengembangan UMKM ➢ Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	➢ Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	➢ Program Pengelolaan Keuangan Daerah ➢ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	➢ Program Pengelolaan Keuangan Daerah ➢ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Badan Keuangan dan Asat Daerah 2. Badan Pendapatan Daerah
	03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.			

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
	04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
	04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Kesejahteraan Rakyat	➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 2. Serkretariat Daerah
	04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
	04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
	04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science,	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)			
	04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Penempatan Tenaga Kerja ➢ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) ➢ Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	➢ Program Pengelolaan Pendidikan ➢ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	04.08 PP: Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	➢ Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah ➢ Program Riset Dan Inovasi Daerah	➢ Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah ➢ Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	➢ Program Kepegawaian Daerah ➢ Program Penataan Organisasi	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	➢ Program Pengembangan Kurikulum ➢ Program Pengembangan Kebudayaan	➢ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ➢ Program Pembinaan	1. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
		➢ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ➢ Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan ➢ Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya	3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
	04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	➢ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➢ Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	➢ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➢ Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	➢ Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat ➢ Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	➢ Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat ➢ Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Dinas Ketahanan Pengan 2. Dinas Perikanan
	04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	➢ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ➢ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ➢ Program Pemberdayaan	➢ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan ➢ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman ➢ Program Pemberdayaan	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
		Masyarakat Bidang Kesehatan	Masyarakat Bidang Kesehatan	
	04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	==	==
	04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	➢ Program Peningkatan Kualitas Keluarga ➢ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	➢ Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) ➢ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
	04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	➢ Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan ➢ Program Perlindungan Perempuan	➢ Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan ➢ Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan	➢ Program Rehabilitasi Sosial ➢ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	➢ Program Rehabilitasi Sosial ➢ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial ➢ Program Penempatan	1. Dinas Sosial 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	Lanjut Usia	➢ Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	
	04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.			
	05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan ➢ Program Pengembangan Ekspor ➢ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ➢ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ➢ Program Penyediaan Dan	➢ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ➢ Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Dinas Perikanan 2. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
		Pengembangan Sarana Pertanian ➢ Program Mineral dan Batubara		
	05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ➢ Program Pengembangan Jasa Konstruksi ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya ➢ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ➢ Program Pengembangan Jasa Konstruksi ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya ➢ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Badan Perencanan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) ➢ Program Pengelolaan Pelayaran ➢ Program Pengelolaan Perkeretaapian ➢ Program Peningkatan Sarana	➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) ➢ Program Pengelolaan Pelayaran ➢ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Badan Perencanan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
		Distribusi Perdagangan		
	05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	➢ Program Pengendalian Izin Usaha Industri ➢ Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ➢ Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan ➢ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	➢ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ➢ Program Pengembangan Ekspor ➢ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ➢ Program Pelayanan Penanaman Modal ➢ Program Kerja Sama Penanaman Modal	➢ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ➢ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ➢ Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Negara	➢ Program Kerja Sama Penanaman Modal ➢ Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6	Membangun Dari Desa Dan Dari			

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan.			
	06.01 PP: Sistem Pendapatan Sosial Ekonomi Terintegrasi	➢ Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ➢ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ➢ Program Pendaftaran Penduduk ➢ Program Pengelolaan Profil Kependudukan ➢ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	➢ Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ➢ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ➢ Program Pendaftaran Penduduk ➢ Program Pengelolaan Profil Kependudukan ➢ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 2. Dinas Komunikasi dan Informastika 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Sosial
	06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	➢ Program Pemberdayaan Sosial ➢ Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ➢ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➢ Program Hubungan Industrial ➢ Program Pengawasan Ketenagakerjaan	➢ Program Pemberdayaan Sosial ➢ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat ➢ Program Hubungan Industrial	1. Dinas Sosial 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi	➢ Program Perencanaan Tenaga Kerja ➢ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Penempatan Tenaga Kerja ➢ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ➢ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	➢ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Penempatan Tenaga Kerja ➢ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ➢ Program Pengembangan UMKM	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	➢ Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) ➢ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase ➢ Program Penataan Bangunan Gedung ➢ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	➢ Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) ➢ Program Penataan Bangunan Gedung ➢ Program Penataan Bangunan Gedung ➢ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya ➢ Program Penyelenggaraan Jalan ➢ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ➢ Program Pengembangan Jasa	1. Dinas Permuahan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
		➢ Program Pengembangan Jasa Konstruksi ➢ Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konstruksi ➢ Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ➢ Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Bukan Kewenangan Provinsi dan Kabiupaten / Kota		
	06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	➢ Program Pengembangan Perumahan ➢ Program Pengembangan Permukiman ➢ Program Kawasan Permukiman	➢ Program Pengembangan Perumahan ➢ Program Kawasan Permukiman	Dinas Permuahan Permukiman dan Pertanahan
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.			
	07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
		Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
	07.02 PP: Reformasi Hukum	➢ Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum ➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan ➢ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan ➢ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
	07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	➢ Program Penataan Organisasi ➢ Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum ➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
	07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	==	==
	07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan ➢ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	➢ Program Penyelenggaraan Pengawasan ➢ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
	07.06 PP: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkoba (P4GN)	➢ Program Pemberdayaan Sosial ➢ Program Rehabilitasi Sosial	➢ Program Pemberdayaan Sosial ➢ Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	Program Penataan Organisasi	==	==
	07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	==	==
	07.10 PP: Pemerintah Digital	Program Penataan Organisasi	==	==
	07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negera	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	➢ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ➢ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	➢ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ➢ Prgram Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
	07.15	Program Stabilisasi Harga Barang	➢ Program Perekonomian Dan	1. Sekretariat Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	PP: Pengendalian Inflasi	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pembangunan ➢ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	07.16 PP: Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	==	==
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.			
	08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan	➢ Program Pengembangan Kebudayaan	➢ Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Provinsi Lampung)	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN Dan PP Nasional (Tingkat Kab. Tulang Bawang Barat)	Prangkat Daerah Kab. Tulang Bawang Barat Pengampu Program
	Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	➢ Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya ➢ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	➢ Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	2. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
	08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	➢ Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ➢ Program Penanggulangan Bencana ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air	➢ Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ➢ Program Penanggulangan Bencana ➢ Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung dan Bapperida Tulang Bawang Barat , 2025

4.1.3. Program RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Dukungan Untuk Kegiatan Prioritas Utama (Lapiran 1) RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029.

Pada RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu dalam Lampiran 1 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan staftehotders lainnya.

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan bagian dari RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional sebagi bentuk keselarasan maka RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan dukungan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang tertera pada Lampiran 1 RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dengan program – program yang diampu perangkat daerah pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Dukungan Program RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Dengan Kegiatan Prioritas Utama Pada Lampiran 1 RPJM Nasional Tahun 2025 - 2029

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Pangan Hewani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas peternakan dan kesehatan Hewan
2	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
3	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
4	Pengernbangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
5	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
6	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemroaeaan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
7	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperindag
8	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
12	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
13	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
14	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
15	Etiminasi Penyakit Kusta & Schisrosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
16	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
17			
18	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
19	Penguatan Pres dan Media Masa Yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
20	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya.		
22	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
23	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
24	Pengembangan Managemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi		
25	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan

4.1.4. Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Dalam upaya mensinergi perencanaan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota), Pemerintah Daerak Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan integrasi program-program perangkat daerah yang secara langsung mendukung tematik pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Tematik pembangunan tersebut meliputi antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Stabilitas Harga Pangan, dan Penyediaan Cadangan Pangan. Setiap perangkat daerah telah merumuskan program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas capaian pembangunan serta memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dukungan program ini juga menunjukkan komitmen Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil. Berikut disampaikan tabel keselarasan Tematik, program perangkat daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan.

Tabel 4.5
Program Perangkat Daerah Pendukung Tematik Pembangunan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, trantibum, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,)	Program pengelolaan pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	===	====
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	===	===
		Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Penangan Bencana	Program Penangan Bencana	Dinas Sosial

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Pol PP
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program penataan bangunan gedung	Program penataan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pengembangan perumahan	Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program kawasan permukiman	Program kawasan permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program peningkatan	Program peningkatan prasarana,	Dinas Perumahan, Kawasan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	sarana dan utilitas umum (psu)	Permukiman dan Pertanahan
2	Pengendalian Inflasi	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program pengembangan ekspor	===	==
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	===	==
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program penyuluhan pertanian	Program penyuluhan pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Prekonomian Sekretariat Daerah
		Program penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Program penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pembinaan, pengawalan dan pemantauan harga		
		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Penurunan Stunting	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyaraka	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyaraka	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program Pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Perikana Tangkap	Program Pengelolaan Perikana Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Kawasan Pemukiman	Program Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program rehabilitasi sosial	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
		Program pengendalian penduduk	Program pengendalian penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
4	Penurunan Angka Kemiskinan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh
		Program pembangunan kawasan transmigrasi	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian		
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)		
		Program pengembangan umkm	Program pengembangan umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil		
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Perikanan
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
		Program pemasaran pariwisata		
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,
		Program penanganan kerawanan pangan	Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,
		Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan		
		Program pengelolaan ketenagalistrikan		
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
		Program fasilitasi dan koordinasi hukum		

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program penyelenggaraan jalan	Program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
		Program penataan bangunan gedung	Program penataan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
		Program pengembangan perumahan	Program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program pemberdayaan sosial	Program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial
		Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		
		Program rehabilitasi sosial	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Program penanganan bencana	Program penanganan bencana	Dinas Sosial
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
		Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian provinsi	Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
5	Ketahanan Pangan	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		
		Program penanganan kerawanan pangan	Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,
		Program pengawasan keamanan pangan	Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Program penyuluhan pertanian	Program penyuluhan pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
6	Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil		
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan		
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	

NO	TEMATIK	PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM KAB/KOTA PENDUKUNG PROGRAM PROVINSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KABUPATEN
		Program Penyuluhan PertaniaN		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Tulang Bawang Barat selama 5 (lima) tahun ke depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil - hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia/Indeks Modal Manusia. Disamping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Tulang Bawang Barat diupayakan mampu menjaga keselarasan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2025 – 2029
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Formula	Sumber Data	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,85	71,35	71,90	72,35	72,95	73,25	$IPM = \sqrt[3]{I.Kesehatan\ x\ I.Pendidilan\ x\ I.Pengeluran\ \ x}\ 100$ **Keterangan :** *I.Kesehatan : Angka Harapan Hidup* *I. Pendidikan : Harapan Lama Sekolah & Rata – Rata Lama sekolah.* *I. Pengeluaran : Pengeluran Perkapita Disesuaikan*	BPS Tulang Bawang Barat	
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,37	74,74	75,11	75,15	75,27	75,60	$UHH = \frac{\sum Usia\ Penduduk\ Yang\ Meninggal\ Dalam\ Tahun\ i}{\sum Penduduk\ Yang\ Meninggal\ Dalam\ Tahun\ i}$	BPS Tulang Bawang Barat	
3	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,82	7,92	8,02	8,12	8,13	8,20	$RLS = \frac{1}{n}\ x \sum_{i=1}^{n} x\ i$ Keterangan : RLS = Rata – Rata Lama Sekolah Xi = Lama Sekolah Penduduk Ke I Berusia 25 Tahun N = Jumlah Penduduk Usia > 25 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BPS Tulang Bawang Barat	

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Formula	Sumber Data	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,30	12,36	12,42	12,47	12,58	12,72	$HLS = FK\ x \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : HLS = Harapan Lama Sekolah E = Penduduk Usia I Yang Bersekolah pada tahun c P = Jumlah Penduduk Usia I Pada Tahun t I = Usia (a, a+1,..... n) FK = Faktor Koreksi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BPS Tulang Bawang Barat	
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	89,97	90,21	90,46	90,70	90,95	91,19	IPG $= \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki{-}Laki}$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6	Indeks Perlindungan anak	Angka	64,60	65,13	65,66	66,20	66,73	66,85	$IPA = \sum_{j=1}^{5}(W_j\ x\ Indeks\ K_j)$ Keterangan : **IPA** adalah Indeks Perlindungan Anak **Wj** adalah Bobot Kluster Kj **Kj** adalah nilai indeks kluster ke-j	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Formula	Sumber Data	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
									Dimana untuk mendapatkan nilai Kj melalui persamaan berikut : $A = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX\,ji}{n_j}\right) \; x\,100$ Keterangan : **SX_{Ji}** adalah nilai indikator i pada kluster Ke-j yang sudah di normalisasi **n_j** adalah banyaknya indikator kluster ke-j **Indeks K_j** adalah kluster ke-j	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	4,69	4,76	4,83	4,90	4,97	5,10	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}}\right) x\,100\,\%$ Keterangan : PE = Pertumbuhan Ekonomi PDB = Produk Domestik Bruto T = Priode Terttentu t-1 = Periode Sebelumnya	BPS Tulang Bawang Barat	
8	Tingkat Inflasi	Persen (%)	2,8-3,5	2,7-3,5	2,6-3,6	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	$Li = [(\{1 + \Delta Inf1\}\{1 + \Delta Inf2\}\{1 + \Delta Inf3\})1/t] - 1$ Keterangan : *Li = Laju Inflasi* $\Delta Inf1$ *= Perubahan Inflasi dari tahun sebelumnya* *t = Periode Pengamatan Perubahan Inflasi*	Sekretariat Daerah BPS	

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Formula	Sumber Data	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
9	Rasio Gini	Persen (%)	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269	0,219 – 0,269	Rumus Gini Ratio: $GR = 1 - \sum fi\ [Yi + Yi\text{-}1]$ Ket : fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0 artinya : ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR = 1 artinya : ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja	BPS Tulang Bawang Barat	
10	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	7,18	7,15	6,95	6,75	6,55	6,35	$AK = \frac{Penduduk\ Dengan\ Pendapatan < GK}{Total\ Penduduk}\ x\ 100\ \%$ Keterangan : *AK = Angka Kemiskinan* *GK = Garis Kemiskinan*	BPS Tulang Bawang Barat	

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Formula	Sumber Data	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	3,89	3,62	3,52	3,42	3,32	3,22	$TPT = \frac{PP}{PAK} x\ 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (Orang) PAK = Jumlah Angkatn Kerja (Orang)	BPS Tulang Bawang Barat	
12	Indeks RB	Skor	B (68,50)	B (68,95)	B (69,35)	B (69,75)	B (69,95)	BB (70,15)	Hasil Perhitungan Indesk Reformasi Birokrasi Kementerian RB	Sekretariat Daerah Tulang Bawang Barat	
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,66 (Baik)						Hasil Penilaian SPBE / IPD	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
	Indeks Pemerintahan Digital	Angka		1,1	1,2	1,3	1,5	1,7			
14	Nilai SAKIP	Angka	B (60,79)	B (61,39)	B (61,99)	B (62,59)	B (63,19)	B (63,79)	Nilai Hasil Penilaian Dari Kemenpan RB Republik Indonesia	Sekretariat Daerah Tulang Bawang Barat	
15	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penilaian BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
16	Maturitas SPIP	Angka	3,25	3,32	3,35	3,37	3,40	3,40	Nilai Maturitas SPIP	Inspektorat	
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,97 (Baik)	77,20 (Baik)	77,43 (Baik)	77,66 (Baik)	77,89 (Baik)	78,12 (Baik)	Hasil Survei IKM	Bapperida / Sekretariat Daerah	

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Formula	Sumber Data	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	76,80	77,08	77,37	77,66	77,95	78,23	$n_0 = \left(\frac{Z_\mu + Z_\beta}{0{,}5\ Ln[(1+r)(1-r)]}\right) + 3$ Keterangan : Z = nilai z pada interval kepercayaan r = nilai korelasi pengukuran sesuai teori n = jumlah populasi untuk mendapatkan nilai indeks kerukunan umat beragama yaitu : $n = \frac{n_o}{1 + \frac{(n_o - 1)}{N}}$	Sekretariat Daerah	
19	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Persen (%)	C (74,45)	C (76,45)	B (78,45)	B (80,45)	B (82,45)	B (84,45)	Hasil Servei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	BAPPERIDA	
20	Persentase Jalan Mantap Kabupaten	Persen (%)	43,90	44,34	44,79	45,23	45,69	46,69	$PPJM = \frac{Panjang\ Jalan\ Kabupaten\ Dalam\ Kondisi\ Mantap}{Total\ Panjang\ Jalan\ Kabupaten}\ x\ 100\%$ Keterangan : PPJM = Persentase Panjang Jalan Mantap	Dinas PUPR BPS Tulang Bawang Barat	

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Formula	Sumber Data	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,80	67,05	67,31	67,56	67,81	68,06	*IKLH Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)* IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan	Dinas Lingkungan Hidup	

Selain dari Indikator Kinerja Utama (IKU) kinerja daerah dilakukan pengukuran dengan indikator kinerja daerah (IKD) yang dalam dokumen RPJMD tahun 2025 – 2029 disajikan pada tabel 4.7 yang terdiri dari IKD dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) serta indikator Makkro Daerah tahun 2025-2029 sebagai mana dibawah ini.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD tahun 2025 -2029
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Produsen Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I. Indikator Kinerja Makro									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,88	5,18	5,43	5,68	5,88	6,08	BPS
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,72-7,00	6,90-7,15	6,00-6,90	5,67-6,39	5,30-6,00	4,95-5,75	BPS
3	PDRB Perkapita	Rp. Juta	55,57	61,30	68,10	75,30	83,30	92,80	BPS
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,90-4,06	3,62	3,62-3,78	3,52-3,68	3,42-3,58	3,32-3,48	BPS
5	Indeks Gini	Angka	0,292	0,219-0,269	0,273-0,284	0,270-0,280	0,268-0,275	0,265-0,273	BPS
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,46	71,20	71,73	72,29	72,85	73,30	BPS
7	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Provinsi	%	3,18	3,18	3,18	3,17	3,17	3,17	BPS
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,80	67,05	67,31	67,56	67,81	68,06	BPS
9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif *)	Ton CO2e	40.657,30	43.947,44	47.596,35	51.701,54	55.964,58	60.601,45	PROVINSI
II. IKD Aspek Geografi dan Demografi									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,23	85,84	86,46	87,07	87,69	88,30	DKP
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	7,39	7,05	6,72	6,38	6,05	5,71	DKP
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	750	750	750	750	750	750	PLN

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Produsen Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Rumah Tannga Dengan Akses Sumber Air Minum Aman	%	2,28	2,31	2,38	2,45	2,53	2,62	Dinas PUPR
5	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Angka**	**66,80**	**67,05**	**67,31**	**67,56**	**67,81**	**68,06**	**DLH**
6	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,095	0,19	0,285	0,375	0,474	0,574	Dinas PUPR
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	31,08	35,81	40,54	45,27	50	52	DLH
8	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	32,00	32,21	32,42	32,63	32,84	33,05	DLH
9	**Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif *)**	**Ton CO2e**	**40.657,30**	**43.947,44**	**47.596,35**	**51.701,54**	**55.964,58**	**60.601,45**	**DLH Provinsi**
10	Indeks Resiko Bencana	Angka	119,91	118,8	117,69	116,58	114,36	113,25	BPBD
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	BPS/Disdukcapil
13	Koefisiensi Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten *)	Angka	5,15	5,08	5,02	4,95	4,87	4,82	Data Provinsi
III. IKD Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Prevalensi Stunting	Persen	12,75	12,15	11,70	11,00	10,65	10,20	(SKI/SSGI) / Dinas Kesehatan
2	Cakupan Kepesertaan JKN (%)	Persen	87,48	87,93	88,25	88,97	89,35	89,92	DINAS KESEHATAN/DINAS SOSIOAL
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,88	5,18	5,43	5,68	5,88	6,08	BPS

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Produsen Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,72-7,00	6,90-7,15	6,00-6,90	5,67-6,39	5,30-6,00	4,95-5,75	BPS,Dinsos
5	Kemiskinan Ekstrim	Persen	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	BPS/Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
6	PDRB Perkapita	Rp. Juta	55,57	61,30	68,10	75,30	83,30	92,80	BPS
7	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,5	BPS/Dinas TPHP/Dinas Peternakan/Dinas Perikanan
8	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		2,44	2,51	2,57	2,63	2,70	2,73	OJK, BI & BPS
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,90-4,06	3,62	3,62-3,78	3,52-3,68	3,42-3,58	3,32-3,48	BPS
10	**Indeks Gini**	**Angka**	**0,292**	**0,219-0,269**	**0,273-0,284**	**0,270-0,280**	**0,268-0,275**	**0,265-0,273**	**BPS**
11	Indeks Modal Manusia *)		0,53	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	
12	Kontribusi Sektor Industri Dalam PDRB	Persen	28,01	28,22	28,43	28,64	28,90	28,93	BPS / Dinas KOPERINDAG
13	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,37	74,74	75,11	75,15	75,27	75,60	BPS
14	Prevalensi Stunting	Persen	9,85	9,25	8,80	8,10	7,75	7,30	BPS
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	6,46	6,54	6,58	6,62	6.66	6,70	BPS / Dinas Pendidikan
16	Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Tahun	7,82	7,92	8,02	8,12	8,13	8,20	BPS/Dinas Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Produsen Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17	Angka Literasi Numerasi	Skor	38,62	40,46	42,31	44,15	46,00	47,84	Disdikbud
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	63,32	63,32	63,78	64,00	64,50	65,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	36,46	38,11	39,76	41,41	43,07	44,72	Disnaker
20	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,80	77,08	77,37	77,66	77,95	78,23	Kemenag
21	Indeks Pembangunan Kebudayaan *)	Angka	59,1	59,82	60,55	61,27	62,00	62,72	Kemendikbud
22	Indeks Perlindungan Anak	Angka	64,60	65,13	65,66	66,20	66,73	66,85	DPPA
23	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,479	0,446	0,414	0,382	0,350	0,310	BPS/DPPA
24	Indeks Pembangunan Gender	Angka	89,97	90,21	90,46	90,70	90,95	91,19	BPS/DPPA
25	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%)	Persen	32,98	33,65	34,9	36,15	37,41	38,66	BPS / NAKERTRANS
26	Persentase Rumah Layak Huni Ditangani	Persen	46,35	49,03	51,71	54,39	57,08	59,76	PERKIMTA
27	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Kabupaten	Persen	90,36	90,34	90,33	90,31	90,30	90,29	Dinas KOPERINDAG
28	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	9,852	9,999	10,115	10,345	10,678	10,958	BPS
29	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada	Persen	1,39	1,59	1,79	1,99	2,19	2,39	2,39

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Produsen Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Level Kabupaten								
30	Indeks Pembangunan Pemuda *)	Indeks	49,53	60,53	62,53	63,53	64,00	65,00	Data Provinsi
31	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	0,095	0,19	0,285	0,375	0,474	0,574	Dinas PUPR
32	Timbulan Sampah Terolah di Fasiltas Pengelolaan Sampah	Persen	31,08	35	40	45	50	55	Dinas LINGKUNGAN HIDUP
33	Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	32,00	32,25	32,55	32,75	32,84	33,00	Dinas LINGKUNGAN HIDUP
34	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	750	750	750	750	750	750	PLN
35	Kapasitas Air Baku *)	(M3/Detik)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	Data Provinsi
36	Persentase Rumah Tangga Aksas air Minum aman (layak)	Persen	2,28	2,31	2,38	2,45	2,53	2,62	Dinas PUPR
IV.	**IKD Aspek Daya Saing Daerah**								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	28,01	28,22	28,43	28,64	28,90	28,93	BPS
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,17	1,23	1,30	1,36	1,43	1,49	BPS
3	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,82	1,91	2,01	2,10	2,20	2,29	BPS/DISPORPAR
4	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil	Persen	14,40	14,95	15,51	15,75	15,90	16,25	**BPS / KOPERINDAK**
5	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,64	2,75	2,85	2,96	3,07	3,27	Data Provinsi
6	Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	54,50	55,14	55,79	56,43	57,08	57,72	

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Produsen Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Pertumbuhan Investasi	Persen	5	5	5	5	5	5	Dinas PMPTSP
8	Indeks Ekonomi Biru Indonesia *)	Angka	23,43	27,57	31,71	35,85	40	42	Data Provinsi
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer *)	Persen	36	36,45	36,9	37,35	37,80	39,80	Data Provinsi
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	29,94	29,99	30,04	30,09	30,15	32,15	BKAD
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	C (74,45)	C (76,45)	B (78,45)	B (80,45)	B (82,45)	B (84,45)	PUPR,DISHUB,BAPPERIDA
12	Persentase Rumah Layak Huni di Tangani	Persen	46,35	49,03	51,71	54,39	57,08	59,76	PUPR
13	Persentase Desa Mandiri	Persen	22	24	29	30	34	36	PMT
14	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0,35	0,41	0,48	0,54	0,61	0,67	BAPENDA
15	Tingkat Inflasi *)	Persen	2,8-3,5	2,7-3,5	2,6-3,6	2,5-3,5	2,5-3,5	2,5-3,5	BPS
16	Return On Aset (ROA) BUMD	Persen	3,89	4,08	4,26	4,52	4,78	5,04	BKAD / BUMD TUBABA
17	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	Angka	NA	70	72	74	76	78	BAPPERIDA/SEKRETARIAT DAERAH
18	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	Angka	122,93	120,91	118,88	116,86	114,83	112,80	BPS / SAT POL PP
19	Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah)	Persen	40	44	48	52	56	60	SAT POL PP
20	Persentase Kelompok Seni Yang Aktif Terlibat / Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam Satu Tahun Terakhir	Persen	70	75	80	85	90	95	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Produsen Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Persentase Panjang Jalan Yang Dilengkapi Fasilitas Keselamatan	Persen	79	82,25	85,50	88,75	92	95	Dinas Perhubungan
22	Persentase Luas Areal Fungsi Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	40,83	40,88	41	41,02	41,94	42,53	42,53
23	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Persen	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	Dinas KOPERINDAG
24	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,27	3,28	3,30	3,31	3,34	3,35	BRIN/BAPPERIDA
V. IKD Aspek Pelayanan Umum									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	B (68,50)	B (68,95)	B (69,35)	B (69,75)	B (69,95)	BB (70,15)	BAGIAN HUKUM
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,66 (Baik)	2,83 (Baik)	3,00 (Baik)	3,17 (Baik)	3,34 (Baik)	3,51 (Sangat Baik)	KEMENPAN/KOMINFO
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,52 (B)	3,62 (B)	3,72 (B)	3,82 (B)	3,92 (B)	4,02 (A-)	KEMENPAN/BAGIAN ORAGNISASI
4	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)	Angka	65	67	69	72	75	76	INSPEKTORAT
5	Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah)	Persen	40	44	48	52	56	60	SATPOL-PP
6	Indeks Pebangunan Kebudayaan *)	Indeks	59,10-59,12	59,13-59,17	59,18-59,25	59,26-59,49	59,50-62,00	62,10-63,00	Data Provinsi
7	Indeks Pengeloaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	75,73	76,98	78,23	79,48	79,98	80,48	BRIN / BAPERIDA
8	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Nilai	50,44 (Inovatif)	53,55 (Inovatif)	55,11 (Inovatif)	56,66 (Inovatif)	58,22 (Inovatif)	59,77 (Inovatif)	BRIN / BAPPERIDA
9	Cakupan Layanan	Persen	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	Dinas Damkar

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Produsen Data
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban								
10	Indeks Pembangunan Teknologi Infromasi dan Komunikasi *)	Indeks	5,80	5,88	5,95	6,02	6,10	6,18	Data Provinsi
11	Persentase Fasilitas Pemerintah Tiyuh Terkoneksi Internet	Persen	54	56	58	61	63	65	Dinas Kominfo / PMT
12	Indeks Demokrasi Indonesia *)	Indeks	79,36-81,00	-	-	-	82,00-83,00	-	Data Provinsi
13	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya *)	Persen	71,70	72,56	73,30	74,10	74,90	75,70	Data Provinsi
14	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	100	100	100	100	100	100	Bapperida
15	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) / Inklusi Keuangan	Indeks	2,44	2,51	2,57	2,63	2,70	2,73	BKAD / OJK

*Keteranga : *) Menggunakan Capaian Angka Provisi Lampung*

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PERANGKAT DAERAH								
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**								
a	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,82	7,92	8,02	8,12	8,13	8,20	8,20
b	Nilai Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,30	12,36	12,42	12,47	12,58	12,72	12,72
c	Angka Patisipasi Murni (APM) SD/MI/PAKET A	Persen	100	100	100	100	100	100	100
d	Angka Patisipasi Murni (APM) SMP/MTS/PAKET B	Persen	100	100	100	100	100	100	100
e	Angka Pertisipasi Murni (APM) PAUD	Persen	75	78	81	84	88	90	90
f	Angka Pertisipasi Kasar (APK) SD/MI/PAKET A	Persen	100	100	100	100	100	100	100
g	Angka Pertisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/PAKET B	Persen	100	100	100	100	100	100	100
i	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	B (60,79)	B (61,39)	B (61,99)	B (62,59)	B (63,19)	B (63,79)	B (63,79)
j	Jumlah Warganegara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	72,11	75,15	78,19	81,23	84,20	87,17	87,17
k	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpertisipasi dalam Pendidikan dasar	Persen	97,55	97,76	97,97	98,19	98,61	99,03	99,03
l	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Persen	10,9	11,67	12,43	13,19	13,95	14,71	14,71
m	Skor Kemampuan Literasi SD	Skor	54,92	57,42	59,92	62,42	64,92	67,42	67,42
n	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Skor	49,92	52,82	55,72	58,62	61,52	64,42	64,42

No		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	o	Skor Kemampuan Literasi SMP	Skor	65,57	66,67	67,77	68,87	69,97	71,07	71,07
	p	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	34,81	42,95	53,8	67,36	83,64	99,92	99,92
	q	Guru bersertifikat pendidik	Persen	67	69	71	81	90	97	97
	r	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Perse	37,76	38,76	39,76	40,76	41,76	42,76	42,76
	s	Iklim keamanan SD	Persen	68,71	69,61	70,51	71,41	72,31	73,21	73,21
	t	Iklim keamanan SMP	Persen	68,52	70,02	71,52	73,02	74,52	76,02	76,02
	u	Iklim kebhinekaan SD	Persen	69,26	70,26	71,26	72,26	73,26	74,26	74,26
	v	Iklim kebinekaan SMP	Persen	68,22	69,22	70,22	71,22	72,22	73,22	73,22
	w	Iklim inklusivitas SD	Persen	55,63	58,13	60,63	63,13	65,63	68,13	68,13
	x	Iklim inklusivitas SMP	Persen	56,26	58,66	61,06	63,46	65,86	68,26	68,26
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**									
	a	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	39,1 Per 100. 000 Penduduk	39,1 Per 100. 000 Penduduk	39,1 Per 100. 000 Penduduk	19,5 Per 100. 000 Penduduk	19,5 Per 100. 000 Penduduk	19,5 Per 100. 000 Penduduk	19,5 Per 100. 000 Penduduk
	b.	Angka Kematian Bayi	Per 1000 kelahiran hidup	3 Per 1000 kelahiran hidup	3 Per 1000 kelahiran hidup	2,8 Per 1000 kelahiran hidup	2,8 Per 1000 kelahiran hidup	2,8 Per 1000 kelahiran hidup	2,6 Per 1000 kelahiran hidup	2,6 Per 1000 kelahiran hidup
	c	Prevalensi *Wasting*	Persen	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,9	4,9
	d	Cakupan Keaktifan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	80	80	80	80	80	80	80
	e	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	B (62,60)	B (62,60)	B (64,10)	B (65,45)	B (66,95)	B (68,45)	B (68,45)
	f	Persentase ANC Minimal 6 Kali (K6) (%)	Persen	80	82	85	88	89	90	90

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN							KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	g	Cakupan Imunisasi Lengkap 14 Antigen(%)	Persen	72	76	80	84	87	90	90
	h	Cakupan Penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	Persen	90	90	90	90	90	90	90
	i	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis	Persen	90	90	90	90	90	90	90
	j	Indeks Penilaian Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	k	Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	15	20	25	30	35	40	40
	l	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	n	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	20	22	25	25	25	30	30
	O	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	Persen	75	75	75	75	75	75	75
	P	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	57	60	63	66	69	70	70
3	**Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
	a	Persentase Jalan Mantap	Persen	43,90	44,34	44,79	45,23	45,69	46,69	46,69
	b	Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air Minum aman	Persen	2,28	2,31	2,38	2,45	2,53	2,62	2,62
	c	Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sanitasi aman	Persen	0,095	0,19	0,285	0,375	0,474	0,574	0,574
	d	Persentase Luas Areal Fungsi Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	40,83	40,88	41	41,02	41,94	42,53	42.53

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN							KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	e	Persentase Penerbitan Perizinan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persen	80	82	84	86	88	90	90
	f.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	62	63	65	66	67	70	70
	g.	Persentase Jembatan Kondisi baik	Persen	82,38	83,2	83,61	84,02	84,43	84,43	84,43
	h.	Persentase ketersediaan tenaga lokal jasa konstruksi yang bersertifikat.	Persen	22,33	31,17	32,93	34,11	34,95	35,58	35,58
	i.	Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi baik	Persen	15,50	15,69	15,74	15,77	15,84	15,92	15,92
	j.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan	Persen	31,08	31,27	31,26	31,65	31,84	31,84	31,84
	k.	Persentase Bangunan Gedung yang berizin sesuai dengan rencana tata ruang	Persen	46	50	53	57	60	63	63
4	**Urusan Permintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
	a	Persentase warga negara korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	90	90	90	90	90	90	90
	b	Persentase kebutuhan tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Persen	95	95	95	95	95	95	95
	c.	Persentase Luas kawasana permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen	90	90	90	90	90	90	90
	d	Persentase RTH kawasan perumahan dan permukian yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN							KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	**Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan									
	a.	Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas Bidang Pemadam Kebakaran	Angka	40	42	45	47	49	50	50
	b.	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00	68,00
	c.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	75	75,5	76	76,5	77	77,5	77,5
	d.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Nilai	56,1	56,3	56,5	56,7	56,9	57	57
	e	Respon Time Kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
	f	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan	Persen	41,2	42,5	43,2	43,5	44,2	44,5	44,5
	g	Prosentase Penanggulangan Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	h	Jumlah Aparatur yang Tersertifikasi	Orang	10	15	15	15	15	15	15
	Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP)									
	a	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	34,14	39,02	43,9	48,78	53,65	58,53	58,53
	b	Persentase Penyelanggaraan Tibumtranmas	Persen	75	75	75	75	75	80	80
	c	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Orang	60	65	65	70	70	75	75
	d	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	50	50	50	50	50	50	50

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	e	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamomg Praja)	Angka	57,98	58,75	59,95	60,73	61,85	62,87	62,87
	f	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	perda	9	12	14	16	18	20	20
	g	Jumlah Operasi Penegakan Perda yang dilaksanakan	kali	12	14	16	18	20	22	22
	h	Jumlah Penertiban yang dilaksanakan	kali	12	12	12	12	12	12	12
	i	Jumlah Kegiatan Pengamanan Ketertiban Umum	kali	30	30	30	30	30	30	30
	j	Jumlah Pengawalan Pejabat yang dilaksanakan	kali	252	252	252	252	252	252	252
	k	Persentase pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	persen	100	100	100	100	100	100	100
	l	Persentase aparatur Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional	persen	40	40	40	40	40	40	40
	m	Jumlah anggota Linmas yang dilatih/diberikan pembinaan	orang	100	100	100	100	100	100	100
	n	Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	orang	2	3	4	5	6	7	7
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)									
	a	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.58	0.60	0.62	0.64	0.66	0.68	0.68
	b	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	CC (56,55)	CC (58,77)	CC (59,93)	B (61,35)	B (63,89)	B (65,97)	B (65,97)
	c	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97
	d	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Orang	100	100	100	100	100	100	100

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN							KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		bencana								
	e	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/lega	Persen	43	71	71	86	86	71	71
	f	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	g	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	**Urusan Pemerintah Bidang Sosial**									
	a	Indeks Kesejahteraan Sosial								
	b	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	97,96%	97,99%	98,00%	98,02%	98,04%	98,06%	98,06%
	c	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitas Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d	Jumlah anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	e	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	f	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	g	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUNAN							KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota.								
B.	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja**									
	a	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja		1,74	1,76	1,77	1,79	1,80	1,81	1,81
	b	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,89	3,62	3,52	3,42	3,32	3,22	3,22
	c	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	54,21	54,93	55,65	56,36	57,08	57,65	57,65
	d	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	B (60,79)	B (61,39)	B (61,99)	B (62,59)	B (63,19)	B (63,79)	B (63,79)
	e	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	85	87	88	89	90	92	92
	f	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	80	81	83	85	87	90	90
	g	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek	Persen	69	70	73	75	76	78	78
	h	Angka Sengkaeta Pengusaha-Pekerja Pertahun	Persen	25	20	16	12	8	4	4
2	**Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**									
	a	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	89,97	90,21	90,46	90,70	90,95	91,19	91,19
	b	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,475	0,475	0,452	0,429	0.406	0,383	0,383
	c	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,60	65,13	65,66	66,20	66,73	66,85	66,85
	d	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	58,89	59,97	61,25	63,75	65,94	65,94	65,94

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	e	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	f	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka	650	650	650	650	650	650	650
	g	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	h	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	100	100	100	100
	i	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100
	j	Tingkat Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan,evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100	100
	k	Persetase Korban Kekerasan Pada Anak Yang Mendapat Pelayanan dan Pendampingan	100	100	100	100	100	100	100	100
3	**Urusan Pemerintah Bidang Pangan**									
	a	Skor Pola Pangan Harapan Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Persen	88,10	89,70	90,25	91,30	92,90	93,40	93,40
	b	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	31	41	49	58	64	70	70
	c	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	82	83	84	85	86	87	87
	d	Nilai Sakib Perangkat Daerah	Angka	CC (58,65)	CC (58,65)	CC (59,96)	B (61,33)	B (62,97)	B (64,55)	B (64,55)

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	e	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,23	85,84	86,46	87,07	87,69	88,3	88,3
	f	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	85,7	90,2	92,7	94,5	95	95,5	95,5
	g	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	7,39	7,05	6,72	6,38	6,05	5,71	5,71
4	**Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup**									
	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,80	67,05	67,31	67,56	67,81	68,06	68,06
	b.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	42,50	43,00	45,00	47,00	50,00	50,00	50,00
	c.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	CC (59,62)	B (60,12)	B (60,62)	B (61,12)	B (61,62)	B (62,12)	B (62,12)
	d	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	71,51	71,91	72,31	72,71	73,11	73,11	73,11
	e	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	67,14	67,34	67,54	67,74	67,94	67,94	67,94
	f	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	57,51	57,58	57,65	57,72	57,79	57,79	57,79
	g	Persentase Titik Pantau Kualitas Lingkungan (Air dan Udara) yang dipantau	%	100	100	100	100	100	100	100
	h	Persentase Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang buat	%	100	100	100	100	100	100	100
	i	Jumlah bank sampah aktif yang beroperasi.	%	30	40	50	60	70	70	70
	j	Persentase tonase sampah yang dikurangi dan ditangani sesuai target kegiatan	%	42,50	43,00	45,00	47,00	50,00	50,00	50,00

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	k	Persentase Laporan SIPSN yang tervalidasi	%	100	100	100	100	100	100	100
	l	Jumlah perusahaan dan kegiatan usaha yang diawasi dan dibina terkait perizinan dan kepatuhan lingkungan	Usaha/ Kegiatan	20	20	20	20	20	20	20
	m	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang di evaluasi dan diterbitkan persetujuan lingkungannya	Usaha/ kegiatan	10	10	10	10	10	10	10
	n	Persentase pengaduan masyarakat yang diverifikasi dan ditindaklanjuti, serta kecepatan waktu respons.	%	100	100	100	100	100	100	100
	o	Luas RTH yang diinventarisasi	Ha	1500	1700	2000	2200	2500	2500	2500
5	**Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
	a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	(B) 84,00	(B) 84,50	(B) 85,00	(B) 85,50	(B) 86,00	(B) 86,50	(B) 86,50
	b	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	(B) 60,79	(B) 61,39	(B) 61,99	(B) 62,59	(B) 63,19	(B) 63,79	(B) 63,79
	c	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	Persen	0,99	0,9915	0,9925	0,9945	0,9960	0,9975	0,9975
	d	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	70	72	74	77	80	82	82
	e	Persentase AKta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	99,85	99,88	99,90	99,93	99,95	100	100
	f	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	30	35	40	45	50	51	51
	g	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN							KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	h	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	i	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	j	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	70	72	73	75	76	77	77
	k	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	**Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh**									
	a	Persentase Desa Mandiri	Persen	22	24	29	30	34	36	36
	b	Persentase Desa Maju	Persen	55	56	58	60	64	68	68
	c	Persentase Desa Berkembang	Persen	23	20	18	16	12	08	08
	d	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Berkembang	Persen	69	71	73	75	77	80	80
	e	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Maju	Persen	0	2	5	10	15	20	20
	f.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh)	Angka	B (60,50)	B (60,76)	B (61,26)	B (61,76)	B (62,26)	B (62,76)	B (62,76)
	g	Persentase Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Yang Memiliki Kompetensi dan Tata Kelola Pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	h	Persentase Kelembagaan Desa yang ditata sesuia standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	i	Persentase Sistem Pelayanan Adaministrasi Kelembagaan Desa Yang Ditata Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	**Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN							KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	a	Indek Pembangunan Keluarga (i Bangga)	Persen	63,08	63,2	63,8	64,5	65,1	63,08	63,08
	b	Total Fertility Rate (TFR)	Permil	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	c	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	Permil	24,4	23,2	22,4	20,1	19,5	19,3	19,3
	d	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	63,3	63,4	63,5	63,6	63,7	63,8	63,8
	e	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Persen	75,4	76,8	77,7	78,6	79,2	80,2	80,2
	f	Indeks Lansia Berdaya	Persen	59,9	60,3	60,8	61,6	62,2	62,9	62,9
	g	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Persen	83,4	83,9	84,2	84,7	85,2	85,5	85,5
	h	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	16,5	17,8	18,2	19,9	21,8	24	24
8	**Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan**									
	a	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	Angka	B (61,57)	B (63,91)	B (65,23)	B (67,75)	BB (70,04)	BB (70,04)	BB (70,04)
	b	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportsi	Indeks	B (78,55) Baik	B (80,23) Baik	B (83,78) Baik	B (85,91) Baik	A (86,73) Sangat Baik	A (88,61) Sangat Baik	A (88,61) Sangat Baik
	c	Konektivitas Darat/ Kabupaten/ Kota	Rasio	0.836 (83,6%)	0,841 (84,1%)	0,848 (84,8%)	0,852 (85,2%)	0,857 (85,7%)	0,860 (86,0%)	0,860 (86,0%)
	d	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Persen	55%	62%	67%	72%	76%	82%	82%
	e	Konektivitas Laut/ Sungai	Unit	5	5	6,25	6,25	7,5	7,5	7,5
	f	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja	Persen	7,03%	6,74%	6,30%	6,11%	5,96%	5,82%	5,82%

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN							KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		dalam APBD tahun sebelumnya								
	g	Penggunanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien Secara Transparan dan Akuntabel	Persen	93,20%	93,50%	93,80%	94,00%	94,20%	94,20%	94,20%
	h	Meningkatnya Persentase PAD Retribusi Parkir	Persen	4,29%	4,62%	4,87%	5,11%	5,35%	5,60%	5,60%
	i	Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berintegritas Profesionalisme, dan Berorientasi Pelayanan	Persen	93,00%	93,20%	93,40%	93,60%	93,80%	94,00%	94,00%
	k	Persentase Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang melakukan Uji Berkala	Persen	48%	50%	53%	57%	62%	65%	65%
	l	Penurunan Angka Rasio Derajat Kejenuhan Lalu Lintas di Ruas Jalan Protokol	Persen	0,46	0,45	0,43	0,42	0,40	0,40	0,40
	m	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu keberangkatan	Rasio	0,011	0,011	0,010	0,010	0,009	0,009	0,009
	n	Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Bus Sekolah Gratis	Orang /tahun	12.000 orang/ tahun	14.000 orang/ tahun	16.000 orang/ tahun	18.000 orang/ tahun	20.000 orang/ tahun	20.000 orang/ tahun	20.000 orang/ tahun
	o	Jumlah pelabuhan/ dermaga Sungai/ Penyeberangan	Unit	0 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
9	**Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika**									
	a.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,60 (Baik)						
		Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Angka		1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5
	b.	Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	Angka	2,50	2,80	3,00	3,30	3,60	3,60	3,60
	c	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	60,98	61,00	61,25	61,50	61,75	61,99	61,99

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	d.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	60	61	62	63	64	64	64
	e	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Persen	60	61	62	63	64	64	64
	f	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem Elektronik	32	33	34	35	36	36	36
	g	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Persen	81	82	83	84	85	85	85
	h	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Persen	10	10	15	15	15	15	15
	i	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	81	82	83	84	85	85	85

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	j	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Persen	81	82	83	84	85	85	85
	k	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Persen	5	5	5	5	5	5	5
	l	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	81	82	83	84	85	85	85
	m	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persen	81	82	83	84	85	85	85
	n	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Persen	21	22	23	24	25	25	25
	o	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Persen	10	10	15	15	15	15	15
	q	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Persen	10	10	15	15	15	15	15
	t	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Peraturan	1	1	1	1	1	1	1
	u	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Persen	81	82	83	84	85	85	85

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	v	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persen	81	82	83	84	85	85	85
	w	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Persen	81	82	83	84	85	85	85
	x	Tersedianya buku profil daerah	Buku	1	1	1	1	1	1	1
10	**Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**									
	a	Persentase Pertumbuhan UMKM	Persen	11%	13%	15%	17%	20%	22%	22%
	b	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	11%	13%	15%	17%	20%	22%	22%
	c	Nilai Sakib Perangkat Daerah	Angka	66.03	66.53	67.03	67.55	68.03	68.53	68.53
	d	Persentase Koperasi yang Sehat	Persen	54%	57%	59%	61%	63%	65%	65%
11	**Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal**									
	a	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	5	5	5	5	5	5	5
	b	Nilai realisasi investasi pada sektor unggulan daerah	(Juta) Rupiah	105.000	115.500	127.050	139.755	153.730	164.230	164.230
	c	Nilai SAKIP Peerangkat Daerah	Nilai	69,64	70,02	70,15	70,25	70,45	70,98	70,98
	d	IKM pada pelayanan perizinan	Nilai	83,00	84,00	85.00	86,00	86,50	86,60	86,60

No		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUNAN							KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	**Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**									
	a	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	20	22	24	26	28	30	30
	b	Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi	Persen	10	10	10	10	10	10	10
	c	Pesentase Atlet Masuk Platnas Dari Jumlah Atlet Yang Terbina	Persen	10	10	10	15	20	20	20
	d	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	10	12	14	16	18	20	20
	e	Persentase Pertumbuhan Atlet Terbina Dalam KKO	Persen	NA	5	5	5	5	5	5
	f	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	B (60,69)	B (61,37)	B (62,79)	B (63,98)	B (65,29)	B (66,78)	B (66,78)
13	**Urusan Pemerintah Bidang Statistik**									
	a	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,20	c
	b	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Survei	3	4	4	4	4	4	4
	c	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kompilasi	20	20	21	21	22	22	22
	d	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Survei	3	4	4	4	4	4	4
	e	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kompilasi	15	15	15	15	15	15	15
	f	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik Sektoral	Persen	81	82	83	84	85	85	85
	g	Persentase kelengkapan metadata indicator sektoral	Persen	68	69	69	70	70	70	70

No		INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	**Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan**									
	a	Persentase Kelompok Seni Yang Aktif Terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun Terakhir	Persen	70	75	80	85	90	95	95
	b	Penyelenggaraan Kegiatan Seni (Kali)	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
	c	Registrasi Kelompok Seni	Tahun	21	22	23	24	25	26	26
15	**Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan**									
	a	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Persen	63,32	63,32	63,78	64	64,50	65	65
	b.	Tingkat Kegemaran Membeca	Persen	64.11	64.50	65.00	65.50	66.00	66.50	66.50
	c	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah)	Angka	CC (59,42)	B (60,82)	B (61,37)	B (62,77)	B (63,95)	B (64,17)	B (64,17)
	d	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Persen	25	30	40	50	60	65	65
16	**Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan**									
	a.	Tingkat Ketersediaan Arsip	OPD	50	51	52	53	54	55	55
17	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**									
	a	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	1,0	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,40
	b	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Persen	68	69	69	70	70	70	70

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	c	Persentase system elektronik yang Telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Persen	10	10	15	15	15	15	15
	d	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Persen	10	10	15	15	15	15	15
	e	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Persen	10	10	15	15	15	15	15
	f	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Persen	10	10	15	15	15	15	15
	g	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Persen	68	69	69	70	70	70	70
C.	**URUSAN PEMERINTAH PILIHAN**									

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Urusan Pemerintah Bidang Perikanan**									
	a	Persentase Produksi Perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	b	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4582,14	4641,71	4715,97	4805,58	4906,49	5024,25	5024,25
	C	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	632,55	637,21	644,85	655,17	688,27	684,31	684,31
	d	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn	35,07	35,29	35,60	36,03	36,57	37,23	37,23
	e	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	B (60,01)	B (60,31)	B (60,61)	B (60,91)	B (61,22)	B (61,53)	B (61,53)
	f	Kelompok Usaha Bersama Nelayan Yang Diberdayakan	Kelompok	3	5	5	3	3	5	5
	g	Kelompok Pelaku Usaha Perikanan Yang Diberdayakan	Kelompok	5	5	5	5	5	5	5
	h	Kelompok Pokmaswas Yang Dibina	Kelompok	6	6	6	6	6	6	6
	i	Poklahsar Yang Diberdayakan	Kelompok	2	2	2	2	2	2	2
	j	Sarana/Prasarana Budidaya Yang Difasilitasi	Unit	2	2	2	2	2	2	2
2	**Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata**									
	a	Persentase Kunjungan Wisatawan Domestik	Persen	3	3	3	3	3	3	3
	b	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	2	2	2	2	2	2	2
	c	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,17	1,23	1,30	1,36	1,43	1,49	1,49
3	**Urusan Pemerintah Bidang Partanian dan Peternakan**									

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan								
	a	Persentase Peningkatan Produksi Komuditas Pertanian	Persen	3	3	3	3	3	3	3
	b	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	60,95	61,93	63,69	64,23	66,79	68,97	68,97
	c	Produksi Padi	Ton	68.280	75.108	82.618	90.879	99.966	109.962	109.962
	d	Produksi Jangung	Ton	15.010	16.511	18.162	19.978	21.175	23.292	23.292
	e	Produksi Ubi Kayu	Ton	561.948	590.045	619.547	650.524	683.050	717.202	717.202
	f	Produksi Cabe	Ton	1.118	1.229	1.351	1.486	1.634	1.797	1.797
	g	Produksi Karet	Ton	21.070	21.702	22.353	23.023	23.713	24.424	24.424
	h	Produksi Kepala Sawit	Ton	3.544	3.650	3.759	3.871	3.987	4.106	4.106
	i	Produksi Tebu	Ton	17.885	18.420	18.972	19.541	20.127	20.730	20.730
	j	Luas LP2B	Hektar	8893	8893	8893	8893	8893	8893	8893
	k	Penangangan Bencana Pertanian	Persen	90	90	90	90	90	90	90
	l	Penanganan Terhadap Dampak Perubahan Iklim	Persen	90	90	90	90	90	90	90
	m	SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	Persen	10	10	10	10	10	10	10
	n	Kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	5	5	5	5	5	5	5
	Dinas Peternakan dan Kesehata Hewan								
	a	Persentase Peningkatan Produksi Ternak	Persen	1,36	1,72	2,12	2,77	3,16	3,60	3,60

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	b	Populasi Sapi	Ekor	35.451	36.515	37.610	38.362	38.745	39.520	39.520
	c	Populasi Kambing	Ekor	175.629	187.923	201.078	211.131	223.790	229.832	229.832
	d	Populasi Ayam Buras	Ekor	716.107	726.849	737.752	748.818	751.813	766.849	766.849
	e	Produksi Daging Ternak Ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba)	Ton	379,36	392,67	406,28	420,01	434,68	446,42	446,42
	f	Produksi Daging Ternak Unggas (ayam buras & ayam ras)	Ton	1.979,09	2.018,67	2.038,90	2.059,28	2.079,88	2.121,48	2.121,48
	g	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Angka	61,50	62,00	62,50	63,00	63,50	64,00	64,00
	h	Prosentase kelompok yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna	Persen	36	38	40	42	44	46	46
	i	Prosentase kelompok yang menerapkan manajemen pakan yang baik	Persen	38	40	42	44	46	48	48
	j	Prosentase kelompok yang mengalami peningkatan produksi dan produktivitas ternak	Persen	65	68	71	75	80	84	84
	k	Jumlah angka kelahiran ternak sapi	Ekor	7.000	7.413	7.636	7.865	8.022	8.134	8.134
	l	Prosentase Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang termanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	m	Prosentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Persen	84	85	86	87	88	89	89
	n	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	9	10	11	12	13	14	14
	o	Prosentase unit usaha pengolahan/ penjualan yang menghasilkan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH	Persen	85	86	87	88	89	90	90

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	p	Prosentase kelompok yang memiliki akses permodalan	Persen	30	32	34	36	38	40	40
	q	Prosentase kelompok dan unit usaha yang menerapkan teknologi pasca panen	Persen	25	26	27	28	29	30	30
	r	Prosentase kelompok yang menerapkan pola budidaya ternak yang baik	Persen	32	34	36	38	40	42	42
4	**Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan**									
	a	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	36	45	55	55	64	64	64
	b	Persentase Pertumbuhan Perdagangan terhadap PDRB	Persen	36	36	45	45	55	55	55
5	**Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**									
	a	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Persen	35%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
	b	Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	Persen	80%	82%	85%	87%	88%	100%	100%
6	**Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi**									
	a	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Mandiri	Persen	23	25	26	27	28	29	29
	b	Persentase Kawasan Transmigrasi YangBerkembang	Persen	41,3	40,2	39,1	38,0	36,9	35,8	35,8
D.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
1	**Sekretariat Daerah**									
	a	Nilai SAKIP Perangkat Derah (Sekretariat Daerah Tulang Bawang Barat)	Angka	B (61,50)	B (62,00)	B (62,50)	B (63,00)	B (63,50)	BB (70,15)	BB (70,15)

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	b	Indeks Pelayanan Publik	Skor	3,52 (B)	3,62 (B)	3,72 (B)	3,82 (B)	3,92 (B)	4,02 (A-)	4,02 (A-)
	c	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	d	Nilai LPPD	Angka	3,45	3,50	3,52	3,55	3,59	3,75	3,75
	e	Persentase Kebijakan Kesejahteran Rakyat yang terealisasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	f	Indeks Reformasi Hukum	Angka	60,24	67,68	75,12	82,56	90,00	90,10	90,10
	g	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	Angka	66,00	66,50	67,00	67,25	68,00	68,50	68,50
2	**Sekretariat DPRD**									
	a.	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	95	96	97	98	99	99	99
	b.	Persentase Perda APBD ditetapkan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	c.	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Ranperda	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d	Persetase penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Persen	98.59	98.65	98.85	98.86	98.87	98.88	98.88
	e	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah (Sekretariat DPRD	Angka	59.85	59.90	59.95	60.00	60.25	60.50	60.50
E.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
1	**PERENCANAAN**									
	a	Persentase perencanaan kinerja	Persen	21,3	21,5	21,8	22,1	22,3	22,5	
	b	Persentase perencanaan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN							KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	c	Persentase keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. (RPJMD terhadap RPJPD)	Persen	100	100	100	100	100	100	
	d	Pelaporan evaluasi pelaksanaan pembangunan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
	e	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	61,00	61,67	62,55	63,73	64,89	65,97	
	f	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	persen	100	-	-	-	-	100	
	g	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100	100	100	100	100	100	
	h	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	persen	100	100	100	100	100	100	
	i	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	persen	100	100	100	100	100	100	
2	**KEUANGAN**									
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	a	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	b	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	75,08	75,68	76,28	76,88	77,48	77,48	77,48
	c.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persen	98	98	98	98	98	98	98
	d.	Persentase Penyerapan Anggaran Sesuai Target dan Penurunan SILPA	Persen	98	98	98	98	98	98	98

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	e.	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persen	98	98	98	98	98	98	98
	e.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	98	98	98	98	98	98	98
	f	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Kepada Desa	Persen	10	10	10	10	10	10	10
	g	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BKAD)	Persen	61,97	62,25	62,89	63,39	63,97	64,59	64,59
	BADAN PENDAPATAN DAERAH									
	a	Persentase Peningkatan PAD	Persen	5	6	7	8	9	10	10
	b	Persentase PAD terhadap Pendapatam Daerah	Persen	7	7,5	8	8,5	9	10	10
	c	Persentase Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persen	80	82	84	86	88	90	90
	d	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BAPPENDA)	Angka	61,15	61,98	62,25	62,85	63,17	63,95	63,95
3	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
	a.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	50,44	53,55	55,11	56,66	58,22	59,77	59,77
	b	Persentase kajian/ inovasi yang masuk dalam kebijakan	Persen	70	75	78	80	85	90	90
	c	Persentase kajian/ inovasi yang dimanfaatkan	Persen	60	62	65	70	75	80	80

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	d	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen		85	87	90	92	95	95
	e	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen		78	80	82	85	90	90
	f	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dlan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen		100	100	100	100	100	100
4	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
	a.	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	68	70	71	73	75	77	77
	b.	Indeks Profesionalitas ASN dimensi Kompetensi	Angka	21,67	21,78	21,85	21,96	22,04	22,16	22,16
	c.	Persentase Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	21,6	22	22,4	22,9	23,4	23,9	23,9
	e.	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persentase	21,8	22,2	22,6	23,1	23,6	24	24
	f.	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Persentase	83	85	87	89	91	93	93
	g.	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional	Persentase	21,6	22	22,4	22,9	23,4	23,9	23,9

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	h.	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	21,6	22	22,4	22,9	23,4	23,9	23,9
F.	**UNSUR PENGAWSAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
1	**INSPEKTORAT DAERAH**									
	a.	Maturitas SPIP	Nilai	3,25	3,32	3,35	3,37	3,40	3,45	3,45
	b.	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,37	3,40	3,45	3,50	3,57	3,70	3,70
	c.	Tindak Lanjut BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	98	100	100	100	100	100	100
	d.	Nilai MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	3,10	3,30	3,38	3,40	3,50	3,70	3,70
	e.	Nilai IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	3,10	3,30	3,38	3,40	3,50	3,70	3,70
	f.	Persentase Nilai Evaluasi Internal SAKIP OPD Dengan Nilai 61	Persen	52	55	60	62	64	65	65
	g.	Persentase Nilai Evaluasi Internal PMPRB OPD Dengan Nilai 61	Persen	45	48	50	55	60	62	62
	h.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	65	67	69	72	73	75	75
	i.	Persentase Tingkat Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalain Intern Pemerintah)	Persen	63	64	66	68	70	71	71
	j.	Persentase Peningkatan Kapabilitas APIP	Persen	62	63	65	68	69	71	71
	K-	Persentase Tingkat Pelaksanaan Manajemen Risiko	Persen	60	62	64	65	67	70	70
	L	Persentase Penurunan Temuan BPK	Persen	50	55	60	65	70	75	75

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	m	Persentase Peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Persen	65	67	69	72	73	75	75
G.	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	1.	**Kecamatan Tulang Bawang Tengah**								
	a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan	Angka	B (77,32)	B (77,47)	B (77,54)	B (77,57)	B (77,59)	B (77,60)	B (77,60)
	b.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	CC (50,47)	CC (56,75)	CC (59,89)	B (61,46)	B (62,25)	B (62,64)	B (62,64)
	c.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh 2 Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2.	**Kecamatan Tulang Bawang Udik**								
	a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan	Angka	B (83,92)	B (84,12)	B (84,22)	B (84,27)	B (84,30)	B (84,31)	B (84,31)
	b.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	CC (55,50)	CC (56,85)	CC (57,53)	CC (57,86)	CC (58,03)	CC (58,12)	CC (58,12)
	c.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3.	**Kecamatan Gunung Terang**								
	a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan	Angka	B (78,82)	B (79,12)	B (79,27)	B (79,35)	B (79,38)	B (79,40)	B (79,40)
	b.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	CC (57,76)	CC (55,81)	CC (56,84)	CC (57,35)	CC (57,60)	CC (57,73)	CC (57,73)

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	c.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	4.	**Kecamatan Gunung Agung**								
	a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan	Angka	C (71,60)	C (72,00)	C (72,19)	C (72,29)	C (72,34)	C (72,37)	C (72,37)
	b.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	CC (57,88)	CC (59,25)	CC (59,94)	B (60,24)	B (60,45)	B (60,53)	B (60,53)
	c.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 13 Tiyuh	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	5.	**Kecamatan Lambu Kibang**								
	a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan	Angka	B (77,18)	B (78,54)	B (79,72)	B (80,31)	B (80,61)	B (80,75)	B (80,75)
	b.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	CC (58,80)	CC (59,75)	B (60,23)	B (60,46)	B (60,58)	B (60,64)	B (60,64)
	c.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6.	**Kecamatan Way Kenanga**								
	a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan	Angka	B (78,82)	B (79,06)	B (79,18)	B (79,24)	B (79,27)	B (79,29)	B (79,29)
	b.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	CC (56,90)	CC (58,35)	CC (59,08)	CC (59,44)	CC (59,62)	CC (59,71)	CC (59,71)

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	c.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 10 Tiyuh	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7. Kecamatan Tumijajar									
	a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan	Angka	B (80,05)	B (80,75)	B (81,10)	B (81,28)	B (81,36)	B (81,41)	B (81,41)
	b.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	CC (56,58)	CC (58,89)	B (60,05)	B (60,62)	B (60,91)	B (61,06)	B (61,06)
	c.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh 1 Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	8. Kecamatan Pagar Dewa									
	a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan	Angka	C (71,66)	C (72,50)	C (72,91)	C (73,12)	C (73,23)	C (73,28)	C (73,28)
	b.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	CC (54,50)	CC (56,50)	CC (57,55)	CC (58,08)	CC (58,34)	CC (58,47)	CC (58,47)
	c.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh 2 Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	9. Kecamatan Batu Putih									
	a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Kecamatan	Angka	C (74,80)	C (75,05)	C (75,17)	C (75,23)	C (75,26)	C (75,27)	C (75,27)

No	INDIKATOR		TARGET KINERJA TAHUNAN						KONDISI AKHIR 2030
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	b.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	CC (56,65)	CC (58,25)	CC (59,05)	CC (59,45)	CC (59,65)	CC (59,75)	CC (59,75)
	c.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	d.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap 21 Tiyuh 2 Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
H.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**									
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
	a.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	CC (58,99)	CC (59,35)	B (60,11)	B (61,05)	B (61,95)	B (61,95)	B (61,95)
	b	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Persen	80	78	75	71	67	60	60
	c	Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih	Persen	0	0	0	0	78	0	0
	d	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	55	60	65	70	75	75	75
	e	Presentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	f	Presentase Organisasi Kemasnyarakatan Yang Aktif	Persen	65	75	80	85	95	95	95

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mencakup kondisi geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis untuk lima tahun ke depan guna mencapai visi "Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan."

Penyusunan Dokumen RPJMD ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan terintegrasi untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif, memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengimplementasikan program pembangunan yang efektif dan efisien dan menyusun kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada data dan analisis yang objektif, sehingga dapat menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat.

RPJMD ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan panduan strategis bagi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun ke depan, dengan memperhatikan Visi bupati dan wakil bupati yaitu " **Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju**" sehingga diharapkan dapat **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,** melalui program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, **Mendorong Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan,** mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan berbasis kearifan lokal, **Meningkatkan Daya Saing Daerah, m**elalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan iklim investasi yang kondusif dan **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan,** meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Keberhasilan implementasi Dokumen RPJMD ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, swasta, akademisi, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dokumen ini juga akan menjadi bahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan bagi perangkat daerah dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD).

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan ini menjadi landasan bagi implementasi RPJMD Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029. Komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi daerah. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang transparan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau progres, mengidentifikasi kendala, dan memastikan akuntabilitas kinerja.

- ***Pengendalian Dan Evaluasi***

  Keberhasilan pencapaian visi RPJMD ini sangat bergantung pada sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara periodik untuk mengukur tingkat pencapaian

indikator, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Hasil evaluasi ini akan menjadi instrumen penting untuk pengambilan keputusan strategis dan peningkatan berkelanjutan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, meliputi:

1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;

yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- ***Pendanaan Pembangunan Yang Sejalan Dengan Rencana Pembangunan***

Pendanaan pembangunan daerah akan diselaraskan sepenuhnya dengan prioritas dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, memastikan alokasi sumber daya yang efektif untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ketersediaan dan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan akan diupayakan secara efisien dan akuntabel, berpedoman pada rencana strategis RPJMD. Hal ini mencakup optimalisasi APBD, sinergi dengan APBN, serta mendorong partisipasi investasi swasta dan kerja sama yang sah lainnya, demi mendukung percepatan capaian pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang inovatif, hingga optimalisasi peran sektor keuangan pemerintah maupun non pemerintah.

- ***Mekanisme Perubahan RPJMD***

Perubahan atas dokumen RPJMD ini dapat dilakukan jika terjadi perubahan kebijakan mendasar di tingkat nasional/provinsi, bencana alam, krisis ekonomi, atau hasil evaluasi yang signifikan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata cara perubahan RPJMD.

Mengacu Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mekanisme Perubahan RPJMD dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan; dan terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

5.2. Tata Kelola Data Pembangunan

Dalam era pembangunan berbasis digital, Tata kelola data pembangunan dilakukan agar menjadi dasar dan tolak ukur kinerja pembangunan, sehingga dapat difungsikan oleh pemerintah untuk merespon setiap dampak dari kebijakan yang telah dilakukan sekaligus merancang strategi yang lebih kuat dampaknya. Arah kebijakan kunci dari tata kelola data pembangunan adalah perkuatan kebijakan dan ekosistem satu data dengan melalui strategi antara lain; harmonisasi kebijakan yang konsisten, penetapan dan penerapan pedoman proses bisnis Satu Data Indonesia diseluruh level kebijakan, serta pembangunan ekosistem kolaborasi melalui infrastruktur interoperabilitas dan sumber daya manusia.

Untuk memastikan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan perluasan kolaborasi, dibutuhkan tindakan terarah sebagai upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang Barat baik dengan dukungan dan pendampingan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan kolaborasi di tingkat Daerah, intervensi kebijakan maupun komitmen dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah penyelenggara Satu Data Indonesia itu sendiri. Selain itu, guna memastikan keselarasan dan kesesuaian antara regulasi dan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia, dirumuskan bahwa penyelenggaraan SDI sesuai kaidah kebijakan tata kelola data melalui koordinasi yang komprehensif di dalam Forum SDI secara konkrit dan berkesinambungan.

Sumber Daya Manusia atau talenta di Instansi Pemerintah menjadi unsur operasional yang sangat krusial dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data sebagai kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik juga akan sangat membutuhkan pemahaman dan partisipasi dari berbagai pihak. Penguatan sumber daya manusia dilaksanakan mulai dari tataran kebijakan sampai dengan pembinaan kapasitas dengan tujuan memperkokoh operasional penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Untuk itu Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu meningkatkan pendampingan, pembinaan, dan penyajian pedoman pengelolaan, serta pemberian insentif terhadap produksi data yang sesuai standar dan metadata kepada seluruh produsen data di Provinsi Lampung terkait agenda strategis dan prioritas dalam pembangunan daerah

5.3. Manajemen Resiko Perencanaan

Perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak luput dari berbagai potensi ketidakpastian dan tantangan. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi instrumen krusial dalam seluruh tahapan penyusunan dan pelaksanaan RPJMD.

Secara proaktif, proses perencanaan RPJMD harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko yang mungkin menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Risiko-risiko ini bisa berasal dari berbagai aspek, mulai dari perubahan kondisi ekonomi makro, fluktuasi kebijakan nasional, bencana alam, dinamika sosial dan politik, hingga tantangan kapasitas internal pemerintah daerah dalam implementasi program.

Terkait resiko perkembangan ekonomi yang tidak pasti yang akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah, sehingga memungkinkan akan mempengaruhi kapisitas fiskal dalam pembiayaan program – program yang

telah di tetapkan maka ***Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah sebagai mana yang telah termasuk dalam proyeksi anggaran RPJMD 2025 – 2029 dalam pembiayaan daerah dan akan dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) ditahun berkenaan dengan pengajuan hutang daerah.*** untuk memenuhi kapasitas fiskal yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program – program yang telah ditetapkan.

Identifikasi risiko bukanlah sekadar daftar ancaman, melainkan juga kesempatan untuk merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Misalnya, jika ada risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global, RPJMD harus memiliki skema kebijakan untuk memperkuat ekonomi lokal atau mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Demikian pula, risiko bencana alam harus diimbangi dengan perencanaan infrastruktur yang tangguh dan sistem peringatan dini yang efektif.

Lebih jauh, manajemen risiko dalam RPJMD juga mencakup penetapan indikator risiko (risk indicators) yang dapat dipantau secara berkala. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif sebelum risiko tersebut berdampak luas. Kapasitas adaptasi dan responsivitas pemerintah daerah terhadap perubahan kondisi akan sangat ditentukan oleh seberapa baik sistem manajemen risiko ini terinternalisasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Merujuk pada Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang dimaksud Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Entitas MRPN (Kementrian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan lainnya) sehubungan adanya
Risiko Pembangunan Nasional. Risiko Pembangunan Nasional adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional yang juga dikontribusikan oleh daerah, sekaligus menjamin terkendalinya Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional.

Sebagaimana MRPN, perencanaan atas pelaksanaan Pembangunan di daerah juga harus didukung penerapan Manajemen Risiko Pembangunan guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Daerah dalam setiap periode Perencanaan Pembangunan, yang dilaksanakan secara kolaboratif konstruktif, lintas sektoral dan berkesinambungan oleh Entitas MRPN yang berada di daerah. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan tujuan :

- Meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah;
- Mengurangi deviasi terhadap perwujudan Visi, serta pencapaian Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di daerah;
- Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Sebagai upaya memperkuat substansi dan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan di Daerah maka RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029 perlu juga diperkuat dengan kerangka regulasi dan kebijakan daerah yang mengacu pada MRPN. Hal ini dilakukan guna menjamin perwujudan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah ditetapkan untuk periode 5 tahun mendatang, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian RPJMN 2025-2029.

Berkenaan hal tersebut, Manajemen Risiko untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 akan ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko pada setiap tahapan perencanaan pembangunan secara tahunan; yang tentunya akan menjadi instrumen pendukung dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan yang juga dilaksanakan secara berkala.

Pada akhirnya, integrasi manajemen risiko dalam perencanaan RPJMD adalah bentuk komitmen terhadap pembangunan yang lebih resilien, adaptif, dan berkelanjutan. Ini memastikan bahwa RPJMD tidak hanya menjadi dokumen statis, melainkan sebuah peta jalan yang hidup dan mampu menghadapi berbagai ketidakpastian, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat secara optimal.

Bupati Tulang Bawang Barat,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009